BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2024

Balai Besar POM di Palembang







DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
HIGHLIGHT LAPKIN TAHUN 2024	vii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang	4
1.4 Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	19
2.5 Metode Pengukuran	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	196
1) Analisis Tren	196
2) Analisis Gap	208
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis	215
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	227
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja	258
3.6 Realisasi Anggaran	270
BAB IV. PENUTUP	292

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 REVIU RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020 S/D 2024

LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Palembang disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan penuh kebanggan dan antusiasme, kami mempersembahkan Laporan kinerja BBPOM di Palembang untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai perwujudan tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran pada DIPA tahun 2024. Misi kami adalah untuk mendukung Visi Badan POM RI mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan merampungkan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik yang terhimpun dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran kegiatan.

BBPOM di Palembang telah merealisasikan 99,84% anggaran DIPA untuk mengelola 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan dan telah berhasil mencapai Sasaran Kegiatan dengan predikat Istimewa dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2024 sebesar **103,09%**.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Utama Badan POM yang telah melakukan bimbingan dan asesmen secara berkelanjutan dengan rekomendasi yang semuanya telah ditindaklanjuti oleh BBPOM di Palembang. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Palembang dan semua pihak yang telah berkontribusi mengelola 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang dicapai dengan predikat Istimewa. Informasi Pencapaian Kinerja telah disajikan dengan lengkap dalam laporan ini dan dapat diandalkan untuk evaluasi bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Anggaran di tahun 2024 tidak menyisakan ketidaksesuaian yang perlu dilaporkan. Kami berharap untuk dapat terus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah lingkup kerja BBPOM di Palembang dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai Sasaran Kegiatan organisasi yang memenuhi ekspektasi Rencana Strategis Badan POM.

Saya, selaku Kepala BBPOM di Palembang, dengan bangga mempersembahkan pencapaian kinerja di tahun 2024 dalam laporan ini dan berkomitmen untuk selalu memastikan bahwa BBPOM di Palembang memiliki dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi misinya di tahun 2025 dan selanjutnya.

Palembang, 25 Februari 2025
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Palembang,

Yani Ardiyanti, SF, Apt., M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dalam mencapai visi, misi sebagaimana dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Palembang memuat informasi tentang pengukuran kinerja dan pengukuran efektivitas kegiatan selama Tahun 2024. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Selama Tahun 2024, Balai Besar POM di Palembang telah melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan untuk mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan yang diukur dengan 34 indikator kinerja sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2024 sebesar **103,09%** dengan predikat **Istimewa.** Dari 11 sasaran kegiatan tersebut, 6 sasaran kegiatan telah **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik,** sebanyak 4 sasaran kegiatan dengan kategori **cukup.** Sedangkan 1 sasaran kegiatan tidak diukur dalam nilai pencapaian organisasi yaitu terwujudnya SDM Balai Besar POM yang berkinerja optimal, yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. **Pernyataan keberhasilan** pencapaian atas 10 sasaran kegiatan :

1. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 99,08% yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.
2. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 97,90% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

3. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS yang disesuaikan sebesar 100,51% yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
4. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 105,07% yang diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja.
5. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 100.02% yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
6. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 120% yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
7. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 91,64% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.
8. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal dengan NPS sebesar 99,02% yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
9. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 110,69% yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
10. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam pengelolaan keuangan Balai Besar POM di Palembang secara akuntabel dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 108,09% yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Pencapaian 11 (sebelas) sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 34 (tiga puluh empat) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian antara 91,64% sampai dengan 132,17%. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri dan capaian indikator kinerja terendah pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mendukung Pencapaian 11 (sebelas) sasaran kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Palembang memperoleh alokasi anggaran hingga akhir TA 2024 sebesar Rp34.049.827.000. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp33.654.512.017 atau 99,84% dari alokasi anggaran TA 2024. Balai Besar POM di Palembang melaksanakan 20 kegiatan utama dengan hasil efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0 hingga 0.30 dengan Tingkat Efisiensi total sebesar 0.05 (efisien). Meskipun demikian, dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan perbaikan yaitu kualitas perencanaan yang detail dan *applicable* dalam penyusunan PoA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran secara berkala, perkuatan *supporting* data dari tim pengelola keuangan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk usaha peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik internal maupun eksternal, Balai Besar POM di Palembang mendorong adanya terobosan dan inovasi. Inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya AmPEra (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) sebagai wadah untuk menyediakan layanan pusat informasi di lingkungan pasar, PEMPPEK (Pendampingan dana Pemenuhan Persyaratan Perizinan Produk sebagau program agar pelaku usaha UMKM Pangan mendapatkan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan perizinan produk .

Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Palembang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja tahun 2024 sekaligus tahun akhir periode renstra 2020-2024 terhadap organisasi yang merupakan upaya terbaik seluruh pegawai namun masih banyak hal-hal yang perlu penyempurnaan dalam menghadapi tantangan yang akan datang, perlu adanya perbaikan secara terus menerus sehingga diharapkan peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh pegawai Balai Besar POM di Palembang semakin optimal dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Selama pelaksanaan kegiatan Balai Besar POM di Palembang masih menghadapi berbagai kendala, meliputi masih ditemukannya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat di pasar, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang keamanan produk yang beredar di pasar masih menjadi salah satu kendala sekaligus tantangan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan dapat meningkatkan risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar dan berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Palembang perlu meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi guna menjangkau masyarakat secara lebih luas serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan produk yang dikonsumsi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat, lintas sektor, serta pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan. Kami akan selalu mendorong untuk bersama-sama mengupayakan perbaikan bagi Balai Besar POM di Palembang dan bagi masyarakat. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang. Hal ini akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Besar POM di Palembang.

Kami mengapresiasi seluruh lintas sektor terkait yang telah bekerja sama dengan Balai Besar POM di Palembang dan seluruh masyarakat yang sering berinteraksi melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami berharap kerjasama akan semakin erat dan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan semakin merasakan kehadiran Balai Besar POM di Palembang. Semoga Laporan Kinerja ini mendapatkan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja dan bermanfaat baik internal maupun eksternal.

HIGHLIGHT TAHUN 2024







Sharing Session Kesuksesan Meraih WBK oleh Kepala BBPOM di Banda Aceh dan Kepala BBPOM di Medan

Bertempat di Aula Balai Besar POM di Palembang dilaksanakan Pertemuan Sharing Session Kesuksesan Meraih WBK oleh Kepala BBPOM di Banda Aceh dan Kepala BBPOM di Medan.

Pertemuan ini adalah wadah diskusi dan pemberian motivasi antara BBPOM di Palembang dengan Narasumber. Narasumber pada pertemuan tersebut adalah seorang Pemimpin yang telah berhasil membawa UPT yang dipimpinnya untuk melakukan reformasi birokrasi dan mendapat predikat WBK. Bapak Yudi sukses membawa BBPOM di Banda Aceh meraih WBK pada tahun 2023 sedangkan Bapak Martin sukses membawa BBPOM di Padang dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik meraih predikat WBK.

Diharapkan dari Kegiatan Sharing Session ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat seluruh pegawai di Balai Besar POM di Palembang agar kompak dan kerjasama melakukan reformasi birokrasi yang konsisten dan terus menerus untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan: Komitmen Balai Besar POM di Palembang Menjaga Integritas

Balai Besar POM di Palembang telah menyelesaikan pelaksanaan Audit Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga integritas dan akuntabilitas. Audit yang dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 09 hingga 10 Desember 2024, merupakan wujud nyata upaya dalam memastikan bebasnya proses kerja dari praktik penyuapan.



Audit ini dilakukan oleh tim auditor profesional dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia. Pelaksanaan audit ini bukan hanya untuk memenuhi standar sertifikasi, tetapi juga untuk menunjukkan kapabilitas Balai Besar POM di Palembang dalam menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Ke depan, Balai Besar POM di Palembang akan terus melakukan pembenahan dan penguatan sistem untuk meningkatkan capaian yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.



Inovasi Portal Aplikasi Kito

Terlalu banyaknya link dan aplikasi yang akan diakses serta tidak terkumpulnya data dalam satu wadah membuat BBPOM di Palembang memunculkan Portal Aplikasi Kito. Portal ini memuat semua aplikasi internal, eksternal Badan POM, dan layanan internal BBPOM di Palembang.

Inovasi MAKSUBA (Mari Kita Kelola ASN Untuk Sukses Bersama) Melalui Portal Aplikasi Kito

Perkuatan SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal ini memunculkan Inovasi MAKSUBA yang dibangun dalam Portal Aplikasi Kito. MAKSUBA menampilkan rekap disiplin berupa keterlambatan jam kerja pegawai dan capaian pengembangan kompetensi serta capaian kinerja pegawai. Dengan ditampilkan secara dini rekap tersebut maka dapat dijadikan *reminder* bagi masing-masing pegawai agar tidak mendapat hukuman disiplin. Terkait capaian pengembangan kompetensi dapat dijadikan sarana oleh pegawai untuk menyusun strategi untuk peningkatan pencapaiannya.







No	Unit Kerja	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	33,51%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	30,65%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	30,26%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	29,76%
5	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	29,00%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	28,43%

Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar / Balai POM

Terbaik 6 Realisasi Anggaran Balai Besar / Balai POM

BBPOM di Palembang berada dalam 10 teratas realisasi anggaran Balai Besar / Balai POM Triwulan 1 Tahun 2024 yaitu dengan menduduki peringkat ke-6 dengan presentase realisasi sebesar 28,43%.

Balai Besar POM di Palembang Raih Peringkat Ketiga Kategori UP KKP Besar

Dalam kegiatan Internalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, *Cash Management System* (CMS) dan *Digipay One* yang dilaksanakan oleh KPPN Kota Palembang, Balai Besar POM di Palembang mendapatkan piagam penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Kategori UP KKP Besar.





Penghargaan Pelayanan Prima

BBPOM di Palembang mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan POM sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima".

Penghargaan Inovasi AMPERA

Kompetisi KOIN BPOM merupakan ajang untuk mengembangkan budaya inovasi di lingkungan BPOM dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Inovasi AMPERA hadir sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi pencapaian, tetapi juga motivasi untuk terus konsisten mengembangkan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.





TOP 10 UPT BPOM Terbaik Pada Lomba Penerapan Sistem Mutu GLP

Lomba Penerapan Sistem Mutu Good Laboratory Practice (GLP) Badan POM merupakan perlombaan untuk meningkatkan standar laboratorium di lingkungan Badan POM. Dalam kegiatan tersebut, BBPOM di Palembang berhasil masuk dalam 10 peringkat teratas.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

BBPOM di Palembang kembali terima predikat badan publik informatif dari kepala Badan POM dalam kategori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM sebagai Badan Publik "INFORMATIF".



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing- masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM Palembang dengan wilayah kerja yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Di Lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator

Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

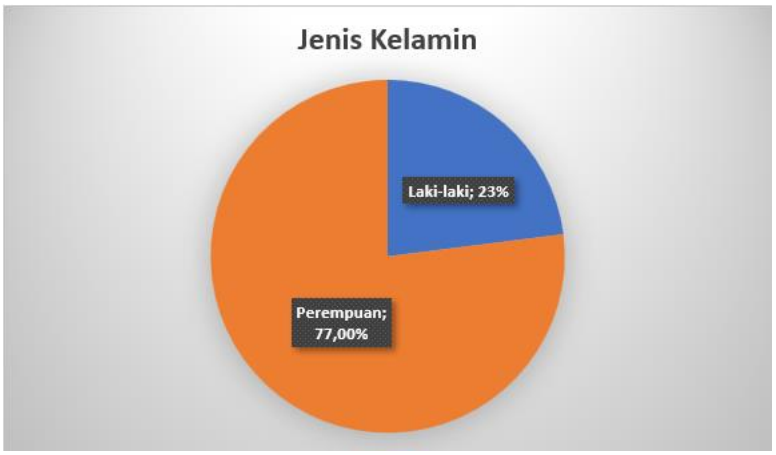
Wilayah kerja BBPOM di Palembang adalah sebanyak 11 Kabupaten/ Kota terdiri dari 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 173 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

(sumber data: Katalog/*catalog*: 1102001.16 BPS Provinsi Sumatera Selatan)

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	18
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
II. KABUPATEN		**Ibukota**	**Jumlah Kecamatan**
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	13
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	22
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	15
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	21
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

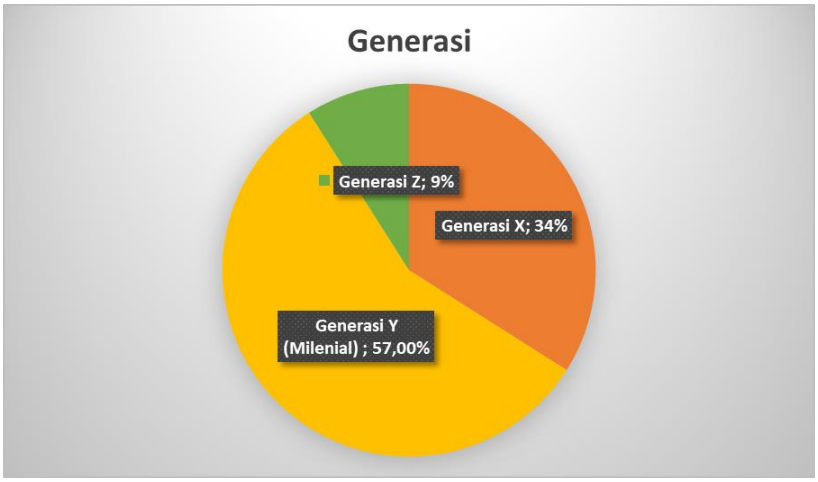
Tabel 1.1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, jumlah PNS di BBPOM di Palembang berjumlah 75 orang dan PPPK 8 orang. Berdasarkan gender terbagi atas 64 orang Perempuan, dan 19 orang laki-laki.



Gambar 1.2. Proporsi SDM Berdasarkan Gender

Sedangkan jika dipetakan melalui generasinya, maka terdapat 3 generasi yaitu 30 orang generasi X, 49 orang generasi milenial dan 4 orang generasi Z.



Gambar 1.3. Proporsi SDM Berdasarkan Generasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM RI, SDM yang dimiliki ini telah ditempatkan sesuai dengan keahlian dan potensi yang dimiliki.

1.4 Isu Strategis : Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan

dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional merupakan perubahan fundamental sistem Kesehatan dalam aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Tiga tujuan utama disusunnya Reformasi SKN yaitu (1) Meningkatnya kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security and resilience*), (2) Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses *supply side* pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotive dan preventif. Reformasi SKN terbagi atas 8 area strategis yang memberikan daya ungkit pembangunan Kesehatan ke depan dengan Pelayanan Kesehatan Dasar menjadi arus utama dalam kedelapan area tersebut.

Balai Besar POM di Palembang dalam Reformasi Sistem Kesehatan Nasional mendukung 4 (empat) area reformasi, yaitu (1) Pengendalian Penyakit dan Imunisasi, antara laindengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT). (2) Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan, Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (Post Authorization Safety Study/PASS). (3) Ketahanan Kesehatan (*Health Security),* khususnya dalam hal penguatan jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan. (4) Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat, ” melalui digitalisasi pelayanan kesehatan dan pengaktifan kader kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

2. Stunting yang mengancam kecerdasan bangsa

Stunting atau kekerdilan adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak, sehingga anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan

dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

BPOM memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, Intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Palembang dalam strategi percepatan penurunan stunting di wilayah Sumatera Selatan melakukan pengawasan *post-market* dengan cara cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta operasi inteliijen dalam dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

3. Jejaring Kerja Belum Optimal

BPOM memiliki jejaring kerja antara lain Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini di antaranya (i) Kerjasama yang terjalin dengan *stakeholder* dan pemangku kepentingan masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

4. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Laboratorium mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, hasil pengujian produk obat dan makanan dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau

tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal). Untuk itu Balai Besar POM di Palembang terus melakukan peningkatan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini Balai Besar POM di Palembang telah didukung dengan *instrument* laboratorium teknologi kompleks seperti GCMS dan *real time* PCR.

5. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Hal ini keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan, dan kosmetik semakin beragam. Selain itu, semakin banyak *e-commerce* menawarkan beragam pilihan kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan Makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena masyarakat berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman masih rendah serta pengaruh gencarnya promosi iklan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada situs daring dan tawaran-tawaran menarik dari penjual menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Balai Besar POM di Palembang secara aktif melakukan kegiatan intelijen dan operasi intelijen pengawasan Obat dan Makanan baik secara *offline*

maupun *online* dengan mekanisme patroli siber serta upaya tindak lanjut dari temuan terkait peredaran obat dan makanan secara daring.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian Balai Besar POM di Palembang terus beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dan distribusi dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan serta intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen pendukung mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

6. **Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM**

Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja BPOM. Sektor ini terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk kesehatan dan pangan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai respons terhadap tren kesehatan yang semakin populer. Namun, di sisi lain, ada tantangan yang muncul bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan dan regulasi yang efektif. Pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, terutama di kalangan UMKM, menghasilkan peningkatan jumlah produk yang harus diawasi dan diuji kelayakannya oleh BPOM. Dalam hal ini, BPOM harus lebih bekerja keras untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Khususnya untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dari tahun 2020 Sarana produksi pangan yang diawasi di wilayah Sumatera Selatan sejumlah 56 sarana, dan 1.582 PIRT. Hingga 2024 ini tercatat sarana yang berada di wilayah Sumatera Selatan sejulah 126 sarana produksi pangan dan 4.120 sarana PIRT. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM, memberikan tantangan besar bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas

pengawasan, dan inovasi dalam sistem pengawasan untuk menjaga agar produk yang beredar tetap aman dan berkualitas. Di sisi lain, BPOM juga harus mengatasi masalah ketidakpatuhan, pemalsuan produk, dan meningkatkan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan begitu, sektor industri ini dapat terus berkembang dengan menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta Masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan terhadap UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima. Secara lengkap dokumen Reviu Renstra 2020-2024 disajikan pada Lampiran 1 pada laporan kinerja ini.

SASARAN KEGIATAN:

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dalam mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, BPOM menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, internal process perspective* dan *learning and growth perspective.* Tahun 2024 terdapat 11 sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja. Sandingan antara sasaran kegiatan dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA
	Stakeholders Perspective		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	**1**	Persentase obat yang memenuhi syarat
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	**6**	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	**7**	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang
	Internal Process Perspective		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	**10**	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	**18**	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		20	Jumlah desa pangan aman
		21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	**22**	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	**24**	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
	Learning and Growth Perspective		
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	**25**	Indeks RB BBPOM di Palembang
		26	Nilai AKIP BBPOM di Palembang
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan

9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	28	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang
10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024

Sesuai data pada tabel di atas terdapat 34 IK yang ditetapkan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) IK tambahan. Indikator Kinerja tersebut merupakan direktif penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja yang sebelumnya telah dinilai di tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 Tanggal 22 Januari 2024. Indikator tersebut, antara lain :

1. Nilai Pengelolaan Kearsipan
2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Satu indikator lainnya yaitu Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator ini disampaikan oleh unit kerja pengampu melalui nota dinas dari Koordinator Tim Kerja Urusan Daerah dan Hibah Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : PR.04.02.21.213.10.23.386 Tanggal 23 Oktober 2023.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2024 mengacu pada Reviu Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 disahkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.6A.6A5.12.23.262 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2023. Dokumen tersebut memuat 11 sasaran kegiatan dengan 34 indikator kinerja kegiatan. Dokumen tersebut dilengkapi dengan matriks reviu target indikator serta kertas kerja target indikator sebagai justifikasi perubahan target juga yang akan ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Tanggal 22 Desember 2023 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 34 indikator kinerja kegiatan beserta anggaran. Namun pada 12 September 2024 dilakukan revisi perjanjian kinerja karena terjadi pergantian Kepala Badan POM dan Kepala Balai Besar POM di Palembang disertai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan pada revisi DIPA. Pada dokumen perubahan perjanjian kinerja tersebut tidak

terdapat perubahan terkait target maupun strategi yang ditetapkan. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp33.322.757.000 yang ditetapkan dalam DIPA Balai Besar POM di Palembang No.SP.DIPA-063.01.2.432841/2024 Tanggal 24 November 2023. Akhir tahun 2024 pada revisi DIPA ke-10 (sepuluh) terdapat perubahan anggaran menjadi Rp34.049.827.000 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2024.

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel dengan target per bulan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024 mengalami dua kali perubahan. RAPK 2024 pertama disahkan pada tanggal 22 Desember 2023 yang telah disusun sesuai dengan dokumen RKT dan matriks reviu serta kertas kerja RKT. Lalu pada 28 Juni 2024 dilakukan perubahan pertama. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil monev capaian kinerja selama triwulan pertama, sehingga pada Mei 2024 BBPOM di Palembang mengusulkan perubahan target pada 6 (enam) Indikator Kinerja yang telah disampaikan surat No : B-PR.07.01.5A.05.24.736 perihal revisi RAPK Tahun 2024 yang juga telah dilengkapi dengan matriks perubahan target yang dibutuhkan. Usulan tersebut disetujui oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan disampaikan melalui surat No. B-PR.07.21.05.24.127 pada tanggal 27 Juni 2024. Perubahan kedua ditetapkan pada 12 September 2024, perubahan ini diperlukan karena adanya perubahan Kepala Balai Besar POM di Palembang. RAPK perubahan kedua yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Laporan Kinerja ini.

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang yang dikumpulkan oleh Ketua Tim Evaluasi Internal dengan berkoordinasi dengan ketua tim yang telah ditugaskan di fungsi masing-masing.

2.5.a. Capaian Indikator Kinerja

Kategori pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

2.5.b. Capaian Nilai Sasaran Strategis

Nilai SS merupakan nilai rata-rata seluruh capaian Indikator Kinerja dalam suatu Sasaran Strategis.

Contoh:

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
SS 1			
IKU A	90	90	100
IKU B	100	80	80
IKU C	85	70	82,35
		NSS	87,45

2.5.c. Capaian Nilai Perspektif

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \Sigma NSS / \Sigma SS$$

Contoh:

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
Stakeholder	**90**
SS1	90
Internal Process	**(100+90+85+90)/4 = 91,25**
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
Learning and Growth	**(75+80+60)/3 = 71,67**
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Contoh:

Stakeholder	**(80+60)/2 = 70**
SS 1	n/a
SS 2	80
SS 3	60

2.5.d. Capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

2.5.e. Predikat Kinerja Organisasi

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada masing-masing perspektif, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yang terdapat pada dokumen Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis dan target nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan rekomendasi perbaikan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataaan kinerja, analisis perkembangan kinerja indikator kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2024, analisis gap dangan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024 (tahun akhir periode Renstra), penilaian ketercapaian tujuan Renstra, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja dan evaluasi dan analisis anggaran.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 sebesar **103,09%** dengan predikat **Istimewa**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :



Gambar 3.1.1 Perhitungan Capaian Kinerja Organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

(Sumber : aplikasi Simetris e-performance)

Pada Tahun 2024 ini terdapat 6 (enam) sasaran kegiatan telah melampaui dengan kategori sangat baik. Namun, 4 (empat) sasaran kegiatan lainnya tidak melampaui target sehingga masuk dalam kategori cukup. Sedangkan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal tidak

termasuk dalam perhitungan capaian kinerja organisasi. Hal ini ditetapkan sesuai dengan Nota Dinas No : KP.17.21.11.24.349 pada tanggal 26 November 2024 dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, mempertimbangkan terkait perubahan intrumen pengukuran IP ASN tahun 2024.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjikan 11 sasaran kegiatan dengan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara singkat perbandingan target, realisasi dan capaian setiap IKU pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	95,44	102,62	Sangat Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	90,58	99,54	Cukup
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	96,04	99,01	Cukup
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,9	82,74	94,13	Cukup
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93	93,07	100,08	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89	87,13	97,90	Cukup
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99	98,85	99,85	Cukup
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,01	80,6	100,74	Sangat Baik

	Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	95	95,9	100,95	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	Baik
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	78,16	104,21	Sangat Baik
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	Baik
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65,79	101,22	Sangat Baik
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,1	85,33	109,26	Sangat Baik
		15	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,75	4,78	100,63	Sangat Baik
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00	Baik
		17	Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	100	105,26	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,9	98,99	100,09	Sangat Baik
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97	97	100,00	Baik
		20	Jumlah desa pangan aman	32	32	100,00	Baik
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17	17	100,00	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik

	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	68,73	91,64	Cukup
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal	25	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	85,9	84,85	98,78	Cukup
		26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	82,81	80,55	97,27	Cukup
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,71	95,66	101,00	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	90,77	87,75	96,67	Cukup
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,3	87,49	101,38	Sangat Baik
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal	3	3	100,00	Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	90,21	91,3	101,21	Sangat Baik
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	94,35	100	105,99	Sangat Baik
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93	97,82	105,18	Sangat Baik
		34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	79,3	132,17	Sangat Baik

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Dari 34 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 16 indikator yang telah melampau target kinerja sehingga mendapatkan kategori capaian **sangat baik,** 9 indikator merealisasikan indikator kinerja sesuai dengan target yang

ditetapkan sehingga masuk dalam kategori capaian **baik,** sedangkan 9 indikator lainnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga masuk dalam kategori capaian **cukup.** Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Palembang akan dijelaskan pada Subbab 3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan, sebagai berikut :

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (lima) indikator. Dari perhitungan 5 indikator tersebut diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 99,16%. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	95,44	102,62	

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1.

Sampel obat terdiri dari komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika (Perpres No. 70 Tahun 2017) dan obat kuasi (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020). Sampel obat acak adalah sampel obat yang di sampling berdasarkan kategori sampel acak dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2024 (SK Kepala BPOM RI No. 35 Tahun 2024). Sampel obat acak adalah sampel yang di sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria sampel yang Tidak Memenuhi Syarat adalah sampel yang tidak memiliki NIE/ produk ilegal/ palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, produk yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan produk yang tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah sampel obat acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024 sebanyak 1074. Sampel yang memenuhi syarat sebanyak 1025 sampel yaitu 325 sampel obat, 212 sampel obat bahan alam, 46 sampel suplemen kesehatan, 14 sampel obat kuasi dan 428 sampel kosmetika. Sedangkan sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 49 sampel.

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung dengan cara :

$$\%\ Obat\ MS = \frac{jumlah\ sampel\ obat\ acak\ MS}{total\ sampel\ obat\ acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

$$= \frac{1025}{1074} \times 100\% \qquad = 95{,}44\ \%$$

Target Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah 93,0% dengan realisasi sebesar 95,44% sehingga capaian yang diperolehsebesar 102,62% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

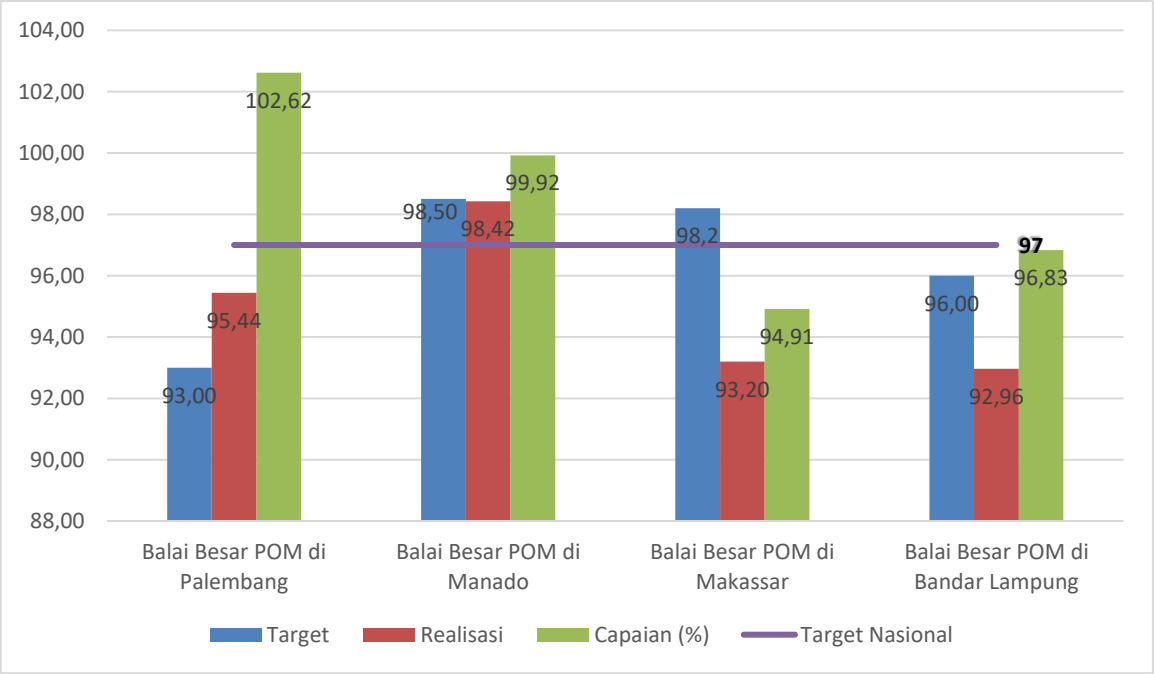
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
80,8	91,19	112,86	91	94,5	103,85	91,5	82,86	90,56	92	92,31	100,34	93	95,44	102,62

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 1.

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat memenuhi syarat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 91,19% menjadi 94,5%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 92,31% dan 95,44%. Sedangkan capaian indikator kinerja sampel obat memenuhi syarat mengalami penurunan dari

tahun 2020 sampai tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Palembang Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 1.

Realisasi Indikator kinerja ini paling tinggi pada Balai Besar POM di Manado dengan realisasi sebesar 98,42%, lalu diikuti dengan Balai Besar POM di Palembang sebesar 95,44%, Balai Besar POM di Makassar sebesar 93,2% dan dengan realisasi terendah yaitu Balai Besar POM di Lampung sebesar 92,96%. Jika dibandingkan dengan target nasional pada PK Badan POM Tahun 2024 dengan target 97%, maka pada klaster ini hanya BBPOM di Manado yang mencapai target. Sedangkan capaian kinerja persentase obat yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Palembang sebesar 102,62%, paling tinggi jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (99,92%), BBPOM di Makassar (94,91%), dan BBPOM di Bandar Lampung (96,83%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini antara lain disebabkan oleh:

1) Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian obat sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan telah dikendalikan melalui peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang melalui pelatihan internal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh personil penguji dan rutin dilakukan diseminasi hasil pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
2) Perencanaan sampling telah dirumuskan oleh tim pemeriksaan dan tim pengujian berdasarkan ketersediaan reagen, media, suku cadang dan perencanaan pengujian sampel regionalisasi sehingga sudah ditentukan kategori sampel apa saja yang dapat diuji di laboratorium setiap bulannya.
3) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman
4) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya obat aman dan bermutu
5) Meningkatnya penggunaan instrumen GCMS dalam pengujian obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetika sehingga menyebabkan antre dalam penggunaan instrumen. Jadwal penggunaan instrumen dibuat berdasarkan jenis kolom GCMS yang akan digunakan, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu untuk proses pengkondisian alat sebelum digunakan.

Rekomendasi penyempurnaan kinerja:

1. Peningkatan kemampuan petugas sampling dan pengujian untuk memenuhi ketentuan sampling dan pengujian sesuai pedoman pada tahun berjalan.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium untuk menunjang kelancaran proses pengujian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Kegiatan pelatihan terkait pengujian baik yang dilaksanakan di pusat (PPPOMN) maupun internal BBPOM di Palembang dengan mengundang narasumber baik internal maupun eksternal BPOM
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pengujian termasuk pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium, pengadaan reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding
3. Rapat monitoring dan evaluasi bulanan
4. KIE kepada masyarakat baik langsung maupun secara online
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk memberikan pembinaan dan pengawalan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	90,58	99,54	

Tabel 3.1.4
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

2) Produk kedaluwarsa

3) Produk rusak

4) Tidak memenuhi ketentuan label

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Jumlah sampel makanan acak selesai diuji pada tahun 2024 sebanyak 467 dengan rincian jumlah sampel memenuhi syarat sebanyak 423 sampel dan sampel tidak memenuhi syarat sebanyak 44 sampel. Dari 44 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut sejumlah 15 sampel tidak memenuhi ketentuan label (TMK mayor) dan sejumlah 29 sampel TMS keamanan/mutu.

Persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan cara :

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{jumlah\ sampel\ makanan\ acak\ MS}{total\ sampel\ makanan\ acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

$$= \frac{422}{467} \times 100\% \qquad = 90{,}58\ \%$$

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah 90,58%. Bila dibandingkan dengan target 91,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 99,54% masuk dalam kategori **cukup**.

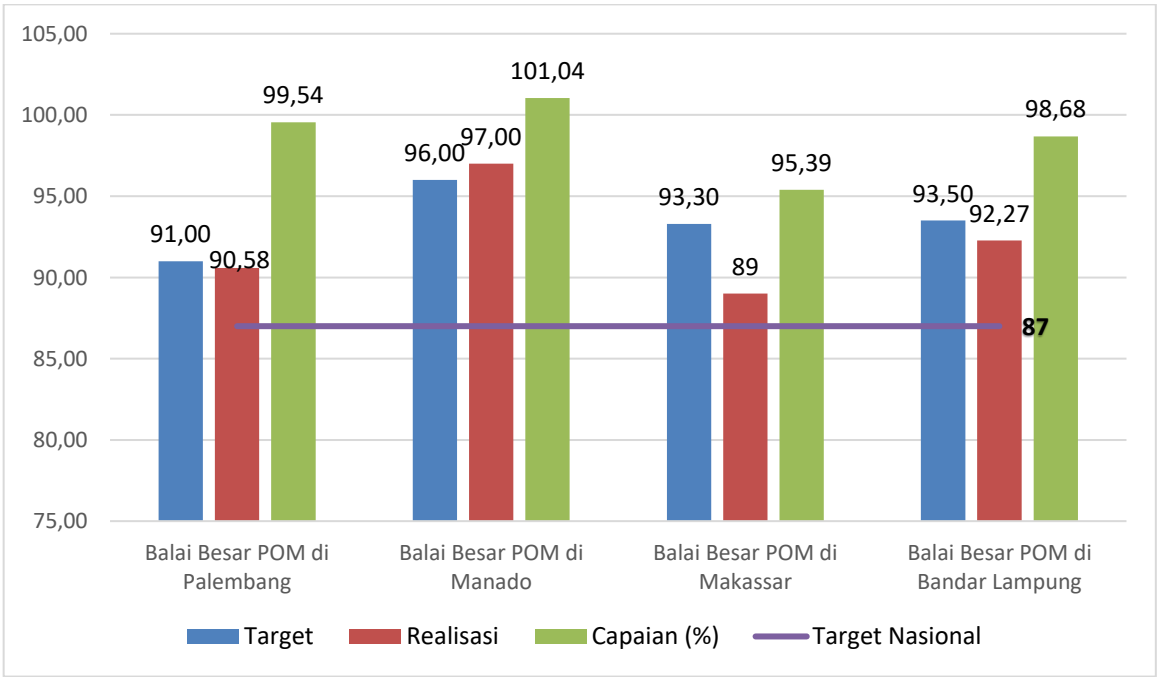
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
78	86,52	110,92	86,5	90,22	104,30	88	77,43	87,99	89,5	89,55	100,06	91	90,58	99,54

Tabel 3.1.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 2.

Realisasi indikator kinerja persentase sampel makanan memenuhi syarat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 86,52% menjadi 90,22%, kemudian realisasi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 77,43%, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 89,55% dan 90,58%. Sedangkan capaian indikator kinerja sampel makanan memenuhi syarat mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 100,06%, namun turun lagi pada tahun 2024 menjadi 99,54%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 2.

Realisasi kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Palembang sebesar 90,58%, lebih tinggi dari realisasi BBPOM di Makassar sebesar 89%. Realisasi tertinggi pada indikator ini adalah BBPOM di Manado dengan realisasi sebesar 97% lalu diikuti dengan BBPOM di Bandang Lampung dengan realisasi sebesar 92,27%. Namun, jika dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 87%, seluruh UPT pada klaster 3 telah melampaui target tersebut. Sedangkan Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Palembang sebesar 99,54%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Makasar (95,39%) dan BBPOM di Bandar Lampung (98,68%), namun lebih rendah dibandingkan capaian BBPOM di Manado (101,04%).

d. Alisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun 2024 tidak dilakukan pengendalian secara berkala
2. Masih banyaknya produk makanan beredar yang tidak memenuhi syarat label (TMK mayor)
3. Masih ditemukannya produk makanan beredar yang tidak memenuhi syarat keamanan/ mutu seperti TMS kadar pengawet dan/ atau pemanis, kadar pewarna, enzim diastase dan HMF pada madu, logam berat, kadar BHA serta ALT dan AKK.
4. Masih adanya produsen yang tidak komitmen terkait cara produksi pangan olahan yang baik yang meliputi keamanan/ mutu dan label kemasan yang benar sesuai dengan peraturan label pangan olahan.

Upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan:

1. Melakukan mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan dan akan dikendalikan secara berkala melalui peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang melalui pelatihan internal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh

personil penguji dan rutin dilakukan diseminasi hasil pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh PPPOMN.

2. Peningkatan kemampuan petugas sampling dan pengujian untuk memenuhi ketentuan sampling dan pengujian sesuai pedoman pada tahun berjalan berdasarkan analisa risiko terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap personil di fungsi pemeriksaan dan pengujian.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya makanan aman melalui program edukasi
4. Peningkatan pengawasan produk makanan di tingkat produksi dan distribusi
5. Melakukan koordinasi terus menerus ke Badan POM melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI terkait produsen yang tidak konsisten dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Sampling dan pengujian produk makanan yang dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
2. Pelatihan terhadap petugas sampling maupun petugas penguji baik yang dilakukan di pusat maupun bimtek internal di BBPOM di Palembang
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pengujian termasuk alat laboratorium, suku cadang, reagensia/media mikrobiologi dan baku pembanding
4. KIE kepada masyarakat mengenai pentingnya makanan yang aman dan bermutu
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi makanan secara rutin maupun secara intensif pada momen-momen tertentu
6. Kegiatan pelatihan / bimbingan teknis / sosialisasi kepada pelaku usaha

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	97	96,04	99,01	

Tabel 3.1.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 3.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan

satuan bets Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\%\ Obat\ Aman\ dan\ Bermutu = \frac{jumlah\ sampel\ obat\ targeted\ MS}{total\ sampel\ obat\ targeted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa,kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Jumlah sampel obat targeted selesai diuji pada tahun 2024 sebanyak 404 dengan rincian jumlah sampel memenuhi syarat sebanyak 388 sampel dan sampel tidak memenuhi syarat sebanyak 16 sampel, sehingga realisasi persentase sampel obat dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung sebagai berikut:

$$\%\ Obat\ Aman\ dan\ Bermutu = \frac{388}{404} \times 100\% = 96{,}04\ \%$$

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah 96,04%, bila dibandingkan dengan target 97,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 99,01% dengan kategori **cukup**.

Sampel komoditi obat yang disampling oleh Balai Besar POM di Palembang sebanyak 418 sampel dengan rincian Acak 332 sampel dan targeted 86 sampel. Target sampel obat tahun 2024 yang ditetapkan pusat dengan rincian kategori Acak 334 sampel dan targeted 84 sampel. Terdapat kelebihan capaian sampling obat targeted dari 84 sampel menjadi 86 sampel dan terdapat

kekurangan sampling obat acak yang seharusnya 334 sampel namun hanya disampling 332 sampel. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman petugas terhadap prioritas/perencanaan sampling yang telah ditetapkan.

Sampel Komoditi Kosmetik yang disampling oleh Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2024 sebanyak 631 sampel dengan rincian Acak 436 sampel dan Targeted 195 sampel. Sementara Target Sampel Kosmetik Tahun 2024 yang ditetapkan Pusat adalah 627 nomor dengan rincian kategori Acak 439 sampel dan kategori Targeted 188 sampel. Kelebihan capaian sampling Kosmetik Targeted dari 188 sampel menjadi 195 sampel disebabkan perubahan beberapa kategori sampel yang ditemukan di lapangan dan penambahan sampel dari Ditwaskos sebanyak 6 sampel sebagai sampel kasus pada bulan September 2024. Kekurangan capaian sampling Kosmetik Acak dari Target 439 sampel menjadi Realisasi 436 sampel tersebut diakibatkan tidak tercapainya sampling di kategori Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur karena sampel tidak tersedia di Sumatera Selatan dan perpindahan Kategori Sampling dari Acak ke Targeted.

Jumlah sampel Kosmetik yang selesai diuji pada tahun 2024 sebanyak 631 sampel dengan rincian jumlah sampel memenuhi syarat sebanyak 617 sampel dan sampel tidak memenuhi syarat sebanyak 14 sampe (6 sampel TMS targeted dan 8 sampel TMS acak) dengan rincian 5 sampel TMS kimia/ Mikro antara lain TMS karena mengandung bahan berbahaya (mengandung metanol pada 2 sampel masker sheet, 1 sampel mengandung asam retinoat), 1 sampel TMS Mikrobiologi, 1 sampel TMS Mutu (Penetapan Kadar Dioksan), dan 9 Sampel TMK penandaan.

Komoditi Obat Bahan Alam yang disampling oleh Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2024 sebanyak 316 sampel dengan rincian : Acak 221 sampel dan Targeted 91 sampel. Target Sampel Obat Bahan Alam yang ditetapkan Pusat pada awal tahun 2024 terdiri atas sampel Acak 221 sampel dan sampel Targeted 90 sampel. Selisih lebih capaian sampling Obat Bahan Alam Targeted sebanyak 1 sampel disebabkan oleh ketidaksesuaian pembelian sampel saat di lapangan. Sebagai antisipasi agar kesalahan ini tidak terulang di tahun 2025, setiap petugas sampling diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Sampling Badan POM secara daring untuk semua komoditi di awal tahun agar tingkat kompetensinya merata.

Selanjutnya, jumlah komoditi Suplemen Kesehatan yang berhasil di sampling oleh Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2024 sebanyak 26 sampel targeted dengan hasil 24 sampel memenuhi syarat dan 2 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk Komoditi Obat Kuasi capaian sampel targetednya sebanyak 6 sampel dengan hasil 6 sampel targeted tersebut memenuhi syarat. Sehingga jumlah keseluruhan sampel targeted Balai sebanyak 404 sampel dengan rincian jumlah sampel obat targeted MS sebanyak 388 sampel.

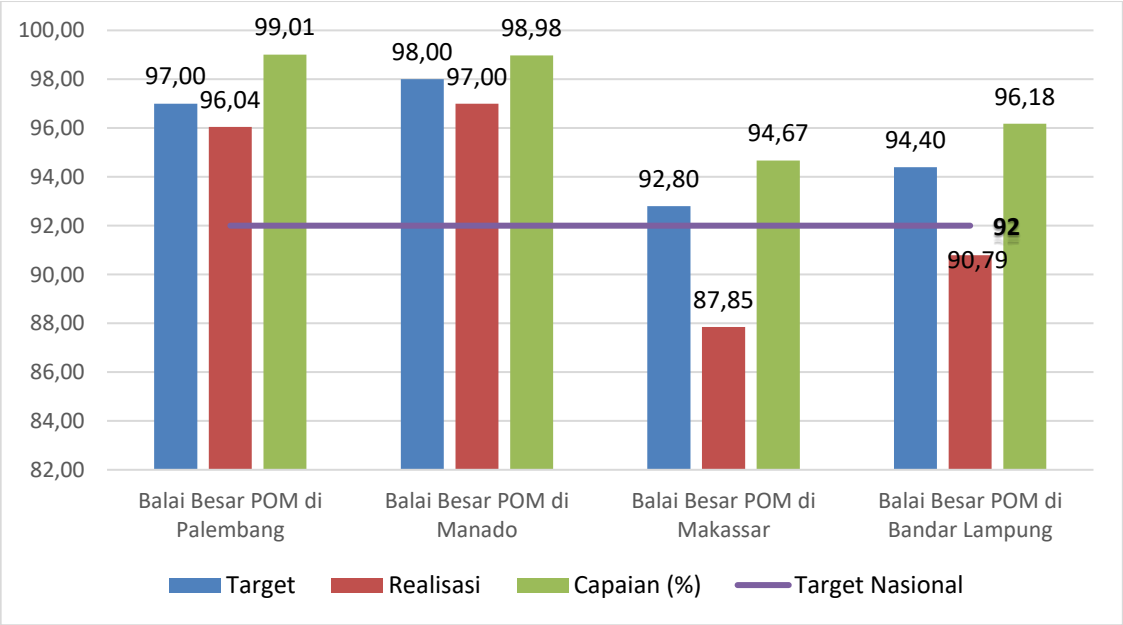
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
95	95,09	100,09	95	95,1	100,11	96	82,21	85,64	96,5	92,95	96,32	97	96,04	99,01

Tabel 3.1.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 3.

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat memenuhi syarat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 91,19% menjadi 94,5%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 92,31% dan 95,44%. Sedangkan capaian indikator kinerja sampel obat memenuhi syarat mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 3.

Realisasi kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 96,04% lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 90,79% dan BBPOM di Makassar sebesar 87,87%. Namun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi BBPOM di Manado sebesar 97%. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 92%, hanya BBPOM di Palembang dan BBPOM di Manado yang melampaui target tersebut. Sedangkan, capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 99,01%, paling tinggi jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (98,98%), BBPOM di Makassar (94,67%), dan BBPOM di Bandar Lampung (99,01%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Ketidakberhasilan capaian kinerja indikator ini antara lain disebabkan oleh kepatuhan petugas sampling terhadap prioritas/perencanaan sampling masih rendah. Maka itu, rekomendasi penyempurnaan kinerja:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian obat yang aman dan bermutu pada tahun 2024 tidak dilakukan pengendalian secara berkala
2. Kepatuhan petugas sampling terhadap prioritas/perencanaan sampling masih rendah

   Upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan:

   1. Melakukan mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian obat yang aman dan bermutu pada tahun berjalan dan akan dikendalikan secara berkala melalui peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang melalui pelatihan internal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh personil penguji dan rutin dilakukan diseminasi hasil pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
   2. Koordinasi penguji dengan petugas sampling setiap bulan terkait prioritas sampling yang telah ditetapkan harus terus dilaksanakan. Apabila terdapat sampel sulit ditemukan di lapangan, petugas sampling agar mengkomunikasikannya dengan penguji sehingga bisa dicari kategori lain yang bisa ditemukan di lapangan
   3. Peningkatan kemampuan petugas sampling untuk memenuhi ketentuan sampling pada tahun berjalan yang belum dilakukan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Kegiatan Pelatihan terkait Pemeriksaan baik yang dilaksanakan oleh Badan POM Pusat maupun internal Balai Besar POM di Palembang dengan mengundang narasumber internal BPOM ataupun penugasan pegawai untuk Kegiatan Forum Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop.
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan konsisten dilaksanakan setiap awal bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
3. Rekonsiliasi data antara Tim Pengujian dan Petugas Sampling untuk pemantauan capaian sampling yang masuk di Laboratorium.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,9	82,74	94,13	

Tabel 3.1.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 4.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ditentukan dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ aman\ dan\ bermutu = \frac{jumlah\ sampel\ makanan\ targeted\ MS}{total\ sampel\ makanan\ targeted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 adalah 82,74%. Bila dibandingkan dengan target 87,90%, maka capaian yang diperoleh sebesar 94,13%. Jumlah sampel makanan targeted selesai diuji pada tahun 2024 sebanyak 197 dengan rincian jumlah sampel memenuhi syarat sebanyak 163 sampel dan sampel tidak memenuhi syarat sebanyak 34 sampel). Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ Makanan\ Aman\ dan\ Bermutu = \frac{163}{197} \times 100\% \quad = 82{,}74\ \%$$

Dalam perhitungan ini sudah termasuk sampel fortifikasi sebanyak 80 nomor, diperhitungkan terhadap hasil uji dari parameter uji non fortifikasi. Sedangkan sampel fortifikasi tambahan dari target awal sebanyak 21 nomor tidak diperhitungkan dalam indikator kinerja ini karena hanya dilakukan pengujian pada parameter uji fortifikasinya saja, sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan pangan fortifikasi.

Adapun rincian sampel makanan targeted tidak memenuhi syarat (TMS) adalah: air baku (2 sampel), garam lokal spesifik (7 sampel), pangan jajanan anak sekolah (PJAS) (13 sampel), AMIU (2 sampel), garam fortifikasi untuk parameter uji non fortifikasi (4 sampel), minyak goreng sawit fortifikasi untuk parameter uji non fortifikasi (1 sampel), minuman buah UMKM (1 sampel), Bakso UMKM (1 sampel), gula aren UMKM (1 sampel), DNA porcine dalam permen (1 sampel), serta latiao (1 sampel).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

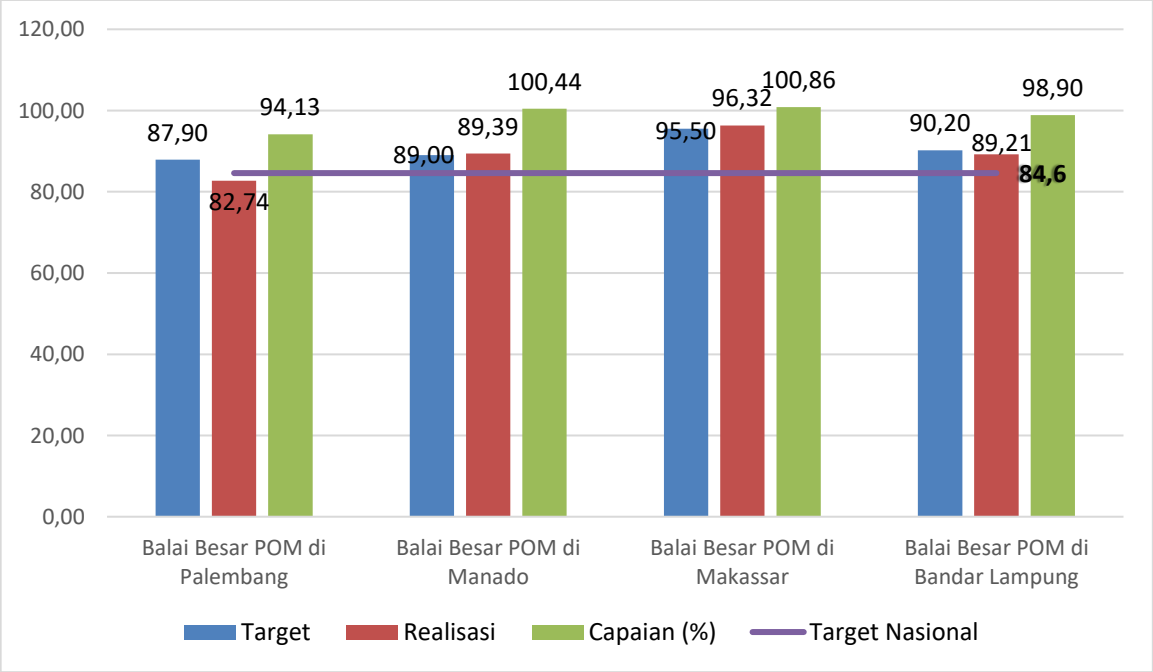
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
75	79,66	106,21	80	85,42	106,78	82	83,72	102,10	83	87,04	104,87	87,9	82,74	94,13

Tabel 3.1.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Periode Renstra 2020-2024
IKU 4.

Realisasi indikator kinerja persentase makanan makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 79,66% menjadi 85,42%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 83,72%, serta meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 87,04, namun mengalami

penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 82,74%. Sedangkan capaian indikator kinerja persentase makanan makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2021 (106,21% menjadi 106,78%), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 102,10%. Capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 menjadi 104,87%, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 94,13%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.5
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 4.

Realisasi indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palembang tahun 2024 merupakan realisasi terendah pada klaster 3 yaitu sebesar 82,74%. Realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Makassar sebesar 96,32%, diikuti oleh BBPOM di Manado sebesar 89,39% dan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 89,21%. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 84,6%, maka pada klaster ini hanya BBPOM di Palembang yang belum melampaui target tersebut. Sedangkan, perbandingan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palembang sebesar 94,13%, paling rendah jika

dibandingkan dengan capaian BBPOM di Makasar (100,86%), BBPOM di Bandar Lampung (98,90%) dan BBPOM di Manado (100,44%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 tidak dilakukan pengendalian secara berkala
2. Masih banyaknya ditemukan produk makanan yang disampling secara targeted yang tidak memenuhi syarat mutu/keamanan terutama pangan jajanan anak sekolah, sampel fortifikasi, sampel kasus seperti produk garam, latiao dan UMKM yang akan mengajukan upgrading menjadi MD
3. Mitigasi risiko terhadap potensi inkonsistensi produsen dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik sehingga menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar belum dimasukan dalam risk register tahun 2024

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja ini yaitu:

1. Melakukan mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian makanan yang aman dan bermutu pada tahun berjalan tidak dilakukan pengendalian secara berkala melalui peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang melalui pelatihan internal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh personil penguji dan rutin dilakukan diseminasi hasil pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, peserta didik dan pihak sekolah mengenai pentingnya makanan aman melalui program edukasi
3. Peningkatan pengawasan produk makanan di tingkat produksi dan distribusi
4. Melakukan mitigasi risiko terhadap potensi inkonsistensi produsen dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik melalui kegiatan bimbingan teknis CPPOB untuk pelaku usaha yang berada di wilayah Sumatera Selatan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian termasuk di dalamnya alat laboratorium, suku cadang, reagensia/media mikrobiologi dan baku pembanding
2. Sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
3. Pelatihan terhadap petugas sampling maupun petugas penguji baik yang dilakukan di pusat maupun bimtek internal di BBPOM di Palembang
4. KIE kepada masyarakat mengenai pentingnya makanan yang aman dan bermutu
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi makanan secara rutin maupun secara intensif pada momen-momen tertentu
6. Kegiatan pelatihan / bimbingan teknis / sosialisasi kepada pelaku usaha

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93	93,07	100,08	

Gambar 3.1.10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 5.

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman

sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Persentase pangan fortifikasi MS dihitung menggunakan rumus:

$$\%\ Pangan\ fortifikasi\ MS = \frac{jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ MS}{total\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan :

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Dari total 101 sampel yang diuji terdapat sampel yang memenuhi syarat sebanyak 94 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 7 sampel, sehingga realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung sebagai berikut:

$$\%\ \text{Pangan Fortifikasi MS} = \frac{94}{101} \times 100\% \ = 93{,}07\ \%$$

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 adalah 93,07%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 93,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 100,08% dengan kategori **sangat baik**.

Target awal jumlah sampel fortifikasi pada tahun 2024 adalah 80 sampel yang terdiri dari garam beryodium sebanyak 40 sampel, minyak goreng sawit sebanyak 34 sampel dan tepung terigu sebanyak 6 sampel. Setelah dilakukan pengujian terhadap 80 sampel tersebut ditemukan banyak sampel tidak memenuhi syarat pada produk garam beryodium sehingga dilakukan intervensi berupa sosialisasi kembali mengenai ketentuan penambahan fortifikan kepada pelaku usaha produk fortifikasi. Menjelang akhir tahun 2024 dilakukan sampling kembali terhadap produk pangan fortifikasi untuk melihat perubahan

yang terjadi setelah dilakukan sosialisasi tersebut, sehingga realisasi sampling fortifikasi bertambah 21 sampel dari target awal.

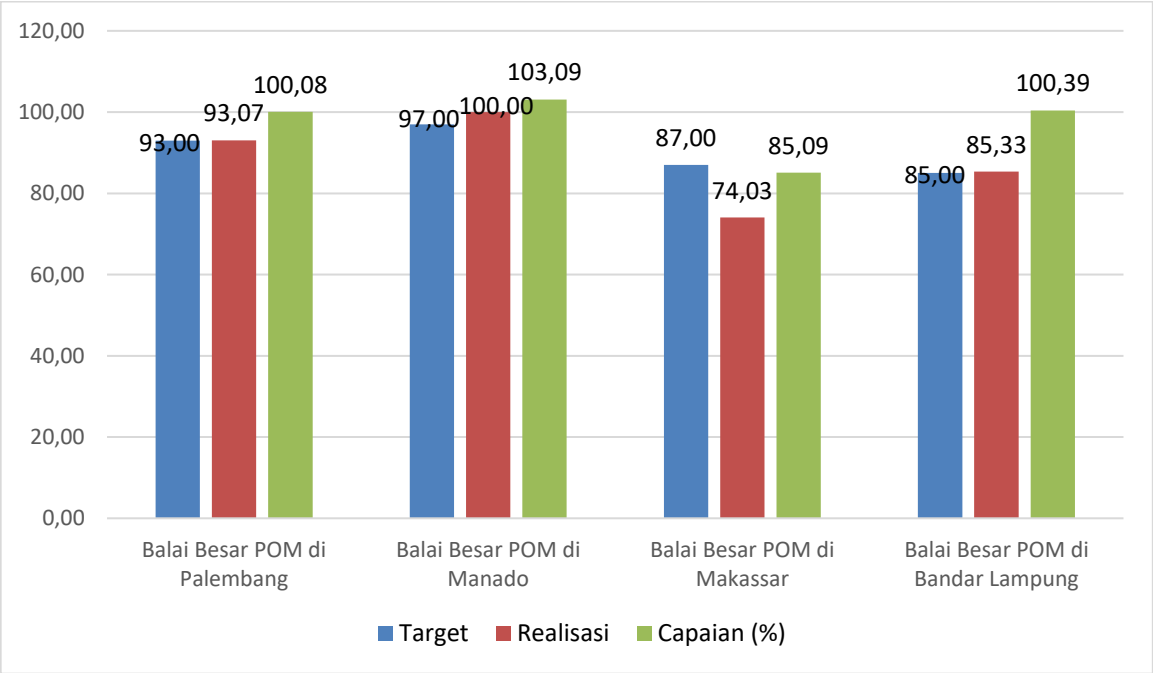
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
			91	60	65,93	92	72	78,26	93	81,05	87,15	93	93,07	100,08

Tabel 3.1.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 5.

Dari kurun waktu 2021 hingga 2023, realisasi indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat cenderung mengalami peningkatan. Namun, pada kurun waktu tersebut realisasi indikator kinerja ini belum mampu melampaui target. Tahun 2024, dengan penyesuaian aktivitas dan strategi akhirnya bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.6
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 5.

Urutan realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat dari yang tertinggi ke rendah adalah Balai Besar POM di Manado (100%), Balai Besar POM di Palembang (93,07%), Balai Besar POM di Lampung (85,33%), dan Balai Besar POM di Makassar (74,03%).

Capaian kinerja paling rendah adalah BBPOM di Makassar (85,09%) dan masuk dalam kategori cukup sedangkan capaian kinerja Balai Besar POM di Manado (103,09%), Balai Besar POM di Palembang (100,08%), Balai Besar POM di Lampung (100,39%) masuk dalam kriteria indikator sangat baik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pengujian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun berjalan telah dikendalikan melalui peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang melalui pelatihan internal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh personil penguji dan rutin dilakukan diseminasi hasil pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh PPPOMN
2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha pangan fortifikasi melalui bimbingan teknis CPPOB kepada pelaku usaha garam yang berada di wilayah Sumatera Selatan dengan kegiatan pengawalan hasil pengawasan kualitas garam konsumsi dalam pendukung program pemerintah untuk percepatan penurunan stunting berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan kemampuan petugas sampling dan pengujian untuk memenuhi ketentuan sampling dan pengujian sesuai pedoman pada tahun berjalan berdasarkan analisa risiko terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap personil di fungsi pemeriksaan dan pengujian.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya makanan aman dan bermutu melalui program edukasi

3. Peningkatan pengawasan produk fortifikasi di tingkat produksi dan distribusi
4. Melakukan koordinasi terus menerus ke Badan POM melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI terkait produsen yang tidak konsisten dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2024.
2) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
3) Masih banyaknya peredaran produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, terutama garam, yang beredar di wilayah BBPOM di Palembang
4) Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha di tingkat produksi terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Masih kurangnya sosialisasi dan KIE terkait pangan fortifikasi, baik kepada produsen maupun masyarakat

2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) indikator sehingga nilai pencapaian sasaran sebesar 97,90%. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut:

6. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89	87,13	97,90	

Tabel 3.1.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 6.

Pengukuran indeks kesadaran masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait penerapan keamanan obat dan makanan khususnya terkait pesan kunci Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa).

Dari hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan rincian hasil pengukuran sebagai berikut :

Komoditi / Indikator pengukuran	Obat	Obat tradisional	Sulemen kesehatan	Kosmetik	Pangan olahan	Rata-rata	Keterangan
Pengetahuan	99.69	98.34	92.80	97.85	99.61	97.97	Sangat baik
Sikap	87.28	86.39	86.80	86.65	87.55	87.07	Baik
Perilaku	77.93	75.79	72.06	78.64	76.51	76.36	Baik
Nilai Akhir						**87,13**	**Baik**

Tabel 3.1.13
Hasil survei IKU 6.

Dengan realisasi sebesar 87,13 jika dibandingkan dengan target 89. Capaian yang didapatkan sebesar 97,90% dengan kategori **cukup**. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat yang disurvei telah mempunyai pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik terhadap kesadaran keamanan obat dan makanan. Namun, perlu ditingkatkan lagi untuk kesadaran masyarakat terkait sikap dan perilaku dalam penerapannya di kehidupan

sehari-hari. Selain itu, dapat dilihat juga tingkat kesadaran masyarakat terkait keamanan komoditi obat paling tinggi, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat terkait keamanan komoditi suplemen kesehatan menjadi yang terendah.

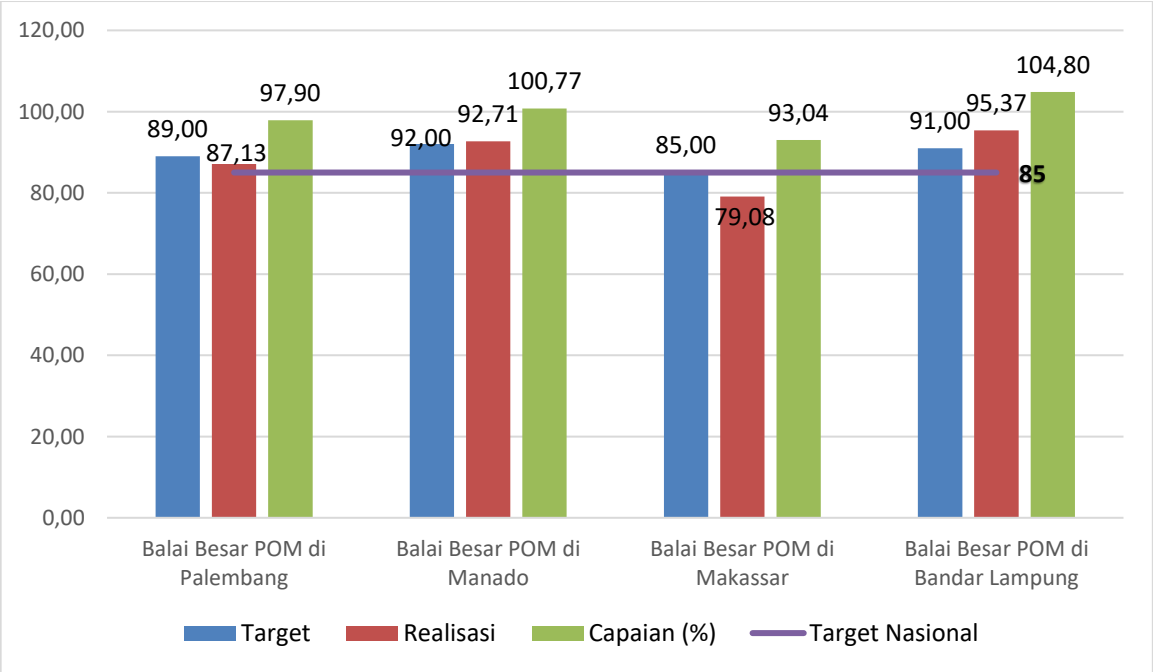
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
72	78,14	108,53	81	76,47	94,41	84	83,04	98,86	86	84,55	98,31	89	87,13	97,90

Tabel 3.1.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 6.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, di mana realisasi 2020 sebesar 78,14 dari target sebesar 72,00 dengan capaian sebesar 108,53% (Baik), realisasi 2021 sebesar 76,47 dari target sebesar 81,00 dengan pencapaian sebesar 94,41% (Baik), realisasi pada tahun 2022 sebesar 83,04 dari target sebesar 84,00 dengan pencapaian sebesar 98,86% (Baik), realisasi tahun 2023 sebesar 84,55 dari target 86,00 dengan pencapaian sebesar 98,31% dan untuk tahun 2024 realisasi tercapai sebesar 87,13 dari target sebesar 89,00 dengan capaian sebesar 97,90% (Baik).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.7
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 6.

Dari keempat UPT terdapat 2 upt yang belum mencapai target yaitu BBPOM di Palembang dan BBPOM di Makassar. Untuk realisasi tertinggi didapatkan oleh BBPOM di Bandar Lampung sebesar 95,37 sedangkan BBPOM di Palembang (87,13) berada di posisi ketiga di bawah BBPOM di Manado (92,17) dan di atas BBPOM di Makassar (79,08). Jika dibandingkan dengan target nasional Balai Besar POM di Palembang sudah melampaui target tersebut karena memang target BBPOM di Palembang sudah lebih tinggi dari target tersebut, sama halnya dengan BBPOM di Manado dan BBPOM di Bandar Lampung, hanya BBPOM di Makassar yang tidak melampaui target nasional tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab kegagalan :

a. Masyarakat masih kurang menyadari terkait pentingnya membaca informasi pada label produk dan mengetahui nomor izin edar produk pada kemasan.

b. Penyebaran informasi terkait pesan kunci Cek KLIK belum optimal ke target sasaran masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
c. Penyebaran informasi terkait Cek BPOM melalui aplikasi BPOM Mobile lebih ditekankan sehingga masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang legal.
d. Kurangnya literasi untuk cek label produk, hal ini juga berkaitan dengan permasalahan produk minuman berenergi yang masih banyak dikonsumsi oleh anak-anak, sedangkan pada label sudah tertera tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak.
e. Kurangnya persiapan UPT dalam mendampingi survei yang dilakukan, karena daerah yang dituju ternyata sebagian besar belum pernah terpapar oleh BBPOM di Palembang.
f. Kurangnya media publikasi yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang kurang/sulit mendapatkan fasilitas sinyal, jaringan internet, dan hal terkait lainnya.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja) :

a. Perlu peningkatan pemberian informasi dan edukasi terkait dengan perilaku/kebiasaan membaca informasi label/kemasan produk.
b. Melakukan pemberian informasi dan edukasi dengan jenis/metode yang beragam sehingga lebih menarik dan dapat mencapai ke pelosok daerah yang belum/ sulit terjangkau.
c. Walaupun iku ini tidak berlanjut untuk tahun selanjutnya, namun peningkatan kesadaran masyarakat terkait keamanan dan mutu obat dan makanan tetap dikawal dengan penyebaran informasi yang optimal.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja :

1. Penambahan variasi metode penyebaran informasi dan edukasi sehingga lebih menarik bagi masyarakat.
2. Penyebaran informasi dan edukasi dapat menggunakan kearifan budaya lokal, seperti bahasa daerah, makanan khas, dan/ atau terkait permasalahan di kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat lebih mudah memahami.

3. Pemutakhiran metode penyebaran informasi agar lebih efektif untuk dapat menjangkau keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang luas dengan jumlah 17 (tujuh belas) kabupaten/ kota.
4. Pesan kunci Cek KLIK harus lebih ditekankan dengan kalimat yang singkat, lugas, dan jelas sehingga masyarakat mudah untuk mengingatnya.

3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator. Dari perhitungan 3 indikator tersebut diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,51%. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut:

7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99	98,85	99,85	

Tabel 3.1.15
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 7.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) adalah hasil pengolahan data Survei Kepuasan Pelaku Usaha berupa angka dengan rentang 0-100. Pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dikelola oleh PUSAKOM melalui survei yang dilakukan oleh Unit Kedeputian I, II dan III serta Balai Besar/Balai POM.

Pengukuran IKEPU dilakukan setiap tahun pada periode Renstra 2020-2024. Kegiatan pengukuran ini bertujuan untuk: 1) memperoleh indeks kepuasan

pelaku usaha Obat dan Makanan terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM di tingkat Nasional, Komoditi dan Unit Kerja, 2) pengukuran pencapaian target kinerja BPOM, Deputi, dan Unit Kerja, 3) evaluasi kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM terhadap pelaku usaha. Pengumpulan data survei dilakukan oleh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia yang melakukan bimbingan dan pembinaan. Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang dapat diakses langsung oleh pelaku usaha serta dapat diintegrasikan hasilnya dengan informasi Geographic Information System (GIS) di BPOM Command Center (BCC). Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada Unit penyelenggara KBP dalam melaksanakan survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 BBPOM di Palembang sebesar 98,85% dari target Tahun 2024 sebesar 99%. Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang sebesar 99,85% dengan kategori **cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

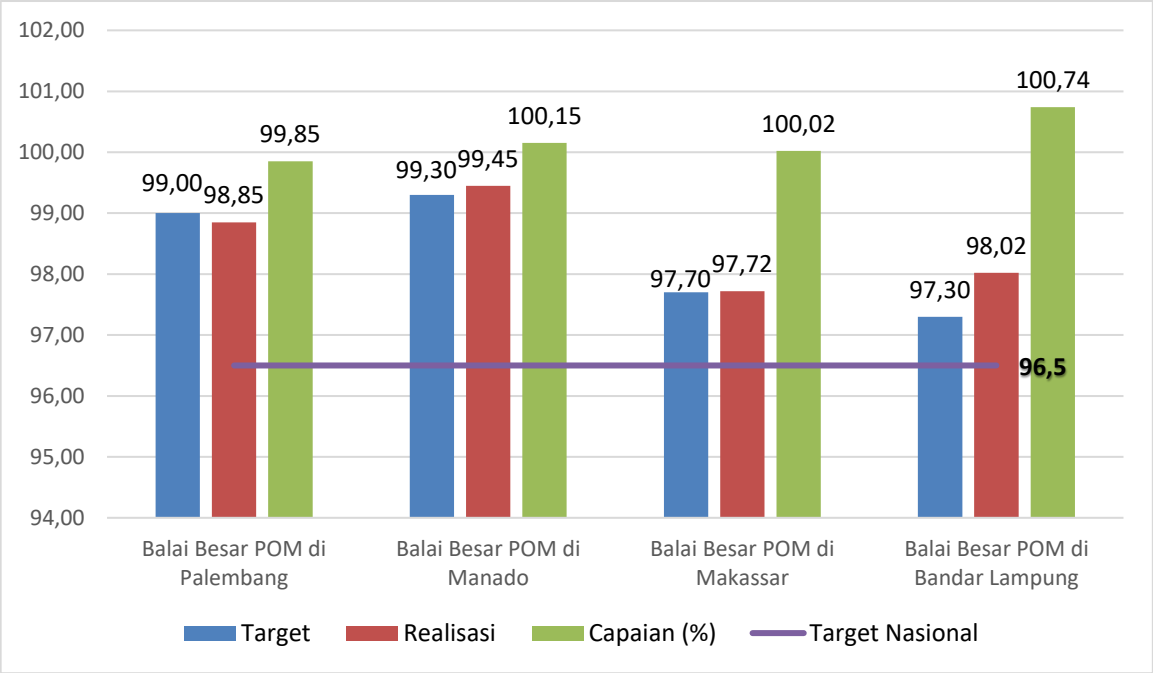
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
86	87,67	101,94	88,80	83,50	94,03	89,9	97	107,90	91	98,34	108,07	99	98,85	99,85

Tabel 3.1.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 7.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, di mana realisasi 2020 sebesar 87,67 dari target sebesar 86,00 dengan capaian sebesar 101,94% (Baik), realisasi 2021 sebesar 83,50 dari target sebesar 88,80 dengan pencapaian sebesar 94,03% (Baik), realisasi pada tahun 2022 sebesar 97,00 dari target sebesar 89,90 dengan pencapaian sebesar 107,90% (Baik), realisasi 2023 sebesar 98,34 dari target 91,00 dengan pencapaian

sebesar 108,07% dan untuk tahun 2024 realisasi tercapai sebesar 98,85 dari target sebesar 99,00 dengan capaian sebesar 99,85% (Baik).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.8
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 7.

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Manado (99,45) diikuti Balai Besar POM di Palembang (98,85), Balai Besar POM di Lampung (98,02) dan Balai Besar POM di Makasar (97,72), sedangkan capaian tertinggi adalah Balai Besar POM di Lampung (100,74) dan terendah adalah Balai Besar POM di Palembang (99,85). Jika dibandingkan dengan target nasional BPOM sebesar 96,5 seluruh UPT pada klaster 3 telah melampaui target tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi kegagalan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 tidak dilakukan pengendalian secara berkala
2. Koordinasi antar fungsi terhadap kegiatan terpadu belum dilakukan perencanaan dengan baik
3. Kompetensi petugas/fasilitator dalam melakukan pendampingan masih belum memadai

Upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi kegagalan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun berjalan akan dilakukan pengendalian secara berkala
2. Kegiatan terpadu dengan melibatkan kelompok substansi lain akan dilakukan perencanaan lebih baik
3. Peningkatan kompetensi petugas/fasilitator dalam melakukan pendampingan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

- Program Pendampingan/Fasilitasi UMKM, Balai Besar POM di Palembang dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap pelaku usaha dengan melakukan bimbingan berupa pendampingan/fasilitasi terhadap UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi produk Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik diwilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
- Upaya pelayanan prima yg dilakukan oleh petugas, seperti pembukaan layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan keikutsertaan dalam layanan kepada UMKM yang diselenggarakan oleh Lintas sektor terkait.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,01	80,60	100,74	

Tabel 3.1.17
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 8.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan obat dan makanan meliputi kemampuan/upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang terhadap :

a. Produk obat dan makanan (kegiatan intensifikasi pengawasan menjelang hari besar keagamaan, intensifikasi pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional)
b. Produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu obat dan makanan
c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran
d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan

masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing antara lain obat sebesar 81,27; obat tradisional sebesar 79,37; suplemen kesehatan sebesar 80,36; kosmetik sebesar 80,13; dan pangan olahan sebesar 81,10; terhadap hasil penilaian tersebut diagregatkan menjadi nilai Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Nasional = \sum[\sum(\bar{R}\,a \times b) \times c]$$

Keterangan :

$\bar{R}\,a$: rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi

b : bobot penduduk (BPS)

c : bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Hasil pengukuran indeks kepuasan atas kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan untuk Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2024 adalah sebesar 80,60 jika dibandingkan dengan target 80,01 maka capaian indikator ini adalah 100,74% dengan kategori **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
71	74,24	104,56	75,68	71,83	94,91	77,12	77,2	100,10	78,57	79,74	101,49	80,01	80,6	100,74

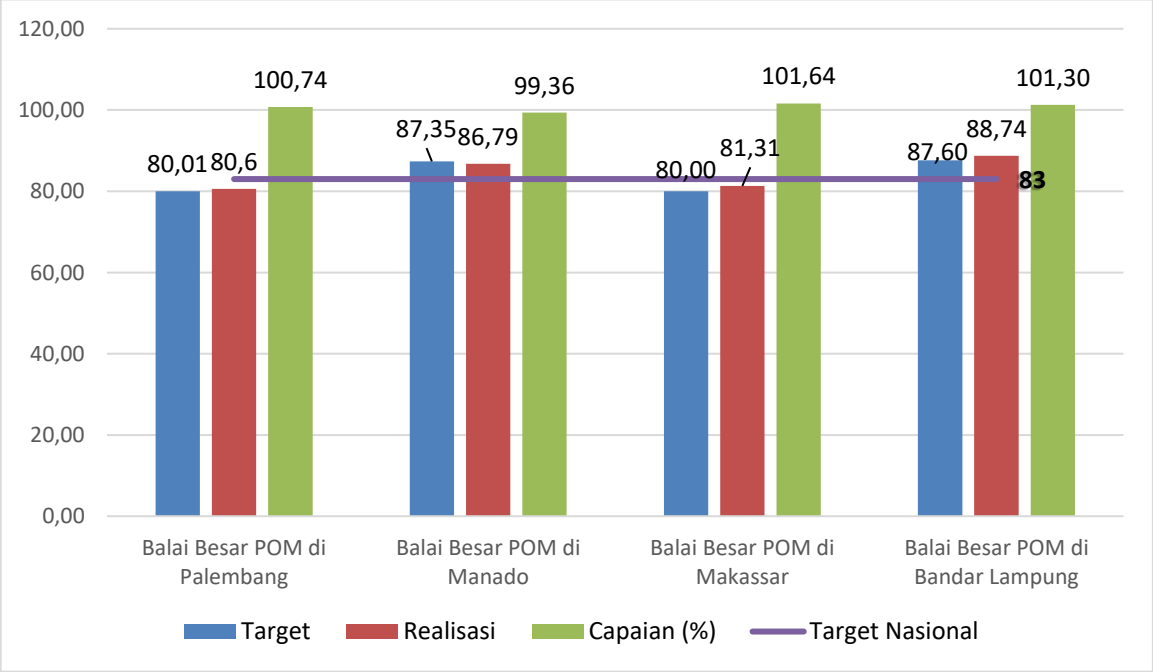
Tabel 3.1.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 8.

Realisasi indikator untuk Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, di mana realisasi 2020 sebesar 74,24 dari target sebesar 71,00 dengan capaian sebesar 104,56% (Baik), realisasi 2021 sebesar 71,83 dari target sebesar 75,68 dengan pencapaian sebesar 94,91% (Baik), realisasi pada tahun 2022 sebesar 77, 20 dari target sebesar 77,12 dengan pencapaian sebesar 100,1

%(Baik), realisasi 2023 sebesar 79,74 dari target 78,57 dengan pencapaian sebesar 101,49% , dan untuk tahun 2024 realisasi tercapai sebesar 80,60 dari target sebesar 80,01 dengan capaian sebesar 100,47% (Baik).

Peningkatan realisasi dan pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 dibandingkan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 merupakan suatu bentuk dari hasil implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 di lingkungan Balai Besar POM di Palembang dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas kinerja pengawasan obat dan makanan sehingga mampu memenuhi kepuasan dan harapan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.9
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 8.

Berdasarkan grafik di atas, realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 80,6 paling rendah dibanding seluruh UPT pada klaster 3. Realisasi tertinggi diraih oleh BBPOM di Bandar Lampung sebesar 88,74 yang diikuti oleh BBPOM di Manado sebesar 86,79 dan BBPOM di Makassar sebesar 81,31. Jika

dibandingkan dengan target nasional BPOM tahun 2024 sebesar 83, sehingga hanya BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Manado yang telah melampaui target tersebut. Sedangkan capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar sebesar 101,64%, diikuti Balai Besar POM di Bandar Lampung sebesar 101,30% dan Balai Besar POM di Palembang sebesar 100,74%, sedangkan realisasi terendah adalah Balai Besar POM di Manado sebesar 99,36%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator ini dinilai oleh masyarakat berdasarkan konsep *Service Quality* (*servqual*) yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar di Palembang meliputi kegiatan pengawasan produk beredar meliputi intensifikasi pengawasan produk seperti pengecekan produk kadaluarsa, kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan berbahaya/merugikan kesehatan melalui pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan, memberikan jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat melalui pengawasan pre dan post market serta pengujian dan juga tindakan Balai Besar POM di Palembang atas produk berbahaya melalui penarikan produk dan penindakan kejahatan.

Harapan dan ekspektasi masyarakat Sumatera Selatan yang tinggi terhadap peran Balai Besar POM di Palembang merupakan landasan kuat untuk melakukan kinerja terbaik. Penetapan target kinerja dari semua aspek dan pengawalan pencapaiannya sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya mendapatkan *outcome* yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Capaian indikator kinerja ini yang didapatkan adalah kategori sangat baik, di mana hasil survei didapatkan pada akhir tahun dan proses serta pelaksanaan survei bersifat independen melalui pihak ketiga. Balai Besar POM di Palembang akan terus berupaya dan berkomitmen melakukan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Sumatera Selatan dari hulu ke hilir dengan mengutamakan pembinaan dan penyebarluasan informasi.

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi terjadinya penurunan/tidak tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan telah dilakukan di tahun 2024 dan dikendalikan secara berkala melalui kolaborasi aktif dari setiap fungsi kerja

2. Peningkatan dukungan dan kerjasama serta komitmen penuh dari setiap unit terkait untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat terkait pengawasan, penindakan, pemberian informasi serta jaminan keamanan obat dan makanan

Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Tercapainya target nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 di Balai Besar POM di Palembang tidak lepas dari beberapa perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan antara lain dengan melakukan mitigasi risiko terhadap potensi terjadinya penurunan/tidak tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi aktif dari setiap fungsi kerja. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan di Balai Besar POM di Palembang melalui peningkatan dukungan dan kerjasama serta komitmen penuh dari setiap unit terkait untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat terkait pengawasan, penindakan, pemberian informasi serta jaminan keamanan obat dan makanan, antara lain :

1. Pemanfaatan dunia digital secara maksimal dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, antara lain fasilitas website/subsite Balai Besar POM di Palembang yang *terupdate*, media social (WhatsApp, website, Instagram, X, Facebook, Youtube dan WA blast), media cetak (media koran lokal) dan media elektronik (televisi and radio).
2. Aktif melakukan pemberian informasi terkait obat dan makanan sesuai permintaan stakeholder dan mengangkat isu-isu terkini, seperti topik terkait Keamanan pangan, Tata Cara Registrasi Pangan Olahan yang Baik, Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Iklan Kosmetik yang baik dan lainnya.
3. Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait isu–isu terkini yang terjadi di masyarakat seperti Sirup Obat Aman, Cikibul dan penggunaan Nitrogen cair pada makanan, pangan impor yang mengandung bakteri E-Coli,

Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Kosmetik mengandung merkuri, Bahan Berbahaya pada pangan, Antimicrobial Resistensi (AMR), Ayo buang sampah Obat, Penggunaan Obat secara rasional, P4GN dan Stunting

4. Adanya Tim KIE Balai Besar POM di Palembang yang mampu membuat desain serta tampilan informasi di media sosial yang menarik, informatif, Kekinian dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan *follower* dan *engagement* media sosial Palembang
5. Tersedia layanan email maupun WhatsApp juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan pengaduan masyarakat. Meningkatkan intensifikasi KIE kepada masyarakat serta penyediaan layanan dengan pemanfaatan media sosial secara maksimal seperti tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM, Halo BPOM, website, dan alamat media sosial Balai Besar POM di Palembang.
6. Pemberian layanan publik yang sesuai standar *Service Level of Agreement* (SLA), meliputi pelayanan pengujian pihak ketiga yang tepat waktu, penyelesaian SKI/ SKE kurang dari 1 hari pelayanan (rata-rata 6 jam pelayanan untuk SKI dan 8 jam pelayanan untuk SKE)

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan antara lain;

1. Pembaharuan data sarana dan produk yang akan diawasi, serta merencanakan kegiatan pada awal tahun secara proporsional dalam mengawasi semua produk Obat dan Makanan.
2. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan setiap akhir bulan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pada kegiatan bulan berikutnya hingga akhir tahun.
3. Melibatkan Lintas Sektor terkait Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal.
4. Melibatkan media cetak dan televisi untuk membantu menyebarkan informasi hasil pengawasan seperti aksi pemberantasan kosmetik ilegal, kegiatan intensifikasi pangan hari besar keagamaan.

5. Melaksanakan MoU dengan organisasi kemasyarakatan & organisasi lainnya seperti Universitas Sriwijaya sebagai perpanjangan tangan BPOM dalam meningkatkan cakupan penyebaran Informasi, komunikasi, dan edukasi serta Pengawasan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	95	95,9	100,95	

Tabel 3.1.20
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 9.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2024 sebesar 95,9% dari target 95%. Capaian yang didapatkan sebesar 100,95% masuk dalam kategori capaian **sangat baik,** dengan kategori mutu pelayanan A (sangat baik). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diukur menggunakan 9 unsur penilaian sesuai dengan jenis layanan yang didapatkan oleh konsumen. Rincian penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Unsur Pelayanan		Nilai
U1	Persyaratan	96,81
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95,74
U3	Waktu Penyelesaian	96,57
U4	Biaya/Tarif	96,99
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,45
U6	Kompetensi Pelaksana	95,92
U7	Perilaku Pelaksana	97,34

Unsur Pelayanan		Nilai
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,81
U9	Sarana dan Prasarana	90,43
Nilai SKM Unit Layanan		**95,90**

Gambar 3.1.21
Nilai SKM berdasarkan Unsur Pelayanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	100	97,62	96,83	100	97,62	95,24	97,62	95,24	85,71	**96,21**
Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	98,15	85,19	96,91	92,59	94,44	92,59	92,59	92,59	100	**93.90**
Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	100	88,89	100	97,22	97,22	94,44	94,44	91,67	100	**95,99**
Sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	91,67	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	100	91,67	83,33	**87,04**
Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	100	98,89	100	100	100	100	100	100	98,89	**99,75**
Pengujian Obat dan Makanan	95,04	97,16	95,27	97,16	96,10	95,39	97,52	97,52	84,40	**95,06**
Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	95,24	100	97,62	95,24	95,24	100	97,62	97,62	97,62	**97,35**

Gambar 3.1.22
Nilai SKM Per Layanan

Dari rincian penilaian tersebut dapat dilihat bahwa unsur perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi (97,34) dan unsur sarana prasarana mendapatkan nilai terendah (90,43). Untuk jenis layanan, layanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu layanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) sebesar 100, sedangkan layanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika mendapatkan penilaian terendah (87,04).

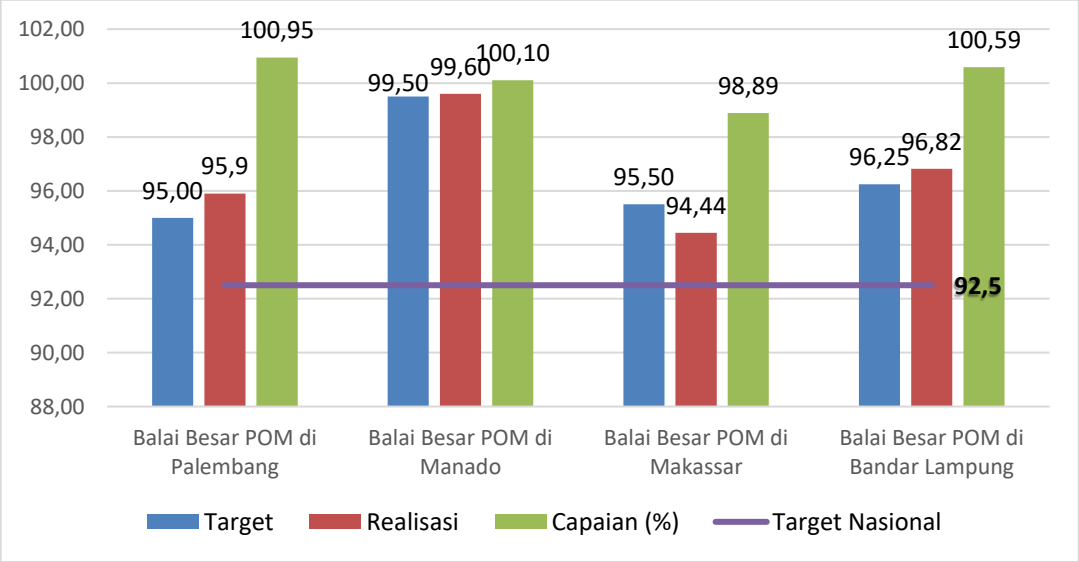
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
89,5	91,74	102,50	91,75	92,21	100,50	92	90,93	98,84	92,5	94,45	102,11	95	95,9	100,95

Tabel 3.1.23
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 9

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2023, 2022, 2021, 2020, di mana realisasi 2020 sebesar 91,74 dari target sebesar 89,50 dengan capaian sebesar 102,50% (Baik), realisasi 2021 sebesar 92,21 dari target sebesar 91,75 dengan pencapaian sebesar 100,05% (Baik), realisasi pada tahun 2022 sebesar 90,93 dari target sebesar 92,00 dengan pencapaian sebesar 98,84% (Baik), realisasi 2023 sebesar 94,45 dari target 92,50 dengan pencapaian sebesar 102,11% (Baik) dan untuk tahun 2024 realisasi tercapai sebesar 95,90 dari target sebesar 95,00 dengan capaian sebesar 100,95% (Baik).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.10
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pad Klaster 3 IKU 9.

Realisasi keempat UPT sudah baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik masuk dalam kategori A (mutu pelayanan), namun salah satu UPT belum mencapai target yaitu BBPOM di Makassar. Untuk persentase capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palembang tahun 2024 paling tinggi dibandingkan dengan ketiga UPT lainnya. Sedangkan untuk realisasi tertinggi didapatkan oleh BBPOM di Manado sebesar 99,60 dan untuk BBPOM di Palembang (95,9) berada di posisi

ketiga di bawah BBPOM di Bandar Lampung (96,82) serta di atas BBPOM di Makassar (94,44). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 92,5, seluruh UPT pada klaster 3 sudah melampaui target tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab keberhasilan :

a. Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang beserta seluruh pegawai dalam menciptakan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang kepada masyarakat yang lebih luas
b. Peningkatan kenyamanan area pelayanan bagi pelanggan dalam upaya pemenuhan harapan masyarakat.
c. Tersedianya fasilitas bermain anak dan laktasi bagi ibu menyusui serta coffe corner bagi pelanggan
d. Tersedianya nomor antrian secara elektronik dan terpisah untuk setiap jenis layanan
e. Tersedianya fasilitas bagi tamu difabel antara lain kursi roda, jalur masuk, tempat parkir mobil khusus, toilet khusus dan meja layanan terpisah

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

a. Meningkatkan komptensi petugas layanan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
b. Meningkatkan implementasi dan pengembangan inovasi yang menunjang peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
c. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana di ruang pelayanan untuk memberikan suasana yang menyenangkan dan nyaman bagi konsumen
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Palembang dalam upaya memenuhi saran, kritik dan masukan serta harapan dari pelanggan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Layanan publik di BBPOM Palembang sudah terselenggara dengan baik dengan melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap triwulan dan melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan.
2. Dalam pemberian layanan kepada konsumen, unsur penilaian yang paling baik ialah perilaku pelaksana/petugas layanan, sehingga budaya pelayanan tetap dilaksanakan secara optimal oleh seluruh petugas.
3. Kompetensi pelaksana sudah baik sehingga pelaksana layanan yang berkompeten dapat memberikan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Penambahan produk jenis layanan BBPOM di Palembang yang semula hanya 3 (tiga) jenis layanan menjadi 9 (sembilan) layanan dalam standar pelayanan terbaru yang terdiri dari layanan penerbitan SKI, SKE, sertifikasi CDOB, CPKB, CPOTB, penerbitan rekomendasi pemohon notifikasi, penerbitan izin penerapan CPPOB, pengujian, dan layanan pengaduan konsultasi.
5. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilakukan dengan responsif sehingga waktu penyelesaian layanan tersebut bisa lebih cepat dilakukan.
6. Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana layanan publik terutama untuk layanan yang belum terpenuhi untuk kelompok rentan.
7. Pengawalan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang juga terhubung langsung dengan survei indeks persepsi anti korupsi untuk mendukung zona integritas dalam paradigma reformasi birokrasi.

4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur melalui 8 (delapan) indikator. Dari perhitungan 8 indikator tersebut diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 105,07%. Dari 8 indikator tersebut, terdapat 1 indikator yang nilai capaiannya dapat dikonversi dari 100% menjadi 120% yaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Konversi tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama pada tanggal 15 Januari 2025 No : PR.09.03.2.01.25.42 perihal ketentuan pengukuran kinerja tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Kepala

BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Nilai konversi tersebut berpengaruh pada nilai pencapaian sasaran, namun pembahasan capaian per indikator akan disajikan dengan nilai sebelum konversi. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut:

10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	

Tabel 3.1.24
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 10.

Indikator kinerja untuk target tahunan tidak mengalami perubahan sejak awal tahun yaitu sebesar 100%, untuk perhitungan indikator kinerja meliputi 4 (empat) parameter perhitungan yaitu keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain dan rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target tahun 2024 adalah 100,00%, dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehinga capaian IKU ini sebesar 100% dengan kategori **Baik.**

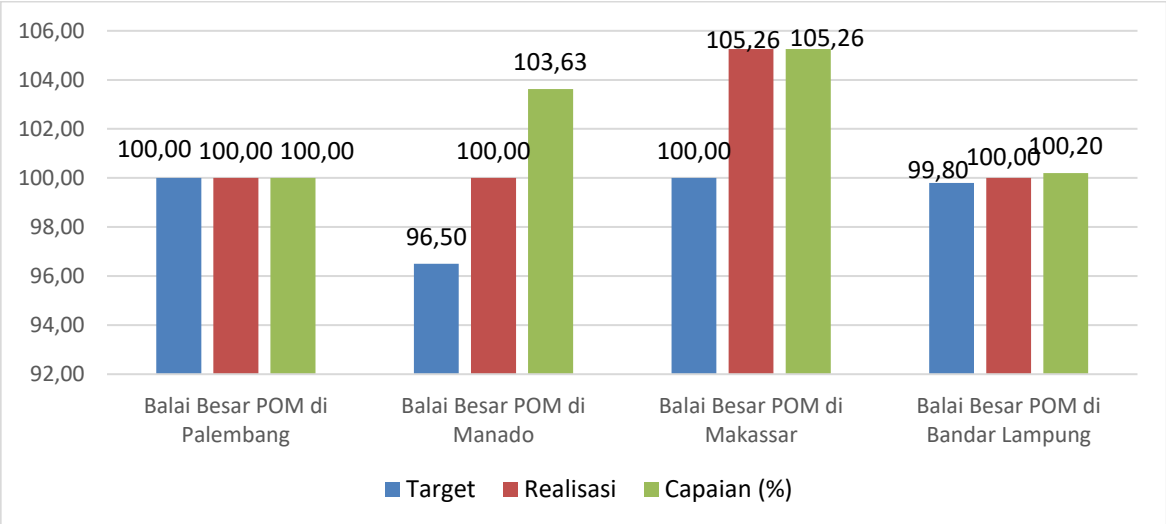
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
87	98,87	113,64	99	99,10	100,10	99,5	89,09	89,54	100	100	100,00	100	100	100,00

Gambar 3.1.25
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja UPT Periode Renstra 2020-2024 IKU 10.

Realisasi indikator untuk Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang di mana realisasi 2020 sebesar 98,87 dari target sebesar 87,00 dengan capaian sebesar 113,64% (Baik), realisasi 2021 sebesar 99,10 dari target sebesar 99,00 dengan pencapaian sebesar 100,10% (Baik), realisasi pada tahun 2022 sebesar 89,09 dari target sebesar 99,50 dengan pencapaian sebesar 89,54 %(Baik), realisasi 2023 sebesar 100 dari target 100 dengan pencapaian sebesar 100,00% , dan untuk tahun 2024 realisasi tercapai sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% (Baik).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.11
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 10.

Realisasi kinerja persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi saran produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 100% sama dengan realisasi BBPOM di Manado dan BBPOM di Bandar

Lampung, sedangkan realisasi BBPOM di Makassar tertinggi yaitu sebesar 105,26%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan pada tahun 2024 tidak dilakukan pengendalian secara berkala
2. Masih kurangnya kepatuhan petugas dalam membuat keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara tepat waktu karena pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana dilakukan pada akhir bulan sehingga surat tindak lanjut/rekomendasi dibuat oleh petugas pada bulan berikutnya sehingga terhitung realisasi TW berikutnya.
3. Masih kurangnya feed back/tindaklanjut hasil pemeriksaan dari pelaku usaha dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan balai oleh pihak Dinas Kesehatan kab/kota
4. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.

Upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan:

1. Melakukan mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan kegiatan
2. Meningkatkan kepatuhan petugas dalam membuat keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara tepat waktu karena pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana dilakukan pada akhir bulan sehingga surat tindak lanjut/rekomendasi dibuat oleh petugas pada bulan berikutnya sehingga terhitung realisasi TW berikutnya.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap feed back/tindaklanjut hasil pemeriksaan dari pelaku usaha dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan balai oleh pihak Dinas Kesehatan kab/kota

4. Melakukan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1) Adanya tools berupa web SiLisaMesra yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tool untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjut
2) Meningkatkan kepatuhan petugas dalam membuat keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara tepat waktu dengan cara monitoring dan evaluasi secara intensif.
3) Meningkatkatnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan perbaikan hasil pemeriksaan (CAPA) kepada petugas.
4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
5) Koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada pihak Dinas Kesehatan kab/kota dan pelaku usaha untuk menyampaikan perbaikan/tindak lanjut ke Balai
6) Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan

11. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	78,16	104,21	

Gambar 3.1.26
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 11.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan

tanggungjawab terhadap sarana. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara
lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi,
sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perhitungan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan :

$$\frac{(A+B)}{2}$$

Dengan rincian sebagai berikut :

$$A = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diTL\ oleh\ pelaku\ usaha}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ pelaku\ usaha}\ x\ 100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diTL\ oleh\ lintas\ sektor}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ lintas\ sektor}\ x\ 100\%$$

Surat tindak lanjut yang disampaikan pihak BBPOM di Palembang kepada pemangku kepentingan adalah sebanyak 609 keputusan/rekomendasi dan kemudian tindaklanjut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan adalah sebanyak 476 keputusan (78,16%). Jika dibandingkan dengan target sebesar

75% dimana capaiannya adalah sebesar 104,21% masuk dalam kategori **sangat baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

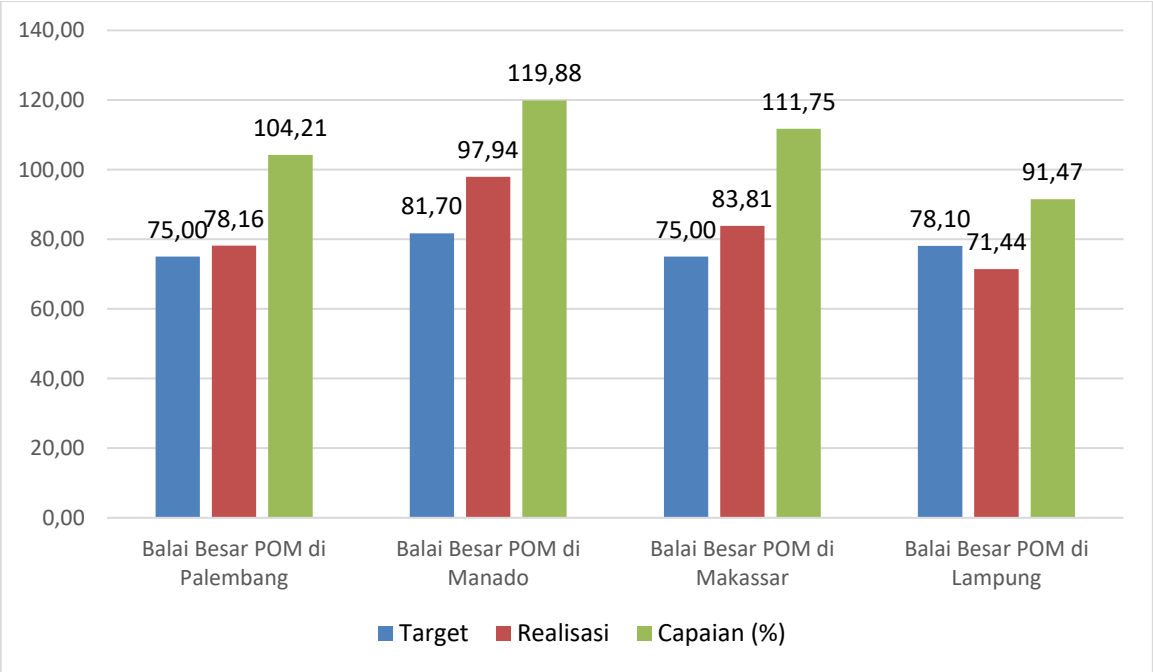
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
55	63,76	115,93	60	64,29	107,15	65	41,09	63,22	70	78,66	112,37	75	78,16	104,21

Gambar 3.1.27
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 11.

Dari data 5 (lima) tahun terakhir di atas bahwa di tahun 2022 tidak tercapai realisasi (dibawah 100%) dimana capaiannya yaitu sebesar 63,23% (target 65%, realisasi 41,90%) sedangkan apda tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024 telah tercapai realisasi di atas 100%.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2022 untuk mencapai target belum maksimal dan dilakukan perbaikan strategi pada tahun-tahun berikutnya. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan cara membuat surat kepada pelaku usaha/dinas kesehatan lab/kota yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan/rekomendasi hasil pemeriksaan, melakukan komunikasi yang lebih aktif kepada pihak terkait yaitu pelaku usaha dan dinas kesehatan kab/kota serta Propinsi untuk melakukan tindak lanjut atas keputusan/rekomendasi yang sudah disampaikan berupa CAPA (Corrective Action Preventive Action) serta dibuat WA grup untuk memudahkan dalam koordinasi disamping itu juga kordinasi dilakukan ketika pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas di kab/kota pada sarana-sarana yang belum menyampaikan CAPA.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.12
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 11.

Realisasi kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 78,16% lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 71,44%. Sedangkan realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Manado sebesar 97,94% diikuti oleh BBPOM di Makassar sebesar 83,81%. Sedangkan data perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap capaian kinerja BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Makasar dan BBPOM di Lampung adalah bahwa BBPOM di Palembang, Manado dan Makasar dalam kategori Sangat Baik (capaian di atas 100%) yaitu 104,21%; 119,88%; 111,75% dan 91,47%. Dari capaian dari masin-masing UPT di atas bahwa capaian tertinggi adalah BBPOM di Makasar yaitu 119,88% dan yang terendah adalah BBPOM di Lampung yaitu 91,47%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan kinerja didukung oleh**:**

- Adanya monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten / Kota serta pelaku usaha yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM di Palembang.
- Adanya sarana komunikasi yang efektif yaitu melalui WA Group BBPOM di Palembang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi.

Penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sbb:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang lebih intensif dan konsisten kepada pemangku kepentingan agar tercapai dengan baik target kinerja setiap triwulannya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkelanjutan untuk pengawalan capaian kinerja kegiatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan / merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikaan.
- Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di Kabupaten / Kota terkait.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	

Tabel 3.1.28
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 12.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

1. Rekomendasi / keputusan pemenuhan CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran kosmetik
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e.sertifikasi.pom.go.id* untuk produsen pangan olahan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil dengan risiko produk rendah dan sedang
6. Hasil pemeriksaan dalam rangka sertifikasi penerbitan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA / evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
7. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran

8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi dan resertifikasi CDOB
9. Surat Hasil Pemeriksaan obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk import Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
11. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan
12. Sertifikasi (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian / Lembaga lain, pelaku usaha, dll)

    Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk point a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

    Untuk perhitungan hingga keputusan MK/TMK apabila ada perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan di tahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n + 1

    Persentase penilaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$= \frac{Jumlah\ keputusan\ penilaian\ sertifikasi\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ permohonan\ sertifikasi}\ x\ 100\%$$

    Dengan catatan :

    ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya

    ✓ Untuk permohonan sertifikasi di bulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Pada tahun 2024, capaian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dengan jumlah permohonan 460, dengan target 100% dan realisasi 100% masuk kategori **baik**.

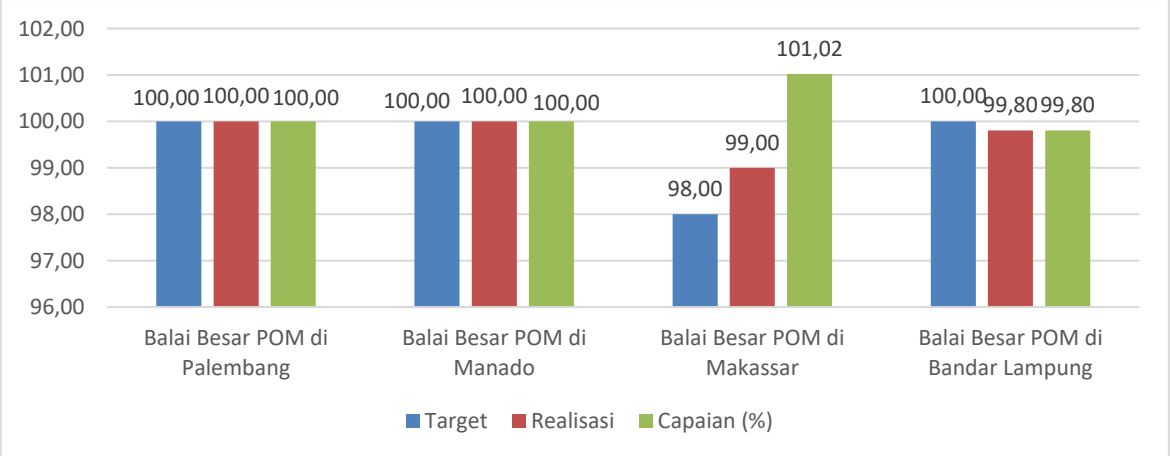
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2024			2024			2024			2024			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
85	100	117,65	100	99,84	99,84	100,00	100	100	100	99,78	99,78	100	100	100

Gambar 3.1.29
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IK 12.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dalam rentang waktu tahun 2020 - 2024 hampir 100% tetapi pada tahun 2021 sebesar 99,84% dan tahun 2023 sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian yang didapatkan pada tahun 2020 sebesar 117,65%, 2021 sebesar 99,84%, 2022 sebesar 100%, 2023 sebesar 99,78% dan 2024 sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.13
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IK 12.

Berdasarkan grafik di atas, realisasi kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 100% sama dengan realisasi BBPOM di Manado, disusul oleh BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,8% dan realisasi terendah yaitu BBPOM di Makassar sebesar 99%. Sedangkan capaian kinerja persentase indikator

persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar sebesar 101,02%, disusul BBPOM di Palembang dan BBPOM di Manado sebesar 100% sedangkan capaian terendah adalah Balai Besar POM Lampung yaitu sebesar 99,8%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan kinerja tahun 2024 dalam persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi yang baik antar petugas BBPOM di Palembang dengan berbagai pihak terkait antara lain :

1. Komunikasi dengan Pusdatin Badan POM jika ada kendala website sertifikasi, *ebpom.pom.go.id*, *eregrba.pom.go.id, asrot.pom.go.id, notifkos.pom.id, sertifikasicdob.pom.go.id* dan website layanan yang lain sehingga jika pelaku usaha bertanya, petugas akan memberikan respon yang cepat, akurat dan tidak mengganggu proses pengajuan permohonan dari pihak pelaku usaha.
2. Sebagai fasilitator antara evaluator/verifikator pusat dengan pelaku usaha terkait pengajuan permohonan izin edar/ sertifikasi/ rekomendasi yang dilakukan pelaku usaha UMK sehingga ketika ada penambahan data tersampaikan dengan baik dan tidak ada mispersepsi terhadap hasil evaluasi yang disampaikan oleh petugas pusat kepada pelaku usaha.
3. Tidak adanya notifikasi pengajuan permohonan untuk layanan SKI/ SKE membuat petugas harus secara rutin membuka aplikasi tersebut secara berkala sehingga jika ada pengajuan tidak melebihi SLA yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut petugas sertifikasi selalu menjalin komunikasi dengan pelaku usaha pemohon SKI/ SKE untuk memberitahu petugas jika pelaku usaha melakukan permohonan SKI/ SKE sehingga jika petugas sertifikasi bisa melakukan evaluasi dan masih masuk dalam SLA yang ditetapkan.

   Beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu

1. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha yang lebih intensif untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
2. Penggunaan sistem elektronik menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang tidak paham baik keterkaitan integrasi sistem OSS dengan sistem Badan POM maupun cara penggunaan sistem elektronik itu sendiri.
3. Jaringan Internet yang sering bermasalah pada pelaku usaha juga menjadi kendala dalam pengajuan permohonan sertifikasi Badan POM.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2024 seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilaksanakan secara *on site*. Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena dengan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha informasi-informasi yang diberikan tersampaikan dengan baik dan pelaku usaha lebih memahami secara jelas informasi yang disampaikan terutama untuk pelaku usaha kategori mikro dan kecil. Selain itu juga diberikan layanan tatap muka di Balai Besar POM di Palembang jika pelaku usaha yang sudah diperiksa ingin menanyakan terkait hasil temuan atau hasil evaluasi pemeriksaan. Komunikasi dua arah secara langsung ini sangat membantu dalam keberhasilan tercapainya target keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai Besar POM di Palembang. Pelaksanaan audit dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) diprioritaskan untuk Usaha Menengah dan Besar, sedangkan untuk usaha Mikro kecil pelaksanaan audit dilakukan setelah Sertifikat IP CPPOB terbit dan diberikan waktu selama 12 bulan setelah sertifikat terbit untuk dilaksanakan audit. Hal ini juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemenuhan target sertifikasi/ rekomendasi yang dilaksanakan oleh BBPOM di Palembang secara tepat waktu, karena selama 12 bulan berjalan pelaku usaha UMK masih punya kesempatan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM baik secara dokumen maupun sarana prasarana. Untuk Sertifikasi/ Resertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) semuanya sesuai dengan *timeline* yaitu 49 Hari Kerja dimulai dari pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP sampai keluarnya sertifikat dengan metode *time to respond.* Sarana

Kosmetik dan OBA di wilayah Sumatera Selatan belum terlalu banyak yang melakukan permohonan sertifikasi ke Badan POM. Pada tahun 2024 hanya 2 produsen kosmetik dan OBA yang mendapatkan Persetujuan denah (Kosmetik) dan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara bertahap. Berdasarkan data pendampingan yang dilakukan, sebenarnya cukup banyak Produsen Kosmetik dan Obat Bahan Alam di Sumsel tetapi beberapa pelaku usaha tersebut belum bisa memenuhi persyaratan sarana prasana yang ditetapkan oleh Badan POM.

Layanan Sertifikat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) melalui ebpom.go.id terlaksana dengan baik meskipun masih ada beberapa produsen yang tidak memenuhi persyaratan dokumen yang ditetapkan diantaranya dokumen CoA yang tidak sesuai dengan masa berlaku, CoA tidak sesuai dengan produk yang diimpor, dan adanya kesalahan tujuan di surat permohonan. Untuk timeline penyelesaian evaluasi sudah sesuai yaitu untuk SKI semua di bawah 6 jam dan untuk SKE di bawah 8 jam. Telah dilakukan penandatanganan secara elektronik pada dokumen Surat Keterangan Ekspor dari yang sebelumnya masih menggunakan tanda tangan konvensional.

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65,79	101,22	

Tabel 3.1.30
Perbandingan Target Realisasi Kinerja IKU 13.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Target\ Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diprioritaskan\ berdasarkan\ kajian\ risiko\ untuk\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

Sarana produksi yang dimaksud terdiri atas sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Target sarana produksi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan

penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat.
2. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
3. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / *track record* tidak memenuhi ketentuan, sarana yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa, dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Pada tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan sebanyak 152 sarana diperiksa dari target 136 sarana dengan hasil sebanyak 100 sarana Memenuhi Ketentuan dan 52 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga persentase sarana produksi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 di Balai Besar POM di Palembang sebesar 65,79%. Dengan demikian capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 101,22% dengan kategori sangat baik.

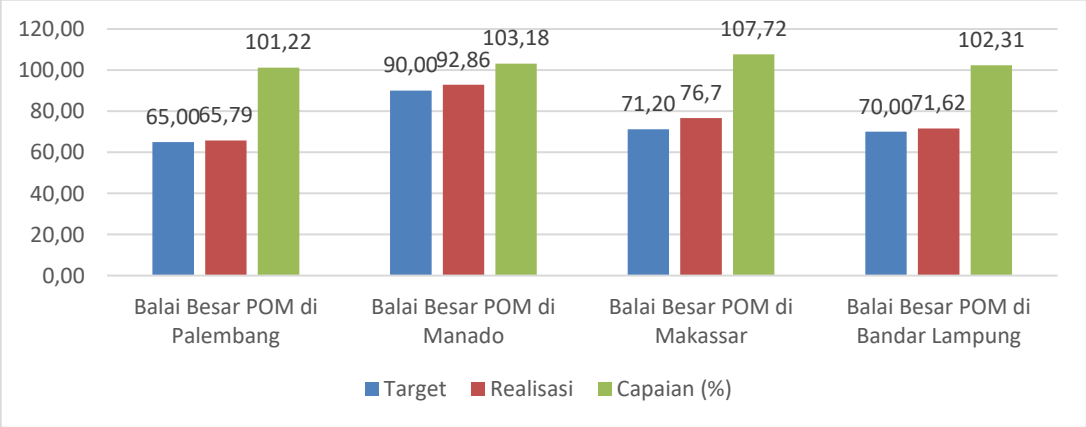
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
55	63,76	115,72	60	64,20	107,15	60	48,84	81,40	60	61,74	102,91	65	65,79	101,22

Tabel 3.1.31
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 13.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa target dan realisasi mengalami kenaikan dari 2020-2024, namun untuk capaian realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2020 dan 2021 dimana realisasi 2022 sebesar 48,84% dari target 60,00% dengan capaian 81,40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021, dimana realisasi 2020 sebesar 63,76% dari target sebesar 55,00% dengan capaian sebesar 115,72% dan realisasi 2021 sebesar 64,20% dari target sebesar 60,00% dengan pencapaian sebesar 107,15%. Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yaitu sebesar 65,79%. Indikator ini dapat dicapai dengan adanya peningkatan jumlah sarana produksi obat dan makanan dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Capaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan terhadap peraturan yang berlaku.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Tabel 3.1.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 13.

Berdasarkan grafik di atas, realisasi kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Palembang tahun 2024 paling rendah jika dibandingkan dengan 3 UPT pada klaster 3 yaitu sebesar 65,79%. Realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Manado yaitu sebesar 92,86%, diikuti oleh BBPOM di Makassar sebesar 76,7% dan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 71,62%. Sedangkan capaian kinerja persentase sarana prduksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Makasar (107,72%) diikuti Balai Besar POM

di Manado (103,18%) dan Balai Besar POM di Lampung (102,31%), sedangkan capaian terendah adalah Balai Besar POM di Palembang (101,22%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, didukung oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan yang berkesinambungan sehingga ketidaksesuaian dapat menurun.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

- Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana produkai Obat dan Makanan
- Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana produksi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.
- Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan pengawasan sarana dan pendampingan perbaikan CAPA dan tindak lanjut dari ketidaksesuaian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja antara lain :

- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan inspeksi sarana produksi obat dan makanan berdasarkan analisis risiko
- Membuat surat tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi obat dan makanan berdasarkan pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI
- Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan seperti Cara Produksi Obat yang Baik, Cara Produksi Kosmetik yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional

yang Baik, dan *Food Inspector* sehingga meningkatkan kompetensi SDM Balai Besar POM di Palembang.

- Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan
- Sosialisasi Cara Produksi Yang Baik kepada pelaku usaha produksi Obat dan Makanan seperti Cara Produksi Obat Yang Baik (CPOB), Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB), Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu obat dan makanan yang diproduksi.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Mengawal pengelolaan Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengawal mutu keamanan obat dan makanan

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,1	85,33	109,26	

Tabel 3.1.32
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 14.

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

% Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan =

$$\frac{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Target\ Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diprioritaskan\ berdasarkan\ kajian\ risiko\ untuk\ diperiksa} x\ 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat.
2. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
3. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / *track record* tidak memenuhi ketentuan, sarana yang tidak melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa, dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Pada tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 852 sarana diperiksa dari target 810 sarana dengan hasil sebanyak 727 sarana Memenuhi Ketentuan dan 125 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 di Balai Besar POM di Palembang sebesar 85,33%. Dengan demikian capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 109,26% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

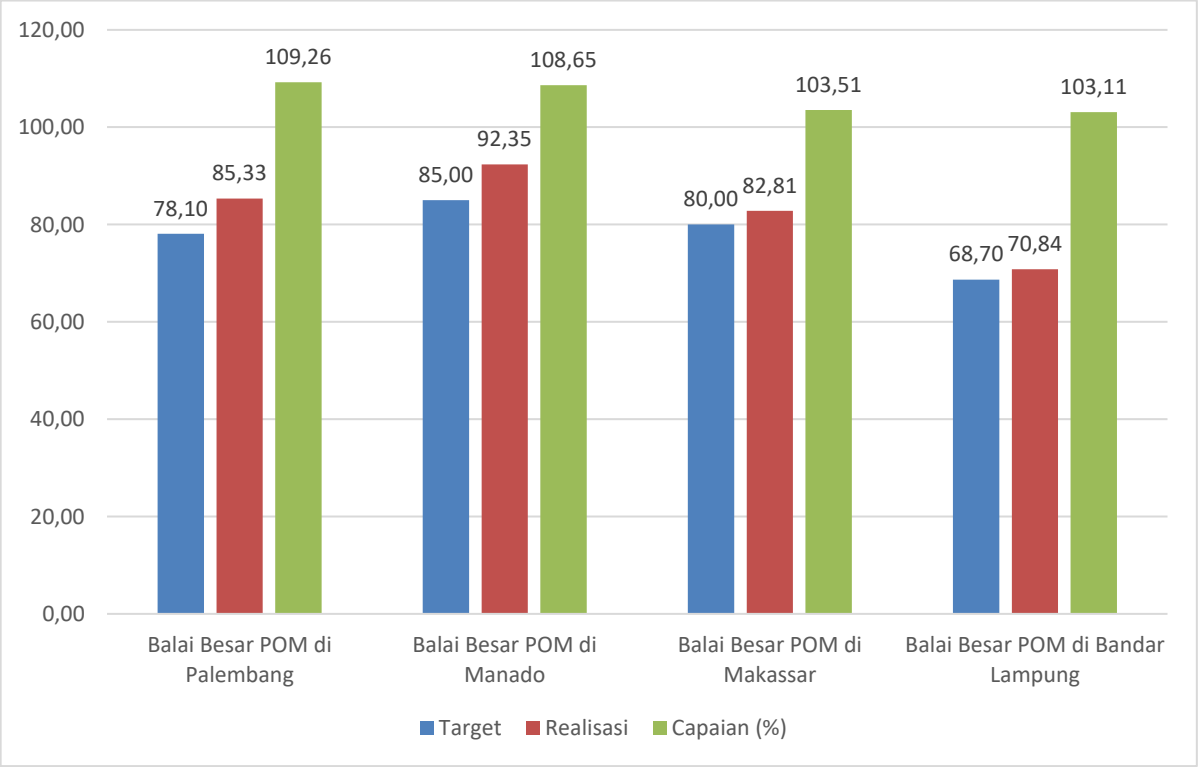
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
60	61,8	103,00	63	73,01	115,89	66	72,86	110,39	68	77,61	114,13	78,1	85,33	109,26

Tabel 3.1.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 14.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi mengalami kenaikan dari 2020-2024, hanya saja untuk capaian tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan capaian di tahun 2021, 2022, dan 2023 walaupun masih dalam kategori sangat baik yaitu sebesar 109,26%. Penurunan capaian ini diikuti dengan kenaikan target sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di tahun 2024 sebesar 78,1% dan realisasi sebesar 85,33%. Penyebab terjadinya penurunan capaian indikator di tahun 2024 ini adalah pola pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang didasarkan pada analisa risiko terhadap sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan di daerah perifer dan sarana distribusi dengan *track record* tertentu, sehingga hasil pengawasan didapatkan capaian menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketercapaian indikator tahun 2024 ini didapat dengan adanya peningkatan jumlah sarana dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan di sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian (Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, Klinik, dan Toko Obat), sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan sarana distribusi pangan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Capaian ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.15
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 14.

Berdasarkan grafik di atas, realisasi kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 85,33% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh oleh BBPOM di Makassar yaitu 82,81% dan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 70,84% dengan realisasi terendah, dan untuk BBPOM di Manado memiliki realisasi tertinggi sebesar 92,35%. Sedangkan perbandingan capaian kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Palembang sebesar 109,26% dengan realisasi sebesar 85,33% terhadap target sebesar 78,10%, diikuti Balai Besar POM di Manado dengan capaian sebesar 108,65% dan realisasi sebesar 92,25% terhadap target sebesar 85,00%, serta Balai Besar POM di Makasar dengan capaian sebesar 103,51% dan realisasi sebesar 82,81% terhadap target sebesar 80,00%. Untuk capaian terendah adalah Balai

Besar POM Lampung sebesar 103,11% dengan realisasi sebesar 70,84% terhadap target sebesar 68,70%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan telah dikendalikan melalui pengkinian sarana distribusi obat dan makanan secara rutin, berkala, dan berkesinambungan, serta dilakukan pendekatan secara persuasif kepada pelaku usaha agar proses pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan dapat berjalan dengan baik
2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam memahami ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketidaksesuaian semakin menurun.
3) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan, sehingga ketidaksesuain dapat menurun.
4) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK, sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, yang merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap potensi risiko petugas dituntut secara hukum oleh pelaku usaha
2) Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana distribusi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

3) Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan pengawasan sarana dan pendampingan perbaikan CAPA dan tindak lanjut dari ketidaksesuaian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja antara lain :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan inspeksi sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan analisis risiko
2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian berdasarkan pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI
3) Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA seperti Cara Distribusi Obat yang Baik, Cara Produksi Kosmetik yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, dan *Food Inspector* sehingga meningkatkan kompetensi SDM Balai Besar POM di Palembang.
4) Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan
5) Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Peraturan BPOM terkait pengawasan pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
6) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
7) Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, di mana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

8) Adanya jaringan komunikasi yang terbangun sangat baik, baik dengan lintas sektor, penanggung jawab sarana, serta pemilik sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait Obat dan Makanan.

15. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

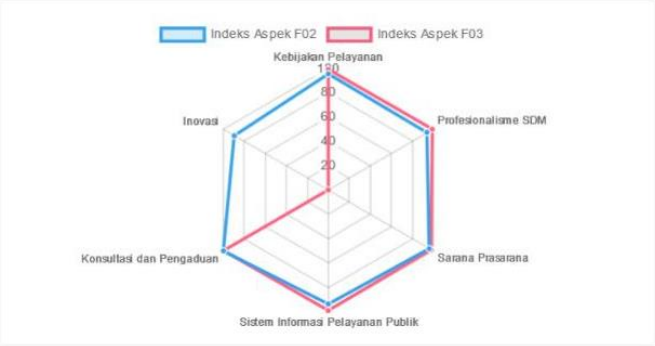
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,75	4,78	100,63	

Tabel 3.1.33
Perbandingan Target Realisasi Kinerja IKU 15.

Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2024 sebesar 4,78 dengan target 4,75. Capaian yang didapatkan sebesar 100,63% dengan kategori pelayanan publik prima. Tingkat efektifitas KIE terdiri dari 6 (enam) aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Setiap aspek penilaian mempunyai bobot persentase, sehingga dapat dilihat untuk perincian nilai sebagai berikut :

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BERDASARKAN PENILAIAN F02 & F03



Aspek	Batas Indeks Aspek F02	Indeks Aspek F02
Kebijakan Pelayanan	5	4.76
Profesionalisme SDM	5	4.7
Sarana Prasarana	5	4.8
Sistem Informasi Pelayanan Publik	5	4.7
Konsultasi dan Pengaduan	5	5
Inovasi	5	4.5

Dari data di atas dapat dilihat bahwa aspek inovasi mendapatkan nilai paling rendah, sehingga masih perlu ditingkatkan inovasi terkait layanan publik beserta monitoring dan evaluasinya.

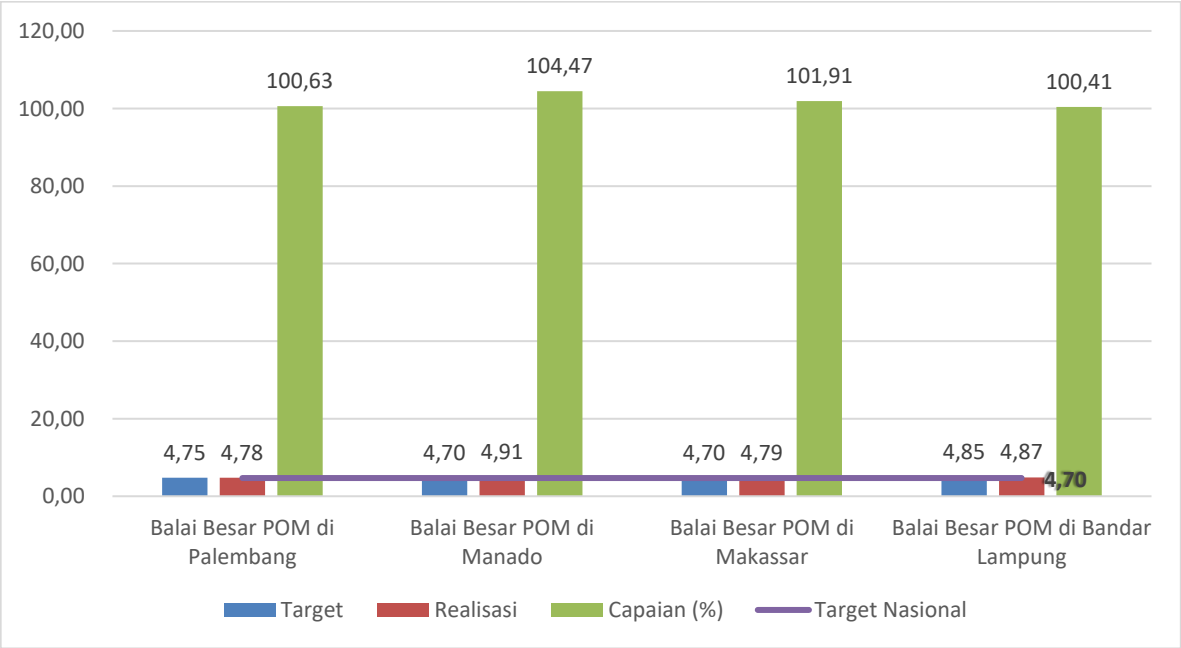
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
3,51	3,8	108,26	3,99	4,27	107,02	4,2	4,14	98,57	4,25	4,68	110,12	4,75	4,78	100,63

Tabel 3.1.34
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 15.

Capaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Palembang selama 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif, yaitu terjadi penurunan di tahun 2022 sehingga tidak mencapai target di tahun tersebut. Namun secara keseluruhan realisasi indeks pelayanan publik di bidang obat dan makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 3,8 pada tahun 2020 menjadi 4,78 pada tahun 2024. Capaian tertinggi pada indeks ini didapatkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 110,12%.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.16
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 15.

Capaian keempat UPT sudah sangat baik dengan melampaui target masing-masing dan layanan publik yang diberikan termasuk dalam kategori pelayanan prima. Untuk realisasi tertinggi didapatkan oleh BBPOM di Manado sebesar 4,91 sedangkan BBPOM di Palembang mendapatkan nilai terendah yaitu 4,78. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 4,70 semua UPT pada Klaster 3 sudah melampaui target tersebut. Sedangkan untuk persentase capaian indeks pelayanan publik di bidang obat dan makanan BBPOM di Palembang tahun 2024 berada di posisi ketiga (100,63%) dibandingkan dengan tiga UPT lainnya, yaitu di bawah BBPOM di Manado (104,47%) dan BBPOM di Makassar (101,91%) serta lebih besar dibandingkan BBPOM di Bandar Lampung (100,41%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab keberhasilan :

a. Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang beserta seluruh pegawai dalam menciptakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

a. Inovasi terkait pelayanan publik lebih ditingkatkan dan disebarluaskan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih besar manfaat yang dirasakan.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya layanan publik di BBPOM Palembang terselenggara dengan baik dengan kolaborasi antar fungsi, baik dari fungsi infokom, fungsi sertifikasi, dan fungsi tata usaha serta fungsi terkait lainnya.
2. Peningkatan inovasi terkait layanan publik khususnya inovasi yang dapat memberikan layanan dengan waktu yang lebih cepat, alur lebih singkat, dan terintegrasi.

3. Meminta saran dan masukan dari pelanggan terkait perbaikan komponen layanan publik, yaitu kebijakan layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem pelayanan, dan konsultasi pengaduan.
4. Peningkatan kompetensi pelaksana/petugas layanan publik secara berkelanjutan.
5. Standar layanan publik telah disosialisasikan dan dilakukan konsultasi publik kepada para stakeholder yang terdiri dari pelaku usaha, masyarakat, bidang pemerintahan terkait, akademisi, komunitas masyarakat, organisasi keprofesian, para media, dan ombudsman serta penerima layanan lainnya.
6. Layanan publik diberikan secara langsung kepada pelanggan sudah terlaksana rutin yang bertempat di kantor BBPOM di Palembang dan Mal Pelayanan Publik Kota Palembang.
7. Layanan publik yang diberikan secara tidak langsung dilakukan melalui berbagai media yaitu nomor telepon, email, nomor whatsapp, instagram, facebook, media X, dan link layanan konsultasi dan pengaduan lainnya.
8. Layanan publik yang prima merupakan salah satu kunci BBPOM di Palembang untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00	

Tabel 3.1.35
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 16.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.

2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:

a. Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
b. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan

Fasilitasi/ Pendampingan Balai Besar POM di Palembang dilakukan terhadap :

1. UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

2. UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

a. Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
b. Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
c. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

Perhitungan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dapat diperoleh dengan rumus :

$$\frac{(A+B+C)}{3}$$

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Realisasi Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/ Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik tahun 2024 sebesar 100% dengan kriteria "**Baik''**. Sebanyak 25 UMK yang didampingi telah memenuhi yang terdiri dari 21 UMK pangan, 2 UMK OBA dan 2 UMK Kosmetik. Rincian sebanyak 20 UMK pangan mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, 1 UMK pangan mendapatkan Izin edar Pangan Olahan, 2 UMK OBA mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, 1 UMK Kosmetik mendapatkan persetujuan denah, dan 1 UMK mendapatkan rekomendasi penotifikasi kosmetik.

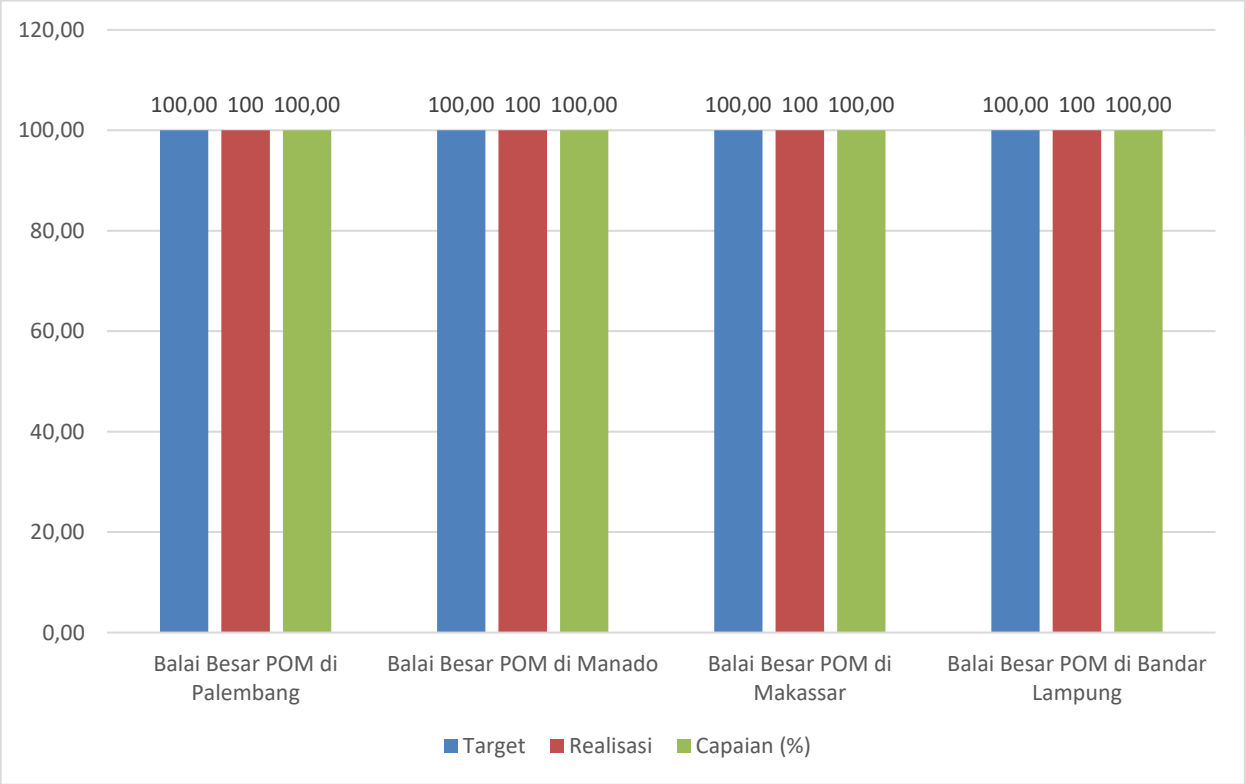
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
						77	90	116,88	79	80,16	101,47	100	100	100,00

Tabel 3.1.36
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Periode Renstra 2020-2024
IKU 16.

Persentase UMKM yang memenuhi standar masuk diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sejak 2022. Pada kurun waktu 2022 hingga 2024 terjadi penurunan capaian kinerja dari 116,88%, 101,47% hingga 100%, namun realisasi kinerja selalu meningkat setiap tahunnya, dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.17
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 16.

Dari keterangan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Manado, Balai Besar POM di Makassar dan Balai Besar POM di Bandar Lampung capaian realisasi semuanya sama yaitu 100% untuk indikator pendampingan UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan, OBA dan Kosmetik. Jika dibandingkan dengan target nasional BPOM sebesar 93% seluruh UPT pada klaster 3 telah melampaui target tersebut. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan tahun 2024 sudah sesuai target, tetapi jika dibandingkan dengan pendampingan dari tahun 2022 - 2023, pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase capaian.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Secara umum produsen Pangan Olahan yang wajib izin edar Badan POM, produsen OBA dan produsen Kosmetik cukup banyak di wilayah Sumatera

Selatan tetapi banyak yang tidak bisa melanjutkan proses permohonan sampai izin edar/ sertifikat produksi terbit disebabkan karena masih minimnya sarana prasarana yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan tidak sesuai dengan kriteria standar produksi yang ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini merupakan salah satu penyebab banyaknya pelaku usaha yang menunda permohonan izin edarnya ke Badan POM.

Jangkauan internet yang terbatas juga menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk melanjutkan permohonan izin edar/proses sertifikasi sarana produksi karena semua permohonan sudah berbasis digital dan semua dilakukan secara online. Untuk beberapa pelaku usaha ada yang mempercayakan akses online mereka kepada petugas sertifikasi Balai Besar POM di Palembang, tetapi ada juga yang lebih memilih pihak lain untuk diizinkan untuk mengakses akun onlinenya sehingga untuk yang terkendala jaringan internet dan tidak memberikan akses akunnya kepada petugas membuat kesulitan untuk melanjutkan permohonan dan akhirnya tidak melanjutkan permohonan tersebut. Dua faktor di atas menjadi kendala dalam kegiatan pendampingan UMK selama beberapa tahun ini. Untuk peningkatan capaian di tahun berikutnya akan disesuaikan dengan IKU yang ditetapkan pada periode tersebut, karena IKU ini tidak lagi diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja antara lain :

1. Komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan izin edar Badan POM, sehingga proses pendampingan yang dilakukan berjalan lancar sampai sertifikasi sarana produksi terbit (IP CPPOB, CPOTB bertahap, rekomendasi penotifikasi, pesetujuan denah produksi kosmetik).
2. Koordinasi antar petugas sertifikasi BBPOM di Palembang dengan verifikator atau evaluator pusat dalam proses pendampingan UMK Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.
3. Penetapan target UMK yang berpotensi untuk melanjutkan proses sertifikasi/izin edar dengan cara *gap assessment* dengan prioritas pemilihan berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan.

4. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMK Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik baik secara daring dan luring.
5. Menyiapkan template dokumen seperti *Standar operating Procedure (SOP)* untuk UMK sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dokumen teknis yang dibutuhkan saat permohonan sertifikasi/izin edar.
6. Peningkatan kompetensi petugas diantaranya ikut Bimbingan teknis fasilitator, pelatihan-pelatihan inspektur dan forum komunikasi antar fasilitator.

17. Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	100	105,26	

Tabel 3.1.38
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 17.

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota mencakup keterlibatan pada:

1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;

a. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.

b. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah

sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).

2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;

a. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

b. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

a. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

b. Peran UPT antara lain:

- menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
- pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
- monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan

  Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindak lanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain. Perhitungan keterlibatan UPT Provinsi/ Kab/ Kota (terdapat DAK) yaitu TKKPOM (30%), TPPS (10%), DAK (60%).

Pada tahun 2024, keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 100,00%. Dengan demikian capaian persentase keterlibatan UPT dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 105,26% dengan kategori **sangat baik**.

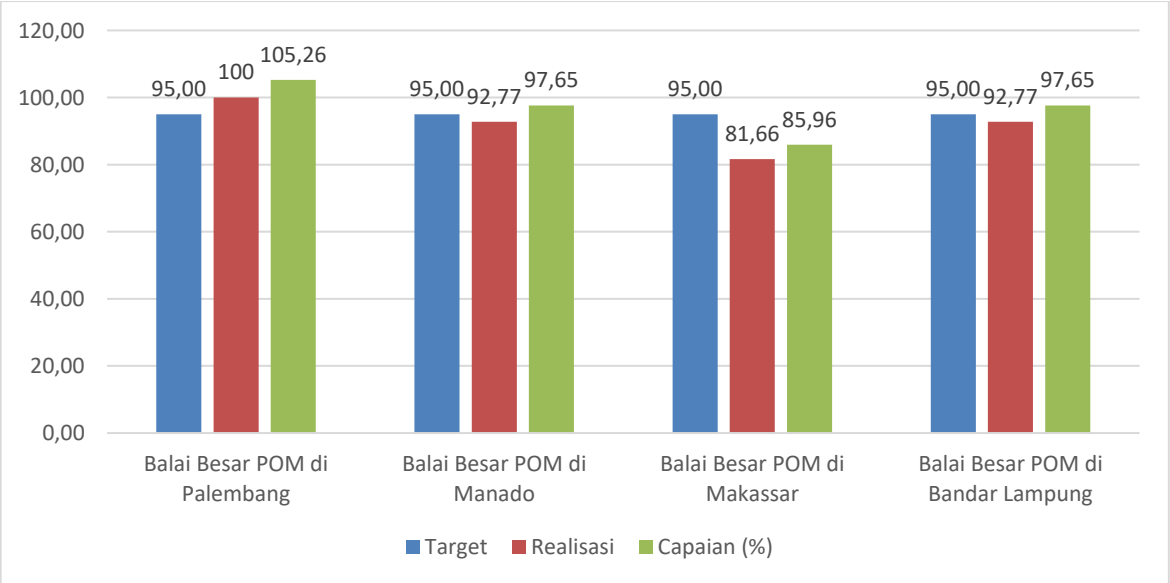
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
												95	100	105,26

Tabel 3.1.39
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 17.

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja periode Renstra 2020-2024, diketahui bahwa indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024 yang ditetapkan sebagai IKU. Realisasi BBPOM di Palembang tahun 2024 adalah 100, artinya BBPOM di Palembang terlibat aktif dalam setiap program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.18
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 17.

Berdasarkan grafik di atas, realisasi kinerja persentase keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2024 sebesar 100% paling tinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Manado 99,54%, BBPOM di Bandar Lampung sebesar 92,77%, dan terendah adalah BBPOM di Makassar sebesar 81,66%. Sedangkan capaian kinerja Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota (2024) tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Palembang (105,26%) dan terendah adalah Balai Besar POM di Makasar (85,96%) dengan kategori cukup. Untuk capaian Balai Besar POM di Manado (104,78%) dengan kategori sangat baik dan Balai Besar POM di Lampung (97,65%) dengan kategori cukup.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisa keberhasilan terhadap peningkatan kinerja adalah adanya hubungan, komunikasi, dan kerjasama yang baik, serta meningkatnya kesadaran Dinkes Kab/kota akan pentingnya pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk hasil dari mitigasi risiko terhadap potensi terjadinya penurunan/tidak tercapainya Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota (2024) tahun 2024, antara lain Balai Besar POM di Palembang sangat aktif dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan lintas sektor yang dilaksanakan dalam bentuk:

- Telah terbitnya SK tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di tingkat kabupaten/ kota di wilayah Sumatera Selatan.
- BPOM masuk sebagai anggota tim TPPS Provinsi Sumatera Selatan dan terlibat secara aktif.

- Adanya wa grup bagi tim TPPS Provinsi Sumatera Selatan dan wa grup Dinas Kesehatan kab/kota yang memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi terkait program-program kegiatan lintas kementerian.
- Monitoring dan evaluasi yang berjenjang dan berkelanjutan dalam pengawalan kegiatan- kegiatan mendukung stunting dan implementasi kegiatan DAK non fisik obat dan makanan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dilakukan berupa peningkatan komunikasi yang lebih baik dengan Dinkes Kabupaten/ Kota, pendampingan yang lebih intensif terhadap penerima Dana DAK NF POM TA 2024 antara lain dengan pendampingan kegiatan DAK agar berjalan sesuai dengan JUKOP. Serapan anggaran dan capaian output sesuai target. Komunikasi yang baik juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Dinas kesehatan kab /kota akan pentingnya terbentuk SK TKPPOM di daerah dan terlaksananya pengawasan sesuai kewenangan Dinkes/Kab/kota sesuai ketentuan. Komunikasi juga diintensifkan terhadap penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan pengujian pangan fortifikasi, adanya komunikasi terkait ke lintas sektor terhadap hasil uji garam di Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti, pembinaan UMKM garam, KIE kepada masyarakat terkait penggunaan pangan fortifikasi, serta aktif melakukan pengawalan kegiatan BOK Non Fisik Obat dan Makanan kepada Dinas Kesehatan kab/kota penerima.

5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator. Dari perhitungan 4 indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,02%. Hasil selengkapnya adalah berikut :

18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,9	98,99	100,09	

Tabel 3.1.40
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 18.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makananyang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi,Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
2) KIE langsung ke masyarakat; dan
3) KIE melalui media sosial

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2024 sebesar 98,99 dengan target 98,90. Capaian yang didapatkan sebesar 100,09% dengan kategori sangat efektif sekali. Tingkat efektifitas KIE terdiri dari 4 indikator penilaian yaitu ragam kegiatan, pemahaman, manfaat dan minat. Didapatkan nilai ragam kegiatan sebesar 99,17 ; pemahaman 99,32 ; manfaat 99,45 ; dan minat sebesar 97,18. Dari empat indikator tersebut keseluruhan penilaian sudah sangat baik. Untuk indikator minat lebih kecil dibandingkan indikator lainnya, dan di bawah nilai target 98,9. Hal tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini :

Indeks Efektifitas KIE BBPOM Di Palembang	
Rata-rata Penlaian	**Skala 100**
Ragam Kegiatan	99,17
Pemahaman	99,32

Manfaat	99,45
Minat	97,18
Indeks	**98,99**
Target	**98,95**
Capaian	**100,1%**

Gambar 3.1.41
Perhitungan Capaian Kinerja IKU 18

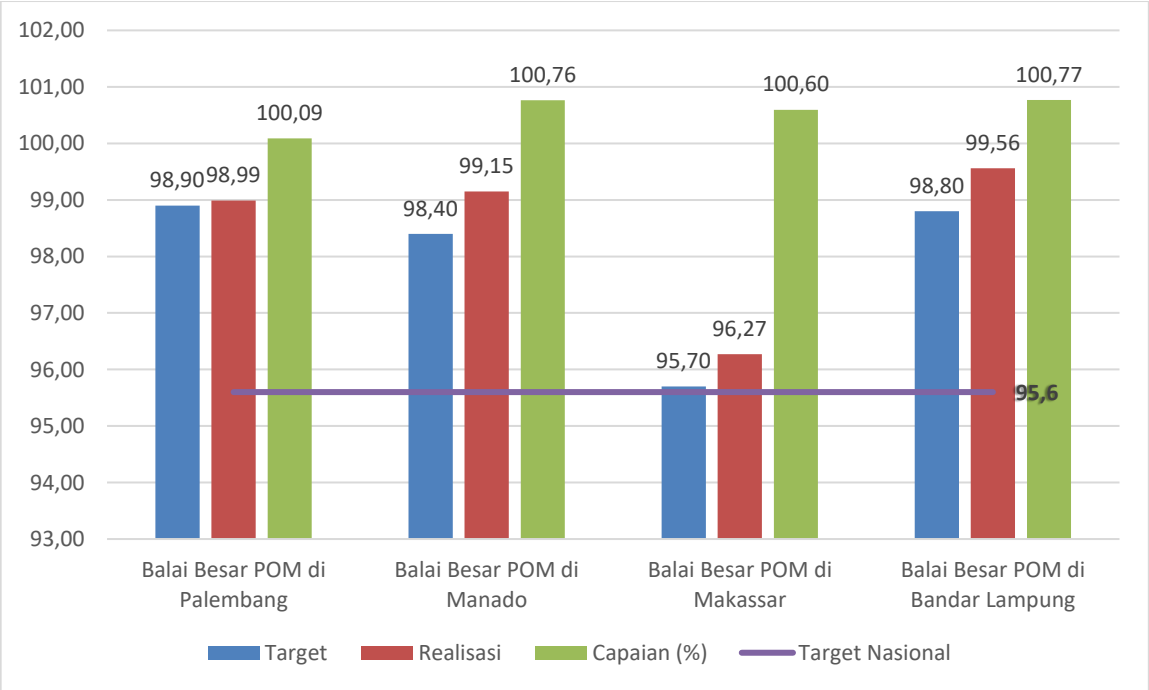
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
90,69	93,79	103,42	94	96,6	102,77	95,4	95,7	100,31	96,8	98,04	101,28	98,9	98,99	100,09

Tabel 3.1.42
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 18.

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Palembang selama 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif, yaitu terjadi sedikit penurunan di tahun 2022. Namun secara keseluruhan nilai efektifitas kie obat dan makanan mengalami kenaikan dari 93,79 pada tahun 2020 menjadi 98,99 pada tahun 2024, atau sebesar 5,2%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.19
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 18.

Capaian keempat UPT sudah sangat baik dengan melampaui target masing-masing, dan efektifitas KIE yang diberikan termasuk dalam kategori sangat efektif sekali. Untuk realisasi tertinggi didapatkan oleh BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,56 sedangkan BBPOM di Palembang (98,99) berada di posisi ketiga di bawah BBPOM di Manado (99,15) dan di atas BBPOM di Makassar (96,27). Jika dibandingkan dengan target nasional BPOM sebesar 95,6 maka seluruh UPT pada Klaster 3 telah melampaui target tersebut, bahkan target tiap UPT telah melewati target tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab keberhasilan :

a. Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan KIE Obat dan Makanan yang Efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang kepada masyarakat yang lebih luas

Penyempurnaan Kinerja ke Depan :

a. Survei efektifitas kie dapat dilakukan juga secara manual jika di tempat kegiatan untuk mengatasi hambatan tidak tersedia sinyal, internet atau faktor lainnya.

b. Pemberian masukan kepada penyelenggara survei terkait penyederhanaan pertanyaan agar sesuai dengan teknis di lapangan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Kegiatan KIE yang dilakukan tepat sasaran, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu caranya menyesuaikan KIE dengan permasalahan obat dan makanan yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
2. Penggunaan alat peraga seperti contoh sampel, sehingga kegiatan kie lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Pemenuhan komponen yang menjadi indikator penilaian survei atau kuisioner terkait efektifitas kegiatan kie yang diberikan.
4. Persiapan kegiatan dilakukan dengan baik dengan memperbaiki kekurangan / memecahkan kendala yang terjadi pada saat kegiatan kie yang sebelumnya.

19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97	97	100,00	

Tabel 3.1.43
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 19.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman yang diintervensi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun

2024 sebanyak 97 sekolah dengan capaian yang didapatkan sebesar 100,00%. Dalam realisasinya, indikator ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dari direktorat pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Indikator ini dapat mencapai target, jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sampai 100% dengan pembobotan sebagai berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Pembobotan
1	Advokasi	20%
2	Sosialisasi KP	10%
3	Bimtek Kader KP	15%
4	Pemberian Paket Edukasi	10%
5	Monitoring Pemberdayaan Kader KP	15%
6	Sertifikasi Sekolah	20%
7	Pengawalan	10%
Kumulatif Capaian		**100,0%**

Tabel 3.1.44
Pembobotan Tiap Tahapan Kegiatan Kemanan PJAS

Kegiatan dimulai dari tahapan advokasi bersama pemerintah kabupaten/kota yang diintervensi beserta lintas sektor terkait. Kegiatan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya berupa sosialisasi terkait keamanan pangan kepada perwakilan sekolah yang diintervensi maupun sekolah perluasan. Selain itu, dilakukan juga kegiatan bimbingan teknis kepada kader keamanan pangan sekolah yang bertugas untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan pangan kepada komunitas di sekolahnya. Kegiatan para kader tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan meninjau kelengkapan dokumen dan keadaan keamanan pjas di sekolahnya. Selanjutnya BBPOM di Palembang akan melakukan sertifikasi sekolah tersebut, dan sekolah akan mendapatkan sertifikat sekolah dengan pjas aman apabila sudah mencapai nilai yang ditentukan. Selain itu, dilakukan juga pemberian paket edukasi kepada sekolah yang diintervensi berupa produk promosi keamanan pangan, seperti leaflet, poster, buku panduan, banner, dan lain sebagainya. Pengawalan keamanan pangan juga dilakukan kepada seluruh sekolah yang telah diintervensi dari tahun 2020-2023.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

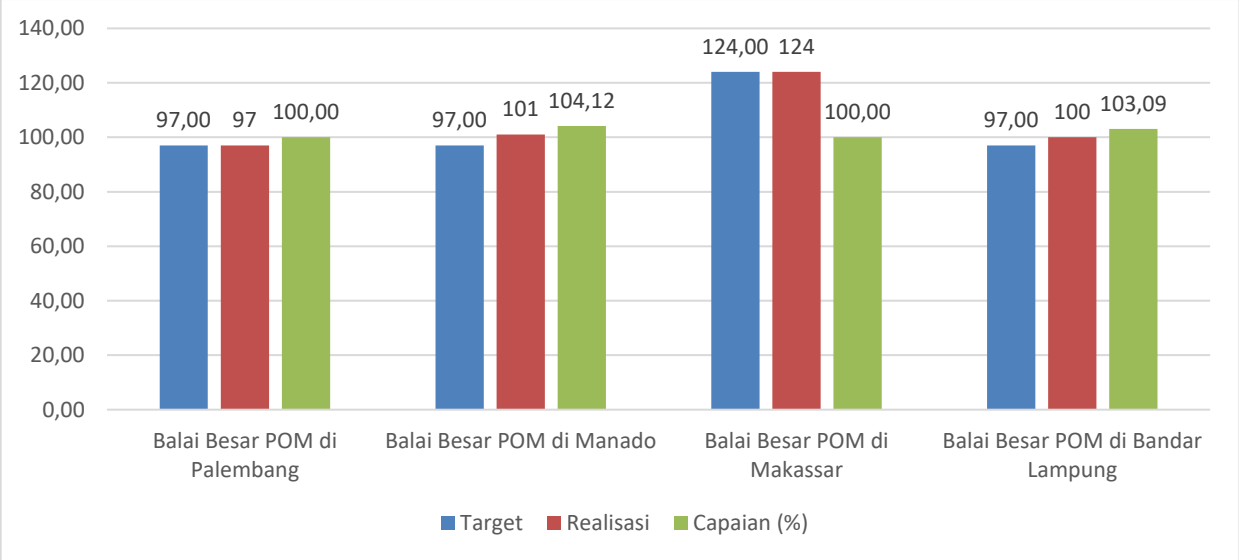
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
16	16	100,00	40	40	100,00	59	61	103,39%	77	77	100,00	97	97	100,00

Tabel 3.1.45
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 19.

Untuk realisasi Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Palembang akan selalu meningkat setiap tahunnya, karena target merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya. Selama 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun 2020 hingga 2024, BBPOM di Palembang telah mengintervensi 97 sekolah dan lebih dari ratusan sekolah perluasan yang diberi sosialisasi keamanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah yang diintervensi mulai dari setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas / setingkatnya. Rata-rata BBPOM di Palembang telah mengintervensi 19-20 sekolah setiap tahunnya selama 5 tahun periode renstra.

Pada tahun 2020-2021 capaian indikator optimal sebesar 100% dengan akumulasi sebanyak 40 sekolah. Pada tahun 2022 jumlah realisasi sekolah dengan PJAS aman sebanyak 61 sekolah dari target 59 sekolah, sehingga didapatkan capaian sebesar 103,39%. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi jumlah sekolah yg diintervensi dengan PJAS aman telah disesuaikan dengan jumlah akumulasi target 2020-2024 yaitu 97 sekolah dengan catatan 3 sekolah yg telah dilakukan intervensi pada tahun 2022 masuk dalam kegiatan pengawalan karena 3 sekolah tersebut sudah pernah diintervensi oleh BBPOM di Palembang pada tahun sebelumnya. Kemudian 3 sekolah yg baru telah ditambahkan dan diintervensi pada tahun 2023 dan 2024, sehingga target 97 sekolah telah tercapai.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.20
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 19.

Realisasi kinerja BBPOM di Palembang yaitu 97 sekolah, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan BBPOM di Bandar Lampung dengan realisasi 100 sekolah, dan BBPOM di Manado 101 sekolah serta BBPOM di Makassar sebanyak 124 sekolah. Kinerja keempat UPT sudah baik dengan capaian target masing-masing. Untuk persentase capaian jumlah sekolah dengan pjas aman BBPOM di Palembang sebesar 100%, sama dengan BBPOM di Makassar sedangkan BBPOM Di Manado dan BBPOM di Bandar Lampung telah melampaui target yang telah ditentukan (>100%).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

1. Penetapan target persentase tahapan kegiatan setiap bulan dan triwulan sudah mempertimbangkan timeline dari unit pengampu
2. Dilakukan efisiensi waktu dan biaya pada tahapan kegiatan karena lokus kab/kota yang dintervensi keamanan pangan tahun 2024 berada di area pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan jarak yang jauh.

3. Menjaga komitmen dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, dinas pendidikan, lintas sektor, dan tim sekolah yang diintervensi dengan sangat baik

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Tahapan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan dan timeline unit pengampu Direktorat PMPUPO.
2. Pelaporan kegiatan kepada unit pusat harus lebih disiplin dan tepat waktu yaitu sesuai format yang telah ditetapkan, dan kelengkapan data analisis yang diperlukan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Dokumentasi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor terkait saat kegiatan advokasi.
2. Perlu adanya inovasi yang berkaitan dengan kegiatan terpadu keamanan pangan, dan/ atau optimalisasi inovasi yang telah ada.
3. Menjelaskan program keamanan PJAS secara jelas kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk menekankan manfaat dan betapa pentingnya program ini.
4. Analisis data peningkatan PSP (pengetahuan, sikap, dan prilaku) kader dan peserta sosialisasi serta bimtek keamanan pangan dilakukan sesuai juknis.
5. Kegiatan monitoring dan sertifikasi dilakukan dengan baik melalui koordinasi dengan para kader keamanan pangan sekolah dan kepala sekolah.
6. Kegiatan pengawalan sekolah telah dilakukan secara rutin setiap tahun, sehingga penerapan keamanan pangan di sekolah tetap berkelanjutan.
7. Paket edukasi merupakan salah satu sarana edukasi keamanan pangan yang dibuat secara menarik dan diserahkan kepada masing-masing sekolah yang diintervensi.

20. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah desa pangan aman	32	32	100,00	

Tabel 3.1.46
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 20.

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Jumlah desa dengan pangan aman yang diintervensi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2024 sebanyak 32 desa/kelurahan dengan capaian yang didapatkan sebesar 100,00%. Dalam realisasinya, indikator ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dari direktorat pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Indikator ini dapat mencapai target, jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sampai 100% dengan pembobotan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Pembobotan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit, dan lain-lain	5%
3	Pelatihan KKPD	15%
4	Bimtek Komunitas	15%
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%
7	Pengawalan	10%
8	Monitoring dan Evaluasi	10%

9	Lomba Desa	5%
Kumulatif Capaian		**100,0%**

Tabel 3.1.47
Pembobotan tahapan kegiatan desa pangan aman

Kegiatan dimulai dari tahapan advokasi bersama pemerintah kabupaten/kota, lintas sektor terkait dan perangkat desa/kelurahan yang akan diintervensi. Tahapan selanjutnya berupa kegiatan pelatihan kader keamanan pangan desa (kkpd) yang bertugas untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan pangan kepada komunitas di desa/kelurahannya. Kader yang dilatih terdiri dari kader keluaraga, kader masyarakat, dan kader sekolah. Selanjutnya dilakukan bimbingan teknis keamanan pangan kepada komunitas atau masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari komunitas ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, komunitas warung/ritel, pangan siap saji, dan lainnya.

Kegiatan para kader tersebut akan dilanjutkan ke tahap fasilitasi dengan langsung mengecek keamanan pangan pada komunitasnya masing-masing. Selain itu, dilakukan juga intensifikasi keamanan pangan dengan mengambil sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan mengujinya dengan alat uji cepat yang telah diberikan. Setiap desa/kelurahan yang diintervensi telah diberikan produk informasi keamanan pangan berupa alat uji cepat beserta kelengkapannya, rompi kader, poster keamanan pangan dan lainnya. Pengawalan keamanan pangan juga dilakukan kepada desa/kelurahan yang telah diintervensi di tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

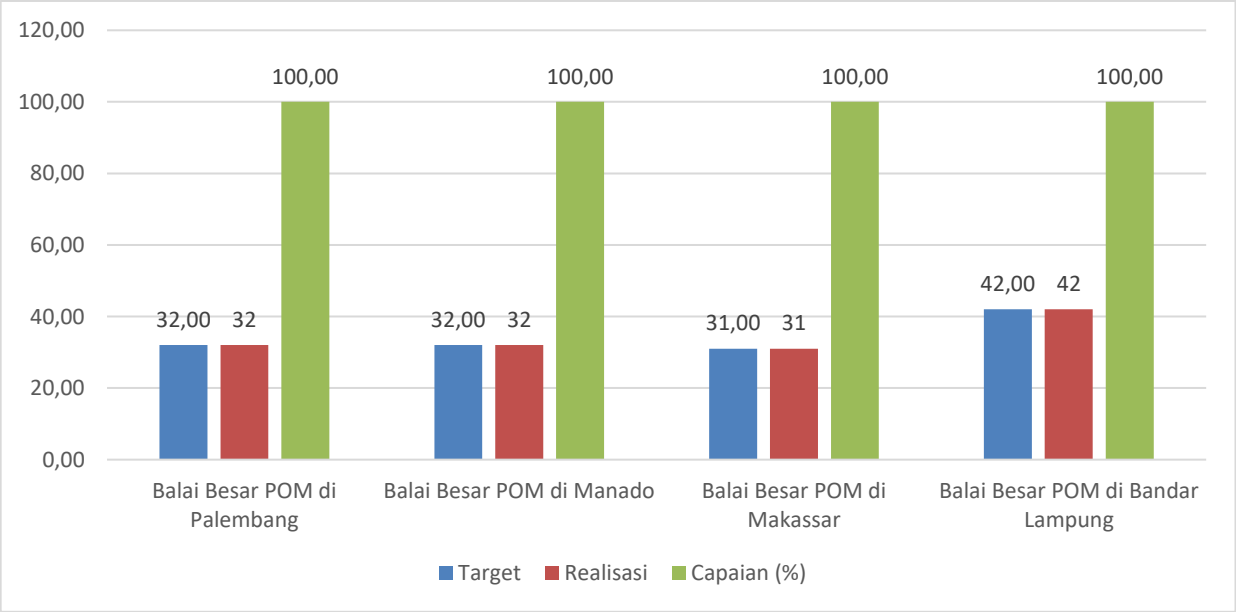
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
4	4	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00	25	25	100,00	32	32	100,00

Tabel 3.1.48
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 20.

Realisasi indikator desa dengan pangan aman yang diintervensi oleh BBPOM di Palembang akan selalu meningkat setiap tahunnya, karena target merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya. Selama 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun

2020 hingga 2024, BBPOM di Palembang telah mengintervensi 32 desa/kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata BBPOM di Palembang telah mengintervensi 6-7 desa/kelurahan setiap tahunnya selama 5 tahun periode renstra. Desa dengan pangan aman BBPOM di Palembang selama 5 tahun selalu memenuhi target, yaitu 100%.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.21
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 20.

Kinerja keempat UPT sudah baik dengan mencapai target masing-masing. Realisasi jumlah desa dengan pangan aman BBPOM di Palembang sebanyak 32 desa/kelurahan sama besar dengan BBPOM di Manado, namun lebih besar dari BBPOM di Makassar (31 desa/kelurahan) dan lebih kecil dibandingkan dengan BBPOM di Bandar Lampung (42 desa/kelurahan). Untuk persentase capaian jumlah desa dengan pangan aman BBPOM di Palembang sebesar 100%, sama dengan ketiga upt lainnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

1. Penetapan target persentase tahapan kegiatan setiap bulan dan triwulan mempertimbangkan timeline dari unit pengampu.
2. Dilakukan efisiensi waktu dan biaya pada tahapan kegiatan karena lokus kab/kota yang dintervensi keamanan pangan tahun 2024 berada di area pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan jarak yang jauh.
3. Menjaga komitmen dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan petugas desa/kelurahan yang diintervensi.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Tahapan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman (kerangka acuan dan timeline) unit pengampu Direktorat PMPUPO.
2. Pelaporan kegiatan kepada unit pusat harus tepat waktu, sesuai format yang telah ditetapkan, dan kelengkapan data analisis yang diperlukan.
3. Kegiatan fasilitasi secara mandiri oleh kader keamanan pangan desa perlu dioptimalkan.
4. Kegiatan GKPD bersinergi dengan kegiatan percepatan penurunan stunting, PMT berbahan pangan lokal dan program lainnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Dokumentasi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor terkait saat kegiatan advokasi.
2. Perlu adanya inovasi yang berkaitan dengan kegiatan terpadu keamanan pangan, dan/atau optimalisasi inovasi yang telah ada.
3. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk melakukan sinergi program keamanan pangan di desa bersama dengan program nasional lainnya.

4. Rekomendasi perbaikan berkelanjutan untuk aplikasi gkpd online sehingga memudahkan admin balai untuk melaporkan setiap data dan tahapan kegiatan dengan tepat waktu.
5. Analisis data peningkatan PSP (pengetahuan, sikap, dan prilaku) kader dan peserta sosialisasi serta bimtek keamanan pangan dilakukan sesuai juknis.
6. Kader diberi pelatihan dengan baik mulai dari materi keamanan pangan dalam kelas, cara berkomunikasi yang baik, pengambilan contoh sampel uji, praktek pengujian menggunakan alat uji cepat, sampai kegiatan fasilitasi di lapangan.
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk setiap desa/kelurahan yang diintervensi kemudian hasilnya akan disampaikan juga kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait, lalu akan dipilih untuk desa/kelurahan terbaik sebagai perwakilan untuk mengikuti lomba keamanan pangan.
8. Pengawalan keamanan pangan di desa/kelurahan yang sudah dintervensi juga tetap dilaksanakan, sehingga keamanan pangan diterapkan secara berkelanjutan.

21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17	17	100,00	

Tabel 3.1.49
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 21.

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman

berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (ppabk) yang diintervensi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2024 sebanyak 17 pasar dengan capaian yang didapatkan sebesar 100,00%. Dalam realisasinya, indikator ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dari direktorat pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Indikator ini dapat mencapai target, jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sampai 100% dengan pembobotan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Pembobotan
1	Survei Pasar	5%
2	Advokasi	20%
3	Bimtek Petugas Pasar	15%
4	Sampling Pengujian Tahap I	15%
5	Pengawalan	10%
6	Penyuluhan Pedagang Pasar	10%
7	Kampanye KP Pasar	10%
8	Sampling Pengujian Tahap II	15%
Kumulatif Capaian		**100,0%**

Tabel 3.1.50
Pembobotan Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebelum dilakukan advokasi bersama pemerintah kabupaten/kota, lintas sektor terkait dan petugas pasar yang akan diintervensi, upt akan melakukan survei pasar untuk melihat kondisi pasar sebelum diintervensi. Setelah kegiatan advokasi, dilakukan tahapan kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan pasar yang merupakan petugas pasar yang bertugas untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan pangan kepada komunitas pasar. Selanjutnya dilakukan penyuluhan keamanan pangan kepada komunitas pasar yang terdiri dari para pedagang pangan. Selain itu, dilakukan juga kegiatan kampanye keamanan pangan di pasar oleh petugas dan lintas sektor terkait dengan berkeliling pasar menyebarkan informasi baik

secara langsung maupun melalui media cetak seperti leaflet, poster, dan spanduk.

Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan secara 2 tahap (tahap awal dan tahap akhir) untuk melihat persentase penurunan sampel yang tidak memenuhi syarat. Semakin besar penurunannya, maka edukasi yang diberikan dianggap semakin bermanfaat, karena komunitas pasar lebih sadar terkait keamanan pangan dengan menghindari pangan yang tidak memenuhi syarat. Pengawalan keamanan pangan juga dilakukan di pasar yang telah diintervensi di tahun 2020-2023, dengan melakukan penyegaran dengan memberikan pelatihan terkait keamanan pangan di pasar.

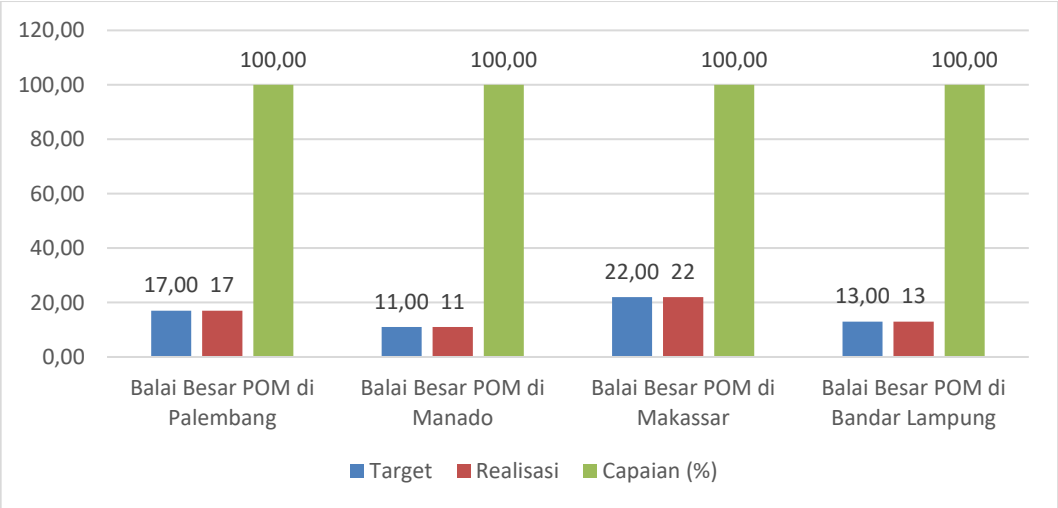
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
2	2	100,00	6	6	100,00	9	9	100,00	13	13	100,00	17	17	100,00

Tabel 3.1.51
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 21.

Untuk capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Palembang selama 5 tahun selalu memenuhi target, yaitu 100%. Sedangkan untuk realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi oleh BBPOM di Palembang akan selalu meningkat setiap tahunnya, karena target merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya. Selama 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun 2020 hingga 2024, BBPOM di Palembang telah mengintervensi 17 pasar di Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata BBPOM di Palembang telah mengintervensi 3-4 pasar setiap tahunnya selama 5 tahun periode renstra.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.22
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 21

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Palembang sebanyak 17 pasar berada di peringkat 2 (dua) di bawah BBPOM di Makassar (22 pasar), dan di atas BBPOM di Bandar Lampung (13 pasar) dan BBPOM di Manado (11 pasar). Untuk kinerja keempat UPT sudah baik dengan mencapai target masing-masing. Untuk persentase capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Palembang sebesar 100%, sama dengan ketiga UPT lainnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

1. Penetapan target persentase tahapan kegiatan setiap bulan dan triwulan mempertimbangkan timeline dari unit pengampu.
2. Dilakukan efisiensi waktu dan biaya pada tahapan kegiatan karena lokus kab/kota yang dintervensi keamanan pangan tahun 2024 berada di area pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan jarak yang jauh.
3. Menjaga komitmen dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan petugas desa/kelurahan yang diintervensi.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Tahapan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan dan timeline unit pengampu Direktorat PMPUPO.
2. Pelaporan kegiatan kepada unit pusat harus tepat waktu, sesuai format yang telah ditetapkan, dan kelengkapan data analisis yang diperlukan.
3. Pendampingan petugas pasar terkait tahapan sampling dan pengujian pada tahap selanjutnya, terutama untuk sampel yang TMS (tidak memenuhi syarat).

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Pelaporan kegiatan sudah dikoordinasikan dengan petugas penanggung jawab unit pengampu sehingga dapat langsung diperbaiki dan diselesaikan.
2. Akses pelaporan lengkap dilakukan melalui Aplikasi SiPAMAN dan link yang sudah disediakan oleh unit pengampu.
3. Dokumentasi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor terkait saat kegiatan advokasi.
4. Perlu adanya inovasi yang berkaitan dengan kegiatan terpadu keamanan pangan, dan/atau optimalisasi inovasi yang telah ada.
5. Pendampingan dan analisis data sampel pengujian tahap I dan tahap II dilakukan dengan petugas pasar sesuai juknis yang ada.
6. Petugas pasar diberi pelatihan dengan baik mulai dari materi keamanan pangan dalam kelas, cara berkomunikasi yang baik, pengambilan contoh sampel uji, praktek pengujian menggunakan alat uji cepat, sampai kegiatan kampanye keamanan pangan di pasar secara langsung.
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk setiap pasar yang diitervensi, kemudian hasilnya akan disampaikan juga kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik.
8. Pengawalan keamanan pangan di pasar yang sudah dintervensi tetap dilaksanakan, sehingga keamanan pangan diterapkan secara berkelanjutan.

6. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator. Dari perhitungan 2 indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 120%. Nilai pencapaian ini merupakan nilai konversi, 2 indikator tersebut berhasil mendapatkan capaian 100% sehingga dapat dikonversi menjadi 120% sesuai nota dinas dari Sekretaris Utama No : PR.09.03.2.01.25.42 Tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Nilai konversi ini berpengaruh pada nilai pencapaian sasaran, namun pembahasan pencapaian per indikator kinerja akan tetap dibahas sesuai nilai capaian sebelum konversi. Hasil selengkapnya adalah berikut :

22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	

Tabel 3.1.52
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 22.

Sampel obat terdiri dari komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika (Perpres No. 70 Tahun 2017) dan obat kuasi (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020). Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat

yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman (SOP).

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\%\ Sampel\ obat\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ sesuai\ standar = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

$$A = \frac{jumlah\ sampel\ obat\ yang\ diuji\ dan\ diperiksa\ sesuai\ standar}{jumlah\ target\ sampel\ obat} \times 100\%$$

$$B = \frac{jumlah\ sampel\ obat\ yang\ diuji\ dan\ diperiksa\ sesuai\ standar}{jumlah\ sampel\ obat\ yang\ masuk\ laboratorium} \times 100\%$$

Total sampel obat yang diuji di laboratorium pangan dan air BBPOM di Palembang (termasuk di dalamnya sampel DIPA BBPOM di Palembang, sampel DIPA Loka POM di Lubuk Linggau, serta sampel regional yang diterima dari Balai /Loka di region 2) adalah sejumlah 1767 sampel. Dari sejumlah sampel tersebut seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan sesuai standar dan pengujian sesuai ketentuan timeline dan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Realisasi persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah 100%. Bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian yang diperoleh sebesar 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

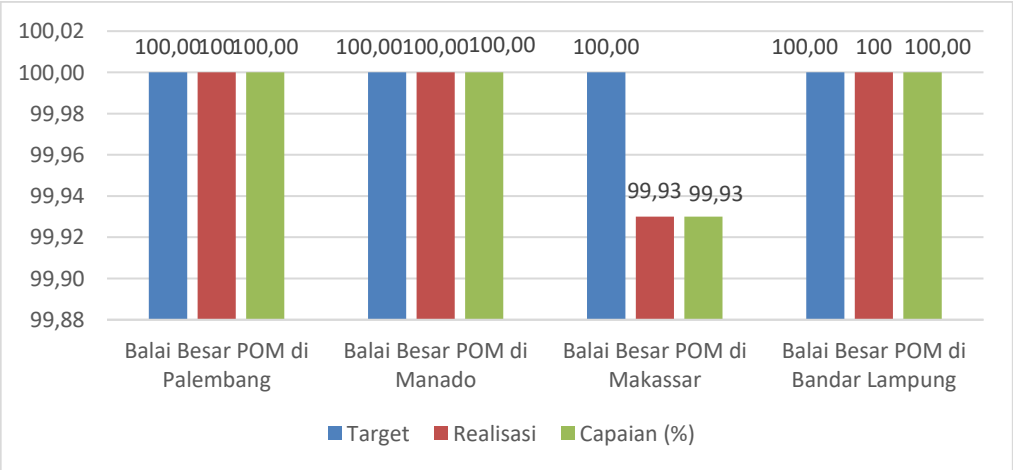
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
82	95,88	116,93	100	98,38	98,38	100	98,28	98,28	100	99,34	99,34	100	100	100,00

Tabel 3.1.52
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 22.

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 95,88% menjadi 98,38%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 98,28%. Realisasi ini meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 99,24%, dan pada tahun 2024 menjadi 100%.

Sedangkan capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2022, dari 116,93% pada tahun 2020, turun menjadi 98,38% pada tahun 2021 dan 98,28% pada tahun 2022. Penurunan capaian dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan adanya kenaikan target yang signifikan dari 85% menjadi 100%. Capaian kinerja indikator ini meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 99,34% dan pada tahun 2024 menjadi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.23
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 22.

Realisasi kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 100% sama dengan BBPOM di Manado dan BBPOM di Bandar Lampung, sedangkan BBPOM di

Makassar memiliki realisasi terendah sebesar 99,93%. Begitupun dengan capaian kinerjanya, karena target pada indikator kinerja pada semua UPT pada klaster ini adalah 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu:

1. Kemampuan petugas dalam melakukan sampling dan pengujian yang selalu ditingkatkan melalui pelatihan baik ke pusat maupun melalui bimbingan teknis internal di BBPOM di Palembang
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengujian seperti alat laboratorium baik dari segi jumlah maupun kondisi alat yang baik dan terkalibrasi, pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding
3. Kepatuhan terhadap pedoman sampling dan pengujian tahun 2024 baik dalam proses sampling, evaluasi terhadap penandaan maupun pengujian sesuai parameter uji kritis dan ketentuan timeline
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan parameter uji kritis dan timeline pengujian untuk melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang timbul selama proses pengujian
5. Koordinasi yang baik antara fungsi pengujian dan fungsi pemeriksaan serta antar Balai POM/ Loka POM sesama anggota regional 2 sehingga sampling dilakukan terhadap produk yang memang sudah siap untuk diuji berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengujian

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ialah:

1. Pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding untuk memenuhi kebutuhan pengujian sampel tahun berjalan

2. Pelatihan personel baik yang dilakukan ke pusat maupun bimtek yang diadakan secara mandiri oleh BBPOM di Palembang
3. Program kalibrasi alat secara berkala baik secara internal oleh PPPOMN maupun eksternal dengan bekerja sama dengan pihak ke-3
4. Pemeliharaan alat yang dilakukan sepanjang tahun berjalan untuk memastikan alat yang diperlukan dalam proses pengujian dalam kondisi baik
5. Monev Regional baik yang diadakan oleh regional 2 maupun gabungan regional 1 dan 2 dapat memudahkan koordinasi antar balai sesama anggota region tersebut

23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	

Tabel 3.1.53
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 23.

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel makanan pada tahun 2024 selain berasal dari Balai Besar POM di Palembang namun juga berasal dari 10 (sepuluh) UPT lainnya, yaitu Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Pangkal Pinang, Balai POM di Jambi, Loka POM di Lubuklinggau, Loka POM di Dumai, Loka POM di Indragiri Hilir, Loka POM di Belitung, Loka POM di Sungai Penuh dan Loka POM di Tulang Bawang. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

$$\%\ Sampel\ makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ sesuai\ standar = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

$$A = \frac{jumlah\ sampel\ makanan\ yang\ diuji\ dan\ diperiksa\ sesuai\ standar}{jumlah\ target\ sampel\ obat} \times 100\%$$

$$B = \frac{jumlah\ sampel\ makanan\ yang\ diuji\ dan\ diperiksa\ sesuai\ standar}{jumlah\ sampel\ obat\ yang\ masuk\ laboratorium} \times 100\%$$

Total sampel makanan yang diuji di laboratorium pangan dan air BBPOM di Palembang adalah sejumlah 982 sampel. Dari sejumlah sampel tersebut seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan sesuai standar dan pengujian sesuai ketentuan timeline dan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah 100%. Bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
75	98,81	131,75	100	99,38	99,38	100	93,31	93,31	100	98,95	98,95	100	100	100

Tabel 3.1.54
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 23.

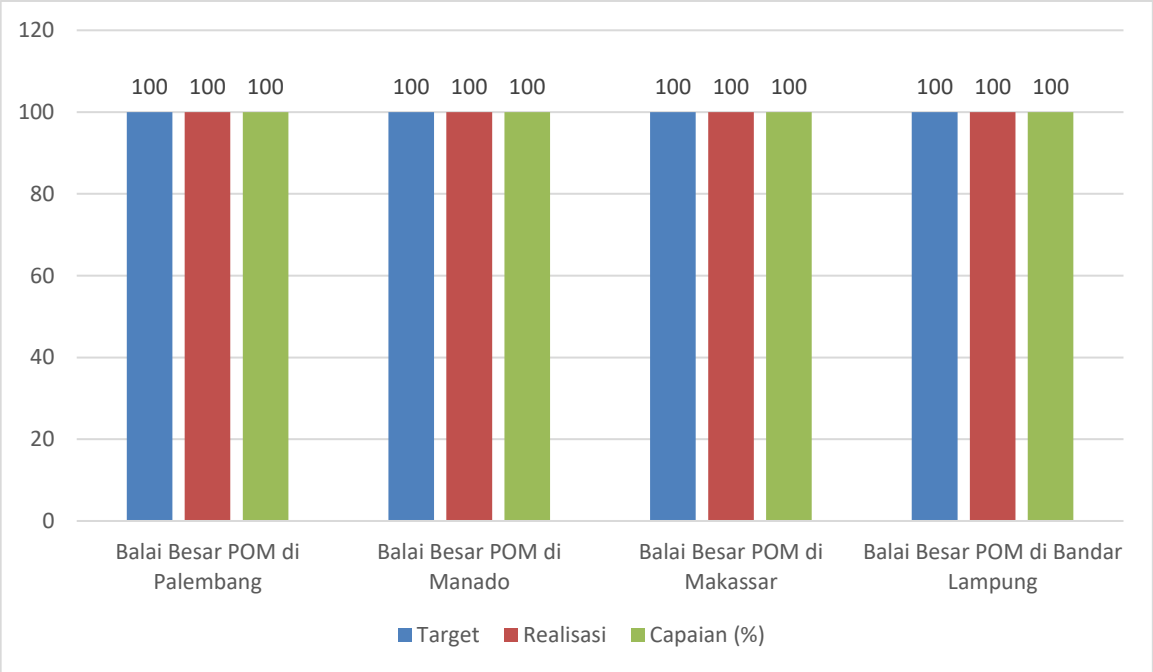
Realisasi indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 98,81% menjadi 99,38%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 93,31%. Realisasi ini meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 98,95%, dan pada tahun 2024 menjadi 100%.

Sedangkan capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2022, dari 131,75% pada tahun 2020, turun menjadi 99,38% pada tahun 2021 dan 93,31% pada tahun 2022. Penurunan capaian dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan adanya kenaikan target yang signifikan dari 75%

menjadi 100%. Capaian indikator ini meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 98,95% dan pada tahun 2024 menjadi 100%.

Analisis Tren terhadap indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator Stagnan dengan nilai 0,05, dimana hanya sedikit terdapat peningkatan capaian.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.24
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 23.

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada BBPOM di Palembang sama dengan capaian pada BBPOM di Manado, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Bandar Lampung yaitu sebesar 100%, dengan kata lain seluruh UPT klaster 3 sudah mencapai realisasi maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu:

1. Kemampuan petugas dalam melakukan sampling dan pengujian yang selalu ditingkatkan melalui pelatihan baik ke pusat maupun melalui bimtek internal di BBPOM di Palembang
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengujian seperti alat laboratorium baik dari segi jumlah maupun kondisi alat yang baik dan terkalibrasi, pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding
3. Kepatuhan terhadap pedoman sampling dan pengujian tahun 2024 baik dalam proses sampling, evaluasi terhadap penandaan maupun pengujian sesuai parameter uji kritis dan ketentuan timeline
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan parameter uji kritis dan timeline pengujian untuk melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang timbul selama proses pengujian sebagai bentuk upaya pengelolaan risiko tidak tercapainya target PUK baru.
5. Koordinasi yang baik antara fungsi pengujian dan fungsi pemeriksaan serta antar Balai POM/Loka POM sesama anggota regional 2 sehingga sampling dilakukan terhadap produk yang memang sudah siap untuk diuji berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengujian

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ialah:

1. Pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding untuk memenuhi kebutuhan pengujian sampel tahun berjalan
2. Pelatihan personel baik yang dilakukan ke pusat maupun bimtek yang diadakan secara mandiri oleh BBPOM di Palembang
3. Program kalibrasi alat secara berkala baik secara internal oleh PPPOMN maupun eksternal dengan bekerja sama dengan pihak ke-3
4. Pemeliharaan alat yang dilakukan sepanjang tahun berjalan untuk memastikan alat yang diperlukan dalam proses pengujian dalam kondisi baik

5. Monev Regional baik yang diadakan oleh regional 2 maupun gabungan regional 1 dan 2 dapat memudahkan koordinasi antar balai sesama anggota region tersebut

7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator maka nilai pencapaian sasaran sebesar 91,64%. Hasil selengkapnya adalah berikut :

24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	68,73	91,64	

Tabel 3.1.54
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 24.

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dari penyelidikan atau kegiatan intelijen hingga penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUndang-Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM diberikan kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran terhadap 7 Undang-Undang yaitu: UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyidikan menurut UU no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang tahun 2024 adalah 68,73 dengan nilai capaian 91,64% dari target 75.

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada tahun 2024 PPNS Balai Besar POM di Palembang menangani 5 perkara tahun berjalan dan 3 perkara *carry over* tahun 2023 dengan posisi tahapan penanganan perkara hingga akhir tahun 2024 sebagai berikut:

Perkara tahun berjalan:

1. SPDP sebanyak 2 perkara
2. Penyerahan tahap 1 (penyerahan berkas perkara) sebanyak 1 perkara
3. Penyerahan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) sebanyak 2 perkara

Perkara *carry over*:

4. Penyerahan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) sebanyak 3 perkara

Berikut adalah tabel perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang obat dan makanan tahun 2024 berdasarkan posisi tahapan dan pembobotan seperti tersebut diatas.

UPT	Tahapan	s.d TW IV (Des24)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Palembang	SPDP	5	0	2		1,00		0,15	15,00%	68,73%	160,00%	109,96%
	Tahap I			1		0,60	0,38	0,4	28,36%			
	P21					0,40	0,38	0,3	16,91%			
	Tahap II			2	3	0,40	0,38	0,15	8,45%			
	Total	5	0	5	3							
TOTAL	SPDP	5	3	2		1,00		0,15	15,00%	68,73%	100,00%	68,73%
	Tahap I			1	0	0,60	0,38	0,4	28,36%			
	P21			0	0	0,40	0,38	0,3	16,91%			
	Tahap II			2	3	0,40	0,38	0,15	8,45%			
	Total	5	3	5	3				0%			

Gambar 3.1.25
Perhitungan Realisasi Kinerja IKU 24 sesuai Pembobotan dan Posisi Tahapan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

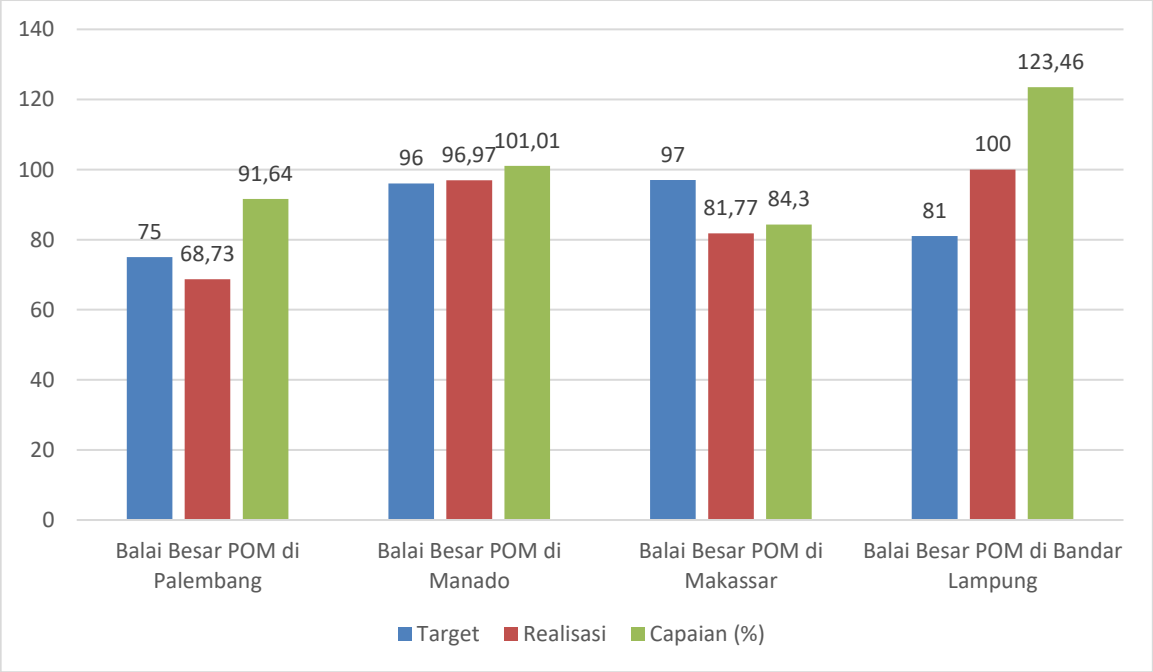
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
52	56,74	109,12	58	69,03	119,02	64	64,17	100,27	69	70,44	102,09	75	68,73	91,64

Tabel 3.1.55
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 24.

Dari tabel diatas terlihat bahwa 4 tahun pertama periode renstra 2020-2024 target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan selalu tercapai dengan nilai capaian antara 100,27% pada tahun 2022 hingga capaian tertinggi 119,02% pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2024 sebagai tahun terakhir periode renstra ini, target Indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang obat dan makanan tidak tercapai yaitu 91,64% dari target 75. Tidak terlihat ada tren khusus terhadap capaian setiap tahunnya. Terlihat bahwa capaian 2021 naik cukup tinggi dibanding tahun 2020 tetapi turun kembali ditahun 2022 dengan capaian lebih rendah dibanding tahun 2021. Capaian 2023 naik kembali ditahun dibanding capaian 2022. Di tahun 2024 turun kembali bahkan dibawah target tahun tersebut.

Capaian tahun 2024 sebesar 91,64% ini disebabkan adanya 2 perkara tertahan di tahap SPDP dikarenakan terduga pelaku/tersangka melarikan diri serta 1 perkara tertahan di tahap 1 dikarenakan adanya tambahan petunjuk dari jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.26
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 24.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, terdapat perbandingan antara target, realisasi, dan capaian dalam persentase dari beberapa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Klaster 3, yaitu Palembang, Manado, Makassar, dan Bandar Lampung.

Dari sisi realisasi terlihat bahwa Palembang realisasinya paling rendah yaitu 68,73 sesuai juga dengan targetnya yang paling rendah dalam klaster ini yaitu 75. Sementara realisasi tertinggi terlihat dari grafik adalah Lampung yaitu 100 dengan target kedua terendah dari klaster ini yaitu 81.

Dilihat dari capaian terhadap target, pada klaster ini Palembang dan Makasar tidak tercapai targetnya di tahun 2024 ini dengan capaian masing masing 96,64 dan 84,30. Sementara Manado dan Lampung dapat tercapai targetnya di tahun 2024 ini dengan capaian masing-masing 101,1 dan 123,46.

Realisasi dan capaian yang rendah dari BBPOM di Palembang tidak lepas dari adanya perkara yang tertahan di tahap SPDP dan tahap 1. terkait kondisi ini memerlukan intensifikasi implementasi tindakan pengendalian ataupun mitigasi risiko terhadap kemungkinan tidak tercapainya target IKU.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tidak Tercapainya target kinerja tahun 2024 (91.64%)disebabkan beberapa faktor, antara lain:

a. Adanya 2 perkara tertahan di tahap SPDP dikarenakan adanya perlawanan dari terduga pelaku yaitu dengan tidak memenuhi panggilan penyidik pemeriksaan selaku saksi dan tersangka.
b. Telah dilakukan juga permohonan bantuan penangkapan kepada Korwas PPNS Polda Sumatera Selatan, tetapi tidak berhasil menghadirkan saksi dan tersangka kehadapan penyidik.
c. Satu perkara telah dilaksanakan penyerahan berkas perkara tahap1 pada tanggal 4 November 2024 tetapi mendapat petunjuk perbaikan berkas perkara pada tanggal 20 November dengan perbaikannya telah dikirimkan pada tanggal 4 Desember 2024 dan sampai akhir tahun 2024 belum ada keputusan P21 dari JPU.
d. Tidak segera menetapkan Tersangka dan tidak melakukan penahanan tersangka dalam waktu 1x 24jam juga menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian berkas perkara hingga penyerahan tahap1.
e. Masih adanya perbedaan persepsi dengan JPU terhadap materi keterangan saksi dan tersangka serta barang bukti yang perlu disita dari tersangka.
f. Tahun 2024 telah diselesaikan 3 perkara carry over tahun 2023 hingga penyerahan tahap 2.
g. Dalam upaya pengelolaan risiko terkait Risk Event berupa keterlambatan dalam penyelesaian berkas perkara, di mana penyebab utama risiko (Risk Cause) adalah kurangnya monitoring terhadap waktu penanganan perkara, langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan sejauh ini masih belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan risiko yang ada.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

a. Diupayakan segera menetapkan tersangka dalam waktu 1x 24jam setelah terbitnya SPDP dan jika perlu dilakukan penahanan;
b. Diupayakan konsultasi intensif dengan JPU dari awal penanganan perkara, dan jika memungkinkan mengikutsertakan personal Kejati/JPU dalam operasi penindakan.
c. Melakukan monev bulanan terhadap kegiatan/operasi intelijen dan penanganan perkara
d. Melakukan evaluasi mendalam terhadap tindakan mitigasi yang telah diterapkan, kemudian menyempurnakan serta menambahkan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan adaptif guna mengurangi potensi risiko, mencegah kemungkinan terjadinya gangguan, serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diterapkan dapat secara optimal mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam bidang Penindakan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan dengan baik. Beberapa faktor utama yang menunjang berjalannya proses tersebut meliputi:

a. Intelijen

Kegiatan intelijen yang dilakukan merupakan salah satu faktur untuk menemukan dan memastikan informasi adanya tindak kejahatan dibidang obat dan makanan secara benar. Hasil laporan intelijen dengan nilai informasi A1 menjadi dasar dalam keberhasilan operasi penindakan yang akan dilakukan.

b. Kegiatan peningkatan kompensi petugas fungsi penindakan, antara lain :

- Diklat pembentukan PPNS
- Bimbingan teknis petugas pengelola barang bukti
- Pembentukan Petugas Analisis Pencegahan Kejahatan
- Pembentukan Petugas Penggalangan
- Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM

c. Pendekatan Persuasif dalam Pemberkasan

Upaya persuasif diterapkan selama proses pemberkasan untuk memastikan calon tersangka atau tersangka memenuhi panggilan penyidik. Pemanggilan berkala juga dilakukan guna menilai tingkat kerja sama tersangka selama proses penyidikan. Pendekatan ini menjadi efektif dengan tersangka yang bersifat kooperatif dimana tersangka datang dan memenuhi panggilan penyidik baik dalam proses BAP dan pelaksanaan Tahap II.

Akan tetapi di lain sisi, pendekatan persuasif ini belum dapat menunjang dalam beberapa kasus dimana tersangka tidak bersifat kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik dan melarikan diri sehingga proses penyidikan belum dapat dilanjutkan.

d. Koordinasi dan Konsultasi dengan Pihak Terkait

Dalam setiap tahap penyidikan, mulai dari Operasi Penindakan hingga proses pemberkasan, PPNS telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Korwas PPNS maupun Kejaksaan Tinggi yang dilaksanakan secara intensif dalam proses yang berjalan. Hal ini membantu dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses pemberkasan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara.

e. Optimalisasi Anggaran

Penyesuaian dan revisi anggaran dilakukan guna memastikan dukungan anggaran yang cukup bagi kegiatan di fungsi Penindakan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif.

f. Monitoring dan Evaluasi Rutin

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta menentukan langkah-langkah perbaikan. Jika hasil evaluasi menunjukkan capaian yang masih rendah, tindakan korektif segera diambil guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

g. Manajemen Risiko

Implementasi Manajemen Risiko selama periode renstra 2020-2024 turut membantu dalam pencapaian target sepanjang periode renstra tersebut. Setiap sasaran kegiatan diindentifikasi risiko yang mungkin timbul yang dapat menggagalkan pencapaian target kemudian dilakukan penilaian terhadap level kemungkinan dan level dampak jika risiko itu terjadi. Selanjutnya juga dilakukan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko yang diidentifikasi sesuai SK Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 TAHUN 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM

Melalui penerapan strategi ini, diharapkan efektivitas penindakan dapat terus ditingkatkan akan tetapi tetap terbuka untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi lainnya yang lebih efektif dan pendekatan yang lebih baik dalam mencapai tujuan, sehingga kinerja dalam menegakkan hukum di bidang obat dan makanan semakin optimal.

8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator. Dari perhitungan 3 indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 106.18%. Hasil selengkapnya adalah berikut :

25. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	85,9	84,85	98,78	

Tabel 3.1.56
Perbandingan Target Realisasi Kinerja IKU 25.

Indeks RB Balai Besar POM di Palembang diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil.

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil

melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kategori proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kategori proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Rincian bobot komponen penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat WBK/WBBM sebagai berikut:

Komponen Pengungkit	Bobot
Manajemen Perubahan	8%
Penataan Tata Laksana	7%
Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
Penguatan Pengawasan	15%
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Komponen Hasil	Bobot
Birokrasi Bersih dan Akuntabel : Nilai Survei Persepsi Korupsi 17,5% dan Capaian Kinerja Lebih Baik dari Capaian Kinerja Sebelumnya 5%	22,5 %
Pelayanan Publik yang Prima: Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	17,5 %

Tabel 3.1.27
Pembobotan Komponenn Penilaian IKU 25.

Penilaian indeks RB Balai Besar POM di Palembang dilakukan oleh Inspektorat Utama Tahun 2024 dengan hasil penilaian sebesar 84,85 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Pengungkit (60)	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
Manajemen Perubahan	8	3,07	2,94	6,01
Penataan Tata Laksana	7	1,96	2,75	4,71
Penataan Sistem Manajemen SDM	10	4,18	4,25	8,43
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10	4,17	3,60	7,77
Penguatan Pengawasan	15	4,97	7,50	12,47
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10	4,28	3,76	8,04
TOTAL PENGUNGKIT				**47,42**
Komponen Hasil (40)	Bobot			Bobot
Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,73
Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			16,98
Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75
Pelayanan Publik yang Prima Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,71
TOTAL HASIL				**37,44**
NILAI PMPZI/RB				**84,85**

Tabel 3.1.28
Hasil Penilaian IKU 25 per Komponen.

Capaian indikator Indeks RB yang telah diterima pada Triwulan IV berdasarkan penilaian Inspektorat Utama sebesar 98,78% dengan kategori **cukup**, realisasi nilai 84,85 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 85,9.

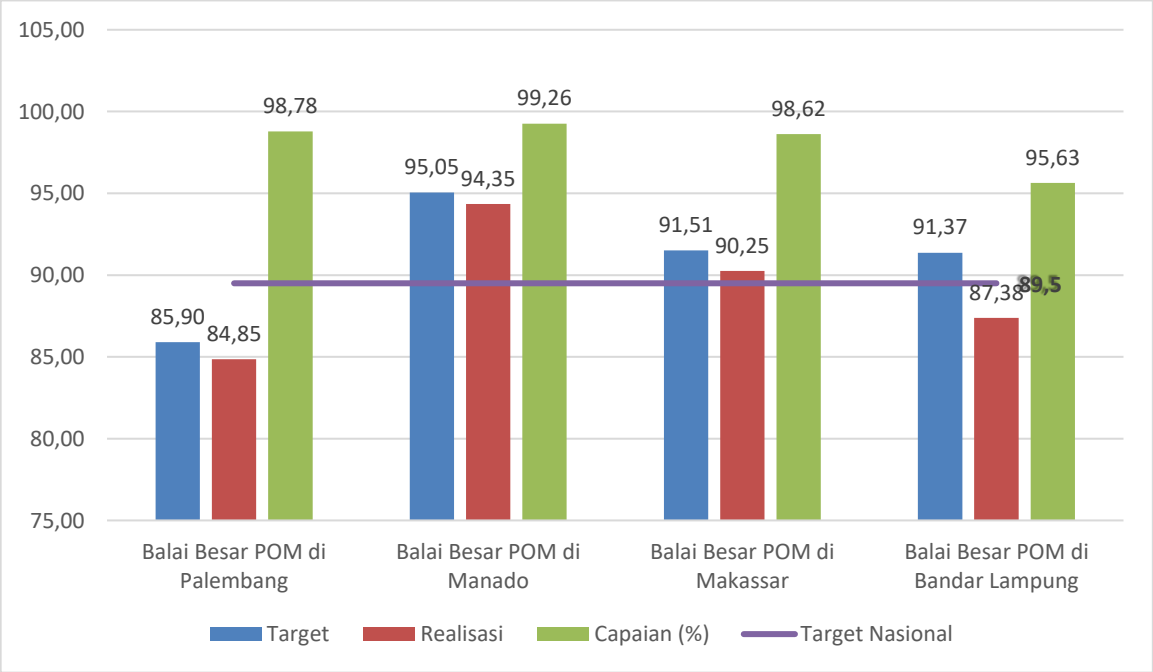
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
85	81,72	96,14	82,9	82,94	100,05	83,9	80,43	95,86	84,9	82,57	97,26	85,9	84,85	98,78

Tabel 3.1.57
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 25

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 sebesar 84,85 mengalami kenaikan dari realisasi 2020 (81,72), 2021 (82,9), 2022 (80,43) dan 2023 (82,57). Capaian Indeks RB Balai Besar POM di Palembang belum memenuhi target pada tahun 2020 yaitu 86,58% dengan kategori Cukup, mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 100,05% dengan kategori sangat baik dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 95,86% dengan kategori cukup, pada tahun 2023 mengalami peningkatan capaian menjadi 97,26% dengan kategori Cukup, pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan capaian menjadi 98,78% dengan kategori Cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.29
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 25

Realisasi kinerja Indeks RB dari seluruh unit kerja pada klaster yang sama menunjukkan hasil belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi tertinggi pada klaster ini diraih oleh Balai Besar POM di Manado dengan indeks 94,35 diikuti Balai Besar POM di Makassar dengan indeks 90,25, kemudian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan indeks 87,38 dan terendah pada Balai Besar POM di Palembang dengan indeks 84,85. Hasil ini menunjukkan

pembangunan zona integritas dalam rangka reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh unit kerja Badan POM di daerah. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 89,5 maka target BBPOM di Palembang memang belum menyamai target nasional tersebut, begitupun dengan realisasi. Sedangkan 3 UPT lainnya BBPOM di Manado dan BBPOM di Makassar sudah melampaui target tersebut, sedangkan BBPOM di Bandar Lampung juga belum melampaui target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan evaluasi capaian Indeks RB Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024 beberapa hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian adalah:

1. Terdapat Inovasi AMPERA yang menitikberatkan pada komunikasi, informasi, edukasi (KIE), pengujian gratis menggunakan rapid test kit dan layanan pengaduan konsumen/masyarakat.
2. Terdapat Inovasi PEMPPEK (Permohonan pendampingan pemenuhan persyaratan Perijinan produk) merupakan sertifikasi yang langsung mendatangi pelaku usaha dan percepatan Izin Edar.
3. Telah ditetapkan agen berubahan beserta rencana aksi agen perubahan yang dikoordinator oleh setiap anggota agen perubahan.
4. Telah terdapat inovasi dalam sistem pengukuran kinerja, manajemen SDM, serta pelayanan publik.
5. Pimpinan secara langsung sebagai role model terlibat dalam penyusunan perencanaan.

   Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,82 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,88 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

   Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Belum terlihat proses internalisasi pembangunan ZI di lingkungan unit kerja.
2. Belum terdapat bukti tindak lanjut atas rencana tindak lanjut dalam menangani kendala pelaksanaan pembangunan ZI.
3. Penerapan atas SOP inovasi yang telah ditetapkan belum menunjukkan pemenuhan mutu baku SOP dan reviu/evaluasi SOP inovasi.
4. Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir namun nilai indeks berakhlak BBPOM di Palembang (54,9%) masih di rata-rata indeks berakhlak BPOM 57,7%.
5. Belum terdapat narasi latar belakang dan dampak (before/after) atas inovas-iinovasi yang dikembangkan, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi.
6. Belum terlihat bukti penempatan pegawai yang mengacu pada matriks kebutuhan pegawai dari setiap jabatan.
7. Belum terdapat standar kompetensi pegawai dan gap kompetensi yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai pegawai.
8. Belum terdapat matriks pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai.
9. Belum terdapat inplementasi pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan unit kerja yang berlaku.
10. Dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya memenuhi standar yang baik.
11. Belum terdapat dokumen implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
12. Terdapat status tindak lanjut yang masih open atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Atas capaian Indeks RB Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024, hal-hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melakukan upaya intensif dalam menginternalisasikan pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada seluruh pegawai.

2. Melakukan tindak lanjut atas rencana tindak lanjut dalam menangani kendala pelaksanaan pembangunan ZI.
3. Menyusun pemenuhan mutu baku dan reviu atas penerapan SOP inovasi.
4. Melakukan evaluasi atas hasil indeks berakhlak atas nilai yang perlu dioptimalkan dan ditindaklanjuti guna sebagai bahan penyusunan program/kegiatan Rencana Aksi Agen Perubahan dalam meningkatnya indeks Core Value BerAKHLAK tahun berikutnya.
5. Menyusun narasi latar belakang dan dampak (before/after) atas inovasi-inovasi yang dikembangkan, serta menindaklanjuti rencana TL atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi.
6. Menyusun matriks penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada setiap jabatan.
7. Menyusun standar kompetensi pegawai dan gap kompetensi yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai pegawai.
8. Menyusun matriks pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai.
9. Mengimplementasi kebijakan pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan yang berlaku.
10. Menyusun seluruh perencanaan kinerja dengan memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
11. Mendokumentasikan dan melaporkan atas implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
12. Melakukan monev dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
13. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Indeks RB Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2024 sebesar 85,9. Langkah awal pelaksanaan RB tahun 2024 adalah peningkatan komitmen dan internalisasi yang dilakukan kepada seluruh pegawai Balai Besar POM di

Palembang untuk meletakkan landasan budaya kerja yang baik dan unggul untuk melaksanakan tupoksi secara optimal. Rencana aksi yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 untuk mencapai target antara lain: melakukan sosialisasi RB secara intens baik secara langsung pada setiap pelaksanaan apel disiplin maupun secara online di media WhatsApp grup kantor, monitoring pelaksanaan kegiatan, keteladanan pimpinan, optimalisasi peran agent of change, workshop dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, kaji ulang dokumen (SOP), penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, intensifikasi komunikasi publik, pelaksanaan manajemen kinerja pegawai secara tepat waktu meliputi penyusunan SKP, penilaian dan monitoring, penguatan akuntabilitas kinerja melalui reviu rencana strategis, monitoring dan evaluasi internal secara ketat, pelatihan SAKIP, pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan, penetapan standar pelayanan publik, pelayanan prima kepada pelanggan dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat serta persepsi anti korupsi. Rencana aksi tersebut telah dilakukan Balai Besar POM di Palembang sejak awal tahun 2024 dan telah dilakukan monitoring serta evaluasi. Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala dilaporkan sebagai data dukung pelaksanaan RB Balai Besar POM di Palembang tahun 2024.

Rencana aksi prioritas yang ditetapkan dan hingga akhir triwulan IV meliputi monitoring dan evaluasi LKE ZI serta data dukung yang memadai, penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi di Badan POM serta sistem informasi internal melalui aplikasi Kito yang menjadi gerbang/portal digitalisasi utk mengakomodir database kepegawaian, kearsipan, disiplin pegawai, database dalam rangka reward dan punishment, pemanfaatan googlesite sebagai data center untuk melakukan monitoring, evaluasi dan laporan kinerja dan keuangan (Metalika). Pemakaian media sosial (twitter, facebook, tiktok dan instagram) dalam pemberian informasi keamanan obat dan makanan, penerapan sistem manajemen SDM melalui penegakan aturan disiplin/kode etik/perilaku pegawai, pelatihan SAKIP dalam rangka pengelolaan akuntabilitas kinerja, pencegahan resiko dan tindakan pengendalian, penetapan roadmap dan pelaksanaan inovasi-inovasi baru dan unggulan antara lain AMPERA, PEMPPEK, serta penerapan budaya pelayanan prima melalui kebijakan

pemberian reward dan punishment bagi pemberi dan penerima layanan publik (kompensasi).

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indeks RB antara lain penguatan pemahaman budaya organisasi melalui internalisasi budaya organisasi PIKKIR dan BerAKHLAK yang dilakukan oleh perwakilan *agent of change*. Inovasi-inovasi oleh Agen Perubahan tersebut selalu dipantau dan dievaluasi serta dilakukan tindak lanjut perbaikan dan peningkatannya. Monitoring dan evaluasi inovasi pada setiap pokja RB dilakukan secara konsisten, sistematis dan terjadwal disertai tindak lanjut dan rencana tindak lanjut. Pemanfaatan media whatsapp group pegawai Balai Besar POM di Palembang untuk membagi pengetahuan dan informasi-informasi terkait pembangunan ZI. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk mental yang kuat supaya pegawai memahami dan menyadari pentingnya Reformasi Birokrasi.

Kegiatan selanjutnya adalah penyebarluasan dan pengenalan Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat termasuk informasi kegiatan/kinerja melalui berita aktual, infografis pada media sosial, media elektronik dan media cetak, pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan publik, penggunaan aplikasi dan pemanfaatan media online. Kampanye antigratifikasi dilakukan melalui banner yang diletakkan di tempat strategis dan mudah dibaca oleh seluruh pegawai dan peserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Palembang. Selain itu Balai Besar POM di Palembang senantiasa melakukan sosialisasi anti gratifikasi, menyerukan kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada praktik gratifikasi yang ditemui. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas dan penanganan pegawai yang terdapat potensi *Conflict of Interest* (COI). Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat dan akan dilakukan secara konsisten dan berkala.

Melakukan perumusan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan sub standar dalam bentuk surat keputusan pemberian reward-punishment pelayanan publik. Melakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja yang dituangkan dalam narasi pada LKE ZI dan paparan Desk Tahap I.

Sebagai institusi yang menerapkan Manajemen Risiko, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi risiko khususnya dalam hal pencapaian

target indikator Indeks RB terdapat risiko pendokumentasian implementasi RB tidak memadai sehingga dampak terhadap organisasi dan masyarakat tidak terasa dan tidak terukur. Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan level risiko antara lain dengan melaksanakan program-program RB dengan perencanaan yang baik, dilakukan monitoring serta pengukuran dampak yang terdokumentasi dengan baik, SK Tim RB memuat uraian tugas yang jelas pada setiap pegawai, menetapkan MPH dengan *cascading* sampai dengan level individu anggota pokja.

26. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	82,81	80,55	97,27	

Tabel 3.1.58
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 26

Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang adalalah hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang. Ruang Lingkup evaluasi AKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Rentang nilai evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 sd 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 sd 90	A	Memuaskan
> 70 sd 80	BB	Sangat Baik
> 60 sd 70	B	Baik
> 50 sd 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 sd 50	C	Kurang
0 sd 30	D	Sangat Kurang

Tabel 3.1.59
Rentang Nilai IKU 26

Berdasarkan hasil evaluasi tim dari Inspektorat Utama BPOM, implementasi SAKIP Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024 dikategorikan A (Memuaskan), dengan nilai 80,55. Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024 ini sebesar 97,27% masuk dalam kategori **cukup**, dengan realisasi 80,55 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 82,81. Capaian tahun 2024 ini masih belum maksimal, masih ada beberapa komponen yang mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2023. Rincian hasil penilaian tiap komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan
			2023	2024	
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,24	20,16	Naik
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,68	20,16	Naik
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,44	9,48	Turun
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	15,20	Turun
5.	Capaian Kinerja	20	14,27	15,55	Naik
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,43	80,55	
	Predikat		BB	A	

Tabel 3.1.60
Hasil Penilaian AKIP per Komponen

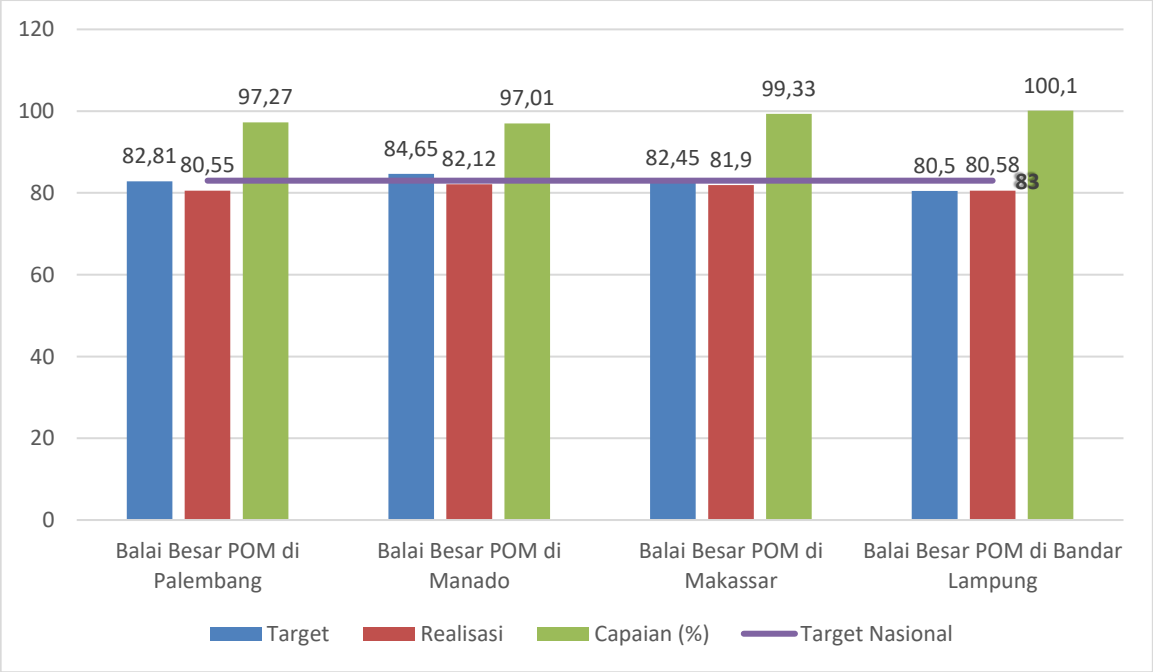
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
81	78,87	97,37	79,9	77,59	97,11	80,9	79,57	98,36	81,9	79,43	96,98	82,81	80,55	97,27

Tabel 3.1.61
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang dalam 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dari 78,87 pada tahun 2020 menjadi 80,55 pada tahun 2024, atau sekitar 2.13% kenaikan realisasi dari tahun pertama dalam periode renstra tersebut. Tren realisasi ini memang tidak selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2023. BBPOM di Palembang berhasil meningkatkan predikat penilaiannya yang sebelumnya pada 2020 hingga 2023 dengan predikat BB (sangat baik) menjadi A (memuaskan) pada tahun 2024. Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Nilai AKIP pada periode renstra 2020-2024, paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 98,36%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Palembang Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.30
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 26

Berdasarkan grafik di atas, Nilai AKIP tertinggi tahun 2024 pada Klaster 3 adalah Balai Besar POM di Manado dengan nilai 82,12 dan Balai Besar POM di Palembang memiliki Nilai AKIP terendah yaitu 80,55 lebih rendah 0,03 dari Balai Besar POM di Bandar Lampung. Sedangkan Balai Besar POM di Makassar berhasil mencapai nilai 81,9. Capaian tertinggi dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, sekaligus sebagai satu-satunya UPT pada Klaster 3 yang melampaui target, dengan persentase capaian sebesar 100,10% dengan kriteria sangat baik. Secara keseluruhan nilai AKIP 4 (empat) UPT pada Klaster 3 sudah masuk dalam predikat A (Memuaskan). Dari target nasional sebesar 83, belum ada UPT pada klaster 3 yang mencapai target tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab kegagalan indikator kinerja ini berdasarkan komponen penilaian, antara lain :

Perencanaan Kinerja

- Terdapat perubahan dokumen perencanaan jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang belum dipublikasikan pada subsite Balai Besar POM di Palembang
- Terdapat perbedaan nomenklatur Indikator Kinerja pada dokumen penetapan IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2024
- Terdapat perbedaan penyajian target pada dokumen PK, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024
- Terdapat indikator kinerja yang belum mencantumkan justifikasi atas penetapan target tahun 2024 yang lebih rendah dari realisasi tahun 2023

Pengukuran Kinerja

- SOP Pengumpulan Data Dan Monev RAPK belum mencantumkan mutu baku (timeline) terkait pengisian aplikasi SIMETRIS, penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim/Tahunan.
- Belum menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi
- Terdapat ketidakandalan data capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja.
- Pengisian kendala dan tindak lanjut untuk indikator yang tidak mencapai target pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan secara tertib

Pelaporan Kinerja

- Belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024
- Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan triwulan sebelumnya
- Belum menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara menyeluruh

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Terdapat personil tim monev pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang belum mengikuti pelatihan SAKIP
- Laporan evaluasi internal belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana/tindaklanjutnya
- Evaluasi internal kurang optimal karena belum menyajikan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target kinerja
- RTL (Rencana Tindak Lanjut) kurang spesifik terhadap kendala yang telah diidentifikasi
- Laporan evaluasi internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan Balai Besar POM di Palembang, pada tahun 2025 yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dari Tim Inspektorat II pada pelaksanaan SAKIP pada tahun 2025, antara lain :

Perencanaan Kinerja

- Mempublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu pada subsite Balai Besar POM di Palembang
- Mendokumentasikan semua dokumen perencanaan beserta perubahannya, agar mudah telusur.
- Menyajikan dokumen kertas kerja beserta justifikasi atas penetapan target sesuai dengan pedoman.

Pengukuran Kinerja

- Pemutakhiran SOP Pengumpulan Data Dan Monev RAPK.
- Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi
- Pengisian kendala dan tindak lanjut untuk indikator yang tidak mencapai target pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib.

Pelaporan Kinerja

- Menyajikan informasi terkait perubahan/penambahan indikator kinerja pada BAB II Laporan Kinerja.
- Menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan triwulan sebelumnya
- Menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara menyeluruh
  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Peningkatan kompetensi pegawai terkait Implementasi SAKIP.
- Menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana/tindaklanjutnya
- Menyajikan analisis kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target kinerja
- Menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang peningkatan nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang sampai dengan tahun 2024:

- Pemenuhan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi dokumen reviu renstra, matriks evaluasi akhir periode renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), SK Penetapan IKU serta telah melakukan *cascading* indikator kinerja hingga ke level individu.
- Pengawalan capaian indikator kinerja dilaksanakan secara rutin melalu monitoring dan evaluasi setiap bulan, menganalisa kendala serta rekomendasi perbaikan sehingga diperoleh rumusan strategi tindak lanjut pencapain target kinerja.
- Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Pelaporan hasil evaluasi internal dan laporan kinerja interim sesuai pedoman.

27. Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,71	95,66	101,00	

Tabel 3.1.62
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 27

Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Palembang diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata komponen penilaian Unit Kearsipan dan Unit Pengolah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dilakukan pembinaan kearsipan dengan salah satu kegiatannya adalah pengawasan kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan kearsipan dilakukan dalam rangka penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Fokus dan sasaran pengawasan kearsipan tahun 2021-2024 diarahkan pada implementasi kebijakan untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip pada setiap entitas dengan indikator keberhasilan dapat menyediakan arsip dengan kualitas autentik, utuh, dan terpercaya pada setiap entitas terutama menjelang kepindahan entitas menuju IKN.

Adaptasi terhadap penggunaan instrumen kearsipan yang baru memerlukan pemahaman bahwa peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan harus senantiasa diupayakan sampai kepada kondisi bahwa pemerintahan dan masyarakat dapat merasakan kemanfaatan atas kinerja kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Kearsipan I melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM terhadap objek pengawasan Balai Besar POM di Palembang. Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dilaksanakan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2022 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan dimana titik berat yang disampaikan pada keputusan ini adalah program alih media untuk arsip dinamis serta persiapan perpindahan Ibu Kota Negara.

Ruang lingkup pengawasan kearsipan internal di lingkungan Balai Besar POM di Palembang, meliputi:

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis. Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan arsip, pemberkasan dan penataan arsip aktif, program alih media, program arsip vital, pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, pengolahan arsip inaktif, pemeliharaan arsip inaktif, layanan dan akses arsip dinamis dan penyusutan arsip.
2. Aspek Sumber Daya Kearsipan. Yaitu kegiatan penilaian terhadap pemenuhan sumber daya kearsipan yang meliputi :

a. Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan. Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap arsiparis dan pengelola arsip dalam hal tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi dan pembinaan yang diperoleh.

b. Aspek Prasarana dan Sarana. Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap prasarana dan sarana kearsipan yang digunakan dalam kegiatan kearsipan.

Pengawasan kearsipan internal pada Balai Besar POM di Palembang dilaksanakan terhadap 1 Unit Kearsipan dan 5 Unit Pengolah

Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal melalui audit sistem kearsipan internal diberikan penilaian atas penyelenggaran kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan)
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik)
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik)
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup)
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang)
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang)

Penilaian Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Palembang dilakukan oleh Biro Umum Tahun 2024 dengan hasil penilaian sebesar 95,66 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Obyek Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	Kategori
Unit Pengolah	94,92	AA (Sangat Memuaskan)
Bagian Tata Usaha	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
Kelompok Infokom	94,20	AA (Sangat Memuaskan)
Kelompok Pengujian	93,27	AA (Sangat Memuaskan)
Kelompok Pemeriksaan	92,69	AA (Sangat Memuaskan)
Kelompok Penindakan	95,89	AA (Sangat Memuaskan)
Unit Kearsipan II	96,39	AA (Sangat Memuaskan)
NILAI PENGAWASAN	95,66	AA (Sangat Memuaskan)

Tabel 3.1.63

Rincian Penilaian IKU 27

Target nilai pengelolaan kearsipan adalah 94,71. Realisasi tahun 2024 sebesar 95,66 (Sangat Memuaskan) dengan capaian kinerja sebesar 101,00% dan termasuk kategori **Sangat Baik**.

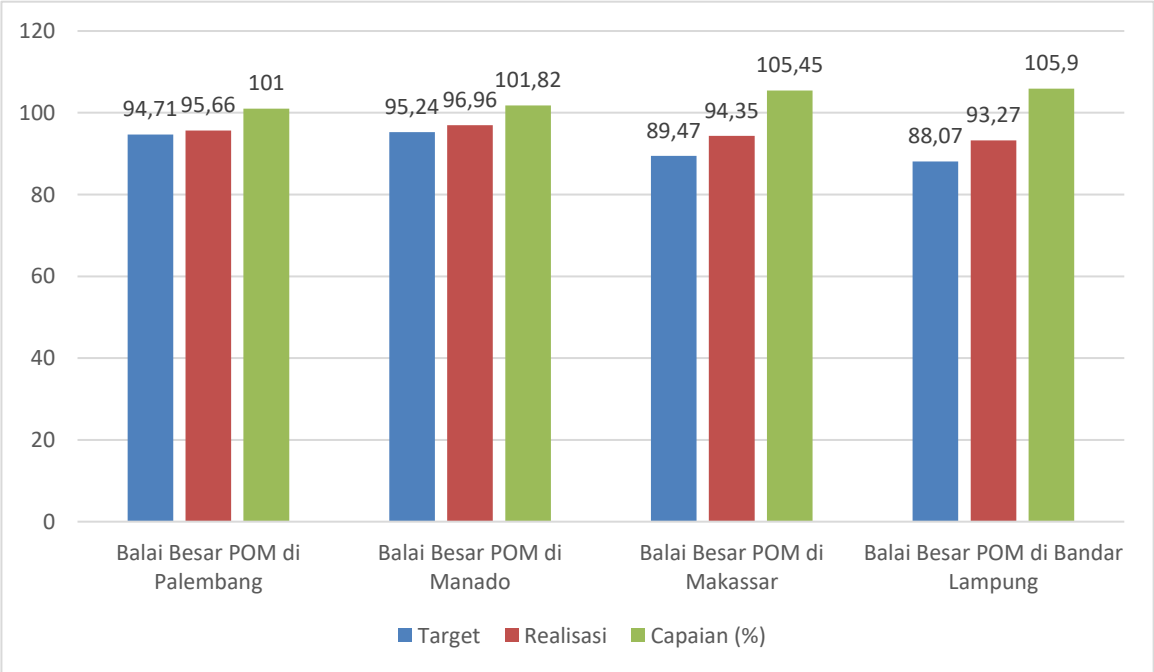
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
												94,71	95,66	101,00

Tabel 3.1.64
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 sebesar 94,71, merupakan indikator baru di tahun 2024 meskipun telah menjadi indikator direktif penugasan tahun 2023 dan telah dilakukan penilaian sejak tahun 2022. Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Palembang sebesar 101,00% dengan kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.31
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 27

Realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan dari seluruh unit kerja pada klaster yang sama menunjukkan hasil telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi tertinggi pada klaster ini diraih oleh Balai Besar POM di Manado

dengan nilai 96,97 diikuti Balai Besar POM di Palembang dengan nilai 95,66, kemudian Balai Besar POM di Makassar dengan nilai 94,35 dan terendah pada Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan nilai 93,27. Hasil ini menunjukkan pengelolaan kearsipan telah dijalankan secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan di seluruh unit kerja Badan POM di daerah dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan evaluasi capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 yang telah mencapai target yang diharapkan, beberapa hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian adalah:

a. Penciptaan arsip menggunakan aplikasi SRIKANDI.
b. Penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
c. Pemberkasan terhadap seluruh arsip aktif yang tercipta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
d. Penyusunan daftar arsip vital pada unit pengolah yang memiliki arsip vital sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

e. Penyediaan sarana peminjaman arsip telah disediakan

f. Pemenuhan sarana dan prasaran kearsipan pada unit pengolah telah dilaksanakan.

g. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan pemindahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Badan POM.

h. Penataan arsip inaktif pada Unit Kearsipan II.

i. Penciptaan naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI dan berdasarkan Peraturan Badan POM NOmor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM

j. Kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan BPOM telah secara konsisten diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang terlibat di lingkungan Balai Besar POM di Palembang

k. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada pengolah telah dilaksanakan.

Rekomendasi terhadap kinerja yang masih harus ditingkatkan berdasarkan evaluasi pengawasan kearsipan Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan format naskah dinas sesuai dengan tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM

b. Pada tahap penggunaan arsip agar menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD

c. Pada tahap pemeliharaan arsip, kegiatan pemberkasan sebaiknya dilakukan untuk seluruh arsip yang tercipta di lingkungan Balai Besar POM di Palembang

d. Penyampaian daftar berita acara alih media sebagai lampiran berita acara alih media agar memuat informasi sesuai ketentuan

e. Penyampaian daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagai lampiran berita acara pemindahan arsip harusmemuat informasi sesuai dengan ketentuan

f. Agar membuat usulan pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan yaitu mengikutkan sertifikasi bagi Arsiparis dan Diklat teknis bagi pengelola arsip

g. Pimpinan unit kearsipan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, agar bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya kearsipan, monitoring dan evaluasi

h. Agar unit kearsipan II menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif di Record Center.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Palembang pada tahun 2024 sebesar 94,71. Langkah awal yang dilaksanakan adalah pembentukan tim kearsipan yang terdiri dari tim yang bertanggungjawab pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah, Tim Pengelola Arsip melibatkan seluruh arsiparis dan

pengelola arsip pada seluruh Kelompok Substansi sebagai Unit Pengolah. Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi tim arsip dilaksanakan pelatihan dan workshop kearsipan secara mandiri maupun pembelajaran daring melalui IDEAS. Rencana aksi yang sudah dilakukan tahun 2024 untuk mencapai target antara lain: melakukan sosialisasi pengelolaan kearsipan pada WhatsApp grup kantor, monitoring pelaksanaan kegiatan, pendampingan penggunaan instrumen kearsipan seperti aplikasi Srikandi (ANRI), operasionalisasi tte, optimalisasi peran arsiparis, workshop dalam rangka pengelolaan kearsipan, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan melalui pembuatan googlesite kearsipan balai dan intensifikasi komunikasi dalam menyiapkan data dukung pengawasan kearsipan.

Kegiatan yang telah disampaikan diatas telah mampu mempertahankan dan capaian meningkat dibanding tahun sebelumnya. Desk pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh auditor Biro Umum menghasilkan penilaian pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Palembang melampaui target yang ditetapkan. Konsistensi dan kedisiplinan dalam hal pengelolaan kearsipan sangat diperlukan sehingga data dukung dapat tersaji dengan lengkap dan mutakhir yang menggambarkan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan sesuai kaidah yang ditentukan.

Balai Besar POM di Palembang senantiasa menerapkan Manajemen Risiko dan telah melakukan identifikasi risiko khususnya dalam hal pencapaian target indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan terdapat risiko penyusunan daftar arsip aktif tidak tepat waktu dilakukan pada setiap unit pengolah. Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan level risiko antara lain dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan daftar arsip aktif, melakukan pembagian tanggung jawab yang jelas serta melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaannya dan melakukan intensifikasi menjelang pengawasan kearsipan oleh Biro Umum Badan POM.

9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator, namun nilai pencapaian sasaran ini tidak diperhitungan dalam pencapaian organisasi. Hal

ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No : KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024. Keputusan tersebut diberlakukan karena mempertimbangkan perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN. Pembahasan pencapaian kinerja indikator tersebut tetap akan disampaikan sesuai hasil selengkapnya adalah berikut :

28. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	90,77	87,75	96,67	

Tabel 3.1.65
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 28

Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 diukur menggunakan aplikasi Siasn Badan POM, dengan 4 dimensi pengukuran yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 87,75 masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 90,77 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 96,67%. Data 4 dimensi pengukuran yang diperoleh BBPOM di Palembang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	DIMENSI	PEMENUHAN DIMENSI	BOBOT	NILAI	GAP
1	KUALIFIKASI	91,52	25%	22,88	2,12
2	KOMPETENSI	87,025	40%	34,81	5,19
3	KINERJA	83,53	30%	25,06	4,94
4	DISIPLIN	100	5%	5	0,00

Tabel 3.1.66
Pengukuran IK 28 per Dimensi

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

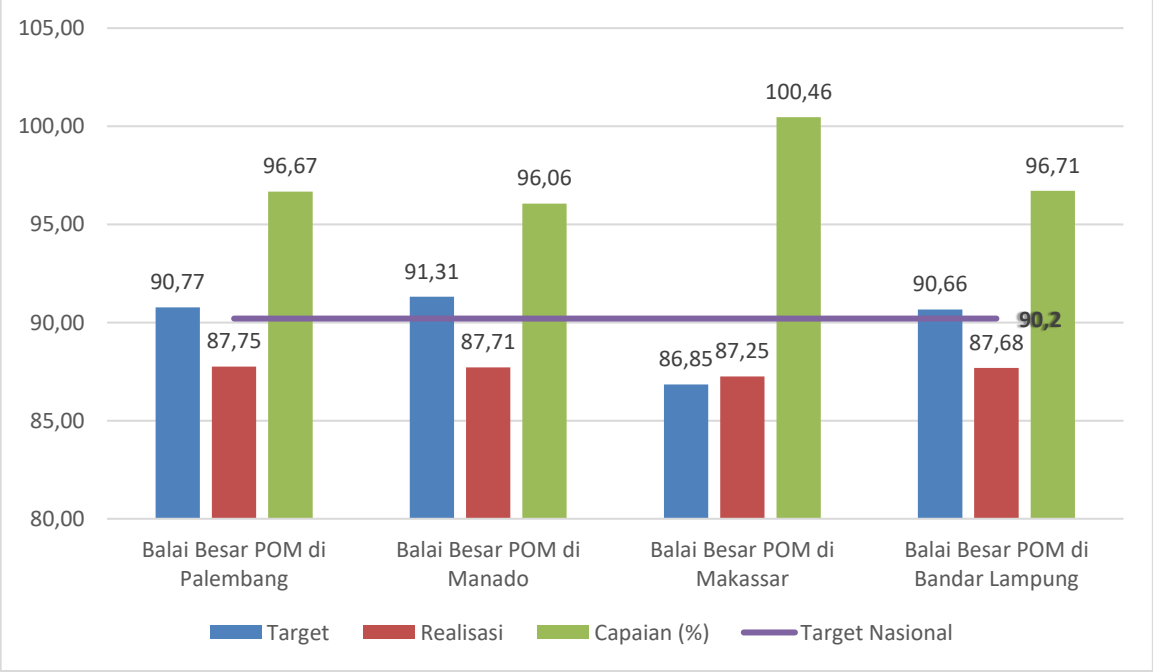
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)

75	85,29	113,72	84,5	84,24	99,69	84,75	85,47	100,85	85	90,42	106,38	90,77	87,75	96,67

Tabel 3.1.67
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Capaian Nilai IP ASN Balai Besar POM di Palembang dalam 1 (satu) periode Renstra dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Capaian IP ASN pada tahun 2020 yaitu 113,72 % pada tahun 2021 capaian turun menjadi 99,69% tahun 2022 capaian naik menjadi 100,85% tahun 2023 naik kembali menjadi 106,38% dan tahun 2024 capaian turun menjadi 96,67%. Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Nilai IP ASN pada periode renstra 2020-2024, paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 113,72 % dan terendah pada tahun 2024 yaitu 96,67%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.32
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 28

Berdasarkan grafik di atas realisasi Nilai IP ASN 4 UPT BBPOM dalam tahun 2024 pada Klaster 3 tertinggi adalah BBPOM di Palembang sebesar 87,75 diikuti oleh BBPOM di Manado sebesar 87,71, BBPOM di Bandar Lampung sebesar 87,68 dan realisasi terendah adalah BBPOM di Makassar sebesar 87,25. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 90,2 maka belum ada

satu pun UPT pada klaster 3 yang melampaui target tersebut. Sedangkan perbandingan capaian Nilai IP ASN pada klaster 3, BBPOM di Manado dengan nilai 96,06 BBPOM di Palembang 96,67 BBPOM di Bandar Lampung 96,71 dan BBPOM Makasar 100,46. Capaian tertinggi dimiliki oleh BBPOM di Makasar, sekaligus sebagai satu-satunya UPT pada Klaster 3 yang melampaui target pada tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai IP ASN BBPOM di Palembang pada tahun 2024 dibawah target yang ditetapkan dan merupakan capaian terendah pada periode renstra 2020 - 2024. Nilai capaian IP ASN BBPOM di Palembang berada diatas BBPOM Manado dan dibawah BBPOM Bandar Lampung dan Makassar. Adapun faktor penyebab kegagalan pencapaian target Nilai IP ASN adalah sebagai berikut :

- Adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.
- Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM untuk masing-masing dimensi yaitu:

  a. Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai. Pada dimensi kualifikasi BBPOM di Ppalembang capaian sebesar 91,52 % masih terdapat 2,12 % pegawai yang belum memenuhi persyaratan minimum pada jabatan terakhir termasuk didalamnya pegawai PPPK.

  b. Dimensi Kompetensi dikonversi data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja dengan data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM). Pada dimensi kompetensi capaian 87,03% dari target masih kurangnya pemenuhan yang cukup tinggi yaitu 5,19%. Hal ini disebabkan pada komponen pengembangan kompetensi fungsional dan teknis belum semua pegawai memenuhi target yang

ditetapkan. Selain itu dengan masuknya penilaian kinerja sebagai aspek dalam penilaian kompetensi juga menyebabkan capaian kompetensi tidak maksimal dimana penilaian kinerja pegawai pada tahun 2023 belum memanfaatkan pemberian reward atas perolehan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM Palembang dengan predikat "Istimewa" untuk penilaian kinerja pegawai " Diatas Ekspektasi".

c. Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN. Capaian aspek Kinerja belum maksimal yaitu 83,53% masih terdapat 4,94% target belum tercapai hal ini disebabkan BBPOM di Palembang belum memanfaatkan pemberian reward atas perolehan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM Palembang dengan predikat "Istimewa" untuk penilaian kinerja pegawai " Diatas Ekspektasi".

d. Dimensi Disiplin mengambil data disiplin dari SIASN BKN. Pencapaian IP ASN pada aspekdisiplin sudah terpenuhi 100% hal ini adalah bentuk kesadaran pegawai dan pengawalan manajemen yang sudah cukup baik.

Sebagai institusi yang menerapkan Manajemen Risiko, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi risiko khususnya dalam hal pencapaian target indikator Indeks Profesionalitas ASN dalam hal ini terdapat Penetapan sanksi yang salah kepada pegawai yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja pegawai yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat profesionalitas pegawai. Hal-hal yang dilakukan ntuk menurunkan level risiko antara lain dengan menyusun kebijakan terkait mekanisme rotasi pegawai, kebijakan pemberian *reward / punishment*, menyusun perencanaan kinerja dengan cascading sesuai tugas fungsinal pegawai dan penegakan disiplin pegawai dengan penerapan reward dan punishment.

Rekomendasi perbaikan dimasa yang akan datang yaitu kegiatan optimalisasi sisa anggaran belanja modal/persediaan agar dilakukan maksimal pada triwulan 3 dan untuk barang yang stoknya tersedia.

ASN adalah modal utama dalam pencapaian target-target indikator yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang tidak maksimal dapat berisiko terhadap gagalnya pencapaian target - target indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu peningkatan aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kediplinan pegawai

perlu dibangun dan dikembangkan malalui inovasi pengelolaan ASN secara digital.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja yang telah dilaksnakan sbb :

1. Perencanaan Pengembangan kompetensi pegawai
2. Pemberian ijin belajar/tugas secara formal
3. Perencanaan kinerja pegawai dan monev kinerja berkala
4. Pembinaan kedisiplinan pegawai secara rutin melalui apel pagi minguan

Program tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2023 yang tujuannya untuk menunjang peningkatan capaian IP ASN dari aspek kualifikasi, pengembangan kompetensi, kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai. Hasil pengukuran IP ASN atas implementasi tahun 2023 melalui program tersebut belum sepenuhnya berhasil terutama pada aspek kompetensi dan kinerja pegawai yang GAP terhadap target bobot yang harus dicapai masih cukup tinggi yaitu 5,19 % dan 4,94. Untuk itu pada triwulan 2 tahun 2024 telah dibangun inovasi pengelolaan ASN yaitu Inovasi "MAKSUBA". Inovasi ini bertujuan agar pegawai dapat menyusun strategi secara mandiri dalam meningkatkan kedisiplinan, pengembangan kompeten dan peningkatan kinerja serta peningkatan kualifikasi.

10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator. Dari perhitungan 2 indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 110,69%. Terdapat 1 indikator yang pencapaian sasarannya dapat dikonversi dari 100% menjadi 120% yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal. Konversi nilai ini dilakukan sesuai Nota dinas dari Sekretaris Utama No : PR.09.03.2.01.25.42 Tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja mengacu

pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Nilai konversi ini berpengaruh pada nilai pencapaian sasaran, namun pembahasan pencapaian per indikator kinerja akan tetap dibahas sesuai nilai capaian sebelum konversi. Hasil selengkapnya adalah berikut :

29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,3	87,49	101,38	

Tabel 3.1.68
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 29

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2021 tentang Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BPOM yang berlaku untuk tahun 2021-2024 merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Standar Ruang Lingkup > 65,

2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,

3) Standar Alat Laboratorium > 70

Monitoring dan evaluasi GLP ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional setiap triwulan tetapi laporannya dilakukan secara

tahunan. Adapun rincian nilai yang diperoleh BBPOM di Palembang pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup 87,21%,
   Nilai ini diperoleh dari Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian, hasil uji profisiensi yang *inlier*, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%
2. Pemenuhan Standar Alat Laboratorium 81,94%
   Nilai ini dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan laboratorium dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.
3. Pemenuhan Standar Kompetensi Personel 93,32%
   Nilai ini diperoleh dengan menhitung kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-rata, dan menjadi nilai realisasi indikator, sehingga realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP pada Tahun 2024 yang didapatkan adalah sebesar 87,49%. Realisasi ini bila dibandingkan dengan target 86,3%, maka capaian yang diperoleh sebesar 101,38% dengan kategori baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
70	70,5	100,71	77	76,2	98,96	82	80,58	98,27	87	86,1	98,97	86,3	87,49	101,38

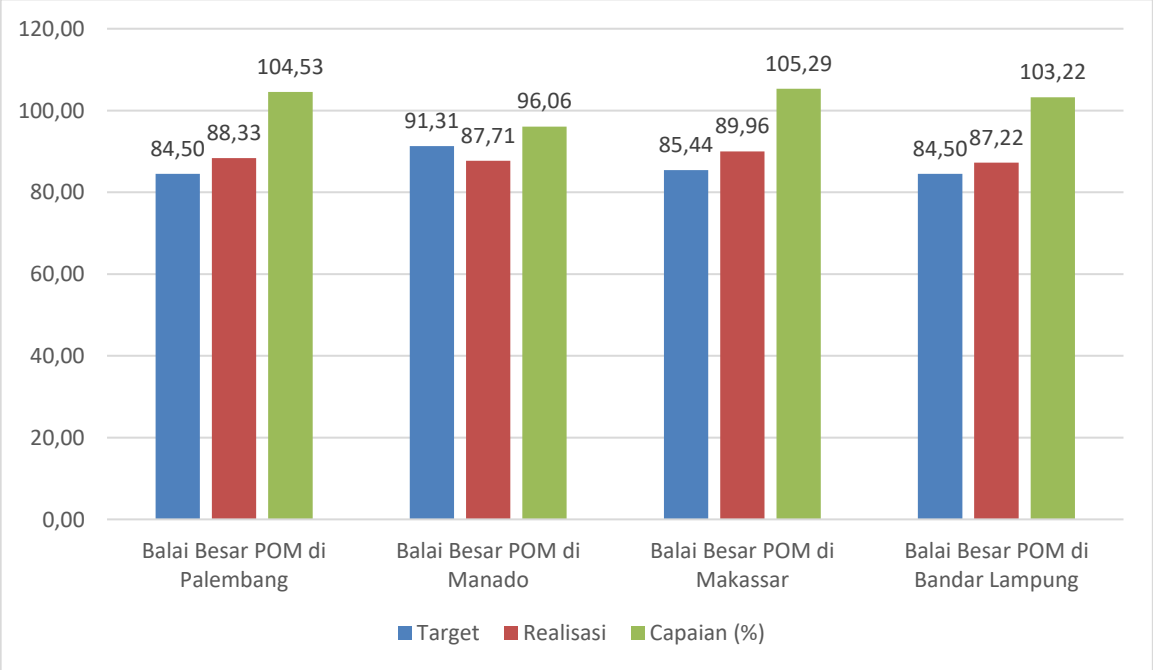
Tabel 3.1.69
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 29

Realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dari tahun 2020 terus meningkat hingga tahun 2024, berturut-turut dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu 70,5%, 76,2%, 80,58%, 86,1% dan 87,49%.

Meskipun demikian capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2022 yaitu 100,71% di tahun 2020, menjadi 98,96 di tahun 2021 dan 98,27 di tahun 2022. Capaian indikator ini kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 98,97% dan 101,38%. Target indikator kinerja ini mengalami penyesuaian oleh PPPOMN pada tahun 2024 dari sebelumnya 87% di tahun 2023 turun menjadi 86,3% pada tahun 2024.

Analisis Trend terhadap indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP pada Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator Stagnan dengan nilai 6,89.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.33
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 29

Realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai GLP yang tertinggi pada klaster ini diraih oleh Balai Besar

POM di Makassar dengan nilai 89,96%, diikuti Balai Besar POM di Manado dengan nilai 88,33%, kemudian Balai Besar POM di Palembang dengan nilai 87,49% dan terendah pada Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan dengan nilai 87,22% dengan capaian di atas 100% pada semua balai pada klaster ini.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa penyebab keberhasilan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan ruang lingkup parameter pengujian di setiap laboratorium
2. Ketersediaan anggaran untuk melakukan penambahan alat laboratorium pada tahun berjalan guna meningkatkan pemenuhan standar alat laboratorium. Selain itu juga dilakukannya kalibrasi alat secara rutin baik kalibrasi dari PPPOMN maupun secara eksternal menggunakan pihak ke 3 untuk memastikan bahwa kinerja alat selalu baik sehingga pengujian yang dilakukan valid. Termasuk dalam upaya untuk mempertahankan pemenuhan standar alat laboratorium adalah dilakukannya perbaikan dengan segera terhadap alat yang rusak.
3. Adanya peran serta aktif dan dukungan personel untuk mengikuti pelatihan sehingga menambah kompetensi untuk melakukan pengujian dan pengelolaan laboratorium sesuai standar GLP
4. Dilakukannya monitoring secara berkala oleh PPPOMN setiap triwulan sebagai pengingat dan dapat mendorong pencapaian indikator kinerja ini

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Program pelatihan fungsi pengujian, baik pelatihan eksternal maupun pelatihan internal.

Pelatihan eksternal yang dilakukan pada tahun 2024 terkait ISO 17025 mengambil tema validasi/verifikasi metode analisis mampu meningkatkan kemampuan SDM pengujian dalam menerapkan prinsip-prinsip validasi/verifikasi metode analisis. Selain pelatihan eksternal dilakukan juga peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan ke PPPOMN, dimana tahun 2024 ini selain pelatihan mengenai metode analisis masing-masing laboratorium juga terdapat pelatihan mengenai pemeliharaan alat yang diikuti oleh SDM pengujian. Jenis program pelatihan yang lain adalah Bimtek internal pengujian yang dilakukan di BBPOM di Palembang untuk masing-masing laboratorium. Program pelatihan ini selain meningkatkan pemenuhan standar kemampuan SDM secara tidak langsung juga akan meningkatkan pemenuhan ruang lingkup pengujian serta pemenuhan standar peralatan.

2. Penyusunan dan pemenuhan roadmap peningkatan ruang lingkup pengujian. Pada awal tahun 2024 setiap laboratorium diharuskan membuat roadmap untuk peningkatan kemampuan uji sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh PPPOMN. Perencanaan dibuat untuk setiap triwulan, dimana di akhir tahun 2024 diharapkan masing-masing laboratorium sudah melaksanakan peningkatan kemampuan uji sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
3. Program kalibrasi secara rutin, baik yang dilakukan oleh PPPOMN maupun kalibrasi eksternal ke pihak ke 3. Program ini akan menjamin alat laboratorium dapat memberikan hasil yang valid saat dilakukan untuk melakukan pengujian, sehingga selain mendukung pemenuhan standar alat laboratorium program ini juga mendukung peningkatan pemenuhan standar ruang lingkup
4. Program pengadaan di BBPOM di Palembang, baik pengadaan alat laboratorium, suku cadang, glassware, reagensia dan media mikrobiologi, serta penunjang pengujian lainnya
5. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di BBPOM di Palembang, di antaranya perbaikan alat laboratorium rusak yang dapat dilakukan sesegera mungkin, perbaikan jaringan listrik, AC serta sarana dan prasarana penunjang pengujian lainnya yang dapat dilakukan sesegera mungkin.
6. Kegiatan monev yang dilakukan oleh PPPOMN per triwulan untuk menjaga agar pencapaian indikator kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian sesuai GLP untuk setiap BB/BPOM tetap on the track.

30. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal	3	3	100,00	

Tabel 3.1.70
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 30

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang mencakup komponen :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM

b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan

c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut : SIPT, SPIMKer Data Keracunan

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BOC, berita aktual pada subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

   Periode pelaporan untuk pengelolaan data dan informasi dilakukan secara bulanan sedangkan realisasi dihitung per triwulan dengan nilai yang diperoleh

dari nilai assessment Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- 2,26 - 3 : optimal
- 1,51 - 2,25 : cukup
- 0,76 - 1,5 : kurang optimal
- 0 - 0,75 : sangat kurang

Pada tahun 2024, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (optimal) sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga didapatkan capaian sebesar 100% dengan kategori **baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

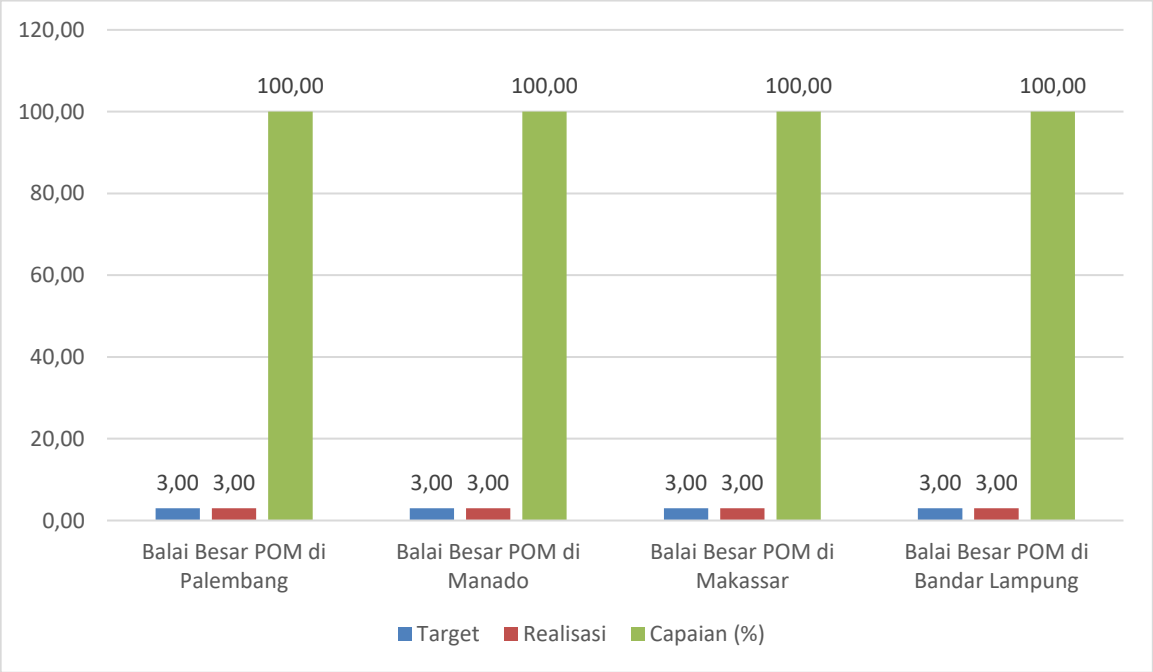
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1,51	2,5	165,56	2	1,95	97,50	2,25	2,5	111,11	2,5	3	120,00	3	3	100,00

Tabel 3.1.71
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang pada umumnya mengalami kenaikan tiap tahunnya dari nilai 1,51 pada tahun 2020 menjadi 3 pada tahun 2024 dengan kriteria cukup menjadi optimal. Dari target tersebut, diperoleh realisasi yang meningkat yaitu dari nilai 2,5 menjadi 3 (optimal) mulai dari tahun 2023 dan dapat dipertahankan sampai tahun 2024. Nilai capaian indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang pada tahun 2020 sebesar 165,56% (tidak dapat di simpulkan) karena merupakan indikator baru sehingga belum ada review terhadap komponen indikator tersebut, kemudian pada tahun 2021 capaian sebesar 97,5% (baik), tahun 2022 sebesar 111,11% (memenuhi ekspektasi), tahun 2023 sebesar 120% (sangat baik) dan tahun 2024 sebesar 100% (baik).

Analisis trend terhadap indikator indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator Stagnan dengan nilai 6,27 dimana hanya sedikit terdapat peningkatan capaian.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.34
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 30

Perbandingan nilai indeks pengelolaan data dan informasi pada klaster 3 yaitu BBPOM di Palembang, BBPOM di Manado, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Lampung, sudah mencapai optimal dengan nilai 3 dengan capaian 100% (baik). Pengelolaan data dan informasi pada klaster 3 berupa SIPT dan SPIMKer Data Keracunan), penggunaan email, sharing folder, dashboard BOC dan berita aktual pada subsite Balai sudah dilakukan secara optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada awal tahun 2020 indeks pengelolaan data dan informasi merupakan IKU baru sehingga capaian tidak dapat di simpulkan (165,56%) tetapi setelah dilakukan review dan pengawalan terhadap komponen penilaian ini, maka nilai indeks ini pada tahun 2023 dan akhir tahun 2024 sudah optimal sehingga ada beberapa faktor pendorong keberhasilan capaian antara lain :

1. Telah dilakukan pemutakhiran SIPT pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian secara real time dan tepat waktu dan menginventaris kendala kendala terkait SIPT dan segera melaporkan ke Pusdatin untuk mendapatkan solusi
2. Pemutakhiran informasi keracunan / kejadian luar biasa keamanan pangan melalui SPIMKer tepat waktu
3. Penggunaan email korporat dan email balai telah dilakukan monitoring setiap bulan pada setiap pegawai oleh TIM IT
4. Meningkatkan login BOC dan akses BCC
5. Sharing folder yang ada telah dimanfaatkan dengan baik sehingga jumlah akses pada sharing folder tersebut meningkat
6. Berita aktual telah berisi tentang semua kegiatan yang dilakukan internal dan eksternal balai dan telah dilakukan sosialisasi pada media sosial untuk meningkatkan jumlah viewer

   Meskipun nilai indeks pengelolaan data dan informasi tidak lagi menjadi penilaian pada renstra selanjutnya, namun perlu terus dilakukan pemantauan terhadap pemanfaatan data dan informasi secara optimal oleh tim IT pada BBPOM di Palembang.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian nilai indeks data dan informasi secara optimal adalah sebagai berikut

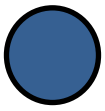
- Memaksimalkan pengadaan alat pengolah data untuk menunjang kegiatan data dan informasi sehingga diperoleh nilai optimal pada setiap tahunnya.
- Pemeliharaan infrastruktur dan jaringan internet secara berkala sehingga kendala terkait jaringan dapat diminimalisir.
- Monitoring terhadap penginputan data sarana pemeriksaan, sampling dan pengujian sampel tepat waktu pada fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian
- Monitoring terhadap login email pegawai dan email balai setiap bulan oleh tim IT
- Monitoring penggunaan sharing folder oleh tim IT
- Monitoring kinerja tim medsos dalam melakukan upload berita aktual pada subsite BBPOM di Palembang dan aktif melakukan sosialisasi di media sosial

11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG SECARA AKUNTABEL BB/BPOM

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator. Dari perhitungan 4 indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 108,09%. Hasil selengkapnya adalah berikut :

31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	90,21	91,3	101,21	

Tabel 3.1.72
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 31

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari asplek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian negara/Lembaga. IKPA dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Fokus formulasi penilaian IKPA terdapat pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) dengan 8 indikator kinerja yaitu revisi DIPA (10%), deviasi halaman III DIPA (10%), data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan

TUP (10%), dispensasi SPM (5%), penyerapan anggaran (20%) dan capaian output (25%).

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2024 adalah 91,3 dari target sebesar 90,21 sehingga capaian yang diperoleh pada Tahun 2024 sebesar 101,21% dengan kategori **sangat baik**. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 91,3 didapatkan dari penjumlahan atas nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yaitu 97,60 dikali 50 persen ditambah nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yaitu 85 dikali 50 persen.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

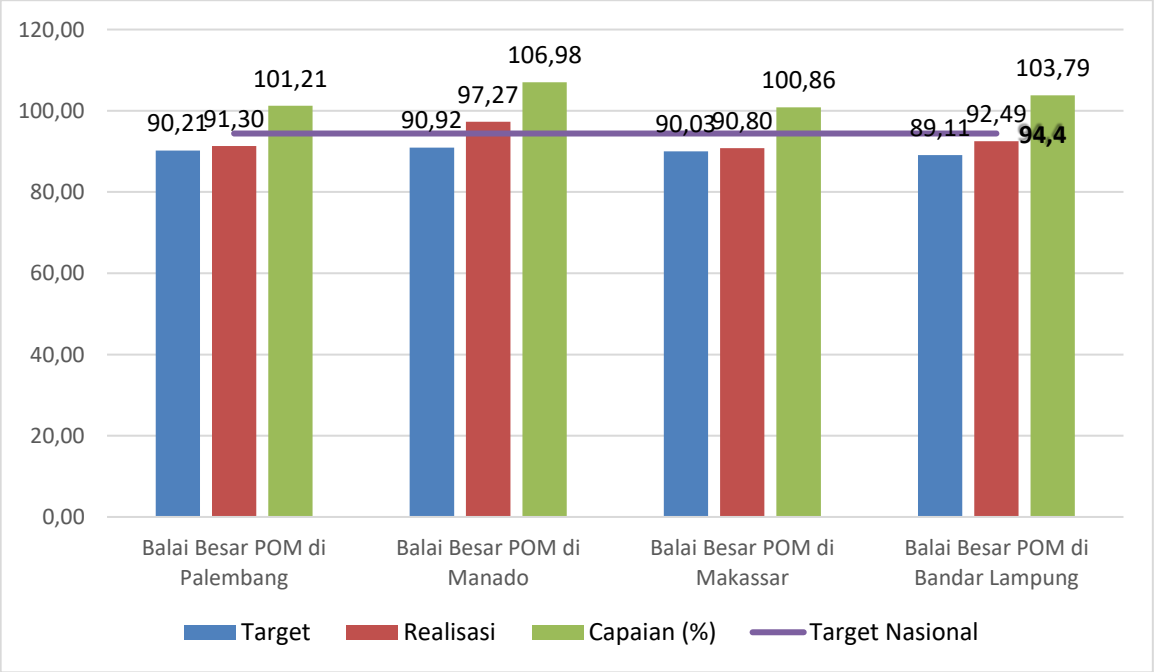
2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
93	97,39	104,72	98,6	89,94	91,22	98,7	90,58	91,77	98,7	89,52	90,70	90,21	91,3	101,21

Tabel 3.1.73
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKU 31

Selama periode lima tahun implementasi Renstra, Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020, sebagai tahun pertama Renstra, capaian indikator ini mencatatkan performa terbaik dengan 104,72%. Hal ini menunjukkan awal yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 dengan capaian 91,22%, yang disebabkan oleh adaptasi terhadap situasi pandemi dan penyesuaian prioritas anggaran.

Pada tahun-tahun berikutnya, trend capaian menunjukkan stabilitas meski belum kembali ke level tertinggi. Tahun 2022 mencatat capaian 91,77%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, diikuti dengan sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 90,70%. Memasuki tahun 2024, sebagai tahun terakhir periode Renstra, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian 101,21%. Peningkatan ini karena adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan pembelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Namun berdasarkan analisis trend terhadap indikator nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator menurun dengan penurunan nilai -2,77.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.35
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 31

Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja UPT Klaster 3 tahun 2024, seluruh Balai Besar POM dalam klaster ini berhasil mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian melebihi 100%. BBPOM di Manado mencatat capaian tertinggi sebesar 106,98% (realisasi 97,27% dari target 90,92), diikuti oleh BBPOM di Lampung dengan capaian 103,79% (realisasi 92,49% dari target 89,11), BBPOM di Palembang dengan capaian 101,21% (realisasi 91,30% dari target 90,21), dan BBPOM di Makassar dengan capaian 100,86% (realisasi 90,80% dari target 90,03).

Jika dibandingkan dengan target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM yang ditetapkan sebesar 94,4, terlihat bahwa hanya BBPOM di Manado yang berhasil melampaui target tersebut dengan realisasi 97,27%. Sementara itu, BBPOM di Palembang, meskipun mencapai target internal, masih berada di bawah target NKA BPOM dengan realisasi 91,30%. Hal serupa juga terjadi pada BBPOM di Lampung (92,49%) dan BBPOM di Makassar (90,80%). Ini mengindikasikan bahwa meskipun seluruh Balai Besar POM di Klaster 3 menunjukkan kinerja

yang baik dalam mencapai target internal masing-masing, masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai target NKA BPOM secara keseluruhan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang tahun 2024 yang mencapai 101,21% didukung oleh beberapa faktor kunci dalam pengelolaan keuangan yang lebih cermat. Program-program yang berkontribusi pada keberhasilan ini meliputi:

- Pengelolaan yang cermat dalam kegiatan keuangan seperti revisi DIPA dan pengelolaan deviasi halaman III DIPA yang menunjukkan fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan. Pengelolaan UP (Uang Persediaan) dan rekon LPJ bendahara yang tepat waktu juga mendukung kelancaran operasional.
- Perbaikan nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang mencakup empat indikator utama: realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi. Fokus pada kelima aspek ini membantu memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan terukur.
- Pengelolaan administrasi keuangan yang baik meliputi penyelesaian kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, optimalisasi penyerapan anggaran, pengelolaan retur SP2D, perencanaan kas (Renkas) yang akurat, serta penanganan dispensasi penyampaian SPM dan pagu minus. Selain itu, konfirmasi capaian output yang rutin dilakukan membantu memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan target kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian NKA ini tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan dan pengendalian yang dilakukan BBPOM Palembang. Implementasi sistem monitoring yang ketat, peningkatan koordinasi antar bagian, dan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur telah berkontribusi pada pencapaian ini. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengelolaan anggaran.

Meski capaian NKA sudah melebihi target yang ditetapkan, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama pada komponen EKA yang nilainya relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek perencanaan program dan kegiatan, serta pengukuran efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi program, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan.

Pencapaian NKA yang sangat baik ini memberikan fondasi yang kuat bagi BBPOM Palembang untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggarannya di masa mendatang. Keberhasilan ini juga dapat menjadi pembelajaran berharga dan benchmark bagi unit kerja lain dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran mereka. Namun, penting untuk tetap menjaga konsistensi dan bahkan meningkatkan kinerja ini, mengingat tantangan pengelolaan keuangan publik yang semakin kompleks di masa mendatang.

Ke depan, BBPOM Palembang perlu mempertahankan praktik-praktik baik yang telah menghasilkan nilai IKPA yang tinggi, sambil terus berupaya meningkatkan nilai EKA melalui perencanaan yang lebih matang dan evaluasi yang lebih mendalam. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan yang lebih integratif, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan sistem pengendalian internal dapat menjadi fokus untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian NKA di periode mendatang.

Berdasarkan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang tahun 2024 yang mencapai 91,3 (101,21% dari target), terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dari sisi IKPA yang mencapai nilai 97,60, meskipun sudah sangat baik, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Rekomendasi untuk komponen IKPA meliputi:

1. Penguatan sistem pengelolaan penyelesaian tagihan, dengan membuat sistem monitoring real-time untuk memastikan tidak ada keterlambatan pembayaran;

2. Optimalisasi pengelolaan UP (Uang Persediaan) melalui perencanaan yang lebih akurat dalam penentuan besaran UP dan revolving-nya;

3. Penyempurnaan proses revisi DIPA dengan melakukan perencanaan yang lebih matang di awal tahun untuk meminimalisir frekuensi revisi;

4. Peningkatan akurasi perencanaan kas (Renkas) untuk menghindari deviasi yang signifikan antara perencanaan dan realisasi.

Untuk komponen EKA yang mendapat nilai 85, diperlukan upaya lebih intensif dalam perbaikan. Rekomendasi perbaikan mencakup:

1. Penguatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran, dengan membuat dashboard monitoring yang dapat diakses real-time oleh seluruh penanggung jawab kegiatan;

2. Peningkatan konsistensi RPD (Rencana Penarikan Dana) melalui penyusunan timeline kegiatan yang lebih detail dan terukur;

3. Optimalisasi capaian output dengan melakukan review berkala terhadap indikator kinerja dan target yang ditetapkan;

4. Implementasi sistem early warning untuk mengidentifikasi potensi deviasi dari rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran, direkomendasikan untuk melakukan beberapa langkah strategis:

1. Pembentukan tim khusus monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang bertugas melakukan pemantauan harian terhadap pelaksanaan anggaran dan pencapaian output;

2. Pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop terkait pengelolaan keuangan negara, particularly dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran;

3. Implementasi sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja anggaran;

4. Penguatan koordinasi antar bagian/bidang untuk memastikan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja anggaran, baik faktor internal maupun eksternal. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran. Terakhir, perlu dilakukan benchmarking dengan unit kerja lain yang memiliki capaian kinerja lebih tinggi untuk mengadopsi best practices yang dapat diimplementasikan di BBPOM Palembang.

a. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BBPOM di Palembang dapat diuraikan dalam dua aspek utama:

1. Pengelolaan kegiatan keuangan secara lebih cermat, yang mencakup beberapa aktivitas penting seperti revisi DIPA, pengelolaan deviasi halaman III DIPA, dan pengelolaan UP (Uang Persediaan). Selain itu, dilakukan pengelolaan pada aspek administrasi keuangan meliputi rekon LPJ bendahara, kontrak, penyelesaian tagihan, dan penyerapan anggaran. Aktivitas ini juga mencakup pengelolaan retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), penanganan pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pengelolaan pagu minus, dan konfirmasi capaian output.
2. Perbaikan terhadap nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang merupakan instrumen pengukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Evaluasi ini mencakup empat indikator utama yaitu: realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi. Pengelolaan yang cermat terhadap komponen-komponen ini berkontribusi pada pencapaian kinerja anggaran yang optimal.

32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	94,35	100	105,99	

Tabel 3.1.74
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 32

Nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa diperoleh dengan rumus :

Nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa = (nilai SiRUP ips + nilai E-Tendering ips + nilai E-Purchasing ips + nilai Non E-Tendering dan Non E-Purchasing ips + nilai E-Kontrak ips)

Dimana masing-masing nilai diperoleh dari rumus sebagai berikut :

1. Rumus SiRUP ips (nilai 20) :
   ((Pagu Penyedia + Pagu Swakelola) / Pagu Pengadaan (OMSPAN Pagu Barang dan Pagu Modal)) * 100%
   A. RUP dengan Nilai 90% s.d 100% = 100 (20)
   B. RUP dengan Nilai 70% s.d 90% = 75 (15)
   C. RUP dengan Nilai 50% s.d 70% = 50 (10)
   D. RUP dengan Nilai Lebih Kecil dari 50% = 0

2. Rumus E-Tendering ips (nilai 20):
   (Pagu Tender Pemilihan / Pagu Tender SiRUP) * 100%
   A. Nilai 100% = 100 (20)
   B. Nilai Kurang Dari 100 = Sesuai Persentase

   Jika tidak ada paket tender, tetap mendapatkan Skor Maksimal

3. Rumus E-Purchasing ips (nilai 20):
   (Total Paket Purchasing / Total Paket Purchasing Status Selesai) * 100%
   A. Nilai 100% = 100 (20)
   B. Nilai lebih dari 79% s.d 99% = 75 (15)

C. Nilai lebih dari 60% s.d 79% = 50 (10)

D. Nilai kurang dari 60% = 0

4. Rumus Non E-Tendering dan Non E-Purchasing ips (nilai 20) :

(Pagu Non Tender Pemilihan / Pagu Non Tender SiRUP) * 100%

A. Nilai Lebih dari 60% = 100 (20)

B. Nilai lebih dari 40% s.d 60% = 75 (15)

C. Nilai lebih dari 20% s.d 40% = 50 (10)

D. Nilai kurang dari 20% = 0

5. Rumus E-Kontrak ips (nilai 20) :

(Total Paket Kontrak Selesai / Total Paket Kontrak) * 100%

((1) / 1)) * 100% = 100% (Indeks Skor : 20)

A. Menerapkan E-Kontrak dengan Nilai Lebih dari 20% = 100 (20)

B. Menerapkan E-Kontrak dengan Nilai Kurang dari 20% = 0

Target nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa BBPOM di Palembang tahun 2024 adalah 94,35%. Realisasi tahun 2024 yang diperoleh pada Siroum BPOM sebesar 100,00% dengan capaian kinerja sebesar 105,99% dan termasuk kategori sangat baik. Rincian realisasi nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa yang diambil dari Siroum sebagai berikut :

Indikator Kinerja	SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	E-Kontrak	Total	Status
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Baik

Tabel 3.1.75
Rincian Penilaian Realisasi IKU 32

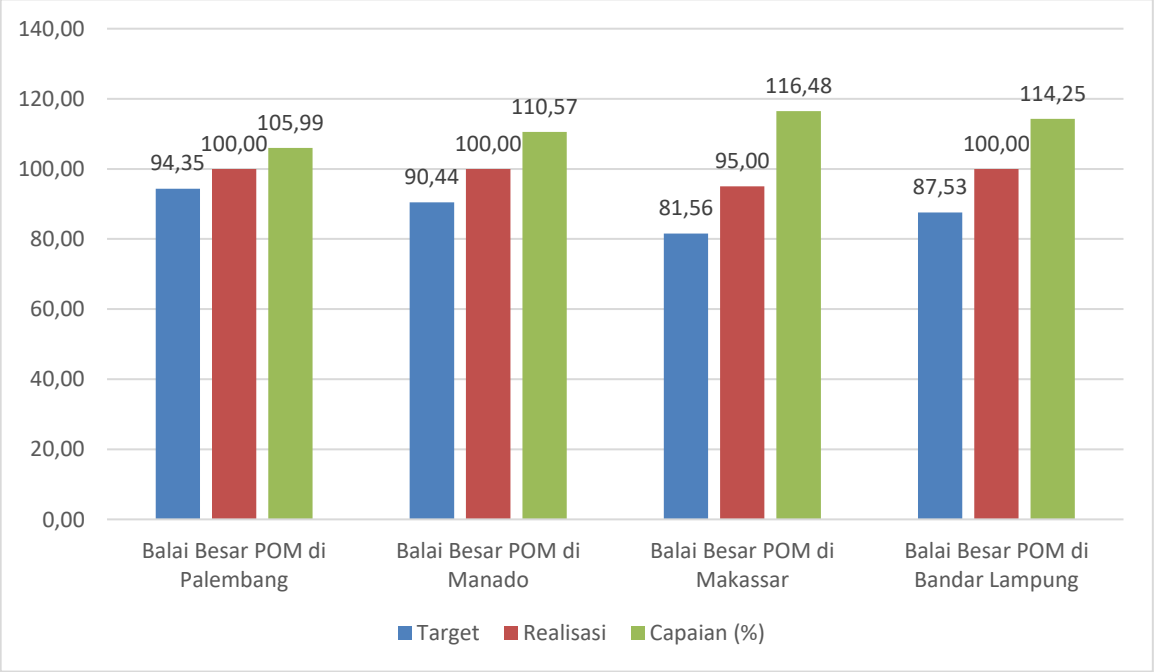
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
												94,35	100	105,99

Tabel 3.1.76
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 IKU 32

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, dimana baru tahun 2024 ditetapkan sebagai IKU, namun pada data siroum, nilai ini sudah dihitung sejak tahun 2022. Realisasi BBPOM di Palembang sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 100, artinya BBPOM di Palembang selalu melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan kualitas maksimal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.36
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 32

Realisasi kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Palembang tahun 2024 sebesar 100 sama dengan realisasi BBPOM di Manado dan BBPOM di Bandar Lampung, sedangkan BBPOM di Makassar dengan realisasi nilai terendah sebesar 95. Sedangkan, dari data terlihat capaian

BBPOM di Palembang menjadi yang terendah (105,99%), walaupun realisasi sama 100%, hal ini tidak terlepas dari target BBPOM di palembang yang paling tinggi dibandingkan target UPT yang lain, yaitu 94,35%. Secara rinci perbandingan target, realisasi dan capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya indikator kinerja ini tidak lepas dari komitmen dan kerja sama antara semua pengelola pengadaan barang dan jasa, baik panitia pengadaan dan pejabat pembuat komitmen dalam menyelesaikan pengadaan yang dilakukan secara tuntas. Monitoring dan evaluasi terhadap semua metode pengadaan yang dilakukan, dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua selesai dan tidak ada kendala. Jika terdapat kendala, maka kendala tersebut dapat segera dicarikan solusi sehingga target indikator dapat tercapai. Sebagai upaya penyempurnaan kinerja kedepan, peningkatan kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga kendala-kendala dalam pengadaan dapat terselesaikan dengan baik yang berakibat pada keberhasilan pengadaan dan ketepatan waktunya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan program, maka dilakukan kegiatan yang dapat mewujudkan target yang ditetapkan, yaitu :

1. Perencanaan pengadaan

   Membuat rencana umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga pelaksanaannya dapat dimonitor dan dilakukan evaluasi.

2. Konsultasi dan koordinasi

   Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan UKPBJ Badan POM terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk meminimalkan terjadinya kesalahan.

3. Pelatihan dan Bimbingan Teknis

   Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa melalui bimbingan teknis ataupun pelatihan lainnya. Hal ini dilakukan agar SDM yang ada selalu terinformasi terhadap perbaruan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

4. Rapat monev bulanan

   Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan sehingga setiap kendala dan masalah dapat terdeteksi sedini mungkin.

33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93	97,82	105,18	

Tabel 3.1.77
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU 2=33

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai

PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. dengan Bobot 30% terdiri dari:

• Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

• Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

➢ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

➢ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)

➢ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)

➢ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

➢ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

➢ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)

➢ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)

➢ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

3. Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

4. Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan/ total barang rusak berat x 100%.

5. Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan/total barang using/rusak x 100 %.

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara diperoleh dengan Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%).

BBPOM di Palembang tahun 2024 mampu merealisasikan pengelolaan barang milik negara sebesar 97,82 dari target 93 sehingga diperoleh capaian sebesar 105,18% dan termasuk kategori "**sangat baik**".

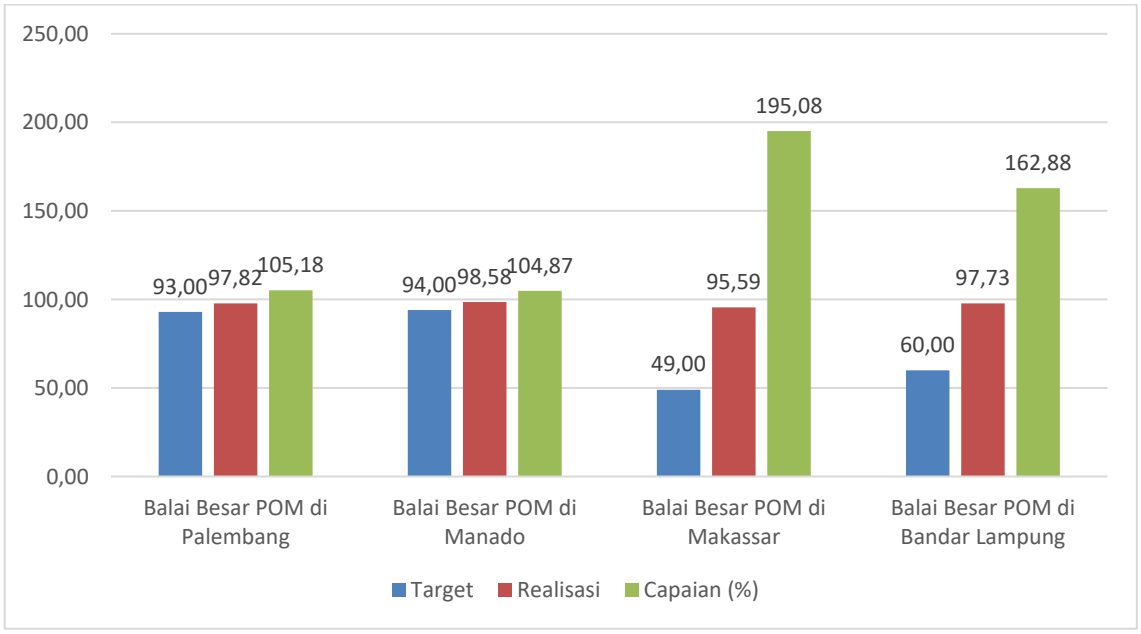
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
												93	97,82	105,18

Tabel 3.1.78
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara ditetapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2024 dengan perolehan capaian 105,18%. Namun demikian pengukuran terhadap pengelolaan BMN telah dilakukan sejak tahun 2022 dengan realisasi sebesar 92 dan tahun 2023 realisasi menurun menjadi 68,72. Realisasi meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 97,82.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.37
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 33

Ada 4 (empat) UPT setara dalam Pengelolaan BMN tahun 2024 pada Klaster 3 yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM Makasar dan BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi Nilai Pengelolaan BMN BBPOM di Palembang sebesar 97,82 menempati urutan kedua tertinggi setelah BBPOM di Manado sebesar 98,58, selanjutnya BBPOM di Bandar Lampung sebesar 97,73 dan realisasi terendah BBPOM Makasar 95,59.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pengelolaan barang milik negara dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas dan optimalisasi barang milik negara dapat terwujud dengan mengedepankan profesionalitas, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Keberhasilan pencapaian indikator nilai pengelolaan BMN secara optimal hal ini didukung oleh beberapa faktor yaitu komitmen, kerjasama petugas pengelola BMN dan tim pengelola keuangan dan perencana dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Komitmen yang baik dari petugas BMN dalam

mengelola BMN melalui Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Dari 5 parameter pengukuran keberhasilan pengelolaan BMN terdapat 2 parameter yang telah diperoleh nilai bobot maksimal yaitu penyusunan RKBMN diperoleh nilai 10 dari bobot 10% dan pemusnahan barang persediaan diperoleh nilai 20 dari bobot 20% sementara 3 parameter masih perlu upaya untuk peningkatan perolehan agar lebih optimal yaitu pelaporan yang baik diperoleh nilai sebesar 28,65 dari bobot 30%. Dalam hal pelaporan ketepatan waktu sudah terpenuhi yaitu 25 dari bobot 25% namun kualitas pelaporan sesuai ketentuan dengan nilai 70,5 dari bobot maksimal 75%, selanjutnya PSP juga belum maksimal, diperoleh nilai 19,95 dari bobot 20% hal ini disebabkan adanya pengadaan optimalisas yang dilaksanakan di akhir tahun. Begitu juga dengan penghapusan diperoleh nilai 19,00 dari bobot 20% tidak maksimalnya nilai pada aktifitas penghapusan yaitu adanya mekanisme kajian dari biro hukor yang belum ada timelinenya, sehingga penerbitan SK pemusnahan memerlukan waktu cukup lama.

Adapun kegiatan pengelolaan BMN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pelaporan BMN Semester I Tahun 2024 telah disusun sesuai 181/PMK.06/2016;
- Pelaporan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024, dengan ketentuan batas akhir pelaporan adalah 25 Juli 2024;
- Laporan RKBMN akan disusun pada bulan Oktober 2024;
- Penetapan status pengunaan telah sesuai pedoman PMK 246/PMK.06/2014;
- Penghapusan BMN telah sampai tahap pengajuan permohonan penjualan ke KPKNL Palembang;
- Pemusnahan BMN berupa persediaan usang telah dilaksanakan pada bulan September 2024;
- Per 30 September 2024 tidak terdapat BMN berupa persediaan dalam kondisi usang/rusak

Sebagai institusi yang menerapkan Manajemen Risiko, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi risiko khususnya dalam hal pencapaian

target indikator Nilai Pengelolaan BMN terdapat risiko Kehilangan BMN dan Persediaan yang dapat berdampak pada kerugian negara dan Menghambat Operasional Perkantoran. Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan level risiko antara lain dengan SOP melakukan stok opname secara berkala setiap semester, melakukan pemutakhiran data BMN secara rutin setiap semester dan meningkatkan kapasitas tenaga pengelola BMN.

Rekomendasi perbaikan dimasa yang akan datang yaitu kegiatan optimalisasi sisa anggaran belanja modal/persediaan agar dilakukan maksimal pada triwulan 3 dan untuk barang yang stoknya tersedia.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target pengelolaan BMN bebrapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Membuat rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga pelaksanaannya dapat dimonitor dan dilakukan evaluasi
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan UKPBJ Badan POM terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk meminimalkan terjadinya kesalahan.
- Adanya koordinasi antara PPK, pejabat pengadaan dan pengelola BMN terkait barang dan jasa yang diadakan, sehingga tercatat dalam aset BMN
- Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa melalui bimbingan teknis ataupun pelatihan lainnya. Hal ini dilakukan agar SDM yang ada selalu terinformasi terhadap perbaruan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan sehingga setiap kendala dan masalah dapat terdeteksi sedini mungkin.

34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	79,3	132,17	

Tabel 3.1.79
Perbandingan Target Realisasi Kinerja IKU 34

Realisasi persentase penggunaan PDN BBPOM di Palembang sebesar 79,3% dari target 60% dengan capaian 132,17% dan termasuk kategori Tidak dapat disimpulkan. Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri diperoleh dari perhitungan 70% dari perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada SIRUP ditambah 30% dari realisasi pemilihan belanja PDN. Perencanaan belanja PDN dihitung dari nilai anggaran PDN yang terumumkan di SIRUP dibagi dengan total pagu anggaran yang terumumkan di SIRUP. Realisasi pemilihan dihitung dari realisasi pemilihan PDN dibagi dengan nilai anggaran PDN yang terumumkan di SIRUP. Rincian data diambil dari aplikasi SIROUM dengan rincian sebagai berikut :

Pagu RUP Terumumkan (a)	Nilai PDN Terumumkan (b)	Nilai Pemilihan PDN (c)	Perencanaan PDN pada SIRUP (d = 70%*b/a)	Realisasi Pemilihan PDN (e = 30%*c/a)	Realisasi Penggunaan PDN (d+e)
6.833.087.000	4.155.387.000	5.088.157.791	42,57 %	36,73 %	79,30 %

Tabel 3.1.80
Rincian Data dari Aplikasi SIROUM

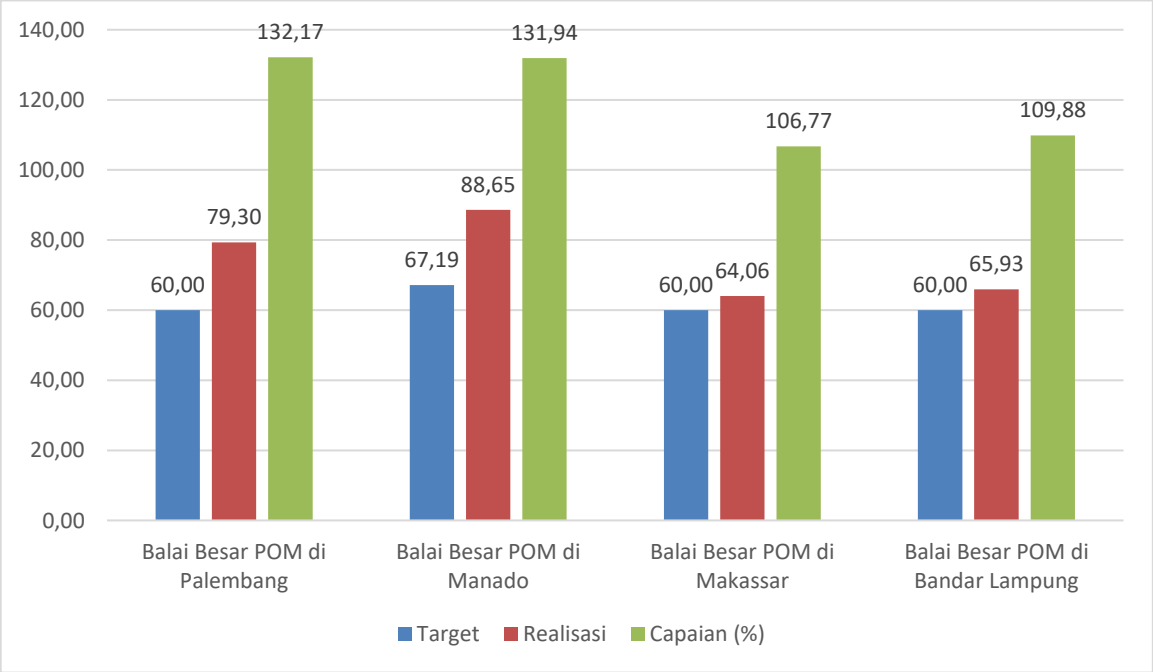
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024

2020			2021			2022			2023			2024		
T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
												60	79,3	132,17

Tabel 3.1.81
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja sasaran kegiatan yang baru ditetapkan di tahun 2024, namun penilaian terhadap penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan oleh Biro Umum Badan POM RI sejak tahun 2022. Untuk nilai penggunaan produk dalam negeri BBPOM di Palembang tahun 2022 adalah 32,23% dan di tahun 2023 adalah 41,27%. Hal ini menunjukkan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, BBPOM di Palembang menunjukkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

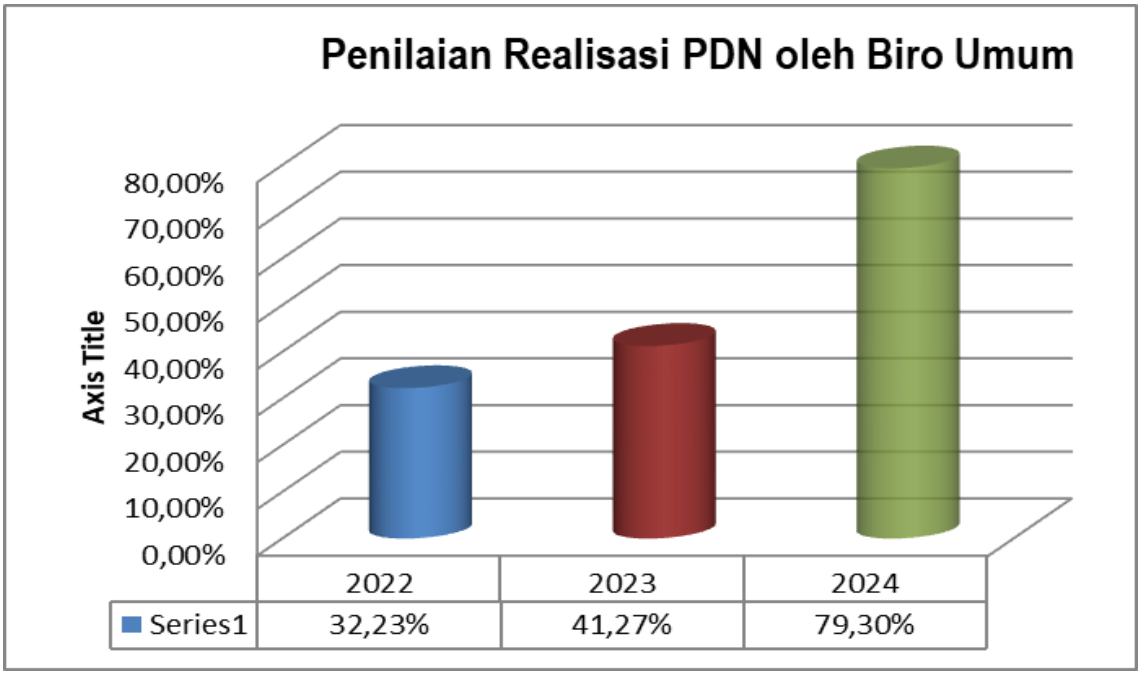
c. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja UPT Lain pada Klaster 3



Gambar 3.1.38
Perbandingan Realisasi Kinerja UPT pada Klaster 3 IKU 34

Berdasarkan grafik dan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penggunaan produk dalam negeri yang tertinggi adalah BBPOM di Manado (88,65%) dan yang terendah adalah BBPOM di Makasar (64,06%). Realisasi BBPOM di Palembang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi BBPOM di Manado namun lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makasar dan BBPOM di Lampung. Secara keseluruhan, realisasi keempat UPT tersebut melampaui target yang ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)



Gambar 3.1.39
Penilaian Realisasi PDN tahun 2022-2024

Berdasarkan grafik dan tabel diatas, realisasi persentase penggunaan produk dalam negeri BBPOM di Palembang tahun 2024 jika dibandingkan dengan penilaian Biro Umum tahun sebelumnya menunjukan peningkatan yang cukup tajam yaitu naik 38,03% dari tahun 2023, hal ini menunjukkan komitmen BBPOM untuk senantiasa melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Beberapa barang yang sudah dialihkan dari produk impor ke produk dalam negeri antara lain alat laboratorium, alat pengolah data, sarana prasarana perkantoran, reagensia dan penunjang laboratorium. Hal ini selaras dengan arahan dari Surat Edaran Sestama Nomor HK.02.01.2.22.05.24.16 Tahun 2024 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengurangan Penggunaan Produk Impor.

Capaian persentase penggunaan produk dalam negeri BBPOM di Palembang masuk kedalam kriteria Tidak dapat disimpulkan, hal ini disebabkan karena BBPOM di Palembang berusaha semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, target tahun 2024 sebesar 60% ditetapkan oleh Biro Umum tanpa didahului dengan self assessment dari BBPOM di Palembang.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini antara lain :

- Perencanaan pengadaan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

  Dalam menyusun perencanaan pengadaan selalu mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor serta intens melakukan sosialisasi peraturan-peraturan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna barang dan jasa di lingkungan BBPOM di Palembang.
- Pengumuman pengadaan di SIRUP dengan tagging yang tepat terhadap pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri. Kesesuaian tagging produk dalam negeri pada saat pengumuman SIRUP berpengaruh besar pada kesesuaian dan penilaian indikator sasaran strategis kegiatan ini.
- Proses pemilihan pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri

  Pada saat proses pemilihan barang dan jasa, selalu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri terutama produk-produk yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri. Pemilihan produk impor hanya dilakukan setelah melalui evaluasi dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa memang produk barang/ jasa tersebut benar-benar tidak tersedia substitusi produk dalam negerinya.
- Monitoring dan evaluasi bulanan terhadap realisasi dan capaian indikator sasaran strategis kegiatan ini.

  Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan agar target dapat tercapai dan dapat menetapkan solusi jika terdapat kendala dalam pencapaian target.

3.2 EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA

Evaluasi akhir periode renstra dilakukan dengan 2 (dua) cara analisis yaitu anilisis tren dan analisis gap. Analisis tren merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun *baseline* hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Sedangkan, analisis gap dilakukan dengan membandingkan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil selengkapnya atas 2 analisis tersebut, sebagai berikut :

1) Analisis Tren

Perkembangan tiap indikator pada periode Renstra 2020-2024 dihitung menggunakan tahun *baseline* yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena adanya indikator baru yang dirumuskan pada tahun awal periode renstra, ada pula yang merupakan hasil penyesuaian strategi serta pengukuran dari beberapa indikator sebelumnya. Analisis tren ini memberikan gambaran objektif tentang efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan ukuran keberhasilan indikator kinerja dalam kurun waktu 5 (tahun). Pada tahun akhir periode renstra perhitungan realisasi ini, menggunakan realisasi prognosa yang merupakan estimasi pencapaian target pada akhir periode renstra berdasarkan data historis dan pola pertumbuhan yang telah terjadi. Di bawah ini adalah Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Trend Analysi):

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										Ket	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))-1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan Kategori
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori		
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R (Prognosa)														
															1	2	3	4	5	6	7	8	9				
SK.1	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,62	80,80	91,19	91,00	94,50	91,50	82,86	92,00	92,31	93,00	93,00		2020	91,19	2023	92,31	93,00	4	3	0,00	0,00	82,78	Meningkat (Moderat)	Kelompok Analisis 1 (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan)	Hasil perhitungan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu (1) menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; (2) stagnan, jika perkembangan kinerja 0–15 persen; (3) meningkat: (a) moderat, jika perkembangan kinerja >15–<100 persen, dan (b) *on the track*, jika perkembangan kinerja ≥100 persen; serta (4)Belum dapat disimpulkan, jika perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		78,00	86,52	86,50	90,22	88,00	77,43	89,50	89,55	91,00	91,00		2019	89,62	2023	89,55	91,00	5	4	0,00	0,00	-6,38	Menurun		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95,00	95,09	95,00	95,10	96,00	82,21	96,50	92,95	97,00	97,00		2020	95,09	2023	92,95	97,00	4	3	0,00	-0,01	-151,65	Menurun		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		75,00	79,66	80,00	85,42	82,00	83,72	83,00	87,04	87,90	87,90		2020	79,66	2023	87,04	87,90	4	3	0,02	0,03	120,31	Meningkat (On The Track)		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				91,00	60,00	92,00	72,00	93,00	81,05	93,00	93,00		2021	60,00	2023	81,05	93,00	3	2	0,16	0,16	103,15	Meningkat (On The Track)		
SK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	66,75	72,00	78,14	81,00	76,47	84,00	83,04	86,00	84,55	89,00	89,00		2019	66,75	2023	84,55	89,00	5	4	0,06	0,06	102,79	Meningkat (On The Track)		
SK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		86,00	87,67	88,80	83,50	89,90	97,00	91,00	98,34	99,00	99,00		2020	87,67	2023	98,34	99,00	4	3	0,03	0,04	126,50	Meningkat (On The Track)		
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		71,00	74,24	75,68	71,83	77,12	77,20	78,57	79,74	80,01	80,01		2020	74,24	2023	79,74	80,01	4	3	0,02	0,02	127,64	Meningkat (On The Track)		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		89,50	91,74	91,75	92,21	92,00	90,93	92,50	94,45	95,00	95,00		2020	91,74	2023	94,45	95,00	4	3	0,01	0,01	111,22	Meningkat (On The Track)		
SK.4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan		87,00	98,87	99,00	99,10	99,50	89,09	100,00	100,00	100,00	100,00		2020	98,87	2023	100,00	100,00	4	3	0,00	0,00	133,40	Meningkat (On The Track)		
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan		55,00	63,76	60,00	64,29	65,00	41,09	70,00	78,66	75,00	75,00		2020	63,76	2023	78,66	75,00	4	3	0,04	0,07	175,04	Meningkat (On The Track)		
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,35	85,00	100,00	100,00	99,84	100,00	100,00	100,00	99,78	100,00	100,00		2019	98,35	2023	99,78	100,00	5	4	0,00	0,00	108,47	Meningkat (On The Track)		
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	23,12	50,00	20,62	55,00	55,56	60,00	48,84	60,00	61,74	65,00	65,00		2019	23,12	2023	61,74	65,00	5	4	0,23	0,28	121,19	Meningkat (On The Track)		
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	81,2	60,00	61,80	63,00	73,01	66,00	72,86	68,00	77,61	78,10	82,72		2019	81,20	2023	77,61	78,10	5	4	-0,01	-0,01	144,96	Meningkat (On The Track)		
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan		3,51	3,80	3,99	4,27	4,20	4,14	4,25	4,68	4,75	4,75		2020	3,80	2023	4,68	4,75	4	3	0,06	0,07	125,32	Meningkat (On The Track)		
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						77,00	90,00	79,00	80,16	100,00	100,00		2022	90,00	2023	80,16	100,00	2	1	0,05	-0,11	-202,12	Menurun		
		Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)										95,00	95,00		2024	95,00	2024	95,00	95,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Dapat Disimpulkan		
SK.5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		90,69	93,79	94,00	96,60	95,40	95,70	96,80	98,04	98,90	98,90		2020	93,79	2023	98,04	98,90	4	3	0,01	0,01	111,47	Meningkat (On The Track)		
		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		16,00	16,00	40,00	40,00	59,00	61,00	77,00	77,00	97,00	97,00		2020	16,00	2023	77,00	97,00	4	3	0,57	0,69	120,94	Meningkat (On The Track)		

	Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	Jumlah Desa Pangan Aman		4,00	4,00	12,00	12,00	19,00	19,00	25,00	25,00	32,00	32,00		2020	4,00	2023	25,00	32,00	4	3	0,68	0,84	123,50	Meningkat (On The Track)	
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya		2,00	2,00									Indikator Kinerja tidak dilaksanakan hingga 2024 karena perubahan konsep dan telah dimunculkan indikator baru (Tidak dilakukan trend analysis)												
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas				6,00	6,00	9,00	9,00	13,00	13,00	17,00	17,00		2021	6,00	2023	13,00	17,00	3	2	0,42	0,47	113,72	Meningkat (On The Track)	
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		82,00	95,88	100,00	98,38	100,00	98,28	100,00	99,34	100,00	100,00		2020	95,88	2023	99,34	100,00	4	3	0,01	0,01	112,42	Meningkat (On The Track)	
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		75,00	98,81	100,00	99,38	100,00	93,31	100,00	98,95	100,00	100,00		2020	98,81	2023	98,95	100,00	4	3	0,00	0,00	15,75	Meningkat (Moderat)	
SK.7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan		52,00	56,74	58,00	69,03	64,00	64,17	69,00	70,44	75,00	75,00		2020	56,74	2023	70,44	75,00	4	3	0,07	0,07	103,48	Meningkat (On The Track)	
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		85,00	81,72	82,90	82,94	83,90	80,43	84,90	82,57	85,90	85,90		2020	81,72	2023	82,57	85,90	4	3	0,01	0,00	27,53	Meningkat (Moderat)	
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	77,76	81,00	78,87	79,90	77,59	80,90	79,57	81,90	79,43	82,81	82,81		2019	77,76	2023	79,43	82,81	5	4	0,01	0,01	42,06	Meningkat (Moderat)	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)										94,71	94,71		2024	94,71	2024	94,71	94,71	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Dapat Disimpulkan	
SK.9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		75,00	85,29	84,50	84,24	84,75	85,47	85,00	90,42	90,77	90,77		2020	85,29	2023	90,42	90,77	4	3	0,02	0,02	125,31	Meningkat (On The Track)	
SK.10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP		70,00	70,50	77,00	76,20	82,00	80,58	87,00	86,10	86,30	86,30		2020	70,50	2023	86,10	86,30	4	3	0,05	0,07	132,88	Meningkat (On The Track)	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal		1,51	2,50	2,00	1,95	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00		2020	2,50	2023	3,00	3,00	4	3	0,05	0,06	134,36	Meningkat (On The Track)	
SK.11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang		93,00	97,39	98,60	89,94	98,70	90,58	98,70	89,52	90,21	90,21		2020	97,39	2023	89,52	90,21	4	3	-0,02	-0,03	146,05	Meningkat (On The Track)	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang		90,00	100,00	92,00	100,00							Indikator tidak dilaksanakan hingga 2024 karena sudah menjadi salah satu komponen dari Indikator lain yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Jika dipertahankan akan muncul redudansi (Tidak dilakukan trend analysis)												
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										94,35	94,35		2024	94,35	2024	94,35	94,35	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Dapat Disimpulkan	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										93	93		2024	93	2024	93	93	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Dapat Disimpulkan	
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri										60	60		2024	60	2024	60	60	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Dapat Disimpulkan	

Tabel 3.2.1Kertas Kerja Analisis Tren

Penjabaran terkait analisis tren yang dilakukan pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat memenuhi syarat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 91,19% menjadi 94,5%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024. Analisis Trend terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*moderat*) dengan nilai perkembangan kinerja 82,78.

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Realisasi *baseline* pada indikator ini adalah realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 89,62%. Sedangkan, perkembangan realisasi indikator kinerja persentase sampel makanan memenuhi syarat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 86,52% menjadi 90,22%, kemudian realisasi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 77,43%, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun ada pemulihan di 2023, tren tidak stabil dan masih di bawah ekspektasi pertumbuhan. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator menurun dengan nilai perkembangan kinerja sebesar -6,38. Penurunan ini disebabkan masih terdapat produsen yang tidak komitmen terkait cara produksi pangan olahan yang baik yang meliputi keamanan/ mutu dan label kemasan yang benar sesuai dengan peraturan label pangan olahan, Masih banyaknya produk makanan beredar yang tidak memenuhi syarat label (TMK mayor), dan masih beredarnya produk pangan Tidak Memenuhi Syarat.

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat memenuhi syarat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 95,09% menjadi 95,1%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan analisis tren terhadap indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator menurun

dengan nilai perkembangan kinerja -151,65, akibat penurunan tajam pada 2022. Meskipun terdapat pemulihan pada 2023, capaian masih belum kembali ke level stabil seperti 2020–2021, kondisi ini memperlihatkan masih ditemukannya Obat beredar yang Tidak Memenuhi Syarat. Perlu dilakukan perkuatan sistem inspeksi berkala ke industri farmasi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan Obat.

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

   Realisasi indikator kinerja persentase makanan makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 79,66% menjadi 85,42%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 83,72%, serta meningkat lagi pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*on the track*) dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 120,31.

5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

   Indikator ini diperjanjikan pada perjanjian kinerja BBPOM di Palembang sejak tahun 2021, sehingga realisasi pada tahun 2021 menjadi *baseline* realisasi indikator ini. Dari kurun waktu 2021 hingga 2024, realisasi indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*on the track*) dengan nilai perkembangan kinerja 103,15.

6) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

   Realisasi *baseline* pada indikator ini adalah realisasi tahun 2019 yaitu dengan nilai 98,35. Sedangkan, selama kurun waktu 4 (empat) tahun realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang mengalami peningkatan, di mana realisasi 2020 sebesar 78,14 , realisasi 2021 sebesar 76,47, realisasi

pada tahun 2022 sebesar 83,04 dan realisasi tahun 2023 dan 2024 juga meningkat. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (o*n the track*) dengan nilai perkembangan kinerja 102,76.

7) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

   Selama kurun waktu 4 (empat) tahun realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan mengalami peningkatan, di mana realisasi 2020 sebesar 87,67. realisasi 2021 sebesar 83,50), realisasi pada tahun 2022 sebesar 97,00 dari target sebesar 89,90, realisasi 2023 sebesar 98,34 dan untuk tahun 2024 juga meningkat. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (o*n the track*) dengan nilai perkembangan kinerja 126,50.

8) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

   Realisasi indikator untuk Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, di mana realisasi 2020 sebesar 74,27, realisasi 2021 sebesar 71,83, realisasi pada tahun 2022 sebesar 77, realisasi 2023 sebesar 79,74, dan untuk tahun 2024 juga mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis tren terhadap indikator Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (o*n the track*) dengan nilai perkembangan kinerja 127,64.

9) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang

   Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang selama tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif, yaitu terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 90,93. Walaupun sempat mengalami penurunan, secara keseluruhan realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palembang masih di atas nilai 90, sehingga mutu layanan publik yang diberikan masih termasuk kategori A (sangat baik). Berdasarkan

analisis tren terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (o*n the track*) dengan nilai perkembangan kinerja 111,22.

10) Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Realisasi indikator untuk Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang mengalami peningkatan, di mana realisasi 2020 sebesar 98,87%, realisasi 2021 sebesar 99%, realisasi pada tahun 2022 sebesar 89,09$, realisasi 2023 dan 2024 dengan realisasi optimal sebesar 100%. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 133,40.

11) Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Realisasi indikator untuk Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan mengalami peningkatan, di mana realisasi 2020 sebesar 63,76%, realisasi 2021 sebesar 64,29%, realisasi pada tahun 2022 menurun cukup drastis menjadi 41,09%, realisasi 2023 meningkat kembali menjadi 78,66%. Pada tahun 2024 diestimasikan realisasi sebesar 75%. Berdasarkan analisis trend terhadap indikator Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 175,04.

12) Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi *baseline* pada indikator ini adalah realisasi tahun 2019 sebesar 98,35. Sedangkan, Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dalam rentang waktu tahun 2020 - 2023 hampir selalu 100% tetapi pada tahun 2021 sebesar 99,84% dan tahun 2023 sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 realisasi paling optimal yaitu sebesar 100% . Analisis trend terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat

waktu di BBPOM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 108,47.

13) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Realisasi *baseline* pada indikator ini adalah realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 23,12%. Sedangkan, perkembangan realisasi dalam selama 2020-2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hanya saja realisasi 2022 menurun menjadi 48,84%, terlihat lebih rendah dari realisasi tahun 2020 dan 2021. Realisasi ini lalu mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 menjadi 61,74%. Tahun 2024 realisasi sebesar 65% cukup tinggi meningkat dari tren tahun-tahun lalu. Namun secara keseluruhan analisis tren terhadap indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Palembang menunjukkan perkembangan kinerja indikator yang meningkat (*on the track*) dengan nilai 121,19.

14) Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Realisasi *baseline* pada indikator ini adalah realisasi tahun 2019 yaitu 81,2%. Realisasi indikator kinerja ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023 walaupun sedikit ada penurunan di tahun 2022, secara rinci sebagai berikut; 2020 dengan realisasi 61,80%; 2021 dengan realisasi 73,01%; 2022 dengan realisasi 72,86%; dan 2023 dengan realisasi 77,61%. Tahun 2024 juga meningkat menjadi 82,72%. Ketercapaian ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 144,96.

15) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan mengalami peningkatan yang cukup konsisten, walaupun sedikit ada penurunan pada tahun 2022. Secara rinci, realisasi 2020 dengan nilai 3,80, realisasi 2021 sebesar 4,27, realisasi pada tahun 2022 sedikit menurun menjadi 4,14, realisasi 2023 meningkat kembali menjadi 4,68, pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,75. Berdasarkan

analisis trend terhadap indikator Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan ini menunjukkan perkembangan kinerja indikator meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 125,32.

16) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Realisasi *baseline* pada indikator ini adalah realisasi tahun 2022 yaitu 90%. Tahun 2023 terjadi penurunan realisasi menjadi 80,16%, dan di tahun 2024 diestimasikan realisasi tetap bisa mencapai realisasi paling optimal yaitu sebesar 100%. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik masuk dalam kategori menurun. Penurunan ini terlihat karena adanya penetapan target tiap tahunnya yang masih belum mempertimbangkan ketercapaian tahun sebelumnya. Tahun 2022 target indikator ini adalah 77%, ketercapaiannya yang sudah tinggi di tahun 2022 yaitu 90% tidak berhasil dijadikan *baseline* untuk penetapan target di tahun 2023, sehingga target pencapaian 2023 masih terlalu rendah. Hal ini perlu menjadi catatan atas penetapan target pada indikator-indikator tahun berikutnya.

17) Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan

Indikator baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat disimpulkan tren analisisnya.

18) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 terbilang cukup konsisten meningkat, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2021 ke 2022 yaitu 96,60 menjadi 95,70. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 111,47.

19) Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkatkan karena memang karakteristik dari indikator ini adalah kumulatif, sehingga pencapaian tahun sebelumnya juga masuk kepada pencapaian tahun pelaksanaan

selama 1 periode renstra. Jumlah sekolah dengan PJAS aman dari 2020 sebanyak 16 sekolah menjadi 97 sekolah di tahun 2024. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 120,94.

20) Jumlah Desa Pangan Aman

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkatkan karena memang karakteristik dari indikator ini adalah kumulatif, sehingga pencapaian tahun sebelumnya juga masuk kepada pencapaian tahun pelaksanaan selama 1 periode renstra. Jumlah desa pangan aman dari 2020 sebanyak 4 desa menjadi 32 desa di tahun 2024. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 123,50.

21) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2021 hingga 2024 selalu meningkatkan karena memang karakteristik dari indikator ini adalah kumulatif, sehingga pencapaian tahun sebelumnya juga masuk kepada pencapaian tahun pelaksanaan selama 1 periode renstra. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dari 2021 sebanyak 6 pasar menjadi 17 pasar di tahun 2024. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 113,72.

22) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat, hanya ada 1 tahun penurunan yaitu pada tahun 2022, yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 98,38% menjadi 98,28% di tahun 2022. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 112,72.

23) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat, hanya ada 1 tahun penurunan yaitu pada tahun 2022, yang sebelumnya di tahun

2021 sebesar 98,38% menjadi 98,31% di tahun 2022. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar masuk dalam kategori meningkat (*moderat*) dengan nilai perkembangan kinerja 15,17.

24) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat, hanya ada 1 tahun penurunan yaitu pada tahun 2022, yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 69,03% menjadi 64,17% di tahun 2022. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 103,48.

25) Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkat. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang masuk dalam kategori meningkat (*moderat)* dengan nilai perkembangan kinerja 27,53.

26) Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Realisasi *baseline* indikator ini adalah tahun 2019 dengan nilai 77,76. Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkat. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang masuk dalam kategori meningkat (*moderat)* dengan nilai perkembangan kinerja 42,06.

27) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat disimpulkan tren analisisnya.

28) Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 125,31.

29) Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkat. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 132,88.

30) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkat. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 134,36.

31) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Realisasi kinerja indikator ini dari tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang masuk dalam kategori meningkat (*on the track)* dengan nilai perkembangan kinerja 146,05.

32) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat disimpulkan tren analisisnya.

33) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat disimpulkan tren analisisnya.

34) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Indikator baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat disimpulkan tren analisisnya.

2) Analisis Gap

Analisis gap atau analisis kesenjangan dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan antara target yang direncanakan (Renstra) dengan capaian aktual pada akhir periode perencanaan strategis. Dengan melakukan analisis ini dapat terlihat efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam mencapai target yang ditetapkan, serta mendapatkan rekomendasi perbaikan kebijakan dan strategi untuk penyusunan Renstra periode berikutnya berbasis data. Berikut adalah Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis) :

No. Kode (Kolom 1)	Sasaran Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	IKSK.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Persentase	80,80	91,19	91,00	94,50	91,50	82,86	92,00	92,31	93,00	95,44	102,62	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase	78,00	86,52	86,50	90,22	88,00	77,43	89,50	89,55	91,00	90,58	99,54	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	95,00	95,09	95,00	95,10	98,00	82,21	96,50	92,95	97,00	96,04	99,01	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	75,00	79,66	80,00	85,42	82,00	83,72	83,00	87,04	87,90	82,74	94,13	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persentase			91,00	60,00	92,00	72,00	93,00	81,05	93,00	93,07	100,08	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	IKSK.6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Nilai	72,00	78,14	81,00	76,47	84,00	83,04	86,00	84,55	89,00	87,13	97,90	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	IKSK.7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Nilai	86,00	87,67	88,80	83,50	89,90	97,00	91,00	98,34	99,00	98,85	99,85	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Nilai	71,00	74,24	75,68	71,83	77,12	77,20	78,57	79,74	80,01	80,6	100,74	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Nilai	89,50	91,74	91,75	92,21	92,00	90,93	92,50	94,45	95,00	95,9	100,95	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	IKSK.10	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	Persentase	87,00	98,87	99,00	99,10	99,50	89,09	100,00	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.11	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	Persentase	55,00	63,76	60,00	64,29	65,00	41,09	70,00	78,66	75,00	78,16	104,21	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.12	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	85,00	100,00	100,00	99,84	100,00	100,00	100,00	99,78	100,00	100	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	



		IKSK.13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Persentase	50,00	20,62	55,00	55,56	60,00	48,84	60,00	61,74	65,00	65,79	101,22	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.14	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Persentase	60,00	61,80	63,00	73,01	66,00	72,86	68,00	77,61	78,10	85,33	109,26	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.15	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	Nilai	3,51	3,80	3,99	4,27	4,20	4,14	4,25	4,68	4,75	4,78	100,63	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase					77,00	90,00	79,00	80,16	100,00	100	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.17	Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	Persentase									95,00	100	105,26	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	Indikator masuk PK UPT pada T5
SK.5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	IKSK.18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	90,69	93,79	94,00	96,60	95,40	95,70	96,80	98,04	98,90	98,99	100,09	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.19	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Jumlah	16,00	16,00	40,00	40,00	59,00	61,00	77,00	77,00	97,00	97	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.20	Jumlah Desa Pangan Aman	Jumlah	4,00	4,00	12,00	12,00	19,00	19,00	25,00	25,00	32,00	32	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.21	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Jumlah	2,00	2,00									0,00		Balai Besar POM di Palembang	Indikator hanya digunakan pada T1
		IKSK.22	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Jumlah			6,00	6,00	9,00	9,00	13,00	13,00	17,00	17	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	IKSK.23	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Persentase	82,00	95,88	100,00	98,38	100,00	98,28	100,00	99,34	100,00	100	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.24	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Persentase	75,00	98,81	100,00	99,38	100,00	93,31	100,00	98,95	100,00	100	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	IKSK.25	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase	52,00	56,74	58,00	69,03	64,00	64,17	69,00	70,44	75,00	68,73	91,64	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	

SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	IKSK.26	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Nilai	85,00	81,72	82,90	82,94	83,90	80,43	84,90	82,57	85,90	84,85	98,78	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.27	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Nilai	81,00	78,87	79,90	77,59	80,90	79,57	81,90	79,43	82,81	80,55	97,27	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.28	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	Nilai									94,71	95,66	101,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	Indikator masuk PK UPT pada T5
SK.9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	IKSK.29	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Nilai	75,00	85,29	84,50	84,24	84,75	85,47	85,00	90,42	90,77	87,75	96,67	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSK.30	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	Persentase	70,00	70,50	77,00	76,20	82,00	80,58	87,00	86,10	86,30	87,49	101,38	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.31	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	Nilai	1,51	2,50	2,00	1,95	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	3	100,00	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
SK.11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	IKSK.32	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Nilai	93,00	97,39	98,60	89,94	98,70	90,58	98,70	89,52	90,21	91,3	101,21	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	
		IKSK.33	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Palembang	Nilai	90,00	100,00	92,00	100,00							0,00		Balai Besar POM di Palembang	Indikator hanya digunakan pada T1 dan T2
		IKSK.34	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	94,35	100							94,35	100	105,99	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	Indikator masuk PK UPT pada T5
		IKSK.35	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	93	97,82							93	97,82	105,18	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	Indikator masuk PK UPT pada T5
		IKSK.36	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase	60	79,3							60	79,3	132,17	Tercapai	Balai Besar POM di Palembang	Indikator masuk PK UPT pada T5

Tabel 3.2.2. Kertas Kerja Analisi Gap

Dari kertas kerja di atas terlihat bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang telah mencapai target renstra yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada 25 indikator tersebut tidak terdapat kesenjangan signifikan antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Strategi, program dan kegiatan yang diterapkan berjalan dengan efektif, sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Sedangkan pada 9 (sembilan) indikator lainnya target renstra tidak tercapai, penjelasan per indikator tersebut antara lain :

- Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 99,54 memperlihatkan ada selisih 0,46 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Indikator ini memang sangat bergantung dengan jumlah sampel makanan yang beredar yang hasil uji laboratoriumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan ataupun Tidak Memenuhi Syarat, serta kepatuhan dari pelaku usaha yang belum 100% memenuhi standar produksi yang ditentukan. Perlu dilakukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan industri serta mitigasi risiko untuk perumusan strategi pada periode berikutnya

- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 99,01 memperlihatkan ada selisih 0,99 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Indikator ini memang sangat bergantung dengan jumlah Obat yang beredar yang hasil uji laboratoriumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Perlu dilakukan perkuatan sistem inspeksi berkala ke industri farmasi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan Obat.

- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 94,13 memperlihatkan ada selisih yang cukup besar yaitu 5,87 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Hampir sama dengan indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, namun memang indikator ini lebuh fokus pada sampling *targeted/purposive*. Ketercapaian indikator ini juga sangat bergantung dengan jumlah sampel makanan yang beredar yang hasil uji laboratoriumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan ataupun Tidak Memenuhi Syarat, serta kepatuhan dari pelaku usaha yang belum 100% memenuhi standar produksi yang ditentukan.

Sehingga perlu dilakukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan industri serta mitigasi risiko untuk perumusan strategi pada periode berikutnya. Untuk perencanaan pada periode selanjutnya kedua indikator ini dapat dirumuskan kembali dengan definisi operasional dan metode pengukuran yang lebih fokus untuk memperlihatkan kinerja UPT. Untuk meningkatkan pencapaian di masa depan, diperlukan langkah strategis berupa penguatan pengawasan laboratorium, regulasi yang lebih ketat, peningkatan kepatuhan industri, serta edukasi dan inovasi teknologi.

- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

  Berdasarkan hasil analisis gap dengan nilai kinerja 97,90 memperlihatkan ada selisih yang cukup besar yaitu 3,10 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan diperlukan penyesuaian strategi edukasi yang lebih masif dan inovatif, penguatan regulasi dan pengawasan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, komunitas, dan dunia usaha. Dengan pendekatan yang lebih luas dan efektif, masyarakat akan lebih sadar dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 99,85 memperlihatkan ada sedikit selisih yaitu 0,15 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan penyesuaian strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kualitas layanan bimbingan, digitalisasi sistem pembinaan, peningkatan kapasitas SDM yang melakukan bimbingan dan pembinaan.

- Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 91,64 memperlihatkan ada selisih yang cukup besar yaitu 8,36 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan penguatan regulasi dan sanksi, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus. Dengan

pendekatan yang lebih tegas, inovatif, dan kolaboratif, efektivitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan makanan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

- Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 98,78 memperlihatkan ada selisih yang cukup besar yaitu 1,22 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan masih perlu dirumuskan strategi yang dapat memacu penguatan internalisasi RB, penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan integritas.

- Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 97,27 memperlihatkan ada selisih yang cukup besar yaitu 2,73 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan penguatan perencanaan kinerja, peningkatan evaluasi dan pengukuran kinerja, serta penguatan tata kelola dan transparansi pelaporan.

- Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

  Berdasarkan hasil analisis dengan nilai kinerja 96,67 memperlihatkan ada selisih yang cukup besar yaitu 3,33 yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan sistem manajemen kinerja berbasis outcome dan transparansi, meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi pengukuran kinerja ASN.

3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sesuai dengan *cascading* organisasi. Berikut adalah matriks evaluasi tujuan renstra tahun 2020-2024 :

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Rata-rata	72	78,14	108,53	81	76,47	94,41	84	83,04	98,86	86	84,55	98,31	89	87,13	97,90	99,60	101,10	Sudah Tercapai/On *Track*
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	55	63,76	115,93	60	64,29	107,15	65	41,09	63,22	70	78,66	112,37	75	78,16	104,21	100,58		
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	90,69	93,79	103,42	94	96,6	102,77	95,4	95,7	100,31	96,8	98,04	101,28	98,9	98,99	100,09	101,57		
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Kumulatif	16	16	100,00	40	40	100,00	59	61	103,39	77	77	100,00	97	97	100,00	100,68		
	Jumlah desa pangan aman	Kumulatif	4	4	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00	25	25	100,00	32	32	100,00	100,00		
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	Kumulatif				6	6	100,00	9	9	100,00	13	13	100,00	17	17	100,00	100,00		
	Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	Rata-rata													95	100	105,26	105,26		
Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rata-rata	70	70,5	100,71	77	76,2	98,96	82	80,58	98,27	87	86,1	98,97	86,3	87,49	101,38	99,66	107,32	Sudah Tercapai/On Track
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Rata-rata	1,51	2,5	165,56	2	1,95	97,50	2,25	2,5	111,11	2,5	3	120,00	3	3	100,00	118,83		
	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	Rata-rata	75	85,29	113,72	84,5	84,24	99,69	84,75	85,47	100,85	85	90,42	106,38	90,77	87,75	96,67	103,46		
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obatdan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-rata							77	90	116,88	79	80,16	101,47	100	100	100,00	106,12	103,23	Sudah Tercapai/On Track
	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	86	87,67	101,94	88,8	83,5	94,03	89,9	97	107,90	91	98,34	108,07	99	98,85	99,85	102,36		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang	Rata-rata	89,5	91,74	102,50	91,75	92,21	100,50	92	90,93	98,84	92,5	94,45	102,11	95	95,9	100,95	100,98		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	85	100	117,65	100	99,84	99,84	100	100	100,00	100	99,78	99,78	100	100	100,00	103,45		

Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	80,8	91,19	112,86	91	94,5	103,85	91,5	82,86	90,56	92	92,31	100,34	93	95,44	102,62	102,04	98,91	Belum Tercapai
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	78	86,52	110,92	86,5	90,22	104,30	88	77,43	87,99	89,5	89,55	100,06	91	90,58	99,54	100,56		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	95	95,09	100,09	95	95,1	100,11	96	82,21	85,64	96,5	92,95	96,32	97	96,04	99,01	96,23		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	75	79,66	106,21	80	85,42	106,78	82	83,72	102,10	83	87,04	104,87	87,9	82,74	94,13	102,82		
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata				91	60	65,93	92	72	78,26	93	81,05	87,15	93	93,07	100,08	82,86		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	85	95,88	112,80	100	98,38	98,38	100	98,28	98,28	100	99,34	99,34	100	100	100,00	101,76		
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	75	98,81	131,75	100	99,38	99,38	100	93,31	93,31	100	98,95	98,95	100	100	100,00	104,68		
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	71	74,24	104,56	75,68	71,83	94,91	77,12	77,2	100,10	78,57	79,74	101,49	80,01	80,6	100,74	100,36		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-rata	87	98,87	113,64	99	99,1	100,10	99,5	89,09	89,54	100	100	100,00	100	100	100,00	100,66		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	50	20,62	41,24	55	55,56	101,02	60	48,84	81,40	60	61,74	102,90	65	65,79	101,22	85,55		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	60	61,8	103,00	63	73,01	115,89	66	72,86	110,39	68	77,61	114,13	78,1	85,33	109,26	110,53		
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	52	56,74	109,12	58	69,03	119,02	64	64,17	100,27	69	70,44	102,09	75	68,73	91,64	104,43	104,43	Sudah Tercapai/On Track
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	Rata-rata	85	81,72	96,14	82,9	82,94	100,05	83,9	80,43	95,86	84,9	82,57	97,26	85,9	84,85	98,78	97,62	105,03	Sudah Tercapai/On Track
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Rata-rata	81	78,87	97,37	79,9	77,59	97,11	80,9	79,57	98,36	81,9	79,43	96,98	82,81	80,55	97,27	97,42		
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Rata-rata	93	97,39	104,72	98,6	89,94	91,22	98,7	90,58	91,77	98,7	89,52	90,70	90,21	91,3	101,21	95,92		
	Indeks Pelayanan Publik	Rata-rata	3,51	3,8	108,26	3,99	4,27	107,02	4,2	4,14	98,57	4,25	4,68	110,12	4,75	4,78	100,63	104,92		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rata-rata													94,35	100	105,99	105,99		
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-rata													93	97,82	105,18	105,18		
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Rata-rata													60	79,3	132,17	132,17		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	Rata-rata													94,71	95,66	101,00	101,00		

Berdasarkan matriks di atas dapat diketahui ketercapaian terhadap masing-masing tujuan renstra di atas adalah sebagai berikut :

Tujuan (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan diukur melalui ketercapaian 7 (tujuh) indikator. 6 (Enam) dari 7 (tujuh) indikator ini telah memiliki rata-rata pencapaian 100 hingga lebih dari 100. Penjelasan per indikator tersebut, sebagai berikut :

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Capaian indikator ini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, tercatat hanya rendah pada tahun ke-3 atau tahun 2022 dengan capaian 63,22%. Namun rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sudah optimal yaitu 100,58%. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi antara BBPOM di Palembang dan pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah di Sumatera Selatan, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Tingginya persentase tindak lanjut dari hasil inspeksi membuktikan bahwa adanya sistem yang responsif dan keberlanjutan dari upaya pengawasan Balai Besar POM di Palembang selama ini. Balai Besar POM di Palembang bersama dengan pihak terkait telah dapat dengan cepat mengatasi temuan yang berpotensi merugikan masyarakat.

- Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Penilaian Efektivitas program KIE yang tinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selalu menunjukkan hasil yang optimal, melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 101,57%. Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang tinggi berarti bahwa informasi yang disampaikan oleh Balai Besar POM di Palembang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Sumatera Selatan yang terbukti dari hasil survei audiens KIE yang pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Obat dan Makanan aman serta dapat membangun kebiasaan untuk selalu membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman.

- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Rata-rata pencapaian indikator dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 100,06% menunjukkan bahwa BPOM berhasil menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat

melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang telah berhasil melakukan intervensi keamanan PJAS pada 97 sekolah yang berada di Sumatera Selatan.

- Jumlah desa pangan aman

Rata-rata pencapaian indikator dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 100% menunjukkan hasil yang optimal. Intervensi keamanan pangan desa melalui advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan telah berhasil dilakukan di Sumatera Selatan sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan. Sebanyak 17 desa pangan aman yang telah diintervensi menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang telah berhasil menjangkau masyarakat di tingkat desa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke pangan yang aman dan berkualitas. Melalui indikator ini BBPOM di Palembang juga melibatkan komunitas pedesaan dalam upaya pengawasan dan edukasi.

- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator ini merupakan indikator yang dimulai dari tahun 2021. Rata-rata pencapaian dalam kurun waktu 4 tahun menunjukkan hasil yang optimal yaitu 100%. Jumlah pasar pangan aman dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 14 (empat belas) pasar. Banyaknya pasar pangan aman berbasis komunitas, ini menunjukkan bahwa pengawasan pangan yang lebih dekat dengan masyarakat dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas. Pasar yang dikelola dengan baik dan diawasi ketat oleh komunitas akan menghasilkan produk pangan yang lebih aman dan berkualitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan.

- Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan

Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang pada tahun 2024 atau baru selama 1 (satu) tahun menjadi salah satu indikator yang mendukung ketercapaian tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan. Keterlibatan Balai Besar POM dalam program ini menunjukkan adanya kerja sama antara BBPOM di Palembang bersama lintas sektor di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, PALI dan Kota Palembang. Kerjasama ini guna meningkatkan akses dan kesadaran akan sediaan farmasi dan makanan yang aman. Pemberdayaan masyarakat ini, juga dilakukan untuk meningkatkan

kesadaran terkait penurunan serta pencegahan *stunting*. Hal ini menuntut keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan kesehatan.

- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Rata-rata pencapaian indikator 99,60. Dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan, indikator ini masih belum maksimal. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan belum cukup efektif dalam menjangkau dan membangun pemahaman masyarakat terlihat dari capaian indikator yang masih fluktuatif. Upaya yang dapat dilakukan bersama lintas sektor dan masyarakat, antara lain :

- Penguatan program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan cara lebih menyesuaikan program KIE dengan karakteristik audiens yang berbeda, seperti usia, latar belakang pendidikan, atau tingkat pemahaman. Program untuk anak-anak, orang dewasa, serta kelompok masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih rendah memerlukan materi yang berbeda dan disesuaikan.
- Penggunaan media yang beragam dengan berbagai platform komunikasi seperti media sosial, radio, televisi, aplikasi mobile, dan iklan publik di tempat umum (seperti pasar, sekolah, dan puskesmas) untuk menyebarkan informasi. Pembuat kebijakan bisa bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan daya tarik kampanye.
- Melakukan survei dan evaluasi berkala untuk mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat tentang pentingnya makanan dan obat yang aman. Hasil survei dan evaluasi ini bisa digunakan untuk merumuskan program edukasi yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Tujuan (2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan diukur melalui ketercapaian 3 (tiga) indikator. Rata-rata ketercapaian dari 3 (tiga) indikator tersebut sebesar 107,32%. 2 (dua) dari 3 (tiga) indikator tersebut telah tercapai optimal. Penjelasan per indikator tersebut, sebagai berikut :

- Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal

Rata-rata pencapaian indikator dalam kurun waktu 5 tahun cukup tinggi yaitu sebesar 118,83%. Rata-rata ketercapaiannya menunjukkan ketercapaian setiap tahun yang

optimal, hanya saja di tahun ke-2 terjadi penurunan capaian. Pencapaian selama 5 tahun ini menunjukkan BBPOM di Palembang telah berhasil memutakhirkan data dan informasi secara berkala pada SIPT, SPIMKer Data Keracunan. Pemanfaatan sistem informasi mencakup email, *sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada *subsite* juga telah dilakukan BBPOM di Palembang dengan dengan optimal. BBPOM di Palembang telah mengelola dan memanfaatkan data serta informasi yang relevan dengan pengawasan obat dan makanan secara efektif. Pengelolaan data yang baik dapat mendukung proses bisnis unit kerja, memantau tren, merespons isu dengan cepat, serta merumuskan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

- Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang

Rata-rata pencapaian indikator dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 103,46%. Capaian terendah berada pada tahun akhir Renstra karena terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN, namun secara keseluruhan selama 5 tahun capaian cukup stabil. Hal ini menunjukkan BBPOM di Palembang telah berhasil meningkatkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Untuk mempermudah pemantauan serta transparansi data pada triwulan 2 tahun 2024 telah dibangun inovasi untuk meningkatkan manajemen SDM yaitu inovasi "MAKSUBA" Mari Kita Kelola ASN untuk Suskses Bersama. Pada inovasi ini disajikan hasil monitoring dan evaluasi 4 Dimensi pengukuran IP ASN setiap pegawai. Dengan inovasi ini pegawai secara mandiri dapat mengendalikan dan menyusun rencana strategi untuk peningkatan kompetensi dan kinerjanya.

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 tahun belum optimal yaitu sebesar 99,66%, terjadi penurunan capaian pada tahun ke-2 hingga ke-4 pelaksanaan. BBPOM di Palembang harus terus memenuhi fasilitas atau peralatan yang memadai, meningkatkan kepatuhan terhadap standar GLP serta pengelolaan kualitas di laboratorium dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah :

- Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbarui fasilitas laboratorium dan memastikan peralatan uji laboratorium terbaru, sesuai dengan standar GLP serta sesuai dengan rekomendasi yang diterima dari PPPOMN.
- Melakukan monitoring dan evaluasi laboratorium secara rutin untuk memastikan bahwa proses pengujian berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan magang di PPPOMN atau dengan mengadakan bimbingan teknis dengan mengundang instruktur dari luar

serta mengikuti pelatihan secara daring terkait sistem mutu laboratorium pengujian.

Tujuan (3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja. Rata-rata pencapaian indikator pada tujuannya ini sebesar 103,23%. Rata-rata pencapaian tiap indikator selama 5 (lima) tahun juga sudah diatas 100%. Penjelasan per indikator tersebut, sebagai berikut :

- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator ini merupakan indikator yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang sejak tahun 2022 atau pada tahun ke-3 pelaksanaan renstra. Rata-rata pencapaian indikator selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar 106,12%. Capaian yang tinggi ini menunjukkan BBPOM di Palembang telah berhasil membantu UMKM dalam memenuhi standar produksi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang tidak hanya berfokus pada pengawasan tetapi juga memberikan bimbingan yang memadai kepada UMKM agar produknya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan standar produksi yang baik, UMKM dapat berkompetisi di pasar yang lebih luas dengan produk yang aman dan berkualitas.

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar 102,36%. Capaian indikator yang tinggi menunjukkan tingginya hasil survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Walaupun di tahun pelaksanaan ke-5 baru diketahui bahwa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan juga akan mempengaruhi penilaian Balai selama dilaksanakan pada wilayah kerja Balai terkait, namun secara keseluruhan selama 5 tahun pencapaian indikator cukup stabil. Hal ini menunjukkan BBPOM di Palembang sudah berhasil memberikan dukungan yang efektif dan bermanfaat bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar pengawasan obat dan makanan.

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 100,95%. Capaian indikator yang tinggi menunjukkan BBPOM di Palembang berhasil memberikan pelayanan publik

yang memadai, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat memperlihatkan seberapa baik BBPOM di Palembang dalam memberikan informasi terkait obat dan makanan yang aman serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk tersebut. Penambahan produk jenis layanan BBPOM di Palembang yang semula hanya 3 (tiga) jenis layanan menjadi 9 (sembilan) layanan dalam standar pelayanan terbaru yang terdiri dari layanan penerbitan SKI, SKE, sertifikasi CDOB, CPKB, CPOTB, penerbitan rekomendasi pemohon notifikasi, penerbitan izin penerapan CPPOB, pengujian, dan layanan pengaduan konsultasi juga menjadi salah satu penunjang keberhasilan indikator ini.

- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 103,45%. Capaian indikator yang tinggi menunjukkan BBPOM di Palembang berhasil menyelesaikan proses penilaian sertifikasi produk obat dan makanan dengan tepat waktu atau tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud yaitu hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelancaran proses perizinan dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

Tujuan (4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu, yang diukur melalui 11 indikator kinerja. Rata-rata pencapaian tujuan renstra dari 11 indikator tersebut adalah 98,91 yang artinya masuk dalam kategori belum tercapai. Padahal secara jumlah 11 indikator terdapat 3 indikator yang tidak mendapatkan rata-rata pencapaian yang optimal, namun memang rata-rata ketidaktercapaian yang cukup rendah pada indikator-indikator memiliki pengaruh besar terhadap ketercapaian tujuan renstra ini. Penjelasan per indikator tersebut, sebagai berikut :

- Persentase Obat yang memenuhi syarat

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun adalah 102,04%. Capaian yang tinggi berarti sebagian besar Obat yang beredar di pasar telah melalui pengawasan yang ketat dan memenuhi standar yang ditetapka. Ini menunjukkan bahwa BBPOM di Palembang berhasil memastikan kualitas dan keamanan obat yang beredar di masyarakat. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tiap tahun pelaksanaan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman

sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun adalah 100,56%. Capaian yang tinggi berarti mayoritas produk makanan yang beredar di telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi keamanan, kualitas, dan nilai gizi. Sampling yang telah dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak pada tiap tahun pelaksanaan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan telah dilakukan secara berjenjang dan berurutan sesuai pedoman.

- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun adalah 102,82%. Capaian yang tinggi berarti BBPOM di Palembang berhasil memastikan bahwa produk pangan telah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive pada tiap tahun pelaksanaan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun adalah 101,76%. Capaian yang tinggi berarti BBPOM di Palembang berhasil memastikan bahwa Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling dengan pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta telah diuji sesuai standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP yang berlaku.

- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 104,68%. Capaian yang tinggi berarti BBPOM di Palembang berhasil melakukan pemeriksaan sampel makanan sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta telah diuji sesuai standar Pedoman Sampling,

Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP yang berlaku.

- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 100,36%. Capaian yang cukup tinggi berarti BBPOM di Palembang berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan serta memastikan bahwa masyarakat merasa aman dengan produk yang beredar di pasaran.

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 100,66%. Capaian yang cukup tinggi berarti BBPOM di Palembang tindakan atau rekomendasi yang diberikan setelah inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan telah dilaksanakan dengan baik.

- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 110,53%. Capaian yang tinggi menunjukkan bahwa sarana distribusi Obat dan Makanan yang terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin) secara umum memenuhi ketentuan yang ditetapkan, yang berarti distribusi produk yang aman dan bermutu telah telaksana di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 96,23%. Capaian ini cukup rendah dan berdampak pada pencapaian tujuan renstra. Dalam kurun waktu 5 tahun kegiatan sampling dan pengujian Obat yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang yang berpedoman kepada Prioritas Sampling yang dilakukan secara terpadu telah memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap obat yang beredar di masyarakat, hanya saja masih ditemukan beberapa produk Obat dengan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat, sehingga sangat mempengaruhi tercapainya indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Upaya yang dapat dilakukan ke depan adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produksi dan distribusi Obat, melakukan pembaharuan data sarana dan produk yang akan diawasi secara terus menerus, serta merencanakan kegiatan pada awal tahun secara proporsional dalam mengawasi semua produk Obat. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

setiap akhir bulan juga harus dilakukan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pada periode selanjutnya.

- Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Rata-rata pencapaian indikator selama 4 (empat) tahun sebesar 82,86%. Capaian ini cukup rendah dan berdampak pada pencapaian tujuan renstra. Dalam kurun waktu 4 tahun kegiatan sampling dan pengujian Pangan Fortifikasi yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang yang berpedoman kepada Prioritas Sampling yang dilakukan secara terpadu telah memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap pangan yang beredar di masyarakat, hanya saja masih ditemukan beberapa produk pangan fortifikasi dengan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat, sehingga sangat mempengaruhi tercapainya indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat. Upaya yang dapat dilakukan ke depan adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produksi dan distribusi pangan fortifikasi, melakukan pembaharuan data sarana dan produk yang akan diawasi secara terus menerus, serta merencanakan kegiatan pada awal tahun secara proporsional dalam mengawasi semua produk pangan fortifikasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan setiap akhir bulan juga harus dilakukan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pada periode selanjutnya.

- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun sebesar 85,55%. Capaian ini cukup rendah dan berdampak pada pencapaian tujuan renstra. Dalam kurun waktu 5 tahun masih konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan aspek-aspek produksi obat dan makanan masih sangat rendah, sehingga sangat mempengaruhi tercapainya indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Ketidaksesuaian antara sarana produksi dengan ketentuan yang ada atau kurangnya pemahaman produsen tentang pentingnya memenuhi standar menjadi tantangan bagi BBPOM di Palembang. Upaya yang akan dilakukan ke depan adalah memperkuat pengawasan terhadap sarana produksi dan memberikan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tujuan (5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
Tujuan (6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
Pembahasan ketercapaian 2 (dua) tujuan renstra ini dilakukan secara bersamaan karena kedua tujuan ini saling terkait dan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk pelaku usaha dan masyarakat atau konsumen secara luas. 2 (dua) tujuan ini pun diukur melalui rata-rata ketercapaian 1 (satu) indikator yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Rata-rata pencapaian indikator

tersebut selama 5 (lima) tahun memperlihatkan hasil yang optimal yaitu 104,43% dengan kategori sudah tercapai/*on track.* Terkait tujuan untuk kepastian hukum bagi pelaku usaha dicapai dengan memperjelas regulasi yang ada dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban serta ketentuan yang harus dipatuhi, Fungsi Penindakan Balai Besar POM di Palembang berkolaborasi bersama dengan fungsi infokom dan juga fungsi pemeriksaan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Sementara terkait tujuan perlindungan masyarakat mengarah pada tindakan tegas terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh BBPOM di Palembang merupakan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara sesuai dengan tahapan penindakan. Hal ini menunjukkan indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan memang sangat relevan untuk menilai efektivitas perlindungan yang diberikan pada masyarakat serta penegakan hukum yang efektif dengan menciptakan iklim usaha yang jelas dan aman. Dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran, baik berupa penyitaan produk, penutupan fasilitas produksi yang tidak sesuai standar, atau tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi, hal ini memberikan sinyal yang jelas kepada seluruh pelaku usaha di bidang Obat dan makanan bahwa ada konsekuensi tegas bagi yang tidak mematuhi aturan.

Tujuan (7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima, yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja. Rata-rata pencapaian tujuan renstra dari 8 indikator tersebut adalah 105,03% yang artinya masuk dalam kategori sudah tercapai/*on track.* Penjelasan per indikator tersebut, sebagai berikut :

- Indeks Pelayanan Publik

Rata-rata pencapaian indikator selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 104,92%. Capaian yang tinggi memperlihatkan bahwa BBPOM di Palembang telah berhasil meningkatkan kepuasan Masyarakat dengan kualitas dan kecepatan pelayanan meliputi 6 (enam) aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang diusung Balai Besar POM di Palembang.

- Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Pencapaian indikator ini hanya diukur pada akhir periode renstra, karena indikator ini diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang sejak tahun 2024. Capaian

indikator sebesar 105,99% menunjukkan BBPOM di Palembang telah melakukan tata kelola pengadaan, secara efisien, transparan dengan memperhatikan kualitas yang memenuhi standar yang berlaku serta menghindari potensi penyelewengan.

- Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pencapaian indikator ini hanya diukur pada akhir periode renstra, karena indikator ini diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang sejak tahun 2024. Capaian indikator sebesar 105,18%. Nilai yang tinggi ini menunjukkan BBPOM di Palembang telah berhasil memenuhi beberapa aspek antara lain penatausahaan, penggunaan, penghapusan dan pemusnahan. BBPOM di Palembang telah menjaga dan memanfaatkan aset negara dengan bijaksana, memastikan bahwa barang milik negara digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak ada penyalahgunaan.

- Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Pencapaian indikator ini hanya diukur pada akhir periode renstra, karena indikator ini diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang sejak tahun 2024. Capaian indikator sebesar 132,17%. Capaian ini memang terlampau tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian target jika indikator ini akan tetap menjadi salah satu indikator dalam periode renstra selanjutnya. Penetapan target yang dilakukan berdasarkan reviu dan arahan dari Unit Pengampu ini memang telah mempertimbangkan ketersediaan opsi Produk dalam Negeri yang perlu dibelanjakan sesuai dengan standar produk dan ketetapan yang berlaku. Dari capaian yang tinggi ini terlihat bahwa BBPOM di Palembang berhasi mengelola perencanaan belanja PDN serta realisasi pemilihan belanja PDN.

- Nilai Pengelolaan Kearsipan

Pencapaian indikator ini hanya diukur pada akhir periode renstra, karena indikator ini diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang sejak tahun 2024. Capaian indikator sebesar 101,00%. Capaian yang tinggi ini memperlihatkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam mengelola arsip secara sistematis, baik itu dokumen administratif, regulasi ataupun hasil pengawasan. Pengelolaan arsip yang baik ini akan selalu dijaga oleh BBPOM di Palembang sebagai bentuk komitmen memberikan akses yang cepat terhadap data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang akurat.

- Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

Rata-rata pencapaian indikator ini selama 5 (lima) tahun adalah 97,62%. Capaian ini cukup rendah karena Reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga komitmen dari seluruh pegawai untuk melakukan perubahan sistemik dan memperkenalkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Pemahaman dan

implementasi nilai-nilai reformasi birokrasi di BBPOM di Palembang belum terinternalisasi secara luas pada seluruh pegawai sehingga perlu dilaksanakan kegiatan yang tidak hanya bersifat formalitas dan seremonial namun kegiatan yang menyentuh dan memberikan efek perubahan yang signifikan terhadap budaya kerja, *role model* dari pimpinan dan ketua tim kerja secara kolektif diharapkan dapat mendorong semangat, *engagement* dan komitmen pegawai dalam penerapan reformasi birokrasi.

- Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

Rata-rata pencapaian indikator ini selama 5 (lima) tahun adalah 97,42% atau masih belum maksimal. Pelaksanaan SAKIP di BBPOM di Palembang sesungguhnya telah optimal dilakukan namun masih terdapat kekurangan terutama pada aspek evaluasi internal dan capaian kinerja yang harus lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Perlu dilakukan peningkatan kualitas evaluasi internal yang dikawal langsung oleh pimpinan unit kerja, menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi serta monitoring capaian kinerja lebih baik.

- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang

Rata-rata pencapaian indikator ini selama 5 (lima) tahun adalah 95,92%. Hal ini memperlihatkan perlu upaya lebih keras dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran untuk periode mendatang. Saat ini, indikator-indikator pada rencana strategis terdiri dari aspek-aspek strategis yang dalam pemenuhan/pelaksanaannya telah dipandu melalui pedoman yang jelas, namun belum secara merata dipahami oleh setiap pegawai yang menjadi penanggungjawab kegiatan/program. Strategi-strategi yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan teknis belum seluruhnya mempertimbangkan imbas pada penilaian perencanaan (EKA) dan kualitas pelaksanaan (IKPA). Maka perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif antar penanggungjawab kegiatan serta peningkatan kompetensi manajemen pegawai

3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Sub bab ini menguraikan progress atas poin-poin rekomendasi yang telah disampaikan pada laporan kinerja triwulanan maupun laporan kinerja tahun sebelumnya sesuai dengan periode penilaian dari masing-masing indikator kinerja dan rekomendasi triwulan IV tahun 2024. Progress tersebut dapat dilihat pada matriks tindak lanjut, sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Time line*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai*	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Time line*	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan sampling (acak) Obat beredar sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	Rencana pelaksanaan sampling (acak) Obat dan pengujian dibuat per bulan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan kesepakatan dengan bagian pengujian	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling (acak) Obadan pengujian dilakukan dengan optimal berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Perlu penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan,seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya	2024	Pengadaan instrumen GCMS pada Triwulan III, sehingga dapat mengurangi antri alat dalam pengujian.	-	-	Tersedia alat GCMS yang mencukupi untuk melakukan pengujian parameter terkait
					Pengadaan suku cadang dan glassware yang dapat menunjang kegiatan pengujian.			Suku cadang, glassware dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengujian lainnya tersedia untuk melakukan pengujian sampel sepanjang tahun

		Kompetensi SDM perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja dan perkembangan teknologi	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan serta Peningkatan kemampuan petugas sampling dan pengujian untuk memenuhi ketentuan sampling dan pengujian sesuai pedoman pada tahun berjalan	2024	Peningkatan kompetensi staf pengujian melalui Pelatihan internal laboratorium obat, kosmetik, dan OBA pada TW II dan III, dan Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia bagi staf pengujian Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika	-	-	Tersedia personil yang kompeten untuk melakukan upaya peningkatan kinerja, terutama untuk melaksanakan kegiatan pengujian sesuai dengan pedoman
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan sampling (acak) pangan olahan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	Rencana pelaksanaan sampling acak pangan olahan dan pengujian dibuat per bulan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan kesepakatan dengan bagian pengujian	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling (acak) pangan olahan dan pengujian dilakukan dengan optimal berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Perlu penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.	2024	Sudah dilaksanakan pengadaan alat GCMS di laboratorium pangan dan air, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia/media mikrobiologi dan baku pembanding untuk menunjang pelaksanaan pengujian	-	-	Tersedia alat GCMS untuk menunjang pengujian produk makanan Suku cadang, glassware, reagensia/media mikrobiologi dan baku pembanding tersedia untuk melakukan pengujian sampel sepanjang tahun

		Kompetensi SDM perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja dan perkembangan teknologi	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan	2024	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi SDM di pengujian baik yang berupa pelatihan ke PPPOMN maupun bimtek internal di BBPOM di Palembang	-	-	Tersedia personel pengujian yang terlatih dan mampu melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan sampling targeted/purposive Obat beredar sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	Rencana pelaksanaan sampling targeted/purposive Obat beredar dan pengujian dibuat per bulan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan kesepakatan dengan bagian pengujian	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling targeted/purposive Obat beredar dan pengujian dilakukan dengan optimal berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Perlu penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan,seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya	2024	Sudah dilakukan pengadaan alat GCMS, suku cadang, glassware, reagensia/media mikrobiologi, dan baku pembanding untuk menunjang pelaksanaan pengujian	-	-	Tersedia sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan pengujian seperti ketersediaan alat yang terkalibrasi, suku cadang, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding
		Kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk menunjang capaian kinerja	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja	2024	Telah dilakukan pelatihan terhadap personel pengujian baik dilakukan di PPPOMN maupun bimtek internal yang dilakukan di BBPOM di Palembang	-	-	Tersedia SDM yang kompeten

4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan sampling sesuai Pedoman Sampling *targeted/purposive* pangan olahan dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	Rencana pelaksanaan targeted/purposive pangan olahan dan pengujian dibuat per bulan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan kesepakatan dengan bagian pengujian	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling targeted/purposive pangan olahan dan pengujian dilakukan dengan optimal berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Perlu penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhaninfrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.	2024	Sudah dilaksanakan pengadaan alat GCMS untuk laboratorium pangan dan air sehingga dapat mengurangi antrian alat dan mempercepat waktu uji	-	-	1. Tersedia alat yang cukup untuk melakukan pengujian selama tahun berjalan serta alat dalam kondisi baik
					Sudah dilaksanakan pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding sesuai keperluan			2. Suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding tersedia
		Kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan	2024	Sudah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM penguji baik ke PPPOMN maupun melalui bimtek internal	-	-	Tersedia SDM yang kompeten
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	Rencana pelaksanaan sampling pangan fortifikasi dan pengujian dibuat per bulan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan kesepakatan dengan bagian pengujian	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian dilakukan dengan optimal berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

		Perlu penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.	2024	Sudah dilakukan pengadaan reagensia/media mikrobiologi, suku cadang, alat gelas dan baku pembanding untuk mencukupi kebutuhan dalam proses pengujian	-	-	Reagensia/media mikrobiologi, suku cadang, alat gelas dan baku pembanding tersedia mencukupi untuk dilakukan uji terhadap produk pangan fortifikasi selama tahun 2024
		Kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan Publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan	2024	Sudah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM di fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian	-	-	Tersedia SDM yang kompeten untuk peningkatan capaian kinerja, terutama di fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait dengan IKU ini
					Sudah dilakukan sosialisasi kembali kepada pelaku usaha mengenai ketentuan pangan fortifikasi, kemudian dilakukan sampling kembali terhadap pangan fortifikasi	-	-	Pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha akan ketentuan pangan fortifikasi meningkat dibuktikan dengan hasil uji sampling tambahan sebanyak 21 nomor semuanya memenuhi syarat
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Belum semua petugas dapat melakukan kegiatan pemberian informasi dan edukasi dengan baik	Melakukan pelatihan kepada petugas secara berkelanjutan terkait pelayanan publik	2024	Petugas fungsi infokom dan fungsi terkait melakukan pelatihan pemberian informasi dan edukasi (penyuluhan)	-	-	Seluruh petugas fungsi infokom dan beberapa petugas fungsi terkait sudah melakukan pelatihan atau praktek langsung terkait pemberian informasi dan edukasi (penyuluhan)
		Kegiatan pemberian informasi dan edukasi (kie) hanya fokus dengan metode penyuluhan secara langsung tatap muka	Variasi kegiatan KIE yang dapat mencakup banyak massa	2024	Dibuat media pemberian informasi dan edukasi yang lebih bervariasi, menarik, dan mudah dijangkau masyarakat luas	-	-	Pemberian infromasi dan edukasi (kie) sudah lebih bervariasi dengan peningkatan jumlah dan penyebarluasan pesan kunci Cek KLIK melalui media elektronik SMS Blast dan media cetak koran

7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Kompetensi petugas yang melakukan bimbingan terhadap pelaku usaha tidak merata	Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung pelayan an kepada pelaku usaha	2024	Kompetensi petugas yang melakukan kegiatan bimbingan teknis dan workshop kepada pelaku usaha meningkat	-	-	Kompetensi petugas yang melakukan kegiatan bimbingan teknis dan workshop kepada pelaku usaha meningkat
		Media konsultasi dengan pelaku usaha berupa tatap muka, WhatsApp, telepon	Media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung	2024	Meningkatnya layanan bagi pelaku usaha baik tatap muka, maupun secara online	Meningkatkan pelayanan dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM terhadap pelaku usaha	2025	Meningkatnya layanan bagi pelaku usaha baik tatap muka, maupun secara online
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Kualitas kinerja pengawasan belum optimal dan intensif dalam melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah kota/kabupaten serta akademisi	Tingkatkan kualitas kinerja pengawasan	2024	Dilakukan upaya peningkatan kualitas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah kota/kabupaten serta akademisi sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Palembang dalam pengawasan obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap publikasi dan jenis konten dengan memanfaatkan media-media yang telah tersedia seperti melalui subsite BPOM, media cetak/elektronik dan media sosial	s.d. tahun 2025	Kualitas kinerja pengawasan menjadi lebih optimal dan intensif dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah kota/kabupaten serta akademisi, sehingga masyarakat lebih teredukasi mengenai obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Belum memadai sarana prasarana untuk kelompok rentan, terutama untuk *holding* / pegangan dan *guilding* blok	Penambahan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana	2024	Penambahan sarana dan prasarana rentan, terutama untuk *holding* / pegangan dan *guilding* blok	-	-	Sudah tersedia sarana prasarana untuk kelompok rentan seperti *holding*/pegangan dan *guilding* blok

10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target belum tercapai 100%	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian indikator dan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki apabila capaian indikator tidak tercapai.	2024	Target realisasi telah tercapai	-	Des 2024	Target tercapai
		Masih terdapat personil di pemeriksaan yang belum mengikuti pelatihan/kompetensi terkait CDOB, CPKB dan CPPOB	Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pengawasan dan tindaklanjut terkait hasil pengawasan, antara lain Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini dilakukan sepanjang tahun	2024	Personil yang sudah mengikuti pelatihan adalah untuk CPKB dan CPOTB	Masih terdapat personil yang belum mengikuti pelatihan CDOB, CPOTB dan CPPOB dikarenakan kuota pelatihan terbatas dari Pusat, hal ini akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya	Tahun 2025	Personil yang belum mengikuti pelatihan akan diikutsertakan pada tahun 2025
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor	Melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan melakukan advokasi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota beserta lintas sektor terkait.	2024	Terlaksananya advokasi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota beserta lintas sektor terkait.	-	-	Koordinasi dan kerja sama lintas sektor telah dilakukan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Sumatera Selatan

			Melakukan monev secara berkala tiap bulan	2024	Monev telah dilakukan setiap bulan	-	-	Monev telah dilaksanakan setiap bulan
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait prosedur ataupun persyaratan terkait izin edar/ sertifikasi dengan mengikuti Bimtek-bimtek fasilitator yang dilaksanakan oleh PPSDM bekerjasama dengan unit kerja terkait.	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin edar turut mendukung dalam percepatan evaluasi dokumen dan pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.	2024	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait prosedur ataupun persyaratan terkait izin edar/sertifikasi dengan mengikuti Bimtek-bimtek fasilitator yang dilaksanakan oleh PPSDM bekerjasama dengan unit kerja terkait.	-	-	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait prosedur ataupun persyaratan terkait izin edar/sertifikasi dengan mengikuti Bimtek-bimtek fasilitator yang dilaksanakan oleh PPSDM bekerjasama dengan unit kerja terkait ataupun melalui IDEAS
		Sudah diberikan fasilitas sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja fasilitator dalam memenuhi target keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain alat laboratorium, laptop, printer, komputer dan penguatan jaringan / bandwith.	2024	Sudah diberikan fasilitas sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja fasilitator dalam memenuhi target keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	Sudah diberikan fasilitas sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja fasilitator dalam memenuhi target keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Mempunyai WAG fasilitator Pangan, Kosmetik, Dan OBA. dan mempunyai WAG dengan pelaku usaha.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, antara lain melalui WA group dan japri WA	2024	Mempunyai WAG fasilitator Pangan, Kosmetik, Dan OBA. dan mempunyai WAG dengan pelaku usaha.	-	-	Mempunyai WAG fasilitator Pangan, Kosmetik, Dan OBA. dan mempunyai WAG dengan pelaku usaha.
		Evaluasi berjenjang dan saling mengingatkan sesama fasilitator untuk segera evaluasi dokumen	Monitoring dan evaluasi berjenjang untuk memastikan keputusan sertifikasi selesai tepat waktu sesuai SLA	2024	Evaluasi berjenjang dan saling mengingatkan sesama fasilitator untuk segera evaluasi dokumen pengajuan jika ada	-	-	Evaluasi berjenjang dan saling mengingatkan sesama fasilitator untuk segera evaluasi dokumen pengajuan jika ada pengajuan permohonan sertifikasi

		pengajuan jika ada pengajuan permohonan sertifikasi			pengajuan permohonan sertifikasi			
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Indikator kinerja memenuhi target yaitu 61,74%	Membuat perencanaan pemeriksaan sarana produksi dan pelaksanaan pengawasan sesuai analisa risiko	2024	152 sarana produksi obat dan makanan di Sumatera Selatan telah diperiksa dan target Indikator Kinerja meningkat menjadi 65,79%	-	-	152 sarana produksi obat dan makanan di Sumatera Selatan telah diperiksa dan target Indikator Kinerja tercapai
		Belum semua petugas yang melakukan pemeriksaan mendapat pelatihan sesuai kebutuhan	Tingkatkan kompetensi inspektur pengawas obat dan makanan		Bertambahnya petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi sebagai Food Inspektur, Inspektur CPOB, CPOTB, CPKB	-	-	Bertambahnya petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi sebagai Food Inspektur, Inspektur CPOB, CPOTB, CPKB
		Lintas sektor belum sepenuhnya dapat melakukan pengawasan secara mandiri	Lakukan intensifikasi advokasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan		Melakukan advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.	-	-	Lintas sektor melakukan pengawasan secara mandiri
		Monitoring dan evaluasi dilakukan per bulan	Lakukan monitoring dan evaluasi		Monitoring dan Evaluasi indikator per bulan sudah dilakukan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikannya.	-	-	Indicator kinerja tercapai 101,22%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi OMKA belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan pemeriksaan sarana distribusi dan pelaksanaan pengawasan sesuai analisa risiko	2024	Rencana pelaksanaan dibuat per bulan berdasarkan data yang sudah dibuatkan analisa risiko	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi OMKA dilakukan dengan optimal berdasarkan analisa risiko
		Pemahaman personil mengenai peraturan terbaru masih rendah	Tingkatkan kompetensi inspektur pengawas obat dan makanan	2024	Diseminasi rutin setiap selesai mengikuti pengembangan kompetensi kepada setiap personil di substansi pemeriksaan	-	-	Kompetensi dan pemahaman personil mengenai peraturan terbaru meningkat

		Intensifikasi advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait masih rendah	Lakukan intensifikasi advokasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan	2024	Rutin dilakukan intensifikasi advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait	-	-	Intensifikasi advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait meningkat
		Monitoring dan evaluasi indikator per triwulan belum dilakukan dengan optimal	Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan optimal	2024	Rutin dilakukan monitoring dan evaluasi indikator secara berkala dan optimal	-	-	Monitoring dan evaluasi indikator per triwulan sudah dilakukan dengan optimal
15	Indeks Pelayanan Publik	Belum memadai sarana prasarana untuk kelompok rentan, terutama untuk *holding* / pegangan dan *guilding* blok	Penambahan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana	2024	Penambahan sarana dan prasarana rentan, terutama untuk *holding* / pegangan dan *guilding* blok	-	-	Sudah tersedia sarana prasarana untuk kelompok rentan seperti *holding*/pegangan dan *guilding* blok
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait prosedur ataupun persyaratan terkait izin edar/sertifikasi dengan mengikuti Bimtek-bimtek fasilitator yang dilaksanakan oleh PPSDM bekerjasama dengan unit kerja terkait.	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik, serta pemanfaatan teknologi informasi	2024	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait prosedur ataupun persyaratan terkait izin edar/sertifikasi dengan mengikuti Bimtek-bimtek fasilitator yang dilaksanakan oleh PPSDM bekerjasama dengan unit kerja terkait.	-	-	Sudah dilakukan peningkatan kompetensi petugas terkait prosedur ataupun persyaratan terkait izin edar/sertifikasi dengan mengikuti Bimtek-bimtek fasilitator yang dilaksanakan oleh PPSDM bekerjasama dengan unit kerja terkait.

17	Persentase Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang belum optimal dan intensif	Lakukan monitoring dan evaluasi yang berjenjang dan berkelanjutan dalam pengawalan kegiatan-kegiatan mendukung stunting dan implementasi kegiatan DAK non fisik obat dan makanan	2024	Dilakukan upaya secara optimal dan berkelanjutan dalam monitoring dan evaluasi terhadap pengawalan kegiatan-kegiatan mendukung stunting dan implementasi kegiatan DAK non fisik obat dan makanan	-	-	Keterlibatan Balai Besar POM di Palembang menjadi lebih optimal dan intensif dalam pengawalan kegiatan-kegiatan mendukung stunting dan implementasi kegiatan DAK non fisik obat dan makanan
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Hanya petugas tertentu yang dapat memberikan kie kepada masyarakat	Kegiatan KIE yang dilakukan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mudah dipahami, menarik, dan membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut.	2024	Pelatihan berkelanjutan bagi petugas kie sehingga lebih informatif dan menarik	-	-	Pelatihan sudah untuk para petugas seperti "Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Budaya Pelayanan Publik Prima" yang diikuti oleh 4 orang dan "Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat" diikuti oleh 2 orang
		Kegiatan KIE secara langsung hanya menggunakan metode presentasi		2024	Penggunaan alat peraga dan contoh yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari sehingga lebih bermanfaat dan mudah dipahami	-	-	Kegiatan KIE secara langsung sudah ditambahkan dengan metode presentasi, alat peraga dan contoh yang sering ditemukan di kehidupan masyarakat.
		Survei efektifitas kie hanya dilakukan secara digital, dan jika peserta tidak ada gawai atau kesulitan sinyal, maka menggunakan gawai milik petugas	Survei efektifitas kie dapat dilakukan juga secara manual jika di tempat kegiatan terjadi hambatan seperti tidak tersedia sinyal, internet atau faktor lainnya.	2024	Survei efektifitas kie dilakukan secara manual dan/atau digital (*hybrid*) jika di tempat kegiatan terjadi hambatan seperti tidak tersedia sinyal, internet atau faktor lainnya.	-	-	Survei efektifitas kie sudah dilakukan secara manual dan/atau digital (*hybrid*) sehingga data efektfitas kie tetap bisa dikumpulkan saat kegiatan berlangsung
		Pengisian survei mebutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisi karena pertanyaannya telalu banyak	Pemberian masukan kepada penyelenggara survei terkait penyederhanaan pertanyaan agar	2024	Pemberian masukan kepada penyelenggara terkait survei efektifitas KIE	-	-	Pihak penyelenggara sudah menerima masukan dari upt dan ditindaklanjuti untuk perubahan indikator survei.

			sesuai dengan teknis di lapangan.					
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Tidak tercapainya persentase tahapan kegiatan pjas terhadap target triwulan	Melakukan tahapan selanjutnya dengan memperhatikan target bulanan dan timeline yang telah ditetapkan	2024	Persentase kegiatan yang terlaksana setiap triwulan tercapai baik dari target bulanan maupun timeline	-	-	Tercapainya persentase tahapan kegiatan pjas terhadap target triwulan, sehingga target di akhir tahun 2024 sebesar 100% dapat tercapai dengan baik.
		Pelaporan kegiatan terlambat dan belum ada format pelaporan	Pelaporan kegiatan sesuai dengan acuan	2024	Pelaporan dilakukan sesuai dengan timeline dan format yang telah ditetapkan	-	-	Pelaporan kegiatan sesuai dengan pedoman dengan nilai kepatuhan lebih dari 70% yaitu 90%-95,9 %
		Belum ada inovasi yang terkait langsung dengan kegiatan terpadu	Inovasi terkait kegiatan terpadu	2024	Monitoring dan evaluasi inovasi yang mendukung kegiatan ini.	-	-	Terdapat inovasi AMPERA (Amankan Pangan, Edukasi masyaRAkat) yang dapat dioptimalisasi bersama program keamanan pangan terpadu
20	Jumlah desa pangan aman	Persentase tahapan kegiatan gkpd belum tercapai penuh sampai triwulan III	Melakukan tahapan selanjutnya dengan memperhatikan target bulanan dan timeline yang telah ditetapkan	2024	Persentase kegiatan yang terlaksana setiap triwulan tercapai baik dari target bulanan maupun timeline	-	-	Persentase tahapan kegiatan gkpd sudah tercapai 100% sampai akhir tahun 2024
		Pelaporan kegiatan terlambat dan aplikasi GKPD online masih perlu perbaikan	Pelaporan kegiatan sesuai dengan acuan	2024	Pelaporan dilakukan sesuai dengan pedoman	-	-	Pelaporan kegiatan sesuai dengan pedoman dengan nilai kepatuhan lebih dari 70% yaitu 80%-90%
		Belum ada inovasi yang terkait langsung dengan kegiatan terpadu	Inovasi terkait kegiatan terpadu	2024	Monitoring dan evaluasi inovasi yang mendukung kegiatan ini.	-	-	Terdapat inovasi AMPERA (Amankan Pangan, Edukasi masyaRAkat) yang dapat dioptimalisasi bersama program keamanan pangan terpadu
		Belum dilakukan pendampingan kader keamanan pangan desa oleh petugas	Tahapan kegiatan fasilitasi perlu dioptimalkan.	2024	Pendampingan kader oleh petugas terkait kegiatan fasilitasi	-	-	Sudah dilakukan pendampingan kader keamanan pangan desa oleh petugas pada tahapan fasilitasi
		Belum dilakukan sinergi program	Perlu dilakukan sinergi Program	2024	Melakukan sinergi kegiatan program GKPD dengan program lain	-	-	Sudah dilakukan sinergi dengan program lainnya

		GKPD dengan program lainnya	GKPD dengan program lainnya					seperti PMT berbahan Pangan Lokal
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Persentase tahapan kegiatan ppabk belum tercapai penuh (100%)	Melakukan tahapan selanjutnya dengan memperhatikan target bulanan dan timeline yang telah ditetapkan	2024	Persentase kegiatan yang terlaksana setiap triwulan tercapai baik dari target bulanan maupun timeline	-	-	Persentase tahapan kegiatan gkpd sudah tercapai 100% sampai akhir tahun 2024
		Pelaporan kegiatan terlambat dan aplikasi SiPAMAN masih belum dioptimalkan	Pelaporan kegiatan sesuai dengan acuan	2024	Pelaporan dilakukan sesuai dengan pedoman	-	-	Pelaporan kegiatan sesuai dengan pedoman dengan nilai kepatuhan lebih dari 70% yaitu 70%-79,9%
		Belum ada inovasi yang terkait langsung dengan kegiatan terpadu	Inovasi terkait kegiatan terpadu	2024	Monitoring dan evaluasi inovasi yang mendukung kegiatan ini.	-	-	Terdapat inovasi AMPERA (Amankan Pangan, Edukasi masyaRAkat) yang dapat dioptimalisasi bersama program keamanan pangan terpadu
		Pelaporan dan tindak lanjut tahapan sampling dan pengujian belum selesai	Pendampingan petugas pasar	2024	Pendampingan petugas pasar pada tahapan sampling dan pengujian	-	-	Pelaporan sampling dan pengujian sudah selesai dilaporkan dan tindak lanjut sudah dilakukan saat kegiatan monitoring evaluasi bersama pemda setempat
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian belum dilakukan dengan optimal	Membuat perencanaan sampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2024	Rencana pelaksanaan dibuat per bulan berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan kesepakatan dengan bagian pengujian	-	-	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian dilakukan dengan optimal berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

		Ketersediaan alat kurang, terutama GCMS, dimana hanya tersedia 1 GCMS yang digunakan untuk 4 laboratorium kimia. Selain itu diperlukan perencanaan dan pengadaan yang tepat sarana penunjang pengujian seperti suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.	2024	Sudah dilakukan pengadaan alat GCMS sehingga dapat mengurangi antrian alat GCMS yang sebelumnya hanya mengandalkan 1 alat	-	-	Alat laboratorium tersedia, cukup untuk melakukan pengujian sampel tahun berjalan
					Sudah dilaksanakan pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding sesuai kebutuhan dalam proses pengujian			Suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding tersedia untuk proses pengujian sampel tahun berjalan
		Kompetensi personel pengujian perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan metode analisis, teknologi dan untuk refreshment terkait ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pengujian	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja		Sudah dilaksanakan pelatihan personel pengujian baik ke PPPOMN maupun melalui bimtek internal di BBPOM di Palembang	-	-	Tersedia personel yang kompeten untuk melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Ketersediaan alat kurang, terutama GCMS, dimana hanya tersedia 1 GCMS yang digunakan untuk 4 laboratorium kimia. Selain itu diperlukan perencanaan dan pengadaan yang tepat sarana penunjang	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan	2024	Sudah dilakukan pengadaan alat GCMS sehingga dapat mengurangi antrian alat GCMS yang sebelumnya hanya mengandalkan 1 alat	-	-	Alat laboratorium tersedia, cukup untuk melakukan pengujian sampel tahun berjalan
					Sudah dilaksanakan pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding sesuai			Suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding tersedia untuk proses pengujian sampel tahun berjalan

		pengujian seperti suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding	khusus intelijen dan lain sebagainya.		kebutuhan dalam proses pengujian			
		Kompetensi personel pengujian perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan metode analisis, teknologi dan untuk refreshment terkait ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pengujian	Melakukan pelatihan terkait ISO 17025 dengan tema Validasi dan Verifikasi Metode Analisis		Pelatihan terkait ISO 17025 dengan tema validasi dan verifikasi metode analisis sudah dilaksanakan di tw 1 tahun 2024	-	-	Tersedia personel yang kompeten untuk melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian
			Melakukan bimtek internal laboratorium pangan		Sudah dilaksanakan pelatihan personel pengujian baik ke PPPOMN maupun melalui bimtek internal di BBPOM di Palembang			
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target TW3 sebesar 55 hanya terealisasi 44 (capaian 80%)	Meningkatkan investigasi kejahatan obat dan makanan (Intelijen maupun siber)	Triwulan 4 2024	Melakukan kegiatan/ operasi intelijen untuk memastikan target dapat dilakukan operasi penindakan (A1)	-	-	Tercapai target informasi A1 yang naik jadi perkara (5 perkara)
			Mempercepat proses pemberkasan perkara	Triwulan 4 2024	-	Melanjutkan penyelesaian berkas perkara hingga tahap 2	TW 1 tahun 2025	- 1 perkara belum P21 - 2 perkara masih tahap SPDP
			Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait (Korwas, Kejati)	Triwulan 4 2024	-	Intensifkan Koordinasi dan konsultasi dengan korwas dan JPU khususnya untuk 3 perkara dapat selesai hingga penyerahan tahap2	TW 1 tahun 2025	- 1 perkara belum P21
			Monev berjenjang dilakukan secara berkala	Triwulan 4 2024	-	Monev setiap bulan terhadap capaian IKU dan Pengelolaan Risiko	TW 1 tahun 2025	Realisasi IKU 68,73 dengan capaian 91,64% dari target 75
			Penggalangan dengan instansi/ stake holder terkait	Triwulan 4 2024	-	Melakukan penggalangan dengan stakeholder terkait	-	Kegiatan penggalangan di TW 4 tidak terlaksana karena ada pemotongan anggaran.

								Ditahun 2025 diperkirakan tidak akan dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran
			Identifikasi Risiko pada msing2 tahapan penyidikan	Triwulan 4 2024	Identifikasi risiko untuk tahap1	Identifikasi risiko untuk tahap2	TW1 tahun 2025	2 perkara belum tahap1 dan 1 perkara belum tahap2
26	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	Mutasi pegawai belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan rotasi dan mutasi yang telah ditetapkan	Membuat kertas kerja mutasi pegawai yang menunjukkan pertimbangan mutasi/rotasi dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan pada pedoman mutasi pegawai	2024	SK Pola mutasi rotasi Kertas Kerja mutasi pegawai dengan pertimbangan dan memperhatikan kompetensi jabatan	-	-	Mutasi pegawai telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan rotasi dan mutasi yang telah ditetapkan
		Dokumen Training Need Analysis belum diformalkan	Membuat dokumen formal untuk Training Need Analysis	2024	Menyusun Training Need Analysis yang diformalkan	-	-	Dokumen Training Need Analysis telah diformalkan
		Belum terdapat peta kompetensi jawabatan dan rencana pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai serta belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Membuat peta kompetensi jabatan dan rencana pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja anggaran menggambarkan dampak terhadap kinerja pegawai	2024	Menyusun peta kompetensi jabatan, rencana pengembangan kompetensi pegawai, monev dampak dan efisiensi anggaran.			Telah terdapat peta kompetensi jawabatan dan rencana pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai serta belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
		Belum terdapat bukti telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengoptimalkan pemenuhan data dukung terkait identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai	2024	Menyusun identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai dan melakukan pemutakhiran secara berkala	-	-	Telah terdapat bukti dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama kepada seluruh pegawai

		kepada seluruh pegawai						
		Belum terdapat bukti bahwa reviu dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan dengan melibatkan stakeholder serta memanfaatkan masukan dari hasil SKM dan pengaduan masyarakat	Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan memanfaatkan hasil SKM dan pengaduan masyarakat	2024	Melaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik serta memanfaatkan masukan dari ahsil SKM dan pengaduan masyarakat			Telah terdapat bukti bahwa reviu dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan dengan melibatkan stakeholder serta memanfaatkan masukan dari hasil SKM dan pengaduan masyarakat
		Belum terdapat bukti telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima kepada setiap pegawai	Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima kepada setiap pegawai dengan sosialisasi atau pelatihan	2024	Melakukan pelatihan dan praktik penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai	-	-	Terdapat bukti telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima kepada setiap pegawai
		Belum terdapat latar belakang masalah/ manajemen risiko, tujuan dan indikator pada inovasi pelayanan yang dirancang, serta belum ada terdapat laporan mengenai pelaksanaan inovasi beserta dampak sebelum dan sesudah adanya inovasi	Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi pada daftar risiko, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain	2024	Membuat identifikasi risiko sebagai dasar penciptaan inovasi Membuat laporan inovasi yang menyajikan dampak sebelum dan sesudah inovasi	-	-	Terdapat latar belakang masalah/manajemen risiko, tujuan dan indikator pada inovasi pelayanan yang dirancang, serta terdapat laporan mengenai pelaksanaan inovasi beserta dampak sebelum dan sesudah adanya inovasi

		Belum terdapat bukti SOP mikro yang telah disusun terkait dengan adanya penyederhanaan jabatan	Merevisi SOP mikro terkait dengan adanya penyederhanaan jabatan	2024	Melakukan kaji ulang dokumen dan melakukan revisi SOP terkait penyederhanaan jabatan	-	-	Terdapat bukti SOP mikro yang telah disusun terkait dengan adanya penyederhanaan jabatan
		Hasil assement pegawai belum dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Menggunakan hasil assement pegawai sebagai pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	2024	Memanfaatkan hasil assesment pegawai sebagai pertimbangan mutasi dan pengembangan karier	-	-	Hasil assement pegawai telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawa
		Unit kerja masih fokus pada pelaksanaan kegiatan dan belum sepenuhnya membangun strategi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik secara berkala	Melakukan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja, ditindaklanjuti secara berkala dengan mengembangkan perencanaan dan strategi yang tepat serta terfokus pada pencapaian kinerja unit kerja yang lebih baik	2024	Melakukan evaluasi internal berkala setiap bulan dan merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik	-	-	Unit kerja membangun strategi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik secara berkala
		Belum menyusun laporan pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) secara berkala	Melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi AntiKorupsi (SPAK) secara berkala serta menuangkan rencana aksi tindak lanjut perbaikan ke dalam laporan setiap bulannya	2024	Melakukan survei SPKP dan SPAK, membuat laporan dan melakukan tindak lanjut hasil survei	-	-	Telah menyusun laporan pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti-Korupsi (SPAK) secara berkala
		Terdapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang masih belum sesuai saran (BSS)	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran	2024	Menindaklanjuti seluruh rekomendai tindak lanjut yang masih BSS	-	-	Tidak terdapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang masih belum sesuai saran (BSS)

		Melaksanakan ZI sesuai dengan pedoman	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	2024	Melaksanakan continuous inprovement pembangunan ZI dengan mengawal seluruh capaian indikator kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi dampak inovasi pelayanan publik	-	-	Melaksanakan ZI sesuai pedoman dan melakukan continuous improvement
		Belum terlihat proses internalisasi pembangunan ZI di lingkungan unit kerja	Melakukan upaya intensif dalam menginternalisasikan pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada seluruh pegawai	2025	Internalisasi pembangunan ZI secara rutin dan berkala pada setiap apel pagi Hari Kamis, membuat notulensi setiap kegiatan internalisasi ZI	Internalisasi lebih intensif pembangunan ZI	2025	Telah terlihat proses internalisasi pembangunan ZI di lingkungan unit kerja
		Belum terdapat bukti tindak lanjut atas rencana tindak lanjut dalam menangani kendala pelaksanaan pembangunan ZI	Melakukan tindak lanjut atas rencana tindak lanjut dalam menangani kendala pelaksanaan pembangunan ZI	2025	-	Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas, merumuskan tindak lanjut dan memantau TLnya	2025	Terdapat bukti tindak lanjut atas rencana tindak lanjut dalam menangani kendala pelaksanaan pembangunan ZI
		Penerapan atas SOP inovasi yang telah ditetapkan belum menunjukkan pemenuhan mutu baku SOP dan reviu/evaluasi SOP inovas	Menyusun pemenuhan mutu baku dan reviu atas penerapan SOP inovasi	2025	-	Melakukan revisi SOP dengan menambahkan mutu baku dan reviu atas penerapan inovasi	2025	Penerapan atas SOP inovasi yang telah ditetapkan telah menunjukkan pemenuhan mutu baku SOP dan reviu/evaluasi SOP inovasi
		Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir namun nilai indeks berakhlak BBPOM di Palembang (54,9%) masih di rata-rata	Melakukan evaluasi atas hasil indeks berakhlak atas nilai yang perlu dioptimalkan dan ditindaklanjuti guna sebagai bahan penyusunan program/ kegiatan Rencana Aksi Agen	2025	-	Melaksanakan program-program AoC untuk meningkatkan haisl indeks berakhlak	2025	Peningkatan nilai indeks berakhlak

		indeks berakhlak BPOM 57,7%	Perubahan dalam meningkatnya indeks Core Value BerAKHLAK tahun berikutnya					
		Belum terdapat narasi latar belakang dan dampak (before/after) atas inovasiinovasi yang dikembangkan, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi	Menyusun narasi latar belakang dan dampak (before/after) atas inovasi-inovasi yang dikembangkan, serta menindaklanjuti rencana TL atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi	2025	-	Menyusun narasi latar belakang dan dampak (before/after) atas inovasi-inovasi yang dikembangkan, serta menindaklanjuti rencana TL atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi	2025	Tterdapat narasi latar belakang dan dampak (before/after) atas inovasiinovasi yang dikembangkan, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi
		Belum terlihat bukti penempatan pegawai yang mengacu pada matriks kebutuhan pegawai dari setiap jabatan	Menyusun matriks penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada setiap jabatan	2025	Menyusun matriks penempatan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada setiap jabatan	-	-	Terlihat bukti penempatan pegawai yang mengacu pada matriks kebutuhan pegawai dari setiap jabatan
		Belum terdapat standar kompetensi pegawai dan gap kompetensi yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai pegawai	Menyusun standar kompetensi pegawai dan gap kompetensi yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai pegawai	2025	-	Menyusun standar kompetensi pegawai dan gap kompetensi yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai pegawai	2025	Terdapat standar kompetensi pegawai dan gap kompetensi yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai pegawai
		Belum terdapat matriks pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawa	Menyusun matriks pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai	2025	-	Menyusun matriks pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai	2025	Terdapat matriks pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawa

		Belum terdapat inplementasi pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan unit kerja yang berlaku	Mengimplementasi kebijakan pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan yang berlaku	2024	Mengimplementasi kebijakan pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan yang berlaku	Mengimplementasi kebijakan pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan yang berlaku	2025	Terdapat inplementasi pemberian reward dan punishment berdasarkan kebijakan unit kerja yang berlaku
		Dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya memenuhi standar yang baik	Menyusun seluruh perencanaan kinerja dengan memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	2025	Melakukan dialog kinerja, penyusunan MPH dan diskusi strategi penetapan target	Menyusun seluruh perencanaan kinerja dengan memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	2025	Dokumen perencanaan kinerja seluruhnya memenuhi standar yang baik
		Belum terdapat dokumen implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat	Mendokumentasikan dan melaporkan atas implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat	2024	Mendokumentasikan dan melaporkan atas implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat	Mendokumentasikan dan melaporkan atas implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat	2025	Terdapat dokumen implementasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat
		Terdapat status tindak lanjut yang masih open atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melakukan monev dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	2025	-	Melakukan monev dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	2025	Tidak terdapat status tindak lanjut yang masih open atas hasil survei kepuasan masyarakat
			Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	2025	-	Melaksanakan continuous inprovement pembangunan ZI dengan mengawal seluruh capaian indikator kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi dampak inovasi pelayanan publik	2025	Melaksanakan ZI sesuai pedoman dan melakukan continuous improvement

1	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Perencanaan Kinerja :	Perencanaan Kinerja :	2024	Perencanaan Kinerja :		-	Perencanaan Kinerja :
		- Belum terdapat kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya	- Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pandek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.		- Penetapan dokumen RKT, PK, RAPK Tahun 2024 yang telah memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target bersama Kepala Balai.			- Dokumen perencanaan berupa Reviu Renstra, matriks reviu renstra, kertas kerja reviu indikator kinerja, RKT, PK, RAPK, SK Penetapan IKU, *Cascading* hingga level individu telah disajikan secara lengkap dan sesuai pedoman.
		- Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	- Membuat dokumentasi pada penyusunan baseline penetapan target kinerja dan penentuan kenaikan dan penurunan target kinerja berupa notulen/justifikasi dilengkapi data yang memadai;		- Mendokumentasikan dasar penetapan target kinerja dan penentuan kenaikan dan penurunan target kinerja berupa notulen/justifikasi dilengkapi data yang memadai;	- Perlu dilakukan pendokumentasian dasar penetapan target kinerja dan penentuan kenaikan dan penurunan target kinerja berupa notulen/justifikasi dilengkapi data yang memadai;	Tahun 2025	
		- Pada Matrik Peran Hasil (MPH), belum seluruh IKU Kepala Unit Kerja diturunkan hingga level individu yaitu Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	- Menyusun breakdown RAPK sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan.		- Penyusunan RAPK sampai kegiatan dan sub kegiatan			
		Pengukuran Kinerja :	Pengukuran Kinerja :		Pengukuran Kinerja :	Pengukuran Kinerja :	Tahun 2025	Pengukuran Kinerja :

		- SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data	- Menyusun mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data atau pencegahan kesalahan data yang terkait dengan pelaporan kinerja;					- Perlu pemutakhiran SOP yang memuat mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data dan pencegahan kesalahan terkait dengan pelaporan kinerja
		- Data kinerja belum dapat diandalkan, terlihat dari adanya perbedaan capaian kinerja tahun 2022 pada dokumen RHPK						
		Belum terdapat pemberian reward dan punisment yang dilakukan secara berkala	- Menyusun mekanisme monitoring capaian kinerja dan pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala;			Menetapkan mekanisme monitoring capaian kinerja dan pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala hingga level individu dengan lengkap		- Perlu pemutakhiran SOP yang memuat mekanisme monitoring capaian kinerja dan pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala hingga level individu.
			- Melakukan monitoring kinerja dan memanfaatkan/ mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) sampai ke level individu.					
		Pelaporan Kinerja :	Pelaporan Kinerja :		Pelaporan Kinerja :	Pelaporan Kinerja :		Pelaporan Kinerja :

		- Belum menyajikan penjelasan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan kegiatan secara memadai serta upaya efisiensi yang telah dan penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	- menyajikan penjelasan terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan kegiatan secara memadai serta upaya efisiensi yang telah dan penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.		- Menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan kegiatan secara memadai	- Menyajikan pemanfaatan informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja	-	- Penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya telah dijelaskan secara memadai
		- Belum menyajikan pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.	- Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja;		-	- Melakukan monitoring indikator sasaran, sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut secara menyeluruh	2025	- Penjelasan pemanfaatan informasi kinerja perlu dilakukan pada semua indikator kinerja
			- Melakukan monitoring indikator sasaran, sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut.		-		2025	- Monev indikator kinerja sampai level kegiatan dan sub kegiatan perlu dioptimalkan.

		Evaluasi Internal :	Evaluasi Internal :		Evaluasi Internal :	Evaluasi Internal :	2025	Evaluasi Internal :
		- Belum menyajikan analisis secara memadai terhadap upaya yang telah dilakukan atas keberhasilan capaian kinerja;	- Menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disusun, pada periode berikutnya sebagai bentuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya;		- Monev capaian kinerja telah dilaksanakan secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah	- Menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disusun, pada periode berikutnya sebagai bentuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya secara menyeluruh.	-	- Monev kinerja telah dilakukan secara berkala
		- Belum terdapat rencana tindak lanjut untuk semua IKU dengan capaian di bawah target. Untuk IKU yang sudah memiliki rencana tindak lanjut belum ditetapkan timeline pelaksanaannya dan kurang spesifik serta hampir semua timeline rencana tindak lanjutnya di akhir tahun	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;				-	
		- Belum dilakukan monitoring atas rencana tindak lanjut sehingga belum terlihat keruntutan tindak lanjut atas rencana tindak lanjut hasil evaluasi kinerja internal pada periode sebelumnya	Mencantumkan PIC dan timeline pada Rencana Aksi Tindak Lanjut di pada link METALIKA untuk memudahkan monitoring atas rencana tindak lanjut		Mencantumkan PIC dan timeline pada Rencana Aksi Tindak Lanjut pada link METALIKA	-		- Pencantuman pic dan timeline telah sesuai.

		- Terdapat target yang belum tercapai namun rencana aksi dinilai selesai ditindaklanjuti dan tidak menyusun opsi rencana aksi lain untuk pencapaian target yang optimal.						
		Capaian Kinerja	Capaian Kinerja :	2024	-	Capaian Kinerja :	2025	Capaian Kinerja :
		Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 15 (53,57%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja			- Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja		Sebanyak 28,57% capaian kinerja output tahun 2023 tidak lebih baik dari tahun 2022 Sebanyak 34,48% indikator kiinerja outcome tahun 2024 tidak tercapai Sebanyak 20,68% capaian indikator kinerja outcome 2023 tidak lebih baik dari capaian tahun 2022.
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Penciptaan naskah dinas tidak seragam, belum konsisten menggunakan format sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku	Penciptaan naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI dan berdasarkan Peraturan Badan POM NOmor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan POM. Pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan format naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM	2024	Melakukan sosialisasi Tata Naskah Dinas kepada seluruh pegawai Arsiparis melakukan verifikasi pada proses penciptaan tata naskah dinas sebelum dilakukan tanda tangan elektronik	-	-	Penciptaan naskah dinas memperhatikan format sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku
		Penyajian arsip sebagai informasi belum mencakup	Penyajian arsip menjadi informasi dilakukan terhadap seluruh arsip yang	2024	Mambuat daftar arsip untuk seluruh arsip yang tercipta di unit Pengolah dan unit Kearsipan	-	-	Penyajian arsip sebagai informasi mencakup seluruh arsip yang tercipta

		seluruh arsip yang tercipta	tercipta di lingkungan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan					
		Belum dilakukan koordinasi untuk menentukan ABK arsiparis bersama Biro SDM	Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk menentukan ABK arsiparis	2024	Melengkapi info jabatan Arsiparis dan mengisi kebutuhan Arsiparis pada aplikasi Siren SDM Biro SDM	-	-	Telah dilakukan koordinasi untuk menentukan ABK Arsiparis bersama Biro SDM
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi belum mencakup kebutuhan pelatihan Arsiparis	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan yaitu mengikutkan sertifikasi bagi Arsiparis dan diklat teknis bagi pengelola arsip	2024	Melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan menyertakan kebutuhan pelatihan kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip	-	-	Telah dilakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi belum mencakup kebutuhan pelatihan Arsiparis
		Sarana prasarana penyimpanan arsip inaktif belum lengkap	Penyediaan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif di Record Center	2024	Melengkapi sarana prasarana penyimpanan arsip inaktif di record center	-	-	Sarana prasarana penyimpanan arsip inaktif belum lengkap
		Masih terdapat arsip hasil penciptaan yang belum sesuai format Tata Naskah Dinas yang berlaku	Pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan format naskah dinas sesuai dengan tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM	-	-	Sosialisasi berkala kepada seluruh pegawai BBPOM di Palembang tentang format penciptaan sesuai Tata naskah Dinas	2025	Seluruh arsip hasil penciptaan sesuai format Tata Naskah Dinas yang berlaku
		Daftar informasi arsip aktif belum seluruhnya memuat SKKAD	Pada tahap penggunaan arsip agar menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD	-	-	Menyusun daftar informasi aktif yang memuat SKKAD	2025	Daftar informasi aktif memuat SKKD
		Pemberkasan belum dilakukan pada seluruh arsip yang tercipta	Pada tahap pemeliharaan arsip, kegiatan pemberkasan sebaiknya dilakukan untuk seluruh arsip yang tercipta di lingkungan Balai	-	-	Melakukan pemberkasan pada seluruh arsip yang tercipta	2025	Pemberkasan dilakukan pada seluruh arsip yang tercipta

			Besar POM di Palembang					
		Daftar berita acara alih media belum memuat informasi sesuai ketentuan	Penyampaian daftar berita acara alih media sebagai lampiran berita acara alih media agar memuat informasi sesuai ketentuan	-	-	Menyempurnakan daftar berita acara alih media memuat informasi sesuai ketentuan	2025	Daftar berita acara alih media telah memuat informasi sesuai ketentuan
		Daftar arsip inaktif yang dipindahkan belum memuat informasi sesuai ketentuan	Penyampaian daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagai lampiran berita acara pemindahan arsip harus memuat informasi sesuai dengan ketentuan	-	-	Menyempurnakan daftar arsip inaktif yang dipindahkan memuat informasi sesuai ketentuan	2025	Daftar arsip inaktif yang dipindahkan telah memuat informasi sesuai ketentuan
		Pengembangan kompetensi mencakup kebutuhan pelatihan Arsiparis belum terealisasi	Agar membuat usulan pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan yaitu mengikutkan sertifikasi bagi Arsiparis dan Diklat teknis bagi pengelola arsip	-	-	Melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan menyertakan kebutuhan pelatihan kearsipan bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip Melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi	2025	Pengembangan kompetensi mencakup kebutuhan pelatihan Arsiparis terlaksana
		Pengelolaan kearsipan belum dipahami sebagai bagian tidak terpisahkan dari setiap fungsi	Pimpinan unit kearsipan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, agar bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya kearsipan, monitoring dan evaluasi	-	-	Melakukan dialog kinerja dan cascading kinerja sampai level individu dalam hal pengelolaan arsip. Menyusun ST Tim Kearsipan yang memasukkan perwakilan setiap fungsi sebagai anggota tim Melakukan pemantauan dan penilaian kinerja pada SKP.	2025	Peningkatan pemahaman dan pengelolaan kearsipan di setiap fungsi
		Sarana prasarana penyimpanan arsip inaktif di record center belum lengkap	Agar unit kearsipan II menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip			Melengkapi sarana prasarana penyimpanan arsip inaktif di Record Center	2025	Sarana prasarana penyimpanan arsip inaktif di record center lengkap dan dipelihara dengan baik

			inaktif di Record Center					
28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	1. Tubel/ibel : Awal tahun 2023, selesai Tubel sejumlah 5 orang, aktif 1 orang pengajuan tubel disetujui 4 orang. Aktif tubel 2023-2024 5 orang, 2 orang lepas jabatan dan 3 orang tetap menjabat.	1. Memberikan peluang kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar (TUBEL), Izin Belajar (IBEL), Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya.	2024	Telah memberika ijin belajar kepada pegawai sejumlah 5 orang.	1 a.Telah memberika ijin belajar kepada pegawai sejumlah 5 orang.	-	- 5 orang Sedang proses melaksanakan tugas belajar.
		2. Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya. Awal tahun 2023 ada 12 orang belum mengikuti diklat fungsional	2. ASN berperan aktif sesuai dengan jenjang jabatan mengikuti Diklat Kepemimpinan (bagi pejabat struktural/fungsional ahli), Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya.	2024	- Manjemen Secara aktif memberikan peringatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi, teknis dan fungsional.	Mengikuti Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya	-	- Seluruh pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP
		3. Penyusunan SKP dilakukan selaras dengan pekerjaan fungsional ASN namun masih ada ketidak sesuaian pada saat memilih metode periodik di MPH	3. Penyusunan SKP yang selaras dengan pekerjaan fungsional ASN.	2024	SKP pegawai disusun dengan mekanisme cascading melalui penyusunan Matrik Peran dan Hasi degan pemberian tugas diselaraskan dengan tugas fungsionalnya.	-	-	3. Penyusunan selesai dibuat awal tahun 2024 untuk seluruh pegawai

			4. Lebih konsisten lagi dalam Penegakkan Disiplin dengan ada adanya pemberian reward dan punishment.	2024	Melakukan pembinaan kinerja internal dan Badan POM tahun 2024. Selanjutnya	4. Pemberian reward dan panisment dalam penerapan disiplin tealah diterapkan secara terintegrasi dengan pencapaian pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai melalui inovasi " MAKSUBA" (Mari Kita Kelola ASN untuk Sukses Bersama) - Perlu keberlanjutan pada periode berikutnya	2025	4. Penerapan penegakan displin terintegrasi dengan pengembangan kompetensi dan Kinerja pegawai secara utuh diterapkan sejak triwulan 2 tahun 2024 melalui pembangunan inovasi MAKSUBA (Mari Kita Kelola ASN untuk Sukses Bersama). Implementasi dan pengembangan inovasi secara kontinue sesuai perkembangan dan kebutuhan.
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Kondisi awal pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP mencapai 98,97%	Meningkatkan pemenuhan aspek kompetensi, peralatan dan aspek ruang lingkup	2024	Sudah dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pada masing masing personil laboratorium sehingga terjadi peningkatan Aspek kompetensi personel dari 92,86% pada tahun 2023 menjadi sebesar 93.32%	Terjadi penurunan nilai standar pemenuhan alat laboratorium dari sebesar 85% pada tahun 2023 menjadi 81,94% pada 2024 sehingga perlu dilakukan rencana aksi sebagai berikut :	2025	
					Sudah dilakukan pengujian dengan parameter uji baru yang belum pernah dilakukan pada standar ruang lingkup sehingga terjadi peningkatan dari 85% pada tahun 2023 menjadi 87,21%	-mengajukan pembelian alat dengan surat rekomendasi		Terjadi peningkatan capaian GLP menjadi
						-mengajukan anggaran pembelian alat sesuai dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya		101,38% (rata rata dari 3 aspek)
30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Masih kurangnya sosialisasi website BPOM	Meningkatkan sosialisasi website BPOM, HALO BPOM dan media sosial	2024	Bekerja sama dengan agen perubahan untuk membuat konten konten yang menarik dan berkala untuk diupload pada media sosial.	-	-	Pengunjung website BPOM dan media sosial meningkat dengan nilai indeks 3
					Membuat template pada paparan PPT dengan menambahkan informasi alamat website BPOM, Halo BPOM dan akun media sosial BPOM			
		Kurang aktifnya tim medos dan tim IT	Mengaktifkan kembali tim medsos dan tim	2024	Membuat wa grup tim medsos dan IT untuk monitoring kegiatan,	-	-	Berita web dan media sosial meningkat dengan nilai indeks 3

			IT BBPOM di Palembang		membuat target upload berita aktual			
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Nilai IKPA dan Nilai EKA kurang optimal	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian IKPA dan EKA untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran	2024	Membahas capaian output dan anggaran di rapat monev bulanan	-	-	Terjadi peningkatan nilai kinerja anggaran dari kondisi awal
			Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan keuangan negara		Pelaksanaan pelatihan SDM	-	-	
			Implementasi sistem informasi terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan		Pengembangan sistem informasi	-	-	
			Penguatan koordinasi antar bagian/bidang		Membahas capaian output dan anggaran di rapat monev bulanan	-	-	
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Telah tersedia RUP yang perlu dimonev	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	2024	Monev pengadaan barang dan jasa setiap triwulan	-	-	Monev telah berjalan setiap bulan dan Capaian kinerja hingga akhir periode 2024 sebesar 105,99%
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	telah tersedia rencana Pengelolaan BMN yang pelaksanaannya perlu dimonitor	Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik negara	2024	Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik negara	Perlu pelaksanaan secara berkelanjutan	2025	sd Desember 2024 Telah dilaksnakan dan dilanjutkan pada tahun 2025
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	terdapat rencana pengadaan barang dan jasa yang berTKDN yang pelaksanaannya perlu dimonitoring serta dievaluasi	Monitoring pengadaan barang dan jasa yang berTKDN	2024	Monev setiap triwulan dengan data diambil dari aplikasi SIROUM	-	-	Monev triwulan sudah dilakukan dan capaian penggunaan produk dalam negeri sebesar 132,17%

Tabel 3.4.1 Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut

3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dalam rangka melaksanakan *Continuous Improvement*, Balai Besar POM di Palembang senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Beberapa Sasaran Kegiatan memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya diperoleh dengan melihat analisa tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa trend dengan pembanding yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid dalam penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya. Setiap triwulan dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan pencapaian kinerja yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja Interim. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di triwulan berikutnya. Diantaranya adalah tata kelola anggaran dengan melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal dan Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu. Pemanfaatan informasi tersebut meliputi :

1. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai sesuai target untuk setiap interim, di mana pada interim I tercapai 103,82%, pada Interim II tercapai 102,33%, pada interim III tercapai 101,76%. Capaian ini dimonitor dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian meningkat menjadi 102,19%.
2. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah tercapai sesuai target untuk setiap interim khususnya interim I-III, di mana pada interim I tercapai 105,21%, pada Interim II tercapai 97,07%, pada interim III tercapai 101,13%. Capaian ini dimonitor dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 namun capaian menurun menjadi 99,54%.

3. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah tercapai sesuai target untuk setiap interim khususnya interim I dan II, di mana pada interim I tercapai 103,09%, pada Interim II tercapai 101,55% namun pada interim III menurun menjadi 99,67%. Capaian ini tetap dimonitor dengan rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 namun capaian tetap menurun menjadi 99,01%.
4. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum tercapai sesuai target untuk setiap interim, di mana pencapaian tiap interimnya yaitu pada interim I tercapai 65,51%, pada Interim II tercapai 87,71%, pada interim III tercapai 89,17%. Capaian ini dimonitor dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 namun capaian hanya menjadi 94,13%.
5. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase pangan fortifikasi memenuhi syarat telah tercapai sesuai target untuk setiap interim, di mana pada interim I masih belum ada capaian karena untuk sampel fortifikasi baru disampling di bulan Maret 2024, pada Interim II tercapai 97,35%, pada interim III tercapai 98,12%. Capaian ini ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti dengan melakukan bimbingan teknis ke pelaku usaha produsen pangan fortifikasi yang berada di wilayah Sumatera Selatan yang menjadi area pengawasan BBPOM di Palembang dan dilakukan sampling ulang sebanyak 21 (dua puluh satu) sampel ke produsen sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian meningkat menjadi 100,08%. Selain itu, dilakukan penyesuaian target tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat telah mengalami perubahan. Pada dokumen reviu renstra tahun 2020-2024 target BBPOM di Palembang di tahun 2024 adalah 94%. Namun mengalami penurunan 1%, sehingga menjadi 93% yaitu tetap sesuai dengan target di tahun 2023. Hal ini sesuai dengan reviu kembali target UPT oleh unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Perubahan ini berbasis data realisasi UPT pada 2022 dan 2023. Hasil reviu ini disampaikan oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada tanggal 13 Desember 2023 melalui Nota Dinas Nomor PR.04.02.53.534.12.23.773.

6. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, belum tercapainya indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang walaupun sudah dilakukan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja secara maksimal sehingga dapat digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama terkait tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat.
7. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, belum tercapainya indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan walaupun sudah dilakukan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja secara interim di tahun 2024, tetap dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai capaian indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2024. Hasil dari analisis kendala serta perumusan rekomendasi yang dilakukan saat monitoring dan evaluasi setiap bulan serta dituangkan dalam laporan kinerja interim, menjadi panduan untuk menyesuaikan aktivitas/kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja.
8. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tidak lepas dari pemanfaatan laporan interim oleh kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja**.** Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan telah dilakukan

berbagai upaya untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2024, antara lain :

a. Penyesuaian aktivitas/ kegiatan untuk mencapai target kinerja;
   Telah dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan optimal untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
b. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
   Telah ditingkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
c. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
   Pencapaian indeks ini telah sesuai dengan target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
d. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   Telah dilakukan perencanaan kinerja secara optimal untuk pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditentukan

9. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tidak lepas dari pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja secara maksimal untuk melakukan penyesuaian perencanaan kinerja pada periode berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama yang berkaitan dengan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat.
10. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Laporan Kinerja ini sangat didukung oleh pemanfaatkan laporan kinerja secara maksimal sebagai upaya menjaga konsistensi manajemen dalam menjaga transparansi dan tanggung jawab kepada pihak internal dan stakeholder terkait, memantau kinerja pegawai, meningkatkan komunikasi dan

koordinasi antar kelompok substansi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (*decision improvement*).

11. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak lepas dari pemanfaatan sumber informasi dari laporan kinerja interim untuk menjaga konsistensi manajemen dalam menjaga transparansi dan tanggung jawab kepada pihak internal dan stake holder terkait, memantau kinerja pegawai, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar kelompok substansi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (*decision improvement*).
12. Berdasarkan laporan kinerja triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sesuai target untuk setiap interim, dan capaian ini ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian meningkat menjadi 110,57%.
13. Berdasarkan laporan kinerja triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan mengalami kenaikan untuk setiap triwulannya, di mana pada triwulan I tercapai 78,71%, pada triwulan II tercapai 91,95%, pada triwulan III tercapai 95,70% dan pada triwulan IV tercapai 101,22%. Capaian ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisa resiko dan melakukan monitoring serta evaluasi sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian meningkat menjadi 101,22%. Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja memberikan dampak yang sangat baik dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di tahun 2024. Pemanfaatan informasi dilakukan dengan cara :
    - Penyesuaian kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan didasarkan pada rencana bulanan yang telah ditetapkan di awal tah untuk mencapai target kinerja;
    - Penyesuaian penggunaan anggaran didasarkan pada rencana bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun untuk mencapai target kinerja;
    - Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan untuk mencapai target kinerja;

- Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

14. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan merupakan suatu bentuk dari hasil pemanfaatan informasi dari proses monitoring dan evaluasi laporan kinerja interim di tahun 2024 terhadap pencapaian target dan realisasi untuk setiap interim, di mana pada interim I tercapai 108,17%, pada Interim II tercapai 104,28%, pada interim III tercapai 105,91%. Capaian ini ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian meningkat menjadi 109,26%.
15. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan merupakan suatu bentuk dari pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja secara maksimal untuk melakukan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sehingga akan mengalami peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama di bagian pelayanan publik yang prima.
16. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh informasi bahwa target target tahun 2024 tercapai dan perkiraan capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan hasil capaian tahun 2024 pun juga akan dapat dicapai, namun tetap diperlukan strategi dan inovasi dalam pencapaian Kinerja agar semua komoditi dan jenis kegiatan dapat terwakili terhadap pemberian Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan bagi pelaku usaha.
17. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kotapada untuk interim I belum dilakukan perhitungan, sedangkan pada Interim II tercapai 103,96%. Capaian kinerja pada interim III tercapai 122,74% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dikarenakan penetapan target triwulan yang kecil.

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian sampai triwulan III, Balai Besar POM di Palembang tetap meningkatkan pelaksanaan monitoring evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian tercapai di akhir tahun 2024 sebesar 109,26%

18. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tidak lepas dari pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja interim secara maksimal yang digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama di bagian peran serta lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
19. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tidak lepas dari pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja interim secara maksimal yang digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama di bagian peran serta lintas sektor di bidang pendidikan dan pemberdayaan komunitas sekolah.
20. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator jumlah desa pangan aman tidak lepas dari pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja interim secara maksimal yang digunakan untuk untuk penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam

melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama di bagian peran serta lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat desa.

21. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja dapat digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Penerima manfaat laporan kinerja ini dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian program dan evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Masyarakat dan stakeholder lainnya juga dapat menggunakan data informasi yang disediakan sebagai acuan atau dasar peningkatan kinerja terutama di bagian peran serta lintas sektor di bidang ritel/perdagangan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan suatu bentuk hasil dari tindak lanjut terhadap rekomendasi laporan kinerja di tahun 2023 untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya telah dituangkan dalam laporan interim di tahun 2024 agar kegagalan pencapaian waktu pengujian yang melebihi ketentuan timeline di tahun 2023 tidak berulang. Hal ini dijadikan sebagai bentuk rekomendasi agar di tahun 2024 dilakukan monitoring yang lebih baik terhadap timeline waktu pengujian untuk mencegah terjadinya kembali sampel diuji melewati timeline. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan parameter uji untuk memastikan terpenuhinya parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian.
23. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan suatu bentuk hasil dari tindak lanjut terhadap rekomendasi laporan kinerja di tahun 2023 untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya telah dituangkan dalam laporan interim di tahun 2024 agar kegagalan pencapaian waktu pengujian yang melebihi ketentuan timeline di tahun 2023 tidak berulang. Hal ini dijadikan sebagai bentuk rekomendasi agar di tahun 2024

dilakukan monitoring yang lebih baik terhadap timeline waktu pengujian untuk mencegah terjadinya kembali sampel diuji melewati timeline. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan parameter uji untuk memastikan terpenuhinya parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian.

24. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator untuk kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum tercapai di tahun 2024, namun tindak lanjut terhadap hasil capaian kinerja di tahun 2024 dimanfaatkan untuk perbaikan pencapaian kinerja di tahun berikutnya, antara lain :
    a. Sebagai *base line* penetapan target IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan renstra periode 2025-2029
    b. Reviu dan pengusulan penyesuaian target bulanan RAPK
    c. Mengambil kebijakan/kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya target IKU
    d. Reviu terhadap identifikasi risiko dan penilaian risiko yang dapat menghambat tercapainya target IKU
    e. Penyesuaian tindakan/aktivitas pengendalian risiko
25. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator Indeks RB Balai Besar POM di Palembang belum tercapai, hanya saja konsistensi pembangunan zona integritas dan kegiatan yang dilaksanakan berdasar pada monitoring dan evaluasi yang telah disajikan dalam laporan-laporan analisis hasil survei baik internal maupun eksternal. Laporan interim Triwulan I sampai III memberikan informasi progress pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut peningkatan. Hasil penilaian Indeks RB Balai Besar POM di Palembang Tahun 2024 dengan trend realisasi selalu meningkat sejak tahun 2020 namun capaian tahun ini masih dalam kategori Cukup memerlukan peningkatan dan upaya yang lebih besar pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
26. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang belum tercapai, dan hal ini menjadikan informasi dalam laporan kinerja tahun 2024 akan dimanfaatkan lebih untuk penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja di tahun mendatang, sehingga memberikan dampak pada pencapaian kinerja. Pemanfaatan yang telah dilakukan antara lain :

a. Penyesuaian target kinerja tahun 2024. Sesuai dengan dokumen reviu renstra tahun 2020-2024 target Indikator Kinerja Nilai AKIP pada tahun 2024 adalah sebesar 92, namun karena dilakukan evaluasi atas realisasi pada periode sebelumnya maka dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 menjadi 82,9. Lalu, target tersebut disesuaikan kembali pada dokumen perencanaan tahun 2024 dengan hasil proyeksi target menggunakan metode regresi linier dengan faktor koreksi yang ditetapkan oleh unit pengampu, sehingga target diubah menjadi 82,81 yang telah disetujui oleh unit pengampu sesuai dengan matriks reviu target dan kertas kerja yang disusun oleh Balai Besar POM di Palembang.
b. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja berupa peningkatan pemahaman SDM terkait implementasi SAKIP dengan mengikuti Bimtek SAKIP, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada tahun 2023.
c. Penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi selama periode renstra 2020-2024 rata-rata kenaikan realisasi adalah sebesar 0.62% sehingga pada desk penetapan target tahun 2025-2029, target tahun 2025 yang semula ditetapkan oleh unit pengampu sebesar 81,55 atau lebih dari 0.62% dari realisasi tahun 2024 dinilai tidak realistis dan tidak *achievable* sehingga perlu disesuaikan setidaknya meningkat sebesar rata-rata peningkatan realisasi pada periode sebelumnya sehingga diusulkan untuk disesuaikan menjadi 81,04.

27. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan sebesar 101,00% merupakan salah satu perwujudan komitmen pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Perlu peningkatan berkelanjutan dan tetap konsisten dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan meskipun tahun 2025 kembali menjadi indikator direktif penugasan. Rekomendasi penilaian menjadi bahan perbaikan untuk penyempurnaan pengelolaan:
    a. Memperluas pemahaman kearsipan pada seluruh pegawai sehingga memahami bahwa kearsipan yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dalam seluruh aktivitas baik teknis maupun non teknis yang menghasilkan arsip.

b. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pemanfaatan sistem elektronik dan melakukan monitoring secara berkala untuk mempertahankan sistem yang telah berjalan dengan baik
c. Menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh
d. Perencanaan kinerja terkait kearsipan dimasukkan dalam Matriks Peran dan Hasil (MPH) sehingga penilaian kinerja dilaksanakan secara objektif berdasarkan cascading kinerja setiap anggota tim.

28. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja sehingga memberikan dampak pada pencapaian kinerja. Pemanfaatan yang telah dilakukan antara lain :
    a. Penyesuaian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan dokumen reviu renstra tahun 2020-2024 target Indikator Kinerja Nilai IP ASN pada tahun 2024 adalah sebesar 91, pada reviu renstra diusulkan menjadi 85,25 dan sesuai surat Kepala Biro SDM nomor KP.17.24.11.24.305 tanggal 30 Oktober 2025 sudah diajukan surat permohonan perubahan target namun sebagaimana Nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor KP. 17.21.11.24.349 dengan mempertimbangkan beberapa hal maka penurunan/revisi target Indeks IP ASN belum dilakukan namun capaian Indeks IP ASN di keluarkan dari perhitungan capaian NPSS.
    b. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja berupa peningkatan pemahaman pegawai terkait IP ASN dan implementasi pemenuhannya.
    c. Penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun 2025 Indeks IP ASN tidak menjadi IKU. Namun betapa pentingnya pengelolaan ASN sebagai modal dasar untuk pencapaian target-target indikator yang ditetapkan tahun 2025 maka pencapaian pengukuran IP ASN tahun 2023/2024 yang belum optimal akan menjadi prioritas pengawalan pada tahun 2025.

29. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator informasi dalam laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan terkait langkah-langkah untuk pencapaian target kinerja dan peningkatan berkelanjutan antara lain menetapkan rencana aksi yang akan

dilakukan tahun 2025 yang belum tercapai dan menyesuaikan sumber daya dan anggaran pada tahun 2025

30. Berdasarkan laporan kinerja dari tahun 2020 - 2024 terhadap capaian pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi di BBPOM Palembang dari sebesar 165,56 % menjadi 100%, dapat digunakan sebagai data untuk bahan kajian dalam peningkatan indeks pengelolaan data dan informasi jika diperlukan.
31. Berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Palembang tahun 2024, pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan kinerja selanjutnya, di antaranya :
    a. Menentukan aktivitas kinerja yang akan dilakukan di tahun 2025
    b. Menyesuaikan sumber daya dan anggaran yang akan dialokasikan di tahun 2025
    c. Menyediakan kerangka untuk evaluasi dan pemanfaatan informasi
32. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target indikator nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa tercapai dengan realisasi 100 dari target 94,35 (capaian kinerja 105,99%). Hasil capaian tahun 2024 ini, akan dijadikan dasar untuk mengusulkan kenaikan target pada renstra periode 2025-2029. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara berkala juga akan terus dilakukan guna mempertahankan capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini.
33. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target indikator Nilai Pengelolaan BMN merupakan indikator baru pada tahun 2024, maka Pemanfaatan Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai dasar penetapan target kinerja tahun selanjutnya. Selain itu evaluasi terhadap kinerja tahun 2024 dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi dalam menyusun strategi pengelolaan BMN pada tahun 2025 agar capaian kinerja dapat ditingkatkan lagi.
34. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa indikator persentase penggunaan produk dalam negeri ini adalah indikator baru pada tahun 2024, sehingga belum terdapat data pada laporan kinerja di tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan dalam pencapaian indikator ini. Untuk capaian indikator ini di tahun 2024 yaitu sebesar 132,17 % dengan realisasi 79,30% dari target 60,00% menunjukkan bahwa perlunya penyesuaian target untuk tahun 2025.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja tahun 2024 adalah sebesar Rp33.654.512.017 atau sebesar 98,84% dari total alokasi anggaran sebesar Rp34.049.827.000 pada DIPA No.SP.DIPA-063.01.2.432841/2024. Rincian realisasi anggaran per sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

SK 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 99,08% menggunakan anggaran Rp1.446.804.539 atau 98,32% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,01 atau capaian **100% (Efisien).** Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	95,44	102,62%	465.171.500	459.085.961	98,69 %	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	90,58	99,54%	248.655.500	241.792.751	97,24 %	**1,02**	**0,02**	**100 %**	**Efisien**
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	96,04	99,01%	465.171.500	459.085.961	98,69 %	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,90	82,74	94,13%	248.655.500	241.792.751	97,24 %	**0,97**	**-0,03**	**75 %**	**Tidak Efisien**
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00	93,07	100,08%	45.167.000	45.047.115	99,73 %	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**

IK 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat dialokasikan anggaran sebesar Rp 465.171.500,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 459.085.961,-.Penggunaan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja ini di antaranya untuk pengadaan sampel beserta perjalanan dinasnya, serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Capaian output sebesar 99,08% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 98,69% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi

penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.04. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan alat laboratorium, suku cadang, dan reagensia dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan POA yang telah disusun berdasarkan jumlah kebutuhan dan tingkat prioritas.

IK 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat dialokasikan anggaran sebesar Rp 248.655.500,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 241.792.751,-.Penggunaan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja ini di antaranya untuk pengadaan sampel beserta perjalanan dinasnya, serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi.Capaian output sebesar 99,54% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 97,24% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.02. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan alat laboratorium, suku cadang, dan reagensia dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan POA yang telah disusun berdasarkan jumlah kebutuhan dan tingkat prioritas.

IK 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dialokasikan anggaran sebesar Rp 465.171.500,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 459.085.961,-. Penggunaan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja ini di antaranya untuk pengadaan sampel beserta perjalanan dinasnya, serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Capaian output sebesar 99,01% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan

anggaran yang hanya sebesar 98,69% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.00.

Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan alat laboratorium, suku cadang, dan reagensia dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan POA yang telah disusun berdasarkan jumlah kebutuhan dan tingkat prioritas.

IK. 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dialokasikan anggaran sebesar Rp 248.655.500,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 241.792.751,-. Penggunaan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja ini di antaranya untuk pengadaan sampel beserta perjalanan dinasnya, serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Capaian output sebesar 94,13% lebih rendah dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 97,24% dapat menunjukkan kegagalan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0.03. Peningkatan efisiensi dilakukan dengan komitmen yang kuat terhadap perencanaan yang telah dibuat, mengawal pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi berkala.

IK 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Rp 45.167.000,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 45.047.115,-. Penggunaan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja ini di antaranya untuk pengadaan sampel beserta perjalanan dinasnya, serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi. Capaian output sebesar 99,08% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 99,73% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.00. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan alat laboratorium, suku cadang, dan reagensia dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan POA yang telah disusun berdasarkan jumlah kebutuhan dan tingkat prioritas.

SK 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Sasaran kegiatan ini diukur hanya dengan 1 (satu) indikator :

IK 6 .Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Perhitungan tingkat efisiensi, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89,00	87,13	97,90 %	116.508.000	115.371.432	99,02 %	**0,99**	**-0,01**	**75 %**	**Tidak Efisien**

Untuk mendukung pencapaian target indikator indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dialokasikan anggaran sebesar Rp 116.508.000,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 115.371.432,-. Capaian output sebesar 97,90% lebih rendah dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 99,02% dapat menunjukkan kegagalan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0.01 yang disebabkan capaian indikator yang kurang dari realisasi anggaran. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang dan

komitmen yang kurang terhadap perencanaan yang telah dibuat dan dalam penggunaan anggaran belum memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

SK 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 100,51% menggunakan anggaran Rp509.088.854 atau 98,09% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,02 atau capaian 100% (**Efisien**). Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,00	98,85	99,85%	183.970.600	181.748.400	98,79 %	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,01	80,6	100,74%	243.267.600	242.087.387	99,51 %	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	95,00	95,9	100,95%	88.849.200	85.253.067	95,95 %	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**

IK 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung pencapaian target indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 183.970.600,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 181.748.400,-. Capaian output sebesar 99,85% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 98,79% dapat menunjukkan keberhasilan dalam penggunaan anggaran tercapai **efisien**, dengan tingkat efisiensi 0,01. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pelaksanaan pendampingan, bimtek

serta KIE kepada pelaku usaha dan inovasi UMKM Berdikari merupakan sebuah terobosan guna meningkatkan pelayanan prima.

IK 8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung pencapaian target indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 243.267.600,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 242.087.387 ,-. Capaian output sebesar 100,74% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 99,51% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan penyebaran informasi, penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pengujian sampel Obat dan Makanan, dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.01. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, publikasi terkait pelaksanaan pengawasan obat dan makanan juga terus dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan.

IK 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang

Untuk mendukung pencapaian target indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang dialokasikan anggaran sebesar Rp 88.849.2000,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 85.253.067,-. Capaian output sebesar 100,95% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 95,95% dapat menunjukkan keberhasilan dalam penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi 0,05 berhasil **efisien**. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pemenuhan faktor-faktor pendukung lainnya juga terus ditingkatkan dan dipenuhi dalam upaya memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Palembang.

SK 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 105,07% menggunakan anggaran Rp843.703.607 atau 97,01% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,08 atau capaian 90% (**Efisien).** Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00%	47.478.500	46.741.099	98,45 %	**1,02**	**0,02**	**100 %**	**Efisien**
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00	78,16	104,21%	47.478.500	46.741.099	98,45 %	**1,06**	**0,06**	**100 %**	**Efisien**
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	120,00%	199.671.200	184.236.822	92,27 %	**1,30**	**0,30**	**95 %**	**Efisien**
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,79	101,22%	80.310.000	79.228.855	98,65 %	**1,03**	**0,03**	**100 %**	**Efisien**
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,10	85,33	109,26%	332.349.500	327.187.692	98,45 %	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**
		15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,75	4,78	100,63%	49.917.800	46.059.206	92,27 %	**1,09**	**0,09**	**100 %**	**Efisien**
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100,00	100,00%	67.373.000	66.767.735	99,10 %	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	95,00	100,00	105,26%	47.478.500	46.741.099	98,45 %	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**

IK 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.478.500,- setelah mengalami

dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 46.741.099 ,-. Capaian output sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 98,45% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan penyebaran informasi, penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pengujian sampel Obat dan Makanan, dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.02. Upaya efisiensi ini didukung dengan mengawal monitoring keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya secara berkesinambungan.

IK 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.478.500,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 46.741.099 ,-. Capaian output sebesar 104,21% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 98,45% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan penyebaran informasi, penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pengujian sampel Obat dan Makanan, dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.06. Upaya efisiensi ini didukung dengan mengawal monitoring keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya secara berkesinambungan.

IK 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dialokasikan anggaran sebesar Rp 199.671.200,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024

terealisasi sebesar Rp 184.236.822,-. Capaian output sebesar 120% merupakan hasil konversi dari ketercapaian 100%. Konversi tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama pada tanggal 15 Januari 2025 No : PR.09.03.2.01.25.42 perihal ketentuan pengukuran kinerja tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Sehingga pencapaian kinerja lebih tinggi dibandingkan capaian input atau penggunaan anggaran yang hanya sebesar 92,27% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai fasilitator antara evaluator/verifikator pusat dengan pelaku usaha terkait pengajuan permohonan izin edar/ sertifikasi/ rekomendasi yang dilakukan pelaku usaha UMK sehingga ketika ada penambahan data tersampaikan dengan baik dan tidak ada mispersepsi terhadap hasil evaluasi yang disampaikan oleh petugas pusat kepada pelaku usaha serta segala aktivitas yang berhubungan dengan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.30. Upaya efisiensi ini didukung dengan mengawal monitoring keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya secara berkesinambungan.

IK 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dialokasikan anggaran sebesar Rp 80.310.000,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 79.228.855 Capaian output sebesar 101,22% memperlihatkan penggunaan anggaran pada indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhitung **efisien** dengan nilai TE 0.03 dikarenakan persentase penggunaan anggaran lebih kecil dari capaian IKU. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Palembang.

IK 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Untuk mendukung pencapaian target indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dialokasikan anggaran sebesar Rp

332,349,500,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 327,187,692,-. Capaian output sebesar 109,26% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 98,45% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran tersebut melekat pada kegiatan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.11 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Faktor pendukung lainnya adalah optimalisasi pengawasan rutin terhadap sarana distribusi dengan cara sosialisasi/edukasi peraturan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan, membuka forum komunikasi untuk konsultasi CAPA dari pelaku usaha, serta meningkatkan kompetensi petugas.

IK 15. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang

Untuk mendukung pencapaian target indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang dialokasikan anggaran sebesar Rp 49.917.800,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 46.059.206,- atau 92,27% dari pagu anggaran dengan capaian output sebesar 100,63%. Tingkat Efisiensi indikator indeks pelayanan publik di bidang obat dan makanan BBPOM di Palembang Tahun 2024 sebesar 0,09 dengan kriteria **efisien**. Penggunaan sumber daya dapat dikatakan efisien karena persentase capaian indikator kinerja lebih besar dari persentase capaian anggaran.

IK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik dialokasikan anggaran sebesar Rp 67.373.000,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 66.767.735,-. Dari anggaran yang terealisasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar produksi sebagai persyaratan pengajuan sertifikasi produk Obat dan Makanan dengan capaian

output 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien**. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

IK 17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.478.500,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 46.741.099,-. Dari anggaran yang terealisasi tersebut dipergunakan untuk pengawalan DAK secara langsung pada Kab/Kotadi Sumatera Selatan, pelaksanaan *join inspection* AMR dan pengawasan bersama lintas sektor dengan capaian output 105,26%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien**. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

SK 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 100,02% menggunakan anggaran Rp6.310.159.927 atau 98,37% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,02 atau capaian 100% (**Efisien**). Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,90	98,99	100,09%	4.307.713.000	4.273.804.511	99,21 %	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97,00	97	100,00%	735.882.400	726.993.601	98,79 %	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
		20	Jumlah desa pangan aman	32,00	32	100,00%	973.070.400	968.349.546	99,51 %	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
		21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	17,00	17	100,00%	355.396.800	341.012.269	95,95 %	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**

	Palembang												

IK 18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Untuk mendukung pencapaian target indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.307.713.000,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 4.273.804.511,-. Atau 99,21% dari alokasi anggaran dengan capaian output 100,09%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien** dengan tingkat efisiensi 0.01.

IK 19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Untuk mendukung pencapaian target indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dialokasikan anggaran sebesar Rp 735.882.400,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 726.993.601,-. Atau 98.79% dari alokasi anggaran yang digunakan untuk melakukan ragam jenis KIE baik melalui media cetak, elektronik, KIE langsung ke masyarakat hingga KIE melalui media sosial. Dengan capaian output 100,00% berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien** dengan tingkat efisiensi 0.01. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

IK 20. Jumlah desa pangan aman

Untuk mendukung pencapaian target indikator Jumlah desa pangan aman

dialokasikan anggaran sebesar Rp 973.070.400,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 968.349.546,-. Atau 99,51% dari alokasi anggaran yang digunakan untuk melakukan semua tahapan intervensi pada target desa yang telah ditentukan mulai dari tahap advokasi hingga monitoring dan evaluasi hingga lomba desa. Dengan capaian output 100,00% berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien** dengan tingkat efisiensi 0.005. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang

dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

IK 21. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Untuk mendukung pencapaian target indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dialokasikan anggaran sebesar Rp 355.396.800,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 341.012.269,-. Atau 95,95% dari alokasi anggaran yang digunakan untuk melakukan semua tahapan intervensi pada target pasar yang telah ditentukan mulai dari tahap survei pasar, advokasi, bimtek petugas pasar, pengawalan, penyuluhan hingga kampanye KP Pasar. Dengan capaian output 100,00% berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien** dengan tingkat efisiensi 0.04. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

SK 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 120% menggunakan anggaran Rp2.622.021.512 atau 99,28% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,21 atau capaian 95% (**Efisien**). Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00%	1.584.621.600	1.573.212.907	99,28%	**1,21**	**0,21**	**95%**	**Efisien**
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00%	1.056.414.400	1.048.808.605	99,28%	**1,21**	**0,21**	**95%**	**Efisien**

IK 22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.584.621.600,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.573.212.907,-. Atau 99,28% dari alokasi anggaran yang digunakan untuk Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengujian seperti alat laboratorium baik dari segi jumlah maupun kondisi alat yang baik dan terkalibrasi, pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding, pemeliharaan alat, serta peningkatan kompetensi SDM. Dengan capaian output 120% yang merupakan hasil konversi dari ketercapaian 100%. Konversi tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama pada tanggal 15 Januari 2025 No : PR.09.03.2.01.25.42 perihal ketentuan pengukuran kinerja tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien** dengan tingkat efisiensi 0.21. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

IK 23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.056.414.400,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.048.808.605,-. Atau 99,28% dari alokasi anggaran yang digunakan untuk Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengujian seperti alat laboratorium baik dari segi jumlah maupun kondisi alat yang baik dan terkalibrasi, pengadaan suku cadang, alat gelas, reagensia dan media mikrobiologi serta baku pembanding, pemeliharaan alat, serta peningkatan kompetensi SDM. Dengan capaian output 120% yang merupakan hasil konversi dari ketercapaian 100%. Konversi tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama pada tanggal 15 Januari 2025 No : PR.09.03.2.01.25.42 perihal ketentuan pengukuran kinerja tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Berdasarkan hasil

pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini **efisien** dengan tingkat efisiensi 0.21. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

SK 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, Sasaran kegiatan ini diukur hanya dengan 1 (satu) indikator :

IK 24 . Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Perhitungan tingkat efisiensi, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00	68,73	91,64 %	567.064.000	462.265.520	81,52 %	**1,12**	**0,12**	**100 %**	**Efisien**

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dialokasikan anggaran sebesar Rp 567.064.000,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 462.265.520,-. Atau 81,52% dari alokasi anggaran, dengan capaian output 91,64%. Sehingga, diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2024 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi 0,12 dengan capaian **efisien**. Capaian ini juga tidak terlepas dari adanya monev bulanan Fungsi Penindakan yang dapat mengontrol laju capain IKU persentasi keberhasilan penindakan dengan anggaran yang digunakannya. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran guna kebutuhan operasional balai, dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tidak terserap sehingga membantu optimalisasi penggunaan anggaran. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan

hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 99,02% menggunakan anggaran Rp5.600.218.988 atau 99,22% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar -0,002 atau capaian 75% (**Tidak Efisien**). Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal	25	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	85,90	84,85	98,78%	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22 %	**1,00**	**-0,004**	**75 %**	**Tidak Efisien**
		26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	82,81	80,55	97,27%	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22 %	**0,98**	**-0,02**	**75 %**	**Tidak Efisien**
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,71	95,66	101,00%	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22 %	**1,02**	**0,02**	**100 %**	**Efisien**

IK 25. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

Untuk mendukung pencapaian target indikator Indeks RB Balai Besar POM di Palembang dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.881.449.100,-., anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.866.739.663,- atau sebesar 99,22% dari dari target realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi termasuk tunjangan kinerja serta pengembangan kompetensi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran **tidak efisien** dengan nilai TE -0,004 yang disebabkan capaian indikator lebih rendah dari capaian realisasi anggaran. Peningkatan efisiensi indeks RB Balai Besar POM di Palembang dipengaruhi oleh komitmen pelaksanaan kegiatan berdasar perencanaan yang telah disusun serta tingginya motivasi capaian kegiatan melebihi target yang ditetapkan dengan optimalisasi anggaran. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai efisiensi indikator ini dalam hal peningkatan kinerja melalui peningkatan kapasitas organisasi melibatkan seluruh pegawai baik ASN (PNS dan PPPK). Upaya lain adalah dengan melakukan pembayaran tunjangan kinerja tepat waktu setiap awal bulan berdasarkan monitoring kedisiplinan dan kinerja secara ketat, penggunaan

anggaran lebih tinggi daripada capaian indikator terkait dengan kewajiban pembayaran tunjangan kinerja yang meningkat pada akhir tahun dengan adanya penambahan pegawai PPPK serta pemanfaatan optimalisasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai serta mendukung target realisasi anggaran 99%.

IK 26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

Tingkat Efisiensi indikator kinerja Nilai AKIP Tahun 2024 sebesar -0,02 dengan kriteria tidak efisien. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.866.739.663 atau sebesar 99.22% dari pagu anggaran yang mendukung indikator Nilai AKIP sebesar Rp1.881.449.100. Penggunaan sumber daya dinilai **tidak efisien** karena persentase capaian indikator kinerja lebih kecil dari persentase capaian anggaran. Hal ini dikarenakan pada hasil evaluasi implementasi SAKIP terdapat 2 komponen penilaian yang menurun dari periode sebelumnya yaitu Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya antara lain mengikuti Bimtek SAKIP dalam rangka peningkatan pemahaman terkait implementasi SAKIP oleh SDM yang telah ditugaskan, mengikuti bimbingan teknis terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan yang membahas mengenai kegiatan tahun 2024 yang akan dan telah ditetapkan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran dan evaluasi internal setiap bulan.

IK 27. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Pada indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Besar POM di Palembang, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.866.739.663,- atau sebesar 99,22% dari dari target realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan dukungan manajemen, peningkatan kompetensi, pelaksanaan koordinasi dan tata kelola pemerintahan termasuk biaya pemenuhan unsur-unsur penilaian pengelolaan kearsipan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran **efisien** dengan nilai TE 0,02 dimana capaian kinerja melebihi input anggaran atau realisasi anggaran yang digunakan. Efisiensi Nilai Pengelolaan Kearsipan sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh tim pengelola kearsipan dalam menjalankan pengelolaan kearsipan secara handal sesuai dengan pedoman yang berlaku. Digitalisasi dan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mendukung efisiensi dan efektivitas

kinerja. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai efisiensi indikator ini dalam hal peningkatan kinerja melalui sosialisasi berkala tentang Tata Naskah Dinas, sistem pengelolaan kearsipan dan pendampingan dalam hal penerapannya. BBPOM di Palembang senantiasa melakukan updating informasi yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan terutama berkaitan dengan sistem kerja berbasis digital untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan monitoringnya. Target realisasi anggaran dari pimpinan sebesar 99% harus diimbangi dengan capaian kinerja yang optimal untuk mencapai efisiensi.

SK 9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan ini diukur hanya dengan 1 (satu) indikator :

IK 28 . Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang. Perhitungan tingkat efisiensi, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	90,77	87,75	96,67 %	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22 %	**0,97**	**-0,03**	**75 %**	**Tidak Efisien**

Untuk mendukung ketercapaian indikator indeks profesionalitas ASN dialokasikan anggaran Rp 1.881.449.100, dan anggaran tersebut terealisasi Rp 1.866.739.663 atau 99,22% dari pagu anggaran. Dengan capaian indikator 99,67% ini didapatkan Tingkat efisiensi sebesar -0,03 dengan capaian **tidak efisien.** Untuk meningkatkan efisiensi anggaran yang menunjang pelaksaan kinerja profesionalitas ASN upaya - upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mengawal capaian 4 komponen IP ASN (Kualifikasi, pengembangan kompetensi dan kinerja serta penerapan disiplin pegawai). Monitoring dan evaluasi capaian 4 komponen IP ASN secara berkala telah dilaksanakan dengan membangun sebuah inovasi pengelolaan ASN MAKSUBA (Mari Kita Kelola ASN untuk Sukses Bersama). Secara periodik telah dilakukan monev capaian komponen 4 komponen IP ASN pegawai dan kepada pegawai yang capaiannya terbaik diberikan reward berupa pemberian penghargaan pimpinan yang diserahkan pada saat upacara peringatan hari besar nasional atau apel internal BBPOM di Palembang dan pegawai tersebut diusulkan

sebagai calon pegawai berprestasi tingkat Badan POM. Selain itu punishment diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau pencapaian sasaran kerja akhir tahun 50% atau kurang akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin.

SK 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 110,69% menggunakan anggaran Rp4.554.439.663 atau 99,61% dari pagu anggaran sasaran kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,11 atau capaian 100% (**Efisien).** Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
				T	R	%	T	R	%				
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,30	87,49	101,38%	2.677.700.000	2.677.700.000	100,00%	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	3,00	3	120,00%	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22%	**1,21**	**0,21**	**95 %**	**Efisien**

IK 29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Dengan tercapainya target SKL 2024 sebesar 101,38% terhadap realisasi anggaran 100 % diperileh tingkat efisiensi 0,01 maka disimpulkan bahwasanya efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dapat dinyatakan **efisien**.

Penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP yaitu :

1. Pengembangan kompetensi seluruh personil pengujian baik melalui mengikuti pelatihan dan magang di PPPOMN atau dengan mengadakan bimbingan teknis dengan mengundang instruktur dari luar serta mengikuti pelatihan secara daring terkait sistem mutu laboratorium pengujian.
2. Pengadaan media reagensia, suku cadang, baku pembanding, penunjang lab dan glassware untuk mendukung pengujian sampel laboratorium, uji

verifikasi dan validasi metode analisa, uji kolaborasi dan uji profisiensi guna menjaga jaminan mutu hasil pengujian

3. Pengadaan alat laboratorium untuk meningkatkan pemenuhan standar alat laboratorium
4. Pengelolaan limbah
5. Kalibrasi alat laboratorium baik internal dari Balai Kalibrasi Badan POM maupun kalibrasi eksternal
6. Mengikuti lomba GLP Badan POM dan masuk dalam 10 besar

IK 30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.881.449.100,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.866.739.663,- atau 99,22% dari alokasi anggaran pada indikator tersebut. Penggunaan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja ini di antaranya pengadaan dan pemeliharaan alat pengolah data untuk menunjang kegiatan data dan informasi sehingga diperoleh nilai optimal pada setiap tahunnya, pemeliharaan infrastruktur dan jaringan internet secara. Capaian output sebesar 120% merupakan hasil konversi dari ketercapaian 100%. Konversi tersebut sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama pada tanggal 15 Januari 2025 No : PR.09.03.2.01.25.42 perihal ketentuan pengukuran kinerja tahun 2024. Konversi capaian indikator kinerja tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.21. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Selain itu, pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan perbaikan/pemeliharaan alat pengolah data dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan POA yang telah disusun berdasarkan jumlah kebutuhan dan tingkat prioritas.

SK 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel, dengan persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 111,14% menggunakan anggaran Rp9.333.698.313 atau 99,22% dari pagu anggaran sasaran kegiatan

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,12 atau capaian 100% (**Efisien**). Pengukuran efisiensi per indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	90,21	91,3	101,21%	3.762.898.200	3.733.479.325	99,22%	**1,02**	**0,02**	**100 %**	**Efisien**
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	94,35	100	105,99%	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22%	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93,00	97,82	105,18%	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22%	**1,06**	**0,06**	**100 %**	**Efisien**
		34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	79,3	120 %	1.881.449.100	1.866.739.663	99,22%	**1,33**	**0,21**	**95 %**	**Efisien**

IK 31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang

Dari total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung ketercapaian indikator ini, sebesar Rp 3.762.898.200, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp 3.733.479.325 atau 99,22% dari pagu anggaran. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam eksekusi perencanaan keuangan. Efisiensi kinerja tercermin dari nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,02. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM Palembang berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output yang melebihi ekspektasi. Tingkat Efisiensi (TE) yang sebesar 0,02 telah tercapai dengan capaian TE **efisien**, yang mengkonfirmasi keberhasilan upaya efisiensi yang dilakukan. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan program yang tepat sasaran, dan pengendalian biaya yang efektif. Manajemen anggaran yang baik terlihat dari selisih antara pagu dan realisasi yang relatif kecil, yakni hanya sekitar 0,78% atau Rp 29.418.875. Ini menunjukkan akurasi dalam perencanaan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran.

IK 32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.881.449.100,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.866.739.663,- atau 99,22% dari alokasi anggaran pada indikator tersebut. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2024 dengan Tingkat efisiensi 0,06 dan capaian **efisien**. Pada

tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, suku cadang alat laboratorium, peralatan fasilitas perkantoran, dan alat pengolah data guna meningkatkan kinerja pengujian dan juga memperlancar operasional kantor, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

IK 33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pada indikator nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Palembang, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 1.866.739.663,- atau sebesar 99,22% dari dari target realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan peningkatan kinerja dalam rangka pengelolaan BMN termasuk tunjangan kinerja serta pengembangan kompetensi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi dengan ketercapaian indikator 105,18%, penggunaan anggaran **efisien** dengan nilai TE 0,06. Hal ini memperlihatkan capaian indikator lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Peningkatan efisiensi nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Palembang dipengaruhi oleh komitmen petugas BMN dalam melaksanakan pengelolaan BMN meliputi Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

IK 34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.881.449.100,- setelah mengalami dua kali revisi anggaran, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.866.739.663,- atau 99,22% dari alokasi anggaran pada indikator tersebut. Dengan capaian indikator 132,17%, namun capaian ini pada perhitungan nilai capaian organisasi secara keseluruhan hanya bisa dimaksimalkan menjadi 120%. Tingkat efisiensi 0,21 dan capaian **efisien**. Efisiensi ini didukung karena ada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa seperti alat laboratorium, sarana prasarana perkantoran dan reagensia yang merupakan produk dalam negeri sehingga realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan dan realisasi anggaran berjalan selaras dan optimal.

BAB IV
PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun akhir periode Rencana Strategis 2020-2024. BBPOM di Palembang 20 (dua puluh) kegiatan untuk mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan diukur dengan 34 indikator kinerja sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2024 sebesar **103,09%** dengan predikat **Istimewa.** Dari 11 sasaran kegiatan tersebut, 6 sasaran kegiatan telah **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik** sebanyak 4 sasaran kegiatan dengan kategori **cukup.** sebanyak 1 sasaran kegiatan. Sedangkan 1 sasaran kegiatan tidak diukur dalam nilai pencapaian organisasi yaitu terwujudnya SDM Balai Besar POM yang berkinerja optimal, yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. **Pernyataan keberhasilan** pencapaian atas 10 sasaran kegiatan :

1. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 99,08% yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.
2. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 97,90% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.
3. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS yang disesuaikan sebesar 100,51% yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
4. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 105,07% yang diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

5. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 100.02% yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
6. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan NPS sebesar 120% yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
7. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 91,64% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.
8. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori cukup** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palembang yang optimal dengan NPS sebesar 99,02% yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
9. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 110,69% yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
10. Balai Besar POM di Palembang **berhasil dengan kategori sangat baik** dalam pengelolaan keuangan Balai Besar POM di Palembang secara akuntabel dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 108,09% yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Pada akhirnya, pencapaian pernyataan kinerja ini tidak terlepas dari peran serta dan tanggung jawab seluruh pegawai Balai Besar POM di Palembang, serta dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan. Sinergi antara berbagai pihak ini menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan serta perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Namun, dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis serta

rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan implementasi strategi yang tepat, diharapkan pengawasan obat dan makanan di wilayah ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang keamanan produk yang beredar di pasar masih menjadi salah satu kendala sekaligus tantangan yang harus diatasi oleh Balai Besar POM di Palembang. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan dapat meningkatkan risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar dan berbahaya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Balai Besar POM di Palembang perlu meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi guna menjangkau masyarakat secara lebih luas serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan produk yang dikonsumsi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat, lintas sektor, serta pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan. Selain itu, strategi digitalisasi layanan publik juga perlu diperkuat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang disediakan oleh Balai Besar POM di Palembang. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait keamanan obat dan makanan, melaporkan dugaan pelanggaran, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pengawasan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat serta memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan di Sumatera Selatan.

Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Palembang. Di satu sisi, teknologi membawa banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengawasan obat dan makanan. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membuka celah bagi peredaran obat dan makanan ilegal yang semakin sulit dikendalikan. Dengan adanya inovasi digital, distribusi produk ilegal dapat berlangsung lebih cepat dan luas, sehingga meningkatkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan langkah

penanganan yang cepat serta tegas terhadap segala bentuk kejahatan di bidang obat dan makanan. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.

Namun, upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri. Balai Besar POM di Palembang sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang erat akan mempercepat respons terhadap pelanggaran, meningkatkan efektivitas penindakan hukum, serta menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dari sisi internal, Balai Besar POM di Palembang juga masih menemui kendala. Salah satu kendala internal yang sangat mempengaruhi kinerja Balai Besar POM di Palembang adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan ini dapat berdampak pada efektivitas pengawasan, kecepatan dalam merespons pelanggaran, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, baik melalui pemenuhan SDM yang sesuai dengan hasil analisis beban kerja maupun peningkatan kualitas SDM yang telah ada.

Upaya peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dengan membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, diharapkan mereka dapat bekerja lebih profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadapi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Selain itu, internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi juga menjadi aspek penting dalam membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui kombinasi pemenuhan kuantitas SDM yang memadai serta peningkatan kualitasnya, Balai Besar POM di Palembang dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dapat terwujud, serta perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya obat dan makanan ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif.

DAFTAR LAMPIRAN

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanan teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang NOmor: HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

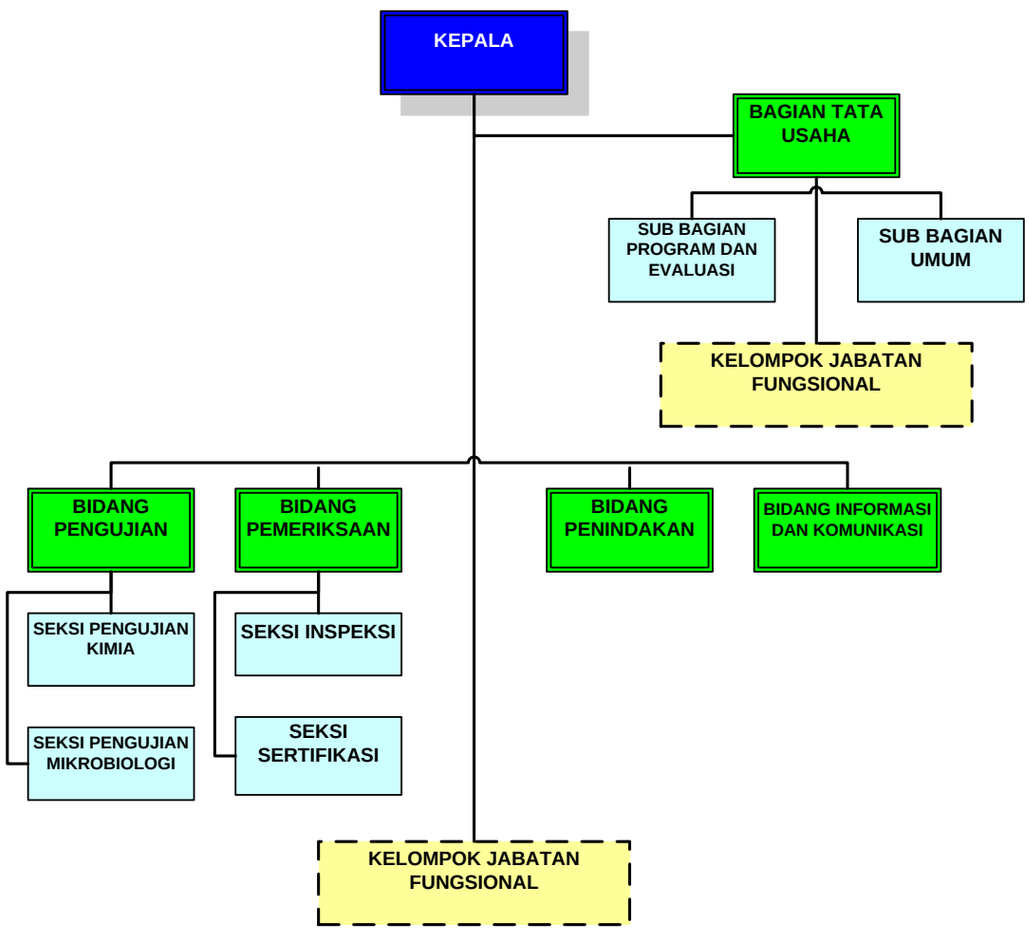
BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

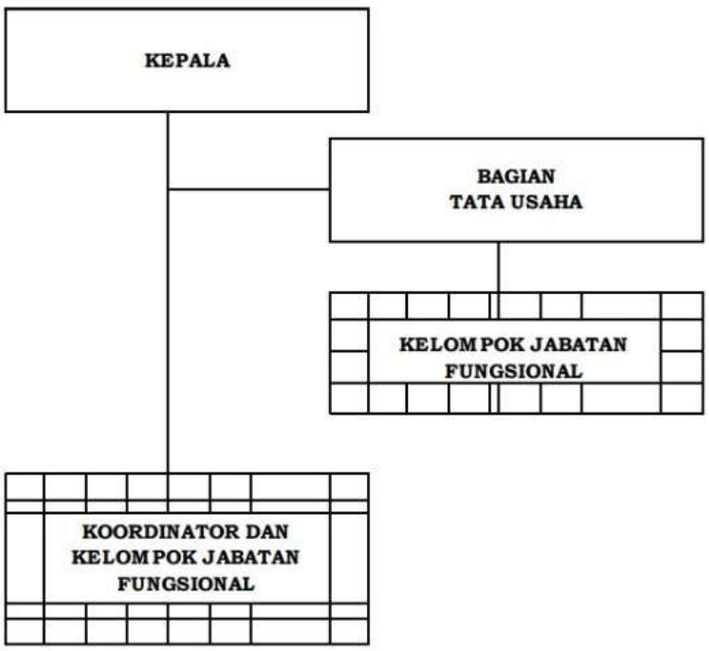
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM



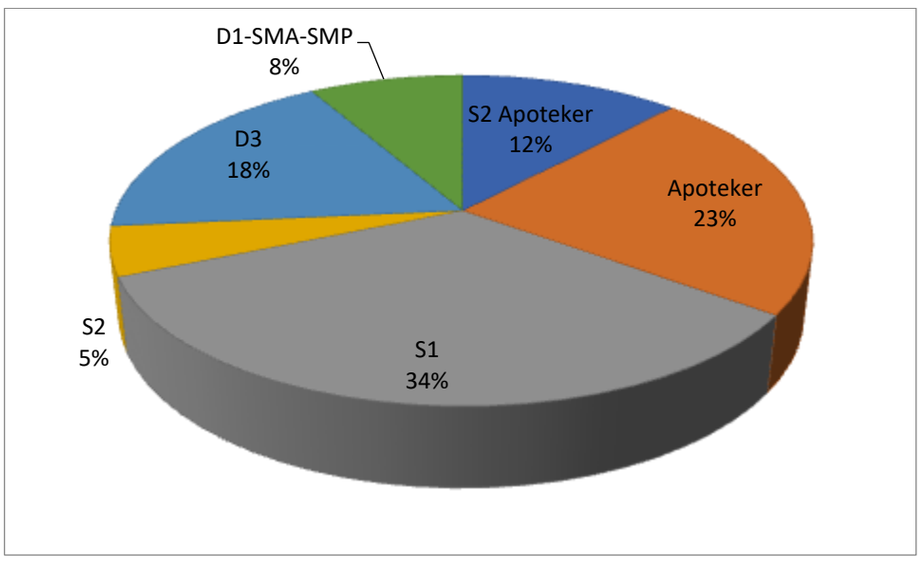
Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Palembang yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

   Pada Renstra BPOM 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 181 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Oktober 2021 sejumlah 83 orang dengan proporsi 73,49% perempuan dan 26,51% laki-laki yang tersebar di masing-masing kelompok/subkelompok substansi dan bagian di Balai Besar POM di Palembang. Jumlah SDM BBPOM di Palembang tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Palembang memerlukan SDM sebesar 181 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 98 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang.



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Palembang sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	91,19	112,86
		2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	86,52	110,92
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,09	100,09
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	79,66	106,21
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	72	78,14	108,53
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,24	104,56
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87	98,87	113,64
		10.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	55	63,76	115,93
		11.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	100	117,65
		12	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	20,62	41,24%
		13.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	61,80	103,00
		14	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	3,51	3,80	108,26
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,	15.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	16.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		17.	Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100
		18.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82	95,88	116,93
		20.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75	98,81	131,75
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	81,72	96,14
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	78,87	97,37

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	85,29	113,72
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	25.	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	70	70,50	100,71
		26.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	2,5	165,56
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	97,86	105,23
		28.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (100%)	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Palembang selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Palembang dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna

mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Palembang juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratorium (BSL) 2* yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Palembang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BBPOM di Palembang tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

<u>Potensi:</u>

1) Peran BBPOM di Palembang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

2) Peran BBPOM di Palembang dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Palembang masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid.*
2) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Palembang dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Palembang mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**
   Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
2) **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan**"
   Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS.
3) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme

rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

4) **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.
2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Palembanh dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Palembang** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya	1. Persentase		

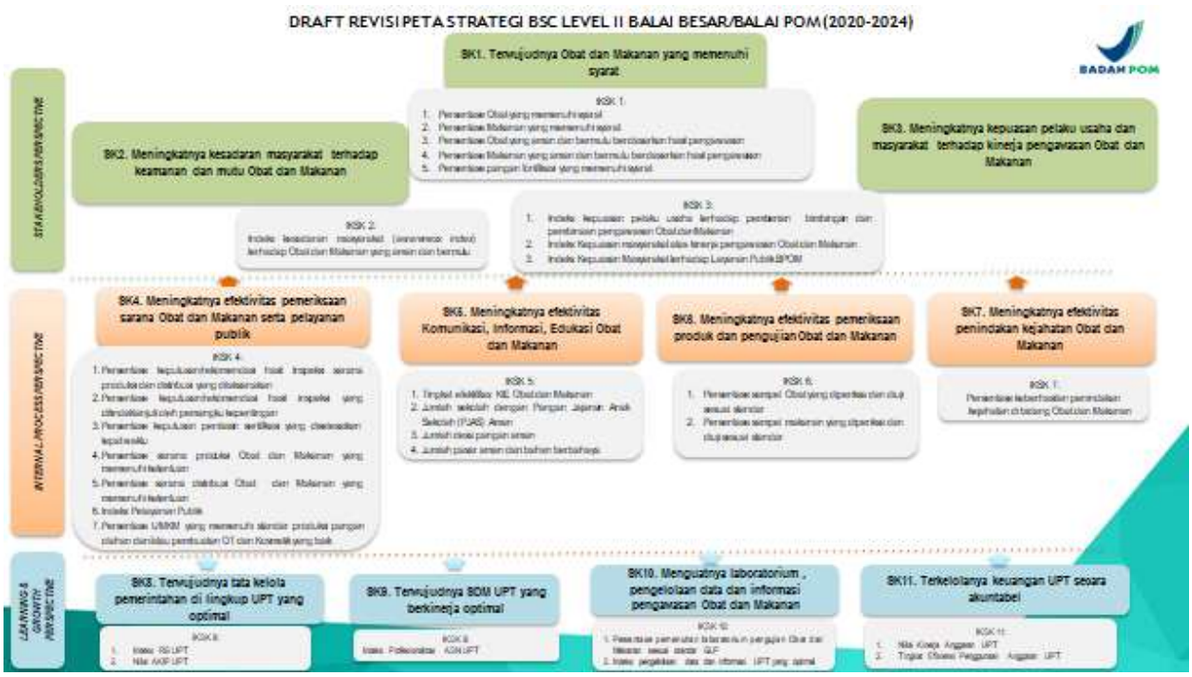
		efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

	masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan: *) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Palembang

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Palembang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Palembang sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan BBPOM di Palembang

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Palembang, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Palembang, sebagai berikut:

a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Palembang harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi "Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan".**

c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BBPOM di Palembang Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai dengan Perubahan Arahan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM **dan lembaga riset** dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan	4. Peningkatan pemahaman,

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Palembang

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Palembang sesuai Strategi BPOM, antara lain:

a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Palembang mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	**Strategi (Menjadi)**
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk	1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	**2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.**
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, **patroli siber**, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. **Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Palembang, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024. Kedua kerangka tersebut

masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Palembang dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Palembang yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 BPOM**, **tidak terdapat perubahan** pada level sasaran strategis namun pada level indikator ada yang bertambah seperti Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada yang dihilangkan yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang serta **dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU BPOM sebelumnya, secara umum target tetap dan meningkat dan saat ini dengan bertambahnya 2(dua) indikator kinerja dan berkurangnya 1(satu) indikator kinerja total indikator menjadi 29(dua puluh sembilan) Indikator kinerja utama. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

a. **Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Palembang,** di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).

b. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**, di mana penurunan target di sebabkan baseline data tahun 2020 kenaikan indeks tidak terlalu tinggi sehingga progress dari tahun ke tahun perlu diturunkan agar capaiannya maksimal di tahun 2024, namun hal ini dapat direviu kembali di tahun 2022.

c. **Persentase Saran Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan,** di mana penurunan target disebabkan capaian tahun 2020 jauh dibawah target diakibatkan banyaknya sarana industri rumah tangga pangan yang masih perlu dibina agar memenuhi ketentuan.

d. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dimasing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang,** hal ini karena pada tahun 2020 terjadi penurunan target karena refocusing anggaran pada masa pandemi sehingga capaian target kumulatif diturunkan disesuaikan dengan penurunan umlah sekolah di tahun 2020.

e. **Indeks RB** dan **Nilai AKIP.** Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	80,8	83,6	86,6	90	92,3	*91,19*	*91*	*91,5*	*92*	*92,5*
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	78	80	82	84	86	*86,52*	*86,5*	*88*	*89,5*	*91*
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	95	95	96	96	97	95,09	95	96	96,5	97
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	75	76	77	78	80	79,66	80	82	83	85
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	*91*	*92*	*93*	*94*
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	78,14	81	84	86	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	87,67	88,8	89,9	91	92,1
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92	91,74	91,75	92	92,5	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95	98,87	99	99,5	100	100
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75	63,76	60	65	70	75
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97	100	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	*50*	*55*	*60*	*65*	*70*	*20,62*	*55*	*55*	*60*	*65*

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	*60*	*63*	*66*	*68*	*71*	*61,80*	*63*	*66*	*68*	*71*
	Indeks Pelayanan Publik						3,80	3,99	4,18	4,36	4,55
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	93,79	94	95,4	96,8	98,3
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*20*	*40*	*62*	*82*	*104*	*16*	*40*	*59*	*78*	*97*
	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*6*	*12*	*19*	*25*	*32*	*4*	*12*	*19*	*25*	*32*
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*3*	*6*	*9*	*13*	*17*	2	*6*	*9*	*13*	*17*

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*82*	*85*	*88*	*91*	*94*	*95,88*	*100*	*100*	*100*	*100*
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	*75*	*77*	*80*	*83*	*85*	98,81	*100*	*100*	*100*	*100*
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*52*	*58*	*64*	*69*	*75*	*56,74*	*58*	*64*	*69*	*75*
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	*Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*85*	*89*	*93*	*94*	*95*	*81,72*	*82,9*	*83,9*	*84,9*	*85,9*
	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*81*	*85*	*90*	*91*	*92*	*78,87*	*79,9*	*80,9*	*81,9*	*82,9*
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*75*	*82*	*85*	*88*	*91*	*85,29*	*84,5*	*84,75*	*85*	*85,25*
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	70,50	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*1,51*	*2*	*2,26*	*2,5*	*3*	*2,5*	*2*	*2,25*	*2,5*	*3*

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	yang optimal										
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*97,86*	*98,6*	*98,7*	*98,9*
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (90%)*	*Efisien (92%)*	*Efisien (94%)*	*Efisien (96%)*	*Efisien (99%)*	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (100%)*	*Efisien (93%)*	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Palembang serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BBPOM di Palembang Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	Kepala Bidang Pengujian	Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	
3	Kepala Bidang Pemeriksaan	
4	Kepala Bidang Penindakan	
5	Kepala Seksi Pengujian Kimia	
6	Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi	
7	Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaaa	
8	Kepala Seksi Sertifikasi Bidang Pemeriksaan	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
10	Kepala Sub Bagian UMUM	

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Palembang secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Palembang 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI PALEMBANG
PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**										UPT BPOM
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3		*1*	*Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*91,19*	*91*	*91,5*	*92*	*92,5*	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	78	80	82	84	86		*2*	*Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*86,52*	*86,5*	*88*	*89,5*	*91*	Pro PN		UPT BPOM
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95	95	96	96	97		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95,09	95	96	96,5	97			UPT BPOM
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	75	76	77	78	80		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	79,66	80	82	83	85			UPT BPOM

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
									5	*Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*		*91*	*92*	*93*	*94*	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83		1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	78,14	81	84	86	89			UPT BPOM
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	86	87	88	89	90		1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87,67	88,8	89,9	91	92,1			UPT BPOM

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01			UPT BPOM
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	89,5	90	90,5	91	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	91,74	91,75	92	92,5	93			UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	98,87	99	99,5	100	100			UPT BPOM
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	63,76	60	65	70	75			UPT BPOM
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	100	100	100	100	100			UPT BPOM

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	4	*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*50*	*55*	*60*	*65*	*70*		*4*	*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*20,62*	*55*	*55*	*60*	*65*	Pro PN		UPT BPOM
	5	*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*60*	*63*	*66*	*68*	*71*		*5*	*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM*	*61,80*	*63*	*66*	*68*	*71*	Pro PN		UPT BPOM
									6	Indeks Pelayanan Publik	3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	Pro PN		UPT BPOM
									7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT									
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84		1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	93,79	94	95,4	96,8	98,3			UPT BPOM
	2	*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*20*	*40*	*62*	*82*	*104*		*2*	*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*16*	*40*	*59*	*78*	*97*	*Pro PN*		*UPT BPOM*

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	3	*Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*6*	*12*	*19*	*25*	*32*		*3*	*Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*4*	*12*	*19*	*25*	*32*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	4	*Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	*3*	*6*	*9*	*13*	*17*		*4*	*Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang*	2	*6*	*9*	*13*	*17*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*82*	*85*	*88*	*91*	*94*		*1*	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*95,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	2	*Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*75*	*77*	*80*	*83*	*85*		*2*	*Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	98,81	*100*	*100*	*100*	*100*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*52*	*58*	*64*	*69*	*75*		*1*	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*56,74*	*58*	*64*	*69*	*75*	*Pro PN*		*UPT BPOM*
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal									
	1	*Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*85*	*89*	*93*	*94*	*95*		*1*	*Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*81,72*	*82,9*	*83,9*	*84,9*	*85,9*			
	2	*Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*81*	*85*	*90*	*91*	*92*		*2*	*Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang*	*78,87*	*79,9*	*80,9*	*81,9*	*82,9*			

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal									
	1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*75*	*82*	*85*	*88*	*91*		*1*	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*85,29*	*84,5*	*84,75*	*85*	*85,25*			
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	70,50	77	82	87	92			UPT BPOM dan PPPOMN
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	*1,51*	*2*	*2,26*	*2,5*	*3*		*2*	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	*2,5*	*2*	*2,25*	*2,5*	*3*			UPT BPOM
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel									
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*		*1*	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*97,86*	*98,6*	*98,7*	*98,9*	*99,0*			
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (90%)*	*Efisien (92%)*	*Efisien (94%)*	*Efisien (96%)*	*Efisien (99%)*		*2*	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	*Efisien (100%)*	*Efisien (93%)*	-	-	-			

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang.

b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Palembang serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang.

b. BBPOM di Palembang selaku unit pelaksana tenis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III
PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Palembang tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Palembang sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang dapat teroperasionalisasikan dan diimpelementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Palembang agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang. BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Palembang dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Palembang ini, diharapkan BBPOM di Palembang terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG,

M. SUHENDRI

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A5.12.23.262 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 Tahun 2024 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TENTANG RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Desember 2023
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,

ZULKIFLI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A5.12.23.262 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,9
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,1
		Indeks Pelayanan Publik	4,75
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan BBPOM di Palembang dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang	95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,9
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,9
		Nilai AKIP UPT	82,81
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,71
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,9
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	94.35
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93.00
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



ZULKIFLI

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YANI ARDIYANTI
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Palembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 12 September 2024

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Palembang	Pihak Kedua Kepala Badan POM RI
YANI ARDIYANTI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	93 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.9 Persen
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 Persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 Persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 Persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78.1 Persen
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.75 Indeks
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persen
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.9 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	32 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17 Pasar
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86.3 Persen
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Indeks
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89 Indeks
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.01 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	85.9 Indeks
		03 - Nilai AKIP UPT	82.81 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.71 Nilai
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.77 Indeks
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.21 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	94.35 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 34,549,827,000 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,426,875,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	18,122,952,000

Palembang, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Palembang

YANI ARDIYANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	465,171,500
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	248,655,500
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	465,171,500
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	248,655,500
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	45,167,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	47,478,500
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	47,478,500
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	199,671,200
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	80,310,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	332,349,500
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	49,917,800
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	10	15	20	30	40	45	50	60	70	75	80	100	67,373,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik													
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	30	30	50	60	60	70	75	75	95	47,478,500
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	4,424,213,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5	10	15	15	30	40	50	60	70	80	90	97	735,882,400
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	10	15	15	35	40	50	60	70	75	90	32	973,070,400
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	15	25	50	55	60	70	80	90	17	355,396,800
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1,584,621,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	80	100	1,056,414,400
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	27	27	27	29	36	45	55	60	65	75	612,141,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.3	2,677,700,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	1,915,291,400
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	116,508,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	dan mutu Obat dan Makanan														
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	183,970,600
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.01	243,267,600
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	88,849,200
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.9	1,915,291,400
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.81	1,915,291,400
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.71	1,915,291,400
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.77	1,915,291,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	90.21	3,830,582,800
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.35	1,915,291,400
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	1,915,291,400
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,915,291,400
														Total	34,549,827,000

Palembang, 12 September 2024

Kepala Balai Besar POM di Palembang



YANI ARDIYANTI


kata
BPOM